

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintah yang meliputi: perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 yang masih tetap mengutamakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi dan daya Saing Daerah, maka Renja OPD juga tidak terlepas dari kebijak strategis tersebut, dengan tetap memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Implementasi Renja beserta estimasi biaya tergambar dalam lampiran dokumen ini sebagai satu kesatuan utuh dari Renja OPD Tahun 2024.

Akhir kata, kiranya Renja OPD Tahun 2024 ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara optimal sebagai tugas dan pengabdian bagi bumi Lamaholot.

Sekian terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan

Kabupaten Flores Timur,



Ir. TULIT BENI

Pembina Utama Muda

Nip. 196408171992031018

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1-2
Landasan Hukum	2-3
Maksud dan Tujuan	4
Sistematika Penulisan	5
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6-13
Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13-16
Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16-23
BAB III	
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	24-31
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32-40
BAB V	
PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan, stakeholder lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 merupakan Renja ke 3 sejak pemisahan dari Badan Keuangan Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan tertuang dalam dokumen perencanaan ini untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 yakni:

- Optimalisasi Potensi PAD,
- Implementasi Digitalisasi PAD

Pada Proses penyusunan Renja BAPENDA Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu

pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Renja BAPENDA 2024 berdasarakan pada aturan-aturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis;
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Renja BAPENDA adalah dokumen perencanaan BAPENDA untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Tujuan

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, penentuan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BAPENDA Tahun 2024.
- b. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.
- c. Mewujudkan capaian tujuan dan sasaran kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur
- a. Pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.4 Sistematika Penulisan :

BAB I Pendahuluan

Bab ini Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah agar Subtansi pada Bab selanjutnya dapat dipahami

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sejak pembentukannya melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub urusan pendapatan yakni menitikberatkan pada Pendapatan Asli daerah. BAPENDA melaksanakan rencana strategis penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun anggaran 2024 memiliki Pagu Belanja Daerahnya yakni Rp. 4.803.657.306 (*Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*). Diharapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Akhir Tahun 2024 adalah 100%. Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut

- 1) Belum optimalnya pendataan potensi pendapatan.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pendapatan.
- 3) Sarana dan prasarana yang terbatas.
- 4) Dana operasional yang sangat terbatas
- 5) Terbatasnya jumlah pegawai

Dari faktor-faktor penyebab tersebut diatas, Pimpinan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur akan melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan dan sinkronisasi program kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table 2.2 berikut ini.

Tabel 0.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdari Pendapatan Daerah Kab. Flores Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	RK/LPPD	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah		100%	6,0%	6,24	4,49	4,30	4,80	51,42	-	100%	100%	Pada diatun ERM PERDA terbaru dan pengisian dan penuntutan. daya apak dan retrograt

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dalam mencapai target pendapatan daerah dari tahun ke tahun target yang ditetapkan meningkat hal tersebut didasari atas analisis PAD terhadap APBD pada tahun penyusunan RENSTRA OPD untuk tahun 2013-2016, dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Flores Timur perlu disusun Rancangan Perda dan Peraturan Bupati terbaru untuk mengoptimalkan potensi obyek pajak dan retribusi yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah 36 orang, Pegawai Negeri sipil berjumlah 31 dan Tenaga Cleaning Service 1, Tenaga Pengaman aset 2 dan 2 Tenaga Sopir. Badan Pendapatan memiliki 5 UPT BPPRD yg melayani 19 Kecamatan yg ada.

Untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah yakni Bank NTT melalui pembayaran pajak secara online melalui aplikasi QRIS yang tersedia pada Bank NTT Mobile Banking. Hal ini memudahkan Wajib Pajak dimanapun dalam melakukan pembayaran pajak.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Luvang Sewu untuk pengadministrasian Pendapatan Daerah.

Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai Koordinator Bidang Pendapatan melalui Program dan kegitannya berusaha agar fungsi pokoknya dapat berjalan dengan baik agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah yakni:

1. Menyiapkan SDM untuk mengelola sistem digitalisasi.
2. Melakukan koordinasi dengan OPD penghasil PAD dalam meningkatkan target.
3. Melakukan Rekon persemester agar dapat mengetahui sejauhmana capaian target dan upaya memenuhi target dimaksud.
4. Melakukan Pendataan dan Pemutakhiran obyek Pajak dan Retribusi.
5. Menyiapkan Peraturan Daerah yang terupdate dalam menyikapi Perubahan Perundang-undangan terkait pajak.
6. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat.

tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih luas

Strategis yang telah ditentukan memiliki beberapa kendala dan hambatan antara lain:

1. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran obyek pajak
2. Sistem aplikasi pendapatan belum semuanya terintegrasi dengan Bank yang ditunjuk
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya

Dampak dari kendala diatas dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bintek, diklat, kursus atau sejenisnya
2. Mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat mendatangkan pendapatan bagi daerah
3. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pajak dan retribusi kepada masyarakat karna pendapatan yang dihasilkan untuk pembangunan daerah

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, dimana Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 maka tidak ada pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah namun Program Kegiatan yang dilaksanakan tetap perdoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk mencapai sasaran dan target.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.3

[illegible]

No	K1	K2	K3	K4	Administrative Management Strategic Direction			123456789	Administrative Management Strategic Direction				123456789	
1	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
2	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
3	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
4	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
5	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
6	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
7	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
8	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
9	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
10	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
11	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
12	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
13	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
14	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
15	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
16	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
17	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
18	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
19	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	
20	01	01	01	01	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	Administrative Management Strategic Direction	123456789	

Dari analisis table diatas dapat dilihat bahwa pagu dana yang dibutuhkan lebih besar dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 hal ini dipandang perlu untuk tercapainya tujuan pelayanan dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 tidak ada usulan masyarakat berkaitan dengan program kegiatan yang ditujukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang memegang peranan penting dan fungsi strategis di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur. BAPENDA memiliki tujuan utama yakni: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai target perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah secara akuntabel.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur tertera pada table 3.1

TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2024. BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Tabel 3.1				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	2	3		
Tersaputnya tata kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	1. Persentase PAD terhadap APBD	3,60%	%

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024 KABUPATEN FLORES TIMUR				
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET Capaian
1	2	3	4	5
Reformasi Struktur	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Program Penguatan Pendapatan Daerah	Persentase Penguatan PAD (%)	4,50%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur memprioritaskan pada Reformasi Birokrasi dalam sasatannya untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah terhadap belanja daerah yakni 4.50% dari total belanja daerah.

Perencanaan dan penganggaran terintegrasi pada program kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana fungsinya sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian perancangan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah.
- 2) Penyusun kebijakan teknis pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan tugas dukung teknis bidang pendapatan daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang pendapatan daerah.
- 5) Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-OPD/DPPA-OPD).
- 6) Pelaksanaan sistem pelaporan pendapatan daerah, pengelolaan administrasi pendapatan daerah.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi pada program kegiatan Tahun 2024 dan perkiraan maju untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabl dibawah ini.

RECEIVED BY THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	1	66	1.01	1999	Prognose des künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
2	2	66	1.01	2000	Prognose des künftigen Markt Umsatz (Prognose 1999)	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999) Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
3	3	66	1.01	2001	Prognose Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
4	4	66	1.01	2002	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
5	5	66	1.01	2003	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
6	6	66	1.01	2004	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
7	7	66	1.01	2005	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
8	8	66	1.01	2006	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
9	9	66	1.01	2007	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
10	10	66	1.01	2008	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
11	11	66	1.01	2009	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000
12	12	66	1.01	2010	Prognose künftigen Markt Umsatz	Interne Informationen des Kunden Markt (Prognose 1999)	Standard (1999)	1	10.000.000	1999	1	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merencanakan akan melaksanakan 3(tiga) Program utama yang didalamnya terdapat sub program penunjang yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan**
 - a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - e) Pengelolaan Data Retribusi Daerah
 - f) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - g) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
 - a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah
 - a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - b) Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah
 - c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
 - f) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - k) Penagihan Pajak Daerah
 - l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah
 - o) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung tujuan utama Badan pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yakni mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.4.575.801.728,- (Empat Miliar Lima Ratus tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Hal ini tersaji pada tabel 4.1

Table 1.1



[illegible]

BAB V

PENUTUP

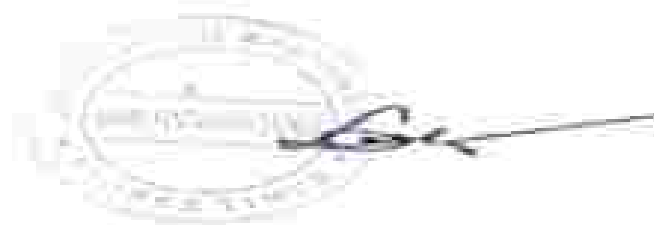
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan pelaksanaan pedoman tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dengan mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, apabila dalam pelaksanaannya anggaran tidak mencukupi maka penurunan volume atau pengurangan lokasi kegiatan, pemangku kepentingan wajib mematuhi renja OPD tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi landasan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Flores Timur selanjutnya.

Larantuka, September 2023

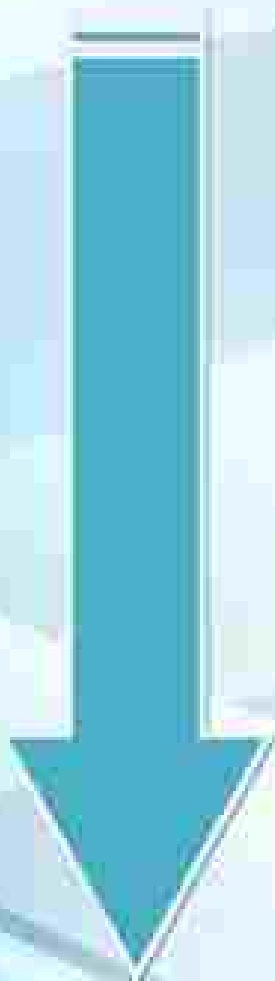
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Flores Timur,



Ir. JULIT BENI
Pembina Utama Muda
Nip.196408171992031013



RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024



LARANTUKA

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	15
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	16
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 33
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	33
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	33
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	55

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja PD menjadi landasan atau pedoman bagi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja PD ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur**

YOSEPH A. S. PEHANKERAF, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 197104261998031012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 merupakan penyabaran Tahun pertama Renstra PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan penyusunan, orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal, dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disusun mengacu pada Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021- 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan pengaburan RENSTRA Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada Bab ini memuat tiga hal pokok yakni Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat secara detail gambaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan dan lokasi dalam rencana kerja tahun 2023.

BAB. V PENUTUP

Pada Bab ini bertisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kendala-kendala pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2021 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Tahun Berjalan) Kabupaten Flores Timur

No	Kategori/Bagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Hasil yang diharapkan)	Target Kinerja Capaian Program/Hasil yang diharapkan Daerah pada Tahun 2017 s.d 2022 (jika tersedia) Maksimal Peningkatan Daerah	Nilai Realisasi Capaian Kinerja Program/Hasil yang diharapkan Daerah dengan Nama Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Realisasi 2022 (Peningkatan Daerah Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan yang direncanakan Tahun 2022	Pencapaian Realisasi Capaian Target Maksimal 2022 (jika tersedia)	
					Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Persentase (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Target Capaian Maksimal Target Maksimal (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9/8	11=10/8
	Struktur Pemerintahan Tingkat Pemangku Kebijakan									
	Struktur Organisasi Badan Kebijakan Daerah									
	INDUKSI PERUMPAH URUSAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN/KEKOTA	Pelaksanaan (Pelayanan Administrasi) Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Peningkatan Sistem dan Peningkatan Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		PKS yang mengikut Bimbel/Workshop Peningkatan Kapasitas (orang)	10	10	4	2	50	4	20	50,00
		Jumlah dokumen, pengendalian dan arahan pencapaian indikator kinerja SKPD (Dokumen)	40	37	9	18	50	9	45	100,00
	Pemerataan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Kelembagaan dan Penguatan Layanan Daerah (Rencana dan Reformasi Rencana Kinerja SKPD)	Jumlah dokumen, pengendalian dan arahan pencapaian indikator kinerja SKPD (Dokumen)	40	37	9	9	50	9	45	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Pengelolaan Dana yang Berpengaruh Aset	Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan	10	40	14	14	50	14	70	100,00
	Pelaksanaan Pemantauan/evaluasi dan Pengawasan/audit keuangan SKPD	Pelaksanaan Pemantauan/evaluasi pencapaian indikator dan pengendalian kinerja SKPD	40	38	12	12	50	12	60	100,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan target kinerjanya tidak tercapai, seperti kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta sub kegiatan Pengamanan Barang milik Daerah, karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid 19.
2. Pada Kegiatan koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, cukup kesulitan dalam menentukan realisasi target kinerja karena ketidakpatuhan dalam penyusunan anggaran dalam hal ini penetapan satuan indikatornya mengalami perubahan berbeda dari satuan di Renstra sehingga kesulitan pada saat penentuan realisasi capaian diakhir periode.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table berikut ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator	SPM/	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
	standar nasional			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Opini BPK terhadap laporan keuangan		√	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	Opini BPK terhadap laporan keuangan baru mencapai WTP pada periode tahun ke-4 Renstra 2017-2022
Persentase SILPA terhadap APBD				5%	5%	5%	5%	3,23%		5%	5%	
Persentase program kegiatan yang tidak terlaksana				0	0	0	0	0		0	0	
Persentase belanja pendidikan (20%)				20%	20%	20%	20%	20%		20%	20%	Tepat
Persentase belanja kesehatan (10%)				10%	10%	10%	10%	22%		10%	10%	Tepat
Penetapan APBD		√		30-Nov	30-Nov	30-Nov	30-Nov	30-Nov		30-Nov	30-Nov	Tepat
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung				36 : 64	36 : 64			45 : 35				

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang ada menunjukkan bahwa :

1. Semua aspek pengelolaan keuangan daerah yang dinilai pada tahun anggaran 2021 oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT dapat memberikan penilaian WTP, dan target opini BPK terhadap laporan keuangan daerah pada tahun 2022 akan tetap dipertahankan dengan berbagai program kegiatan yang mendukung penyajian laporan keuangan secara akuntabel dan handal.

2. Persentase (%) SILPA pada tahun 2021 diperoleh dari Belanja APBD adalah 3,25 % yang didominasi oleh paket-paket pekerjaan lanjutan bahkan dari penghematan belanja, dan direncanakan SILPA semakin rendah pada tahun berikutnya, seiring membaiknya kinerja keuangan daerah.
3. Pada semua program kegiatan telah dilaksanakan.
4. Belanja mandatory bidang pendidikan dan kesehatan telah memenuhi persentase yang ditentukan.
5. Penetapan APBD sampai dengan saat ini telah memenuhi batas waktu yang ditentukan dan akan selalu dijaga ketepatan waktunya serta berusaha untuk percepatan penetapannya.
6. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Flores Timur dari sisi pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer, salah satunya adalah DAU yang peruntukan dasarnya adalah untuk membiayai gaji PNS, sehingga cukup jelas terlihat pada porsi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung untuk belanja publik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur serta tuntutan regulasi atau kebijakan nasional untuk isu prioritas tertentu. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yaitu :

1. Laporan Keuangan OPD belum tepat waktu;
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
3. Persentase SILPA masih relatif tinggi;
4. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung tidak seimbang.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia dari formasi yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi SDM yang ada, yang masih perlu pengembangan;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi.

Adapun yang menjadi tantangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Pengelolaan keuangan daerah secara umum belum tertib sesuai ketentuan yang berlaku khususnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pengelolaan aset belum sepenuhnya tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan yang menjadi peluang adalah Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Misi Reformasi Birokrasi, termasuk pada aspek tata laksana dengan mendorong pemanfaatan *E-Government*.

Sepalan dengan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan isu strategis yaitu : Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum maksimal

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Flores Timur 2023 adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.4. Sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH						REKAPITULASI				22.579.811.819	
	Program Peningkat Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Sida				18.894.747.725					22.579.811.819	
	Program Peningkat Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Sida		Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100		Program Peningkat Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Sida	Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100			
			Persentase Peningkatan Service dan Pemasangan Aparatur (%)	100			Persentase Kelengkapan Service dan Pemasangan Aparatur (%)	100			
			Persentase ASN yang Menerima Pelatihan Kompetensi (%)	100			Persentase ASN yang Menerima Pelatihan Kompetensi (%)	100			
			Persentase Peningkatan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			Persentase Peningkatan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			
	Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terdapatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	10 dokumen	44.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	10 dokumen	44.000.000		
	Revisi awal dan final dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 2022	Lapangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 2022 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 2022 (Lapangan)	10 dokumen	44.000.000	Revisi awal dan final dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (dok)	4 dok	10.000.000		

REKAPITULASI KEBUTUHAN 2023

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
						Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen RUP + RPMD	Jumlah Dokumen RUP-RPMD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RUP-RPMD (dok)	4 dok	16.000.000	tidak dilaksanakan RUPA
						Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Tahunan Rancangan-Rencana RPMD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan Rancangan-Rencana RPMD (Laporan)	Jumlah Laporan Laporan Kinerja dan Laporan Rancangan-Rencana RPMD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan Rancangan-Rencana RPMD (Laporan)	10 dok	14.300.000	penyusunan laporan tahunan selesai
						Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 dok	11.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbentuknya dokumen Laporan Keuangan Rencana Pembangunan Daerah dan RPMD dan Laporan Tahunan (dok)	2 dokumen /th	11.375.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbentuknya dokumen Laporan Keuangan Rencana Pembangunan Daerah dan RPMD dan Laporan Tahunan (dok)	2 dokumen /th	2.375.000,00	
	Penyusunan Capaian Tumpangan ASD	Lokasi: ASD	Jumlah Orang yang Menerima Capaian Tumpangan ASD (orang)	30 orang / tahun	17.000.000,00	Penyusunan Capaian Tumpangan ASD	Jumlah Orang yang Menerima Capaian Tumpangan ASD (orang)	30 orang / tahun	21.150.000,00	kegiatan kegiatan SD/CS Penangan 2024 dan Tumpangan Kerja
	Penyusunan/Perencanaan dan Penyusunan/Verifikasi Rancangan RPMD	Lokasi: ASD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penyusunan/Verifikasi Rancangan RPMD (dok)	2 dokumen /th	40.000.000	Penyusunan/Perencanaan dan Penyusunan/Verifikasi Rancangan RPMD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penyusunan/Verifikasi Rancangan RPMD (dok)	2 dokumen /th	20.000.000	
						Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Tahunan Rancangan-Rencana RPMD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan Rancangan-Rencana RPMD (Laporan)	Jumlah Laporan Laporan Kinerja Rancangan-Rencana RPMD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan Rancangan-Rencana RPMD (Laporan)	10 Laporan /th	14.300.000	tidak dilaksanakan penyusunan laporan tahunan RPMD

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
	1	2	3	4	5	7	8	10	11	
						Administrasi Berbasis Rute Dewasa pada Wilayah Kota Dewasa	Pengelolaan Berbasis Rute Dewasa (Rute)	3 dokumen	25.000.000	
						Pengukuran Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa (Rute)	Jumlah Rencana Kegiatan Berbasis Rute Dewasa (Rute)	1 dokumen	25.000.000	ada Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa
						Saluran dan Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa (Rute)	Jumlah Laporan Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa (Rute)	2 dokumen	25.000.000	ada Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa
						Administrasi Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa	Jumlah Laporan Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa (Rute)	2 dokumen	15.000.000	ada Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai (Dok)	2 dokumen	15.000.000	
						Pengukuran dan Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa (Rute)	Jumlah Laporan Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa (Rute)	2 dokumen	25.000.000	ada Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa
						Saluran dan Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa	Jumlah Laporan Pemecahan Masalah Berbasis Rute Dewasa (Rute)	2 dokumen	25.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
						Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Penyelenggaraan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Rencana Penyelenggaraan-Undangan (orang)	2 orang	80.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Luaran-ke	Persediaan kebutuhan barang dan jasa untuk kantor (%)	100	147.127.349	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persediaan kebutuhan barang dan jasa untuk kantor (%)	100	281.128.829	
	Penyediaan Akutansi Kesehatan (Lain) Penyelenggaraan Kegiatan Kantor	Luaran-ke	Jumlah Rasio Kegiatan Instalasi Lain Penyelenggaraan Kegiatan Kantor yang Disediakan (persen)	2 persan	4.079.029	Penyediaan Akutansi Kesehatan (Lain) Penyelenggaraan Kegiatan Kantor	Jumlah Rasio Kegiatan Instalasi Lain Penyelenggaraan Kegiatan Kantor yang Disediakan (persen)	2 persan	4.370.029	
	(Penyediaan) Bahan Logistik Kantor	Luaran-ke	Jumlah Rasio Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (persen)	20 persan	44.999.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rasio Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (persen)	2 persan	80.000.000	
	Persediaan Barang Cetak dan Persediaan	Luaran-ke	Jumlah Rasio Barang Cetak dan Persediaan yang Disediakan (persen)	2 persan	40.000.000	Persediaan Barang Cetak dan Persediaan	Jumlah Rasio Barang Cetak dan Persediaan yang Disediakan (persen)	2 persan	40.000.000	
	Persediaan Bahan Baku dan Persediaan	Luaran-ke	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Persediaan Penyelenggaraan yang Disediakan (persen)	2 persan	1.000.000	Persediaan Bahan Baku dan Persediaan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Persediaan Penyelenggaraan yang Disediakan (persen)	2 persan	1.000.000	
	Penyediaan Kegiatan Lain	Luaran-ke	Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan Lain (persen)	2 persan	20.000.000	Penyediaan Kegiatan Lain	Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan Lain (persen)	2 persan	20.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	Pertertinggalan Rapor Pendidikan dan Kesehatan (SDP)	Luwero	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Pendidikan dan Kesehatan (SDP) (laporan)	4 laporan	48.250.000	Pertertinggalan Rapor Pendidikan dan Kesehatan (SDP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Pendidikan dan Kesehatan (SDP) (laporan)	4 laporan	48.250.000	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	Jumlah Dokumen Pembangunan RKB ditinjau pada SDP	7 dokumen	28.000.000	penyusunan dokumen
						Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Ruang	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Ruang yang Disiapkan (Paket)	2 paket	22.000.000	memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan barang
						Pengadaan Peralatan Ruang Kelas	Jumlah Paket Peralatan Ruang Kelas yang Disiapkan (Paket)	2 paket	22.000.000	memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan barang
						Pengadaan Bangun Muka Daerah Persegi Panjang	Jumlah Pengadaan Bangun Muka Daerah Persegi Panjang (Bangun Muka)	10 unit	120.000.000	memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan barang
						Pengadaan Bangun	Jumlah Bangun yang Disiapkan (Unit)			
						Pengadaan Peralatan dan Ruang Kelas	Jumlah Unit Peralatan dan Ruang Kelas yang Disiapkan (Unit)	4 unit	48.000.000	
						Pengadaan Ruang TPA Sekolah	Jumlah Unit Ruang TPA Sekolah yang Disiapkan (Unit)	8 unit	28.800.000	
						Pengadaan Bangun dan Peralatan Pendidikan Gedung Kantor atau Sekolah Lain-lain	Jumlah Unit Bangun dan Peralatan Pendidikan Gedung Kantor atau Sekolah Lain-lain yang Disiapkan (Unit)	8 unit	88.000.000	

KESKIPAN ERPA BUDIDAHUSAN

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemungut Sampah Pemukiman Desa	Luwero	Persentase pemungutan jasa: pemungut (Jasa Pemukiman Desa) (%)	100	145.000.000	Penyediaan Jasa Pemungut Sampah Pemukiman Desa	Persentase pemungutan jasa: pemungut (Jasa Pemukiman Desa) (%)	100	145.000.000	
	Penyediaan Jasa Daur (Masyarakat)	Luwero	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Daur (Masyarakat) (laporan)	12 laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Daur Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa: Daur (Masyarakat) (laporan)	12 laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemusnahan Sisa/limbah Desa dan Lahan	Luwero	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Pemusnahan Sisa/limbah Desa dan Lahan yang Disediakan) (laporan)	12 laporan	145.000.000	Penyediaan Jasa Pemusnahan Sisa/limbah Desa dan Lahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa: Pemusnahan Sisa/limbah Desa dan Lahan yang Disediakan (laporan)	12 laporan	145.000.000	
	Penyediaan Jasa Penyediaan Ubin dan Kaca	Luwero	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Ubin dan Kaca yang Disediakan (laporan)	12 laporan	144.000.000	Penyediaan Jasa Penyediaan Ubin dan Kaca	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa: Penyediaan Ubin dan Kaca yang Disediakan (laporan)	12 laporan	144.000.000	
	Pemeliharaan Salang 1000 Desam Pemungut Sampah Pemukiman Desa	Luwero	Persentase Pemeliharaan Salang 1000 Desam Pemungut Sampah Pemukiman Desa (%)	100	100.000.000	Pemeliharaan Salang 1000 Desam Pemungut Sampah Pemukiman Desa	Persentase Pemeliharaan Salang 1000 Desam Pemungut Sampah Pemukiman Desa (%)	100	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pabrik dan Pemeliharaan Pemeliharaan (Desa Operasional) dan Lahan	Luwero	Jumlah Laporan dan Laporan Operasional dan Laporan yang Disediakan dan Disediakan (laporan dan Pemeliharaan) (laporan)	12 laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pabrik dan Pemeliharaan Pemeliharaan (Desa Operasional) dan Lahan	Jumlah Laporan dan Laporan Operasional dan Laporan yang Disediakan dan Disediakan (laporan dan Pemeliharaan) (laporan)	12 laporan	100.000.000	
						Pemeliharaan Salang	Jumlah Salang yang Disediakan (laporan)	12 laporan	25.000.000	Pemeliharaan Salang 1000 Desam Pemungut Sampah Pemukiman Desa
						Pemeliharaan Pemeliharaan dan Lahan Lahan	Jumlah Laporan dan Laporan Lahan yang Disediakan (laporan)	12 laporan	1.000.000	Pemeliharaan Salang 1000 Desam Pemungut Sampah Pemukiman Desa
						Pemeliharaan Asid 1000 Desam	Jumlah Asid 1000 Desam yang Disediakan (laporan)	12 laporan	25.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
	1	2	3	4	5	7	8	10	11	
	Pemeliharaan/kelestarian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luwero	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki / Direhabilitasi (unit)	1 unit	1.000.000	Pemeliharaan/kelestarian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki / Direhabilitasi (unit)	1 unit	1.000.000	
	Pemeliharaan/kelestarian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luwero	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki / Direhabilitasi (unit)	1 unit	1.000.000	Pemeliharaan/kelestarian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki / Direhabilitasi (unit)	1 unit	1.000.000	
	Pemeliharaan/kelestarian Sarana dan Prasarana Perhubungan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luwero	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki / Direhabilitasi (unit)	2 unit	1.000.000	Pemeliharaan/kelestarian Sarana dan Prasarana Perhubungan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki / Direhabilitasi (unit)	2 unit	1.000.000	
	Rancangan				247.840.822.342				247.840.822.342	
	Program Pengeluaran Rancangan Daerah		Persentase Pencairan Rancangan Daerah (%)	100,00	247.840.822.342	Program Pengeluaran Rancangan Daerah	Persentase Pencairan Rancangan Daerah (%)	100,00	247.840.822.342	
	Kendaraan dan Peralengkapan Rancangan Daerah		Terdapatnya Jumlah Dokumen Pencairan Rancangan Daerah (dok)	10 100% dok	1.000.000.000	Kendaraan dan Peralengkapan Rancangan Daerah	Terdapatnya Jumlah Dokumen Pencairan Rancangan Daerah (dok)	10 100% dok	1.000.000.000	
	Kendaraan dan Peralengkapan RKA dan PPA3	Luwero	Jumlah Dokumen RKA dan PPA3 yang Disusun (dok)	1 100% dok	250.000.000	Kendaraan dan Peralengkapan RKA dan PPA3	Jumlah Dokumen RKA dan PPA3 yang Disusun (dok)	1 100% dok	250.000.000	
	Kendaraan dan Peralengkapan Perubahan RKA dan Perubahan PPA3	Luwero	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Perubahan PPA3 yang Disusun (dok)	1 100% dok	250.000.000	Kendaraan dan Peralengkapan Perubahan RKA dan Perubahan PPA3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Perubahan PPA3 yang Disusun (dok)	1 100% dok	250.000.000	
	RKPD dan Perubahan dan Tambahan RKA-SMPD	Luwero	Jumlah RKPD yang Disusun (dok)	1 100% dok	25.000.000	RKPD dan Perubahan dan Tambahan RKA-SMPD	Jumlah RKPD yang Disusun (dok)	1 100% dok	25.000.000	

[illegible]

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1	Kelembagaan dan Pengembangan Perekonomian Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan Daerah (Dok)	40 dokumen	440.000.000	Kelembagaan dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan Daerah (Dok)	40 dokumen	440.000.000	
	Kelembagaan dan Pengembangan Kota Daerah	Luwero, Ka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengabdian K3S Daerah (Dok)	10 dokumen	170.000.000	Kelembagaan dan Pengembangan Kota Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengabdian K3S Daerah (Dok)	10 dokumen	200.000.000	
	Pelayanan, Perekonomian Pengembangan HSP Peternakan Anggotan K3S dan SPPO	Luwero, Ka	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian dan Pengabdian Anggotan K3S dan SPPO (Dok)	4 dokumen	120.000.000	Pengabdian, Perekonomian (Pengabdian dan Perekonomian Anggotan K3S dan SPPO)	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian dan Perekonomian Anggotan K3S dan SPPO (Dok)	20 dokumen	30.000.000	
	Pengembangan Perekonomian Daerah	Luwero, Ka	Jumlah Dokumen Hasil Perekonomian Perekonomian Daerah (Dok)	2 dokumen	10.000.000	Pengembangan Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perekonomian Perekonomian Daerah (Dok)	2 dokumen	10.000.000	
	Kelembagaan, Fasilitas, Asuransi, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya	Luwero, Ka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perekonomian, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya (Dok)	10 dokumen	20.000.000	Kelembagaan, Fasilitas, Asuransi, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perekonomian, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya (Dok)	10 dokumen	20.000.000	
	Kelembagaan, Perekonomian, Fasilitas, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya	Luwero, Ka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perekonomian, Fasilitas, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya (Dok)	10 dokumen	20.000.000	Kelembagaan, Perekonomian, Fasilitas, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perekonomian, Fasilitas, Sistemisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Perekonomian dan Kota Transfer Lainnya (Dok)	10 dokumen	20.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
	1	2	3	4	5	7	8	10	11	
1	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Realisasi, Penyelesaian dan Penuntutan Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Pemusutan/Pemungutan dan Penyaluran Pemusutan / Kas Keluar (PRK)	Luwero-ka	Jumlah Laporan Realisasi, Rencana dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Pemusutan/Pemungutan dan Penyaluran Pemusutan / Kas Keluar (PRK) dan Laporan Realisasi Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Rencana dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Pemusutan/Pemungutan dan Penyaluran Pemusutan / Kas Keluar (PRK) (laporan)	1 tahun s	82.450.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Realisasi, Penyelesaian dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Pemusutan/Pemungutan dan Penyaluran Pemusutan / Kas Keluar (PRK)	Jumlah Laporan Realisasi, Rencana dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Pemusutan/Pemungutan dan Penyaluran Pemusutan / Kas Keluar (PRK) dan Laporan Realisasi Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Rencana dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Pemusutan/Pemungutan dan Penyaluran Pemusutan / Kas Keluar (PRK) (laporan)	2 tahun s	22.900.000	
	Kecamatan Pematangsari Padang dan Uluang Daerah yang Terdiri Atas Pengeluaran Kas, Pemusutan, Analisa, Pemusutan dan Penyaluran Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Luwero-ka	Jumlah Dokumen Realisasi Rencana Pemusutan/Pemungutan dan Uluang Daerah yang Terdiri Atas Pengeluaran Kas, Pelaksanaan Analisa Pemusutan dan Penyaluran Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dok)	2 tahun s	20.000.000	Kecamatan Pematangsari Padang dan Uluang Daerah yang Terdiri Atas Pengeluaran Kas, Pemusutan, Analisa, Pemusutan dan Penyaluran Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Realisasi Rencana Pemusutan/Pemungutan dan Uluang Daerah yang Terdiri Atas Pengeluaran Kas, Pelaksanaan Analisa Pemusutan dan Penyaluran Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dok)	2 tahun s	20.000.000	
	Kebijakan Data Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas SP2D sebagai Laporan Tahunan	Luwero-ka	Jumlah Dokumen Realisasi Rencana Data Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas SP2D sebagai Laporan Tahunan (dok)	2 tahun s	82.120.000	Kebijakan Data Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas SP2D sebagai Laporan Tahunan	Jumlah Dokumen Realisasi Rencana Data Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas SP2D sebagai Laporan Tahunan (dok)	2 tahun s	82.120.000	
	Pemusutan Pemusutan Tahunan, Administrasi, Anggaran yang Berjalan dengan Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Laporan Tahunan	Luwero-ka	Jumlah Rencana Tahunan, Administrasi, Anggaran yang Berjalan dengan Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Laporan Tahunan (dok)	1 tahun s	25.000.000	Pemusutan Pemusutan Tahunan, Administrasi, Anggaran yang Berjalan dengan Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Laporan Tahunan	Jumlah Rencana Tahunan, Administrasi, Anggaran yang Berjalan dengan Pemusutan dan Pengeluaran Kas serta Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Pemusutan dan Penyaluran Kas sebagai Laporan Tahunan (dok)	2 tahun s	25.000.000	

[illegible]

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Penyusunan dan Pelaksanaan Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD Kabupaten/Kota dan Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Peningkatan Kualitas AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD Kabupaten/Kota dan Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Peningkatan Kualitas AP/SD Kabupaten/Kota	2 tahun	624.000.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD Kabupaten/Kota dan Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Peningkatan Kualitas AP/SD	Jumlah Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD Kabupaten/Kota dan Rancangan Penelitian Daerah tentang Peningkatan Peningkatan Kualitas AP/SD Kabupaten/Kota	2 tahun	624.000.000	
	Penyusunan Laporan Tahunan (LRT) dan Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan LRT dan Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan Tahunan (LRT) dan Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan LRT dan Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	
	Penyusunan Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	124.000.000	Penyusunan Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	124.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	
	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Luwero-ku	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	Penyusunan Laporan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Kualitas Pendidikan AP/SD	2 tahun	24.000.000	

KESIMPULAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Luwero	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	1	1.575.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	1	1.575.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pemukiman Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan Daerah	Luwero	Dokumen Rencana Pemukiman Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan (dok)	1	325.400.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pemukiman Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan Daerah	Dokumen Rencana Pemukiman Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan (dok)	1	325.400.000	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan Daerah	Luwero	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan Daerah (dok)	1	325.400.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemukiman Daerah Lingkup Kecamatan Daerah (dok)	1	325.400.000	
	Program Pengelolaan Saling Muka Daerah	Luwero	Penyelesaian Penyelesaian Saling Muka (TU)	80%	429.817.000	Program Pengelolaan Saling Muka Daerah	Penyelesaian Penyelesaian Saling Muka (TU)	80%	429.817.000	
	Pengelolaan Saling Muka Daerah	Luwero	Jumlah dokumen pengelolaan saling muka daerah (dok)	80%	429.817.000	Pengelolaan Saling Muka Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan saling muka daerah (dok)	80%	429.817.000	
	Penyelesaian Saling Muka	Luwero	Jumlah Saling Muka yang diselesaikan (dok)	1	1.575.000	Penyelesaian Saling Muka	Jumlah Saling Muka yang diselesaikan (dok)	1	1.575.000	
						Penyelesaian Saling Muka (dok)	Jumlah Saling Muka yang diselesaikan (dok)	1	1.575.000	Pada anggaran pemerintah kabupaten Luwero
	Penyelesaian Penyelesaian Saling Muka Daerah	Luwero	Jumlah Rencana Penyelesaian Saling Muka Daerah (dok)	1	12.500.000	Penyelesaian Penyelesaian Saling Muka Daerah	Jumlah Rencana Penyelesaian Saling Muka Daerah (dok)	1	12.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
						Pembinaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Mik Dampak)	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat (Mik Dampak)	1 laporan/ta	20.000.000		Hasil terdapat peningkatan pelayanan pada masyarakat, DAK yang telah selesai
	Pembinaan Desa Mik Dampak	Lokasi: ta	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat (Mik Dampak)	1 laporan	14.000.000	Pembinaan Desa Mik Dampak	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat (Mik Dampak)	1 laporan	24.000.000		
	Pembinaan Desa Mik Dampak	Lokasi: ta	Jumlah Laporan hasil Pembinaan (LH) Desa Mik Dampak (laporan)	1 laporan	14.000.000	Pembinaan Desa Mik Dampak	Jumlah Laporan hasil Pembinaan (LH) Desa Mik Dampak (laporan)	1 laporan	24.000.000		
	Pengembangan Desa Mik Dampak	Lokasi: ta	Jumlah Laporan hasil Pengembangan Desa Mik Dampak (laporan)	1 laporan	125.400.000	Pengembangan Desa Mik Dampak	Jumlah Laporan hasil Pengembangan Desa Mik Dampak (laporan)	1 laporan	125.400.000		
						Pembinaan Desa Mik Dampak	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Desa Mik Dampak dan hasil Pembinaan Desa Mik Dampak (laporan)	1 laporan	24.000.000		Salvage DAK yang sudah selesai
						Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat Mik Dampak	Jumlah Laporan hasil Pengembangan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat Mik Dampak (laporan)	1 laporan	24.000.000		Hasil terdapat peningkatan DAK yang telah selesai sesuai per-123-01
	Optimalisasi Pelayanan, Penguatan, Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan Desa Mik Dampak	Lokasi: ta	Jumlah Dokumen hasil Optimalisasi Pelayanan, Penguatan, Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan Desa Mik Dampak (laporan)	1 laporan	45.000.000	Optimalisasi Pelayanan, Penguatan, Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan Desa Mik Dampak	Jumlah Dokumen hasil Optimalisasi Pelayanan, Penguatan, Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan Desa Mik Dampak (laporan)	1 laporan	45.000.000		

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Pembinaan dalam rangka Penyusunan Laporan Berang MMR Daerah	Luwero	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Penyusunan Laporan Berang MMR Daerah (laporan)	2 laporan	20.000.000	Pembinaan dalam rangka Penyusunan Laporan Berang MMR Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Penyusunan Laporan Berang MMR Daerah (laporan)	2 laporan	20.000.000	
	Pembinaan Laporan Berang MMR Daerah	Luwero	Jumlah Laporan Berang MMR Daerah yang Diusut (laporan)	2 laporan	20.000.000	Pembinaan Laporan Berang MMR Daerah	Jumlah Laporan Berang MMR Daerah yang Diusut (laporan)	2 laporan	20.000.000	
	Pembinaan Penyusunan Berang MMR Daerah Pemantapan Kabupaten/Kota	Luwero	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyusunan Berang MMR Daerah Pemantapan Kabupaten/Kota (orang)	4 orang	20.000.000	Pembinaan Penyusunan Berang MMR Daerah Pemantapan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyusunan Berang MMR Daerah Pemantapan Kabupaten/Kota (orang)	4 orang	20.000.000	

Dilihat dari rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, ada penambahan beberapa sub kegiatan, antara lain :

1. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tujuan untuk peningkatan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan perencanaan sampai penyusunan laporan dan penilaian kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada perangkat daerah untuk peningkatan proses pengelolaan barang milik daerah mulai dari penyusunan perencanaan sampai penyusunan laporan
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah karena terjadinya perubahan regulasi dari pusat sehingga perlu ada pengembangan sumber daya manusia terkait dengan tugas dan fungsi
4. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan karena terdapat barang milik daerah selaku penunjang kegiatan pelayanan sudah habis masa manfaat dan dalam kondisi rusak berat.
5. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan untuk optimalisasi barang milik daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pelayanan
6. Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah serta kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk memperkuat dasar pengelolaan barang milik daerah melalui produk hukum daerah
7. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mempertegas pemanfaatan barang milik daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Adapun visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah “Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif”

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif” antara lain :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif
Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan target.
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif
Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Kabupaten Flores Timur

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan unsur pemnjang urusan pemerintahan, program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan tujuan keempat yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan Sasaran Meningkatnya Prioritas Penyekenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan dua indikator sasaran yaitu Opini BPK dan Persentase Pemrunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasara
			2021	2023
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Opini BPK (Opin)	WDP	WTP

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program kegiatan, 14 (empat belas) Kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut;

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Mayu Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG	URUSAN PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	02				Keuangan				162.343.877.960				162.343.877.960
5	0.2	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Keuangan Daerah (%)</i>		100,00	162.758.345.960			100,00	165.325.945.969
5	0.2	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Terselenggaranya Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah (dokumen)</i>		15	3.414.635.700			15	3.387.456.697
5	0.2	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dokumen)</i>	Lumutika	2	120.021.000	APBD II (DAU)		2	100.000.000
5	0.2	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dokumen)</i>	Lumutika	2	500.411.000	APBD II (DAU)	mendukung pencapaian target	2	140.000.000
5	0.2	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (dokumen)</i>	Lumutika	30	25.000.000	APBD II (DAU)		30	25.000.000
5	0.2	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (dokumen)</i>	Lumutika	30	25.000.000	APBD II (DAU)		30	25.250.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2013				CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KESUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)	SUMBER DANA		TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KESUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
5	02	02	2.04	05	Kontinuitas Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Seluruh)	Lumutika	30	25.000.000	APBD 0 (DAI)	30	25.250.000	
5	02	02	2.04	06	Kontinuitas Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Seluruh)	Lumutika	30	25.000.000	APBD 0 (DAI)	30	25.250.000	
5	02	02	2.04	07	Kontinuitas dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemerintahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan APBD (Sek)	Lumutika	2	1.200.000.000	APBD 0 (DAI)	2	1.200.000.000	
5	02	02	2.04	08	Kontinuitas dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Perubahan APBD (Sek)	Lumutika	2	118.700.000	APBD 0 (DAI)	2	120.000.000	
5	02	02	2.04	09	Kontinuitas dan Penyusunan Kepuasan serta Kelengkapan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kelengkapan Bidang Anggaran (Sek)	Lumutika	2	200.000.000	APBD 0 (DAI)	2	202.000.000	
5	02	02	2.04	10	Kontinuitas Penyusunan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Sek)	Lumutika	2	38.999.000	APBD 0 (DAI)	2	39.500.000	
5	02	02	2.04	11	Kontinuitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Sek)	Lumutika	2	43.000.000	APBD 0 (DAI)	2	43.450.000	
5	02	02	2.04	12	Kontinuitas Penyusunan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Sek)	Lumutika	2	30.999.000	APBD 0 (DAI)	2	31.500.000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2013			CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014	
KODEN URUSAN	KODEN PROGRAM	KODEN KEGIATAN	KODEN SUB KEGIATAN	KODEN SUB KEGIATAN			LOKASI	TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KISUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)		TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KISUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	02	02	2.01	01	Pembinaan Perumusan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kota (orang)	Lumutika	20	25.000.000	APBD II (DAU)	20	25.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolan Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolan Erangan Daerah (dok)		48	394.100.000		48	394.100.000
5	02	02	2.02	01	Kontinuitas dan Pengelolan K- Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolan K- Daerah (dok)	Lumutika	12	20.000.000	APBD II (DAU)	12	20.000.000
5	02	02	2.02	02	Penyusunan, Pelaksanaan, Pemasukan dan Pembiayaan Anggaran K- dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan dan Pembiayaan Anggaran K- dan SPD (dok)	Lumutika	20	90.000.000	APBD II (DAU)	20	90.000.000
5	02	02	2.02	04	Pembinaan Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Perencanaan Daerah (dok)	Lumutika	2	25.000.000	APBD II (DAU)	2	25.000.000
5	02	02	2.02	05	Kontinuitas, Fasilitas, Asistensi, Wakasasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Wakasasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dok)	Lumutika	18	20.000.000	APBD II (DAU)	18	20.000.000
5	02	02	2.02	06	Kontinuitas, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dok)	Lumutika	2	25.000.000	APBD II (DAU)	2	25.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2013				CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014	
URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR			LOKASI	TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KISUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)	SUMBER DANA		TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KISUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	0.2	02	2.02	07	Kewilayahan dan Pengawasan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aritan Kas, dan Pelaksanaan Pemeriksaan/Pemeriksaan dan Pemeriksaan Pemeriksaan Pihak Ketiga (PKK)	Jumlah Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aritan Kas, dan Pelaksanaan Pemerintahan/ Pemeriksaan dan Pemeriksaan Pemeriksaan Pihak Ketiga (PKK) dan Laporan Realisasi Kewilayahan dalam rangka Pengawasan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aritan Kas, dan Pelaksanaan Pemerintahan/ Pemeriksaan dan Pemeriksaan Pemeriksaan Pihak Ketiga (PKK) Laporan	Lumajang	1	70.000.000	APBD D (DAI)		1	70.000.000
3	0.2	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Pening- katan Utang Daerah yang Tidak Aktif Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pemeriksaan dan Pemeriksaan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan dan Utang Daerah yang Tidak Aktif Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pemeriksaan dan Pemeriksaan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dik)	Lumajang	1	20.000.000	APBD D (DAI)		1	20.000.000
3	0.2	02	2.02	09	Kewilayahan Data Pemerintahan dan Pengelolaan Kas serta Pemeriksaan dan Pemeriksaan (Nas) (NPD) sebagai Indikator Utama	Jumlah Dokumen Hasil Kewilayahan Data Pemerintahan dan Pengelolaan Kas serta Pemeriksaan dan Pemeriksaan atau SPKD sebagai Indikator Utama (dik)	Lumajang	1	60.000.000	APBD D (DAI)		1	60.000.000
3	0.2	02	2.02	10	Pemeriksaan Peningkatan Teknik Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemerintahan dan Pengelolaan Kas serta Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan Sub Kegiatan	Jumlah Peningkatan Teknik Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengelolaan Kas serta Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan Sub Kegiatan (dik)	Lumajang	1	25.000.000	APBD D (DAI)		1	25.000.000

RENCANA KERJA BUDGET TAHUN 2013

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2013				CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014	
URUSAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KISUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KISUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	0.2	02	2.02	01	Pembiayaan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiayaan Pemenuhan Kebutuhan Pemenuhan Kabupaten/Kota (orang)	Lumutika	30	15.000.000	APBD II (DAU)		30	15.000.000
5	0.2	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (dokumen)		35	779.912.800			35	779.912.800
5	0.2	02	2.03	01	Kewajiban Pelaksanaan Akuntansi Pemenuhan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemenuhan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)	Lumutika	1	44.999.900	APBD II (DAU)		1	44.999.900
5	0.2	02	2.03	02	Monev dan Verifikasi Aset, Keuangan, Utang, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pengeluaran dan Lain-lain	Jumlah Dokumen Hasil Eksekusi dan Verifikasi Aset, Keuangan, Utang, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pengeluaran dan Lain-lain (dokumen)	Lumutika	4	10.999.000	APBD II (DAU)		4	10.999.000
5	0.2	02	2.04	01	Kewajiban Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Kecamatan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Kecamatan dan Kecamatan (laporan)	Lumutika	4	14.999.000	APBD II (DAU)		4	14.999.000
5	0.2	02	2.05	04	Kewajiban Laporan Keuangan APBD, APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan APBD, APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terselesaikan (laporan)	Lumutika	4	24.999.000	APBD II (DAU)		4	24.999.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2015			CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014		
URUSAN	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI			TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KISUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TAR GET CAPAI AN KINE RJA	KESUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
3	0.2	02	2.03	05	Kerjasama dan Penguatan Kemitraan Pemerintah Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota dan Kabupaten Pemerintah Kepada Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rencana Penguatan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota dan Rencana Penguatan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota (Sal)	Lumutika	2	604.999.500	APBD II (DAU)		2	604.999.495
3	0.2	02	2.04	06	Pengawasan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Sal)	Lumutika	2	14.999.900	APBD II (DAU)		2	15.349.788
3	0.2	02	2.04	08	Pengawasan Analisis Laporan Pertanggungjawaban/ Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Sal)	Lumutika	1	129.000.000	APBD II (DAU)		1	129.200.000
3	0.2	02	2.04	09	Pengawasan Kelengkapan dan Pantauan Efektif Operasional/ Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kelengkapan dan Pantauan Efektif Operasional Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Daerah (Salinan)	Lumutika	1	25.000.000	APBD II (DAU)		1	25.290.000
3	0.2	02	2.04	10	Pengawasan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sal)	Lumutika	1	14.999.700	APBD II (DAU)		1	15.349.687
3	0.2	02	2.04		Penguatan Urutan Kemitraan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terdapatnya Dokumen Laporan Rencana Keuangan Daerah, Dana Sarana dan Dana Bagi Hasil (Laporan)		3	258.548.718.360			3	259.416.710.644

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2015			CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KESUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)		TAR- GET CAPAI- AN KINE- RIA	KESUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	0.2	02	2.04	08	Analisa Perencanaan dan Pengelolaan Monev Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan Kecamatan (Laporan)	Lumutika	1	249.070.225.360	APBUD-B (DAU)	1	241.360.970.644
5	0.2	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Desa dan Mandek	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Desa dan Mandek (Laporan)	Lumutika	1	6.300.000.000	APBUD-B (DAU)	1	6.300.000.000
5	0.2	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kebudayaan Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kebudayaan Kota (Laporan)	Lumutika	1	1.278.000.000	APBUD-B (DAU)	1	1.280.780.000
5	0.2	03	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Kecamatan (Lok)		1	929.400.000		1	929.604.000
5	0.2	03	2.05	01	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Masing Kecamatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah (Lok)	Lumutika	1	929.400.000	APBUD-B (DAU)	1	929.604.000
5	0.2	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek (%)		80	634.831.000		85	641.179.319
5	0.3	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan barang milik daerah (Lok)		80	634.831.000		85	641.179.319
5	0.2	03	2.01	01	Pengelolaan Sediaan Barang	Jumlah Sediaan Barang yang Dikawatir (Lok)	Lumutika	1	18.018.500	APBUD-B (DAU)	1	18.018.500
5	0.2	03	2.01	02	Pengelolaan Sediaan Barang Milik Daerah dan Sediaan Aset/Likuidasi Monev Milik Daerah	Jumlah Sediaan Barang Milik Daerah dan Sediaan Likuidasi Barang Milik Daerah (Lok)	Lumutika	1	79.000.000	APBUD-B (DAU)	1	79.390.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2013			CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014	
KEKOR	KEKOR	KEKOR	KEKOR	KEKOR			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KISUTURAN DANA DAN PAGO INDIKATIF (Rp-)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KISUTURAN DANA DAN PAGO INDIKATIF (Rp-)
5	02	03	204	03	Pengawasan Pemenuhan Kebutuhan Haring Milk Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	1	12.500.000	APBD II (DAU)	1	12.500.000
5	02	03	204	04	Pengawasan Kebutuhan Pengolahan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengolahan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	1	15.000.000	APBD II (DAU)	1	15.000.000
5	02	03	204	05	Pemenuhan Haring Milk Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	1	24.902.500	APBD II (DAU)	1	25.100.000
5	02	03	204	06	Hortikultura Haring Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Hortikultura (LH) Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	2	24.900.000	APBD II (DAU)	2	25.100.000
5	02	03	204	07	Pengawasan Haring Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	2	120.400.000	APBD II (DAU)	2	130.744.000
5	02	03	204	08	Pemilihan Haring Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemilihan Haring Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Pemilihan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	2	15.000.000	APBD II (DAU)	2	15.700.000
5	02	03	204	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengolahan Haring Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengolahan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	2	15.000.000	APBD II (DAU)	2	15.700.000
5	02	03	204	10	Optimalisasi Pengawasan, Pemenuhan, Pemeliharaan, Pemertahan, dan Pengawasan Haring Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengawasan, Pemenuhan, Pemeliharaan, Pemertahan, dan Pengawasan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	2	45.000.000	APBD II (DAU)	2	45.450.000
5	02	03	204	11	Wakomunikasi dalam rangka Pengawasan Laporan Haring Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Wakomunikasi dalam rangka Pengawasan Laporan Haring Milk Daerah (Rp-)	Lumutika	2	20.000.000	APBD II (DAU)	2	20.200.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (tahun)	RENCANA TAHUN 2013				CATATAN PENTING	PRANTRAA TAHUN 2014	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTURAN DANA DAN PAGU INDIKATIF (Rp.)
(a)					(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
3	0.2	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Raring Milik Daerah	Jumlah Laporan Raring Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	Lumutaba	2	40.000.000	AH010.0 (DAU.1)		2	40.000.000
3	0.2	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Raring Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Raring Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota (orang)	Lumutaba	4	20.000.000	AH010.0 (DAU.1)		4	20.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023.

Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores
Tahun 2023

KODE					URUSAN / BIDANG-URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KELOMPOK (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRANKIRAN TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG-URUSAN	PROGRAM	SUB-PROGRAM	KEGIATAN			TARGET T	PAGE INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DAYA	P N	P D	TARGET	PAGE INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
52	54	5	01		BADAN KEUANGAN DAN ASET			255.989.889.475						255.989.889.475
1	11				Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			22.578.011.615						22.800.427.231
1	1				Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	22.578.011.615				PP	100	22.800.427.231
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi kompetensi (%)	100						100	
						Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						100	
1	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	10	44.999.800				KP	10	45.448.798
1	11	01	2.01	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4	10.000.000	Luwamuka	APBN D (DAU)			4	10.700.000
1	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	4	10.000.000	Luwamuka	APBN D (DAU)			4	10.700.000
1	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	10	14.999.800	Luwamuka	APBN D (DAU)			10	14.949.800
1	11	01	2.01	04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4	10.000.000	Luwamuka	APBN D (DAU)			4	10.604.798
1	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Realisasi Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Tahunan (dok)	2	21.273.881.394				KP	2	21.498.428.208
1	11	01	2.02	04	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bln)	11 (14)	21.290.000.544	Luwamuka	APBN D (DAU)			12 (14)	21.409.670.228

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		PEMBILANGAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET TAHUN 2024 T	PAGE INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGE INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Doc)	2	20.200.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			2	20.200.000
x	xx	01	2.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan Semester SKPD (laporan)	36	55.999.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			36	56.357.880
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Peningkatan manajemen aset barang milik Daerah (ak)		55.000.000				KP		55.550.000
x	xx	01	2.03	04	Penyusunan Pemantauan Kehutanan Barang Milik SKPD	Jumlah Rencana Kehutanan Barang Milik Daerah SKPD (ak)	1	25.000.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			1	25.250.000
x	xx	05	2.04	05	Kelengkapan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD (lap)	2	30.200.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			2	30.380.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135.000.000				KP		131.100.000
x	xx	01	2.05	08	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai (ak)	2	10.000.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			2	10.700.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti pendidikan dan pelatihan (org)	3	20.000.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			3	20.300.000
x	xx	01	2.05	10	Sosialisasi Forum Perundingan-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Forum Perundingan-undangan (org)	3	25.000.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			3	26.000.000
x	xx	05	2.05	11	Monitoring Pelaksanaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Monitoring Pelaksanaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan (org)	3	30.200.000	Lumutaka	APBD U (DAU)			3	30.500.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase keterlaksanaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	101.129.029				PP	100	111.094.119
x	xx	05	2.06	01	Pengelolaan Keuangan Internal Untuk Peningkatan Rengas Kantor	Jumlah Pokok Kergasan Internal Untuk Peningkatan Rengas Kantor yang Diadatkan (jokai)	1	4.974.029	Lumutaka	APBD U (DAU)			1	5.025.419

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		PEMBILANGAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TAHUN 2024 TARGET T	PAGE INDEKATIF (Rp/)	LOKASI	SUMBER DANA	P/N	PD	TARGET	PAGE INDEKATIF (Rp/)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	01	01	2.06	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	2	35.795.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			2	35.795.000
1	01	01	2.06	03	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	2	35.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			2	35.000.000
1	01	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	2	30.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			2	30.000.000
1	01	01	2.06	05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	40.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			2	40.000.000
1	01	01	2.06	06	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	2	1.200.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			2	1.212.000
1	01	01	2.06	08	Facilities Kunjungan Timor	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Timor (laporan)	2	25.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			2	25.000.000
1	01	01	2.06	09	Pencelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD (laporan)	2	40.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			2	40.000.000
1	01	01	2.06	10	Realisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (org)	2	25.000.000	Lumutaba				2	40.000.000
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (unit)		130.500.000				KP		147.000.000
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	45.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			4	45.000.000
1	01	01	2.07	08	Pengadaan Alat Tek Berwujud	Jumlah Unit Alat Tek Berwujud yang Disediakan (Unit)	6	15.500.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			6	45.000.000
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	6	35.795.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			6	45.000.000
1	01	01	2.08		Pengadaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perantara pemerintah dan pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (TU)	100	545.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)		KP	100	501.118.000
1	01	01	2.08	01	Pengadaan Jasa Sewa Menyewa	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sewa Menyewa (laporan)	12	1.000.000	Lumutaba	APBD U (DAU)			12	1.018.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		PEMBILANGAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET TAHUN 2024 T	PAGE INDEKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P-N	P-D	TARGET	PAGE INDEKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	01	01	2.08	02	Pengelolaan Jasa & Pemeliharaan, Santitas (Jasa Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunitas, Santitas Daya Air dan Listrik yang Disiapkan Laporan	12	100.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			12	100.000.000
1	01	01	2.08	04	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan Laporan	12	100.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			12	100.000.000
1	01	01	2.08		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan (%)	100	109.881.382				KP	100	110.990.206
1	01	01	2.09	02	Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dikawatir Pajak dan Perawatannya (unit)	11	45.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			11	45.000.000
1	01	01	2.09	03	Pemeliharaan Motor	Jumlah Motor yang Dipelihara (unit)	25	25.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			25	25.000.000
1	01	01	2.09	04	Pemeliharaan Perahu dan Motor Lainnya	Jumlah Perahu dan Motor Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1.998.500	Lumutika	APBD D (DAU)			1	1.029.495
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Aspal (Tol, Persegi)	Jumlah Aspal Tol Persegi yang Dipelihara (unit)	1	25.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			1	25.000.000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Kabin/Kabin Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dihabiskan (unit)	1	1.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			1	1.000.000
1	01	01	2.09	07	Pemeliharaan, Rehabilitasi Bangun dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	1.891.892	Lumutika	APBD D (DAU)			1	1.891.892
1	01	01	2.09	08	Pemeliharaan, Rehabilitasi Bangun dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	1.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			2	1.000.000
1	02				Keuangan			163.000.677.880						165.947.125.179
1	0.2	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemeliharaan Urusan Daerah (%)	100,00	162.758.846.860			P-N 2	P-D 4	100,00	165.325.846.860
1	0.2	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah (bilangan)	18	3.414.835.700			KP- 1	KU-4	18	3.387.836.697
1	0.2	02	2.03	01	Koordinasi dan Penyusunan K/LA dan PPAI	Jumlah Dokumen K/LA dan PPAI yang Disusun (bilangan)	2	250.000.000	Lumutika	APBD D (DAU)			2	100.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		PEMBILANGAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET TAHUN 2024 TARGE T	PAGE INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P.N	P.D	TARGET	PAGE INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	8.2	02	2.03	02	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	205.443.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			2	205.000.000
3	0.2	02	2.01	03	Kordinasi, Pengawasan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	20	25.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			20	25.000.000
3	0.2	02	2.01	04	Kordinasi, Pengawasan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	20	25.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			20	25.250.000
3	8.2	02	2.03	05	Kordinasi, Pengawasan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	20	25.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			20	25.250.000
3	0.2	02	2.01	06	Kordinasi, Pengawasan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	20	25.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			20	25.250.000
3	0.2	02	2.01	07	Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengeluaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengeluaran APBD (Ak)	2	1.500.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			2	1.500.000.000
3	0.2	02	2.01	08	Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengeluaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengeluaran Perubahan APBD (Ak)	2	215.700.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			2	215.250.000
3	8.2	02	2.03	09	Kordinasi dan Penyusunan Kegiatan untuk Kelengkapan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kegiatan untuk Kelengkapan Bidang Anggaran (Ak)	2	200.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			2	200.000.000
3	0.2	02	2.01	10	Kordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan (Ak)	2	35.999.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			2	35.300.000
3	8.2	02	2.01	11	Kordinasi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah (Ak)	2	45.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			2	45.000.000
3	0.2	02	2.01	12	Kordinasi Penyusunan Anggaran Pembayaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Pembayaran (Ak)	2	10.999.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			2	11.000.000
3	0.2	02	2.01	13	Penelitian Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Penelitian Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kota (orang)	20	25.000.000	Lumutaka	APBD D (DAU)			20	25.250.000
5	0.1	02	1.01		Kordinasi dan Pengelolaaan Perbedaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kerjasama Daerah (Ak)	48	595.000.000			KP- 2	KP-4	48	602.100.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		PEMBILANGAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TAHUN 2023 TARGET T	PAGE INIKRATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P.N	P.D	TARGET	PAGE INIKRATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	8.2	02	2.02	81	Koordinasi dan Pengawasan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengawasan Kas Daerah (Dok)	12	202.000.000	Lumutaku	APBD D (DAU)			12	202.000.000
3	8.2	02	2.02	83	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD (Dok)	50	90.000.000	Lumutaku	APBD D (DAU)			50	90.000.000
3	8.2	02	2.02	84	Pemenuhan Perimbangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan Perimbangan Daerah (Dok)	2	25.000.000	Lumutaku	APBD D (DAU)			2	25.000.000
3	8.2	02	2.02	88	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya (Dok)	19	20.000.000	Lumutaku	APBD D (DAU)			19	20.000.000
3	8.2	02	2.02	88	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Instansi Non Tatal dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Instansi Non Tatal dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dok)	2	25.000.000	Lumutaku	APBD D (DAU)			2	25.000.000
3	8.2	02	2.02	87	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemenuhan Perimbangan Perimbangan dan Pembelian Perimbangan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemenuhan Perimbangan dan Pembelian Perimbangan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemenuhan Perimbangan dan Pembelian Perimbangan Pihak Ketiga (PPK) (Laporan)	3	70.000.000	Lumutaku	APBD D (DAU)			3	70.000.000
3	8.2	02	2.02	88	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Uang Daerah yang Terhalat Aktiva: Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pemenuhan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Uang Daerah yang Terhalat Aktiva: Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pemenuhan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dok)	3	20.000.000	Lumutaku	APBD D (DAU)			3	20.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DASAR KETERANGAN PENSANGAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PEMBILANGAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET T	PAGE INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGE INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	8.2	02	2.02	99	Keterampilan Dana Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyisihan Atas SP/SD dengan Insentif Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Data Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyisihan atas SP/SD dengan Insentif Terkait (Mok)	2	85.725.000	Lumutaka	APBD-B (DAU)			2	85.571.200
3	8.2	02	2.02	10	Perencanaan Penerimaan, Ekstra Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Pembiayaan dan Pengeluaran atas Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Pembiayaan dan Pengeluaran atas Sub Kegiatan (Mok)	2	25.400.000	Lumutaka	APBD-B (DAU)			2	25.250.000
3	8.2	02	2.02	11	Pembinaan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota (orang)	20	15.000.000	Lumutaka	APBD-B (DAU)			20	15.250.000
3	8.2	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (dokumen)	25	173.982.800			KP- 1	KU-4	35	168.782.800
3	8.2	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)	3	44.995.800	Lumutaka	APBD-B (DAU)			3	45.440.700
3	8.2	02	2.03	02	Keterampilan dan Verifikasi Aspek Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pengeluaran/LO dan Lain-lain	Jumlah Dokumen Hasil Rekapitulasi dan Verifikasi Aspek Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pengeluaran-LO dan Lain-lain (dokumen)	4	18.990.000	Lumutaka	APBD-B (DAU)			4	19.280.000
3	8.2	02	2.03	03	Koordinasi Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Belanja, Trasnparansi dan Sementara)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Belanja, Transparansi dan Sementara (laporan)	4	18.995.000	Lumutaka	APBD-B (DAU)			4	19.295.000
3	8.2	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan RAPD, RUPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan RAPD, RUPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terlengkap (laporan)	4	29.995.000	Lumutaka	APBD-B (DAU)			4	30.294.000

KODE					URUSAN / RIRANG-URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KETERANGAN PENJAJARAN TAHUN 2024				PRIORITAS		FRANKILAN TAHUN 2024	
URUSAN	RIRANG-URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET T	PAGE INDEKATIF (Rp/)	LOKASI	SUMBER DATA	PN	PD	TARGET	PAGE INDEKATIF (Rp/)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3	3.2	02	2.03	05	Kecamatan dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Daerah tentang Peningkatan dan Pelaksanaan APHD Kecamatan Kota dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Daerah tentang Peningkatan Peningkatan dan APHD	Jumlah Kecamatan Kecamatan Daerah tentang Peningkatan dan Pelaksanaan APHD Kecamatan Kota dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Daerah tentang Peningkatan Peningkatan dan Pelaksanaan APHD Kecamatan Kota (dk)	3	104.999.200	Lumutika	APHD II (DAU)			3	104.999.200
4	3.2	02	2.03	06	Peningkatan Tanggapan/Urut Lampiran Lampiran LHP BPK dan Laporan Peningkatan dan Pelaksanaan APHD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Urut Lampiran Lampiran LHP BPK dan Laporan Peningkatan dan Pelaksanaan APHD (dk)	3	14.999.200	Lumutika	APHD II (DAU)			3	14.999.200
5	3.2	02	2.03	08	Peningkatan Analisis Laporan Peningkatan dan Pelaksanaan APHD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Peningkatan dan Pelaksanaan APHD (dk)	1	123.000.000	Lumutika	APHD II (DAU)			1	123.000.000
6	3.2	02	2.03	09	Peningkatan Kegiatan dan Peningkatan Tingkat Operasional Peningkatan Masyarakat Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan dan Peningkatan Operasional Peningkatan Masyarakat Pemerintah Daerah (Masyarakat)	1	25.000.000	Lumutika	APHD II (DAU)			1	25.000.000
7	3.2	02	2.03	10	Peningkatan Sistem dan Peningkatan Akutansi dan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Daerah	Jumlah Sistem dan Peningkatan Akutansi dan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Daerah (dk)	1	34.999.200	Lumutika	APHD II (DAU)			1	34.999.200
8	3.2	02	2.04		Peningkatan Urutan Kewenangan Pengelolaan Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kewenangan Kewenangan Daerah dan Dokumen dan Sisi Sisi Laporan	3	156.345.228.360			KP- 1	KU-4	3	159.418.118.644
9	3.2	02	2.04	08	Analisis Peningkatan dan Peningkatan Kewenangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Peningkatan dan Peningkatan Kewenangan (Laporan)	1	349.079.228.360	Lumutika	APHD II (DAU)			1	371.500.930.644
9	3.2	02	2.04	09	Peningkatan Data Daerah dan Mendukung	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Data Daerah dan Mendukung (Laporan)	1	6.200.000.000	Lumutika	APHD II (DAU)			1	6.202.000.000
9	3.2	02	2.04	10	Peningkatan Data dan Peningkatan Kegiatan Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Data dan Peningkatan Kegiatan Kota (Laporan)	1	1.378.000.000	Lumutika	APHD II (DAU)			1	1.389.700.000
5	3.2	02	2.05		Peningkatan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kewenangan Daerah	Dokumen Kewenangan Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kewenangan (dk)	1	828.495.200			KP- 1	KU-4	1	829.634.008

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		PEMBILANGAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TAHUN 2024 TARGET T	PAGE INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P.N	P.D	TARGET	PAGE INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	8.2	02	2.00	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Hiking Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok)	1	925.000.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			1	925.000.000
5	8.2	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek (%)	80	634.531.000				PP	85	641.179.310
5	8.2	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dok)	80	634.531.000				KP	85	641.179.310
3	0.2	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (dok)	1	78.818.500	Lumutaba	APBD II (DAU)			1	78.818.500
3	0.2	03	2.01	02	Penyusunan Standar Harga Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1	25.350.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			1	25.350.000
3	0.2	03	2.01	03	Penyusunan Persetujuan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1	32.825.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			1	32.825.000
3	0.2	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (dok)	1	25.350.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			1	25.350.000
3	0.2	03	2.01	05	Pembentukan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pembentukan Barang Milik Daerah (laporan)	1	24.912.500	Lumutaba	APBD II (DAU)			1	25.181.825
3	8.2	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (laporan)	2	24.918.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			2	25.159.100
3	8.2	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	2	129.450.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			2	130.344.500
3	8.2	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)	2	75.000.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			2	75.750.000
1	0.2	03	2.01	09	Program dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)	2	75.000.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			2	75.750.000
3	8.2	04	2.03	01	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)	2	45.450.000	Lumutaba	APBD II (DAU)			2	45.450.000

[illegible]

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang keuangan disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

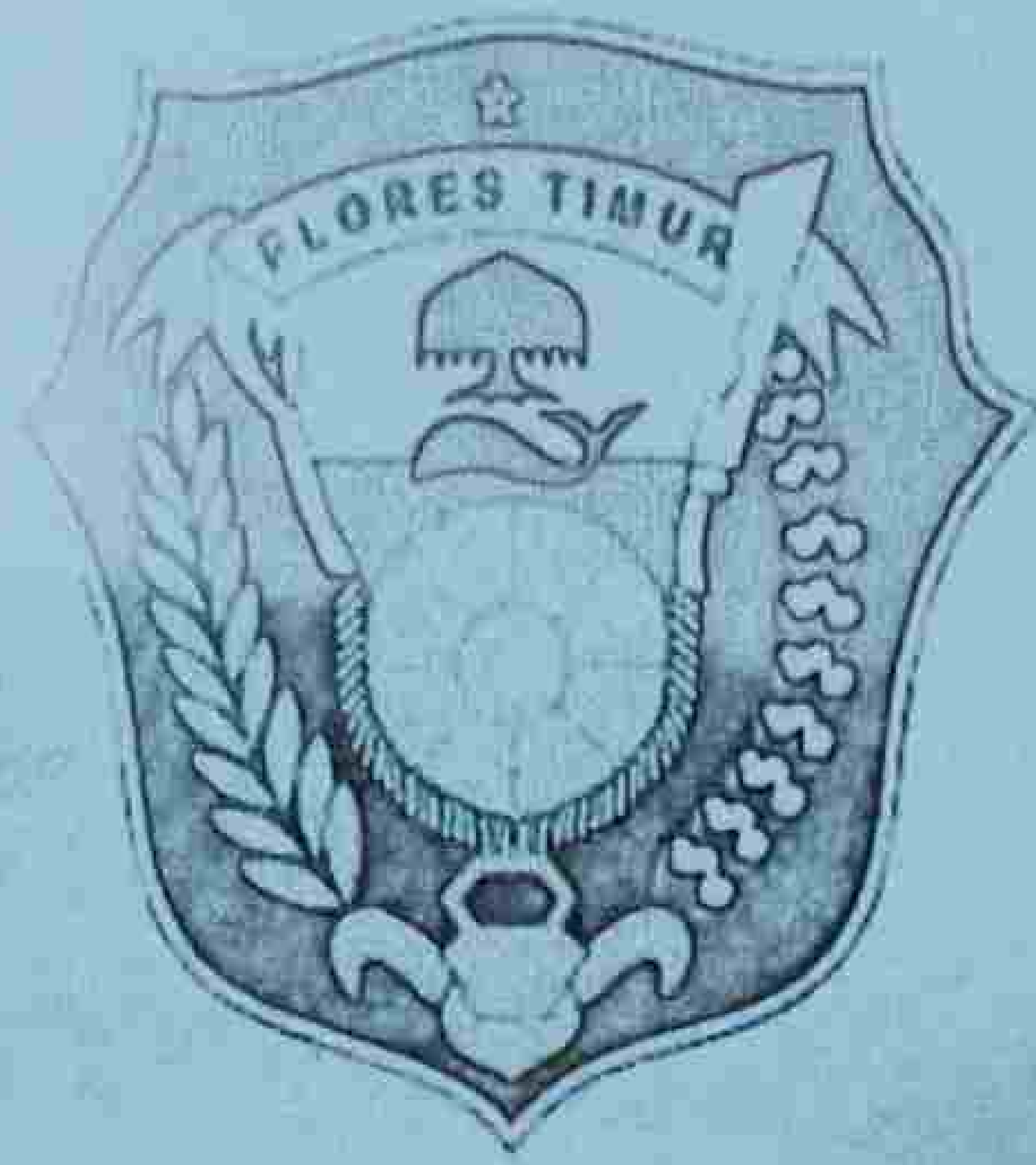
Melalui penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2023. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Tahun 2023.

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur**

YOSEPH A. S. PEHAN KERAH, SE, MSI
Pembina Utama Muda

NIP. 197104261998031012



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta tuntunan-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan..

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja pada tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, Dana Indikatif berserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur ini dapat mencerminkan kinerja kesinambungan Program & Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2024

Larantuka, Juli 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,


Rufus Koda Teluma, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196907251997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023	38
BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022	7
Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel II.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	29
Tabel III.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMD.....	36
Tabel III.3. Perumusan rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	37
Tabel IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026

23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuannya penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB.II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB.III :TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

meliputi: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB.IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V : PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,baikdalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran,kaidah kaidah pelaksanaan danrencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Flores Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

A. BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2018-2022

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN/(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
	5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									
	x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)	100							
	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)	100							
							Jumlah sarana prasarana aparatur yang tingkatan (%)	100							
							Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)								

x	xx	01	2.06	01	01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik /Pencrangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik dan penerangan (jenis)	54	19	2	2	100			
x	xx	01	2.06	02	02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	12	125	30	30	100			
x	xx	01	2.06	04	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	24	71	12	12	100			
x	xx	01	2.06	05	05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	87	57	14	14	100			
x	xx	01	2.06	06	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya alat tulis kantor (jenis)	184	96	29	29	100			
x	xx	01	2.06	08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya barang cetak dan penggandaan(lambar)	590.000	287.375	37.500	37.500	100			
x	xx	01	2.06	09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan(jenis/ bulan)	10	6	2	2	100			
x	xx	01	2.07	05	05	Pengadaan Barang Milik Daerah	tersedianya makan dan minum (porsi)	2700	745	600	250	41,67			
x	xx	01	2.07	05	05	Pengadaan Mebel	tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	251	74	36	51	141,67			
x	xx	01	2.08	01	01	Persediaan Jasa Penunjang Urusan	tersedianya meja dan kursi yang memadai (unit)	86	31	20	0	0			
x	xx	01	2.08	01	01	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah administrasi surat menyurat (lembar)	3500	1362	150	150	100			
x	xx	01	2.08	02	02	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100			
x	xx	01	2.08	04	04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	1	1	1	1	100			
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah									

x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	8	8	6	6	109	
						Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang dipelihara (unit)	8	8	1	1	100	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	2	2	2	1	50	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	90	90	6	6	100	
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	29	30	5	5	100	
5	03				Kepegawaian							
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur(%)						
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan							
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penerimaan CPNS (pelamar)	7500	4605	3.919	3.751	95.71	
						Jumlah rencana formasi pegawai dan pemetaan jabatan yang disusun (formasi)	2681	386	400	-	-	
						Jumlah pengangkatan CPNS (orang)	2681	283	250	-	-	
						Jumlah pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (orang)	-	-	112	-	-	
						Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD (orang)	800	-	-	-	-	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Penataan sistem aparatur purnabhakti/pensiun(orang)	800	788	150	239	159.33	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian (file)	28.000	14.927	5800	7078	122.03	
						Tersediannya 1 aplikasi kepegawaian (aplikasi)	1	1	1	1	100	

5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah sistem informasi administrasi proses penyusunan karpeg taspen karis karsu (kartu)	2535	2760	500	394	78,8	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	14550	6342	2380	2410	101,26	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karir (orang/dok)	1781	1660	300	350	116,67	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							
5	03	02	2.03	1	Peningkatan kapasitas ASN	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional (orang)	400	0	0	0	0	
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Ujian dinas dan penyusunan ijasah (orang)	620	430	100	55	55	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	pemberian bantuan tubel dan ibel dan ikatan dinas (orang)	335	199	100	100	100,0	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan jabatan fungsional ASN	tercapainya penempatan pengangkatan/ inpasing/ perpindahan jabatan fungsional (berkas)		-			-	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja							
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (orang)	45	28	20	20	100,00	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS (kasus)	90	89	20	21	105,0	
5	04	02			Pendidikan dan Pelatihan							
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)						
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan							
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan kelembagaan tenaga pengembang kompensasi dan sumber belajar	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian (orang)	580	66	-	-	-	

B. BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2023-2026

NO	KODE					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d dengan (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
								K	K	K	K	K	K	RP
								787						
								735						
								100				100	100	100%
								100				100	100	100%
								100				100	100	100%
								100				100	100	100%
								60				7	7	12%
								8				2	2	25%
								4				1	1	25%

	X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8						2	2	25%
	X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24						-	-	0%
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	24						3		0%
	X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	9						3	3	33%
	X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7						2	2	29%
	X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yg mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8						2	2	25%
	X	XX	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	146						38		0%
	X	XX	01	2.06	01	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4						1	1	25%
	X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	8						2	2	25%
	X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	8						2	2	25%
	X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	4						1	1	25%
	X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	8						2	2	25%

	X	XX	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinaanya (Unit)	144						36		0%
	X	XX	01	2.08 01			48						12	12	25%
	X	XX	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	48						12	12	25%
	X	XX	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	48						12	12	25%
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	121								0%
	X	XX	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	24						6	6	25%
	5	03	01	2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	60						20	20	33%
	X	XX	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	5						2	2	40%
	5	03	01	2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	4						1	1	25%
	X	XX	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4						1	1	25%
	X	XX	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	16						4	4	25%

Pengelolaan Promosi ASN					Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	12						3	3	25%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		762							0%
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	8						2	2	25%
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	400						100	100	25%
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	350						100	100	29%
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	4						2	2	50%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja	168								0%
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8						2	2	25%
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	80						20	20	25%
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	80						20	20	25%
5	04				Pendidikan dan Pelatihan	26,00								0%
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	26,00						14,68		0%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan,	288								0%
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	280						75	75	27%

Dari Tabel II.1 bagian A Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2022 terlihat bahwa pada Realisasi Program / kegiatan sangat variatif ada yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan tetapi ada program ataupun kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran dan dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Kisaran Persentase Capaian Kinerja dari 41,67 % sampai dengan 141,67 % .Capaian persentase terendah yaitu pada kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dan persentase capaian tertinggi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program yaitu alokasi anggaran yang belum memadai atau dapat juga di pengaruhi oleh efisiensi penggunaan yang baik sehingga terjadi penghematan yang berdampak pada tidak terelisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya , terpenuhinya target kinerja program bahkan melebihi target adalah tentu alokasi anggaran yang sudah cukup memadai dan juga optimalisasi sumber daya yang ada untuk mempercepat Realisasi capaian program atau kegiatan dimaksud.
2. Program Kepegawaian Daerah yang tingkat capainnya terendah adalah pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sub kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN dengan indikator Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional (orang) dalam target Renstra 2017 s/d 2022 sebanyak 400 orang tetapi tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 0 %, hal ini dapat dijelaskan bahwa terhadap kegiatan tersebut diatas tidak pernah di jalankan/direalisasikan karena keterbatasan anggaran sehingga tidak mendapat alokasi anggaran setiap tahunnya. Adapun kegiatan yang telah mencapai target diantaranya kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN terutama pada indikator Jumlah Penerimaan CPNS (pelamar) dari target Renstra 2017 s/d 2022 sebanyak 7500 pelamar terealisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 11.356 pelamar atau sebesar 95,71 %. Faktor yang cukup mempengaruhi tingkat capaian pada kegiatan ini adalah cukup tersedianya formasi yang dibutuhkan, ketersediaan akses informasi yang memadai, transparansi dalam pelaksanaan proses pengadaanya, juga dukungan anggaran yang cukup

memadai. Secara umum untuk Program kepegawaian Daerah telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melebihi target.

3. Untuk program Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan data dari tabel II.1 diatas terlihat bahwa kegiatan yang masih rendah capaiannya adalah pada sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan indikator Penyelenggaraan diklat teknis Fungsional dan kepemimpinan(orang) sebesar 15,51% atau 69 orang dari target Renstra 2017 - 2022 sebanyak 445 orang. Hal ini di pengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan anggaran setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi jumlah atau kuota yang diusulkan untuk mengikuti diklat. Sedangkan untuk kegiatan yang telah mencapai target bahkan telah melebihi target adalah kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan fungsional kepemimpinan dan prajabatan dengan indikator Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III (CPNS) dari target 646 orang terealisasi 826 atau 127,86%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini adalah Jumlah Persentase yang lulus seleksi CPNS setiap tahun cukup banyak sesuai usulan formasi serta dukungan ketersediaan anggaran yang cukup memadai.

Dari uraian capaian program/kegiatan diatas, terhadap capaian program/kegiatan yang belum mencapai target harus menjadi perhatian dan prioritas dalam pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya, untuk itu kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran juga harus mengikuti program/kegiatan prioritas yang belum mencapai target seperti yang termuat didalam Renstra OPD.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel II.2 berikut ini.

TABEL II.Z.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BKPSDMD KABUPATEN FLORES TIMUR**

NO	INDIKATOR	SPM/Stan dar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)
1	Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi Jabatan	-	✓		83,47	84,19	84,91	100,00		84,19	84,91	Realisasi capaian cukup baik/sudah memenuhi Target
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar		✓		130,81	138,21	146,09	126,05		138,21	146,09	Realisasi capaian cukup baik
3	Rasio Pegawai Fungsional		✓		22,23	26,8	31,38	20,43		26,8	31,38	Realisasi capaian cukup baik
4	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikasi Kompetensi		✓		53,55	69,68	85,81	38,18		69,68	85,81	Realisasi capaian cukup baik
5	Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (bulan)		✓		3	3	3	3		3	3	Realisasi capaian cukup baik/sudah memenuhi Target
6	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	✓	3,48	57,89	63,16	68,42	0,00		63,16	68,42	Tidak Ada Realisasi pada Tahun 2022 karena tidak ada Dukungan Dana / tidak ada ketersediaan anggaran untuk indikator ini

7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	-	✓	58,53	6,26	14,68	18,45	43,55		14,68	18,45	Realisasi belum mencapai Target karena terbatasnya Dukungan Anggaran.
8	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	-	✓	35	36	36	36	30		36	36	Per 31 desember 2022 ada 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Yang lowong karena BUP
9	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	-	✓	2.102	0	0	0	1.615		0	0	Berkurang karena adanya BUP,Mutasi
10	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	-	✓	3.178	2.975	3.233	3.318	3.178		3.233	3.318	Realisasi capaian cukup baik/sudah memenuhi Target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah diatas menunjukkan beberapa indikator telah mencapai target dan beberapa indikator lainnya belum mencapai target. Adapaun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor yang mendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sumber daya yang berkompeten belum mencukupi sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

b) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai standar menjadi faktor pendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sarana dan prasarana belum lengkap dan sesuai standar sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

c) Kerjasama Lintas Sektor

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah membutuhkan peran serta lintas sektor. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dari evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagian sudah tercapai dan sebagian belum tercapai seperti terlihat dalam indikator kinerja pada tabel II.2 diatas. Realisasi Capaian tertinggi tahun 2022 pada Indikator Rasio Pegawai Pendidikan tinggi dan Menengah/dasar sebesar 126,05 % dari target ditahun 2022 sebesar 0 %. Capaian terendah pada Indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 % dari target 3, 48%, hal ini dipengaruhi oleh tidak ada dukungan ketersediaan Anggaran untuk membiayaan kegiatan ini. Dengan melihat capaian kinerja diatas maka dapat diketahui hal kritis/permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan isu

strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu ;

1. Masih rendahnya ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
2. Masih kurangnya Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
3. Masih Kurangnya Jabatan fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah
4. Masih rendahnya ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun Fungsional.
5. Kualitas SDM yang belum memadai atau Masih Kurangnya SDM yang memenuhi Kompetensi.
6. Pengadaan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
7. Masih banyak jenis pelayanan yang belum menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

1. Masalah Kedisiplinan Kerja
2. Alokasi Anggaran yang belum memadai.
3. Kurang adanya bimbingan teknis atau pelatihan bagi ASN
4. Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar yang dibutuhkan.
5. Kurang memahami Tugas pokok dan fungsi secara baik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program , kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026. Secara garis besar program , kegiatan dan Sub Kegiatan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan.

Secara umum program kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2024 sudah sesuai dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.4.

KODE				RANCANGAN AWAL				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATI F (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.533.291.987	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.574.809.464	
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.533.291.987	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.574.809.464	
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
						Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100				Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100		
						Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		
X	XX	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		107.500.000	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		56.000.000	
X	XX	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	
X	XX	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000	
X	XX	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	17.000.000	
X	XX	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	5	17.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.000	
X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		3.037.550.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		3.187.089.464	

Tunjangan ASN				Larantuka		ASN		Larantuka (OPD)		dan Tunjangan ASN (Orang bulan)		43/14		3 110 259 454	
03	01	2.02	02	Larantuka	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	64 800 000				
XX	01	2.02	07	Larantuka	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	17	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	2	12 000 000				
XX	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20 000 000				
XX	01	2.03	01	Larantuka	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	Larantuka (OPD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5 000 000				
XX	01	2.03	05	Larantuka	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10 000 000				
XX	01	2.03	06	Larantuka	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	5 000 000				
XX	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25 000 000				
XX	01	2.05	05	Kab. Flores Timur	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15	10 000 000				
XX	01	2.05	09	Luar Wilayah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	Luar Wilayah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	15 000 000				
XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						136 020 000				
XX	01	2.06	01	Larantuka	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	2 500 000				
XX	01	2.06	02	Larantuka	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	5 000 000				
XX	01	2.06	03	Larantuka	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2	5 000 000				
XX	01	2.06	04	Larantuka	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	17 500 000				
XX	01	2.06	05	Larantuka	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	25 000 000				

X	XX	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah dokumen bahan baku dan Perundang-undangan yang disiapkan (Dokumen)	2	1.800.000	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen bahan baku dan Perundang-undangan yang disiapkan (Dokumen)	1	1.000.000
X	XX	01	2.06	03	Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Wilayah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	80.000.000
X	XX	01	2.06	10	Penertarikan Asap Dinamis pada SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penertarikan Asap Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Penertarikan Asap Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penertarikan Asap Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	4.000.000
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		48.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		60.000.000
5	C3	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disiapkan (Unit)	1	23.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disiapkan (Unit)	2	14.000.000
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Larantuka	Jumlah paket Mebel yang disiapkan (Unit)	15	25.000.000	Pengadaan Mebel	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Mebel yang disiapkan (Unit)	2	35.000.000
X	XX	01	2.03		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.100.000
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Masyrakat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat masyrakat (laporan)	12	2.700.000	Penyediaan Jasa Surat Masyrakat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat masyrakat (laporan)	12	1.200.000
X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disiapkan (laporan)	12	31.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disiapkan (laporan)	12	40.000.000
X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disiapkan (laporan)	12	9.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disiapkan (laporan)	12	18.000.000
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		23.141.987	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		40.500.000
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	14.141.987	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	25.500.000
X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	10	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Larantuka (OPD)	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	2	5.000.000
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	1	2.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	5	5.000.000
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	4.000.000
5	03				Kepengawasan				1.190.000.000	Kepengawasan				1.241.500.000

5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		serikat fungsional sesuai jabatan (%)	14,68	1.190.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase ASN yang memiliki serikat fungsional sesuai jabatan (%)	18,45	1.247.500.000
5	03	02	2.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5	25.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5	30.000.000
5	03	02	2.01	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Larantuka,	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	350.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	325.000.000
5	03	02	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7	40.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7	30.000.000
5	03	02	2.01	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15	10.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	30.000.000
5	03	02	2.01	Pengelolaan Data Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5	30.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5	25.000.000
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN				430.000.000	Mutasi dan Promosi ASN				570.000.000
5	03	02	2.02	Pengelolaan Mutasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2	30.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2	30.000.000
5	03	02	2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	50.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	50.000.000
5	03	02	2.02	Pengelolaan Promosi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	350.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	450.000.000
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				200.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN				170.000.000
5	03	02	2.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	40.000.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	40.000.000
5	03	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Luar Wilayah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	100	110.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Luar Wilayah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	20	70.000.000
5	03	02	2.03	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Larantuka	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	100	50.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Larantuka	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	50	60.000.000
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				105.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				67.500.000
5	03	02	2.04	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	35.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Larantuka,	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	25.000.000

5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Larantuka,	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	20	35.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Larantuka,	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	21	22.500.000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Larantuka,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20	35.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Larantuka,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	21	22.500.000
5	04				Pendidikan dan Pelatihan				700.000.000	Pendidikan dan Pelatihan				150.000.000
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	14,68	700.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	18,45%	150.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				700.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				150.000.000
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Larantuka,	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	35	50.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Larantuka,	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	35	50.000.000
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Luar Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	650.000.000	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Luar Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	100.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2023. Usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan pada 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat pada wilayahnya masing-masing yang sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi Masing-masing OPD, Namun untuk OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tidak ada Usulan program /kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

RKP tahun 2024 memuat prioritas dan kebijakan pembangunan nasional. Sebagai RKP tahun terakhir dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP mengusung Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. Sesuai dengan tema RKP 2024 tersebut maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah Kebijakan yang meliputi : (1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan (4) Penguatan Daya saing Usaha (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (8) Pelaksanaan Pemilu 2024. Kedelapan arah Kebijakan tersebut diatas pada point Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Daya Saing, memiliki korelasi manakala dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur sebagai leading sektor pengelolaan kepegawaian daerah. Isu nasional Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan dapat membantu dan memperkuat SDM di kabuapten Flores Timur, yang mana menjadi salah satu fokus pekerjaan BKPSDMD pada tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang termuat pada rencana strategis BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Sebagai Tahun Kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian Sasaran tahun kedua dari setiap tujuan Flores Timur Tahun 2023-2026. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berperan pada Tujuan /sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator Sasaran Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi jabatan yang dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel III.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan (%) Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 tersebut maka dirumuskan program dan kegiatan Prioritas Tahun 2024 yang dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut.

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024 (Tahun Rencana)					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	
53	54	04	04	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDN DAERAH	3	4	5	6	7	8	9	10	
									150.000.000				1.428.000.000	
5	04				Pendidikan dan Pelatihan				150.000.000				1.428.000.000	
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjenjangan Sesuai Jabatan(%)			150.000.000				1.428.000.000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				150.000.000				1.428.000.000	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	Larantuka, Luar wilayah Flotim	35	50.000.000	APBD II (DAU)		85	1000.000.000	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	Larantuka, Kupang, Surabaya	2	100.000.000	APBD II (DAU)		2	1.328.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis BKPSDMD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BKPSDMD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan pada Daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 terdapat pada tabel IV.1 sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
5-3	5-4	0-0	0-0	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			4.972.309.464						6.436.468.656	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.574.809.464						3.513.468.656	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.574.809.464					100	3.513.468.656	
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100		
						Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						100		
						Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						100		
x	xx	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		56.000.000						97.500.000	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	10.000.000	
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	12.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.000.000	

N	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	17.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		7	60.000.000
x	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	5	12.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		5	17.500.000
x	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		3.187.089.464					3.026.050.000
x	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	3.110.289.464	Larantuka	APBD II (DAU)		43/12	2.988.050.000
s	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	64.800.000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	37.500.000
x	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	12.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	500.000
x	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1	20.000.000					12.000.000
x	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	3.000.000
x	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	4.000.000
x	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		8	5.000.000

				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	4.000.000	Larantuka,	APBD II (DAU)			1	5.000.000
X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			50.000.000						25.000.000
X	XX	01	2.07	Pengadaan Mebel		Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)		15	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	15.000.000
X	XX	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)		2	35.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	10.000.000
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.200.000						43.640.608
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)		12	1.200.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	3.040.608
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)		12	41.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	31.000.000
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)		12	18.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	9.600.000
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			40.500.000						22.978.048
X	XX	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		6	26.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	13.978.048
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)		10	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	2.000.000
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	2.000.000
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		1	4.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	5.000.000
5	03			Kepegawaian					1.247.500.000						1.425.000.000

Program Kepegawaian Daerah				Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)				1.247.500.000				18,45				1.495.000.000			
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				18,45				1.247.500.000				1.495.000.000			
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				5	30.000.000				Larantuka,	APBD II (DAU)	30.000.000			
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2	325.000.000				Larantuka,	APBD II (DAU)	400.000.000			
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				7	30.000.000				Larantuka	APBD II (DAU)	70.000.000			
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				15	30.000.000				Larantuka	APBD II (DAU)	15.000.000			
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian				5	25.000.000				Larantuka	APBD II (DAU)	30.000.000			
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					570.000.000						540.000.000			
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN				2	30.000.000				Larantuka,	APBD II (DAU)	30.000.000			
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				4	50.000.000				Larantuka,	APBD II (DAU)	110.000.000			
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN				3	490.000.000				Larantuka,	APBD II (DAU)	400.000.000			
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN					170.000.000						260.000.000			
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2	40.000.000				Larantuka,	APBD II (DAU)	40.000.000			

Lanjutan ASN				Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)				Luar Wilayah				APBD II (DAU)				100				120.000.000				
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)				Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang).				Larantuka				100				100.000.000			
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																150.000.000			
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)				Larantuka,				2				55.000.000			
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)				Larantuka,				20				45.000.000			
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)				Larantuka,				20				50.000.000			
5	04				Pendidikan dan Pelatihan																1.428.000.000			
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat penjenjangan sesuai jabatan								18,45				1.428.000.000			
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																1.428.000.000			
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota				Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)				Larantuka,				35				50.000.000			
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)				Luar Wilayah				2				1.328.000.000			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memperhatikan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yang dapat dilaksanakan ke depan adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penataan administrasi umum, perencanaan serta peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Flores Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,


Rufus Koda Teluma, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005

**“RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERATURAN BUPATI	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPPPD	35
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi	41
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPPPPD	56
3.3 Program dan Kegiatan	57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

61

BAB V PENUTUP

74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 36

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RIKPD Tahun 2023 44

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BPPPD Tahun 2024 57

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju
Tahun 2025 59

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju
Tahun 2024 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran	1
---	---

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNYA, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan rencana kerja Tahun 2024 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana kerja resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Selain itu Renja tahun 2024 merupakan renja tahun kedua dalam periode RPD 2023-2026.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPPPD Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini guna membantu meningkatkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apolonia Corebima, S.E. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907181997032002



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD.
- (3) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

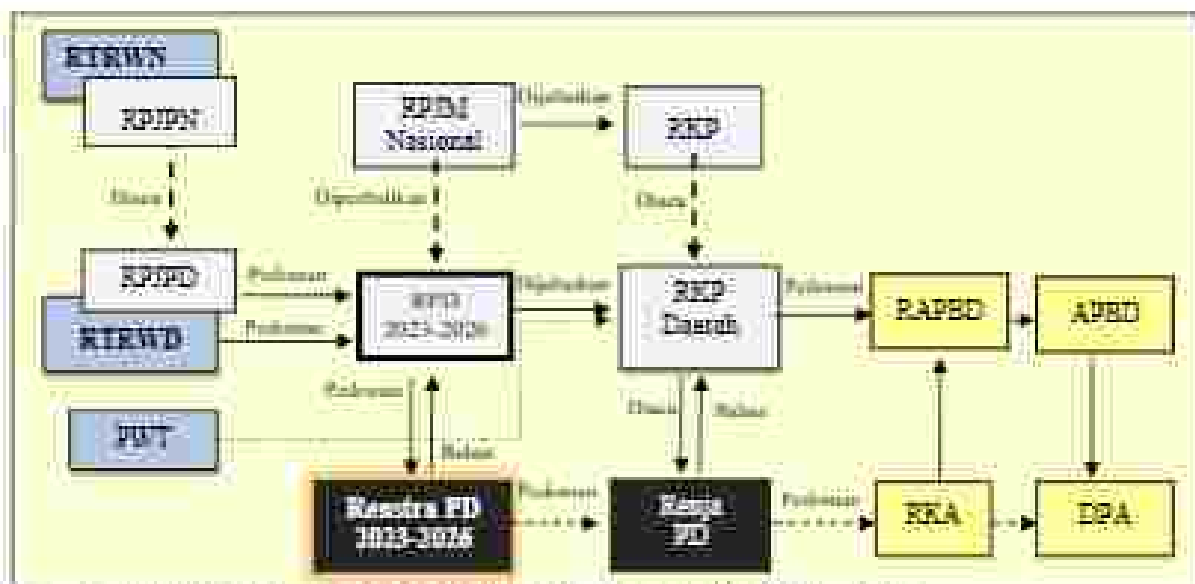
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat

Daerah/linfas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterkaitan Renja PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TKJ

NIP. 19780426 200212 1 007

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
18. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rentra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Flores Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah s- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun s-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Renstra 2017-2022																
01	04	040	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						95,4					
1	01				Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						85					
1	01	01			Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	74,07	100	100,40	100					
						- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	68,15	100	88,53	100,00					
						- Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	24	6	5	2	40					
						- Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	30	27	8	8	100					
						- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (dokumen)										

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12-13	14-15-16	
						- Jumlah tenaga peneliti dan 6 tema hasil penelitian yang dipublikasikan (Orang)	0	1							
1	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30	27	9	9	100,0				
1	11	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiatif Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengumpulan dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD (dokumen)	30	27	9	9	100,0				
1	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		60	36			100				
1	11	01	2.02	02	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)			14	14	100,00				
1	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	60	48	12	12	100				
1	11	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1	11	01	2.03	01	Pendidikan dan Peningkatan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Lulusan Daerah yang mengikuti Diklat (Orang)	25	4							
						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)			3	2	40,00				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peningkat Daerah s.d Rerje Peningkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12-13	14	15	
						Peningkatan Kapasitas Kalambezzan Lutheng Daerah (Orang/dokumen)	5	1								
						Jumlah penelitian yang di publikasikan (dokumen)	4									
1	01	01	2.08		Administrasi Umum Peningkat Daerah		100									
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkat Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penierangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)	3	3	3	3	100.00					
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	3	2	2	2	100					
						Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	28	28	10	10	100.00					
1	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	140	121	14	14	100.00					
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	160	140	28	28	100.00					
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah paket barang cetak dan penggunaan (lambor)	7862	5750	73855	94516	128.58					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah s.d 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12-13	14	15
6	64	61	2.66	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (eks)	3857	1410	2	2	100,00				
6	64	61	2.66	02	Realisasi Kunjungan Timu	Jumlah makan dan minum yang disediakan (poror)	13071	5612	750	916	122,13				
6	64	61	2.66	03	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	275	240	45	33	117,78				
6	64	61	2.67		Pengadaan Barang Milik Daerah Pentunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0,00				
6	64	61	2.67	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	7								
6	64	61	2.67	02	Pengadaan Mebelur	Tersedianya mebelur yang diadakan (unit)	131	15							
6	64	61	2.68		Penyediaan Jasa Pentunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi pemerintahan (%)					100,00				
6	64	61	2.68	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	4373	1988	100	100	100,00				
6	64	61	2.68	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	48	12	12	100				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Kemara Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah s- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-14-15	11-100	
6	61	61	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	20	18	19	19	100				
6	61	61	2.09		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemerintah Daerah										
6	61	61	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Perak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diurus/ jasa perbaikan (unit)	18	18	18	18	100.0				
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit)	18	18	3	3	100.0				
7	61	61	2.09	04	Pemeliharaan/Reha- bitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100				
						Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	1	1							
6	61	61	2.09	10	Pemeliharaan/Reha- bitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan gedung kantor yang terpelihara (unit)	74	60	12	12	100.00				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Kampanye Peningkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	04	01	2.00	1.1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	22	22	15	15	100.00				
5	01				Perencanaan						100.00				
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						100.0				
						Jumlah dokumen data dan informasi (dokumen)	5	4	1	1	100.0				
						Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)	10	12	14	14	100.0				
						Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan (orang)	500	411	100	100	100.0				
						- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)	50	32	4	4	100.0				
						- Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	1000	800	200	200	100.0				
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						133.33				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelitian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)	500	411	100	100	100				
						- Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu (PERDA)	1								
						Jumlah event penilaian penghargaan pembangunan daerah yang diikuti (gali)			2	2	100				
2	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	1000	900	200	200	100.0				
3	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan rancangan awal RKPD tahunan n-1 (dokumen)	15	12	3	3	100.0				
						Jumlah dokumen rancangan RPJPD (dokumen)									
4	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						100				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Peningkat Daerah s.d Rencana Peningkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12	13
1	41	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen)	5	4	1	1	100				
2	01	02	2.02	02	Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)	60	36	12	12	100				
						Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)									
3	41	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku profil(buku)	5	4	1	1	100				
						Tersedianya data informasi geospasial dan koordinasi penataan (bulan)	60	12							
7	41	02	2.02		Pengendalian, Evaluasi dan Pelemparan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						100.0				
14	01	02	2.02	04	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelemparan Pembangunan Daerah di	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)	10	8	2	2	100				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah s.d 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
						1	2	3	4	5	6	7	8-9	10-11		
						Kabupaten Kota										
							Jumlah dokumen evaluasi Mithram RPJMD (dokumen)	1								
							Jumlah dokumen evaluasi RPJPD (dokumen)									
9	41	02	2.03	02		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dunia usaha Lembaga yang dilakukan kerja sama (LSM/NGO)	16	12	14	14	100.0				
3	41	02	2.03	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Manev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (dokumen)	10	8	2	2	100				
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						100.00				
5	41	03					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen)	25	20	7	7	100.00				
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	30	15	6	6	100.00				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peningkat Daerah s.d Renc Peningkat Daerah n- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12	13	
						Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	40	23	3	3			100.00 100.00		
3	01	01	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat		23	20	7	7					
3	01	02	2.01	01	Koordinasi Peryusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->pemerintahan		1	3	3			100		
3	01	03	2.01	03	Koordinasi Peryusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Masyarakat (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->sosial budaya	20	15	3	3			100		
3	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peryusunan Dokumen	Jumlah laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan (dokumen)	5	4	1	1			1		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah s.d 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-12	9	13-14-15	11-100	
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
1	41	42	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)		30	16	6	6	100				
2	41	43	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Berlaku dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	30	15	3	3	100				
3	41	43	2.02	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Berlaku dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi -->SDA (dokumen)		1	3	3	100				
4	41	44	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kendayahan		40	23	4	4	100.00				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah n- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-1 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12-13	14-15-16	
3	01	01	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	35	14	3	3	100.00				
7	04	01	2.04	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi/ Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Dokumen) Lanjutan PAMSIMAS III (Paket)	5	0	1	1	100.00				
7	2				URUSAN KEUANGAN			4							
8	2	1			Program pengelolaan Keuangan Daerah										
			2	1	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan KUA dan PPAS (dokumen)	20	6							
4	01				Penelitian dan Pengembangan		20	2	1	1	100				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pengantar Daerah s.d Rencana Pengantar Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	9	10-11-12	13-14	
1	01	01			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang di kembangkan sesuai dengan 5 tema (dokumen)	20	2	1	1	100				
2	01	01	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)	4	0	1	1	100				
3	01	01	2.01	11	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen) -> DikRed	4		1	1	100				
4	01	01	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)	4	2							
5	01	01	2.01	14	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen) -> Pertanian	4	2							
6	01	01	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		12	0	0	0					
7	01	01	2.04	11	Penelitian, Pengembangan dan Peraknyaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang IPTEK (dokumen)	4								

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Kemara Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah s.d 5(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat							
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
						2	3	4	5	6	7	8-9*	9	10-11+*	11-100%								
							Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan (dokumen)	4															
					11	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup (dokumen)	4															

B. Renstra 2023-2026

0.0	0.1	0.0	0.0			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		-					-	100	76	
4	3.5	9				Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	-	-	-	-	100	100	100	
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
							Persentase Keterwakilan Siswa dan Prakerum Apasmas (%)	78	-	-	-	-	73	73	73	
							Persentase ASN yang memiliki kesetaraan kompetensi (%)	92	-	-	-	-	53,8	53,80	36	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkembangan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	9	10-11-12	11-12-14	
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
X	XX	41	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	50	-	-	-	-	13	13	26	
A	XX	41	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	-	-	-	-	2	2	22	
C	XX	41	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8	-	-	-	-	2	2	25	
A	XX	41	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	-	-	-	-	5	5	29	
C	XX	41	2.01	04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	-	-	-	-	4	4	25	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Peningkat Daerah s.d Rencana Peningkat Daerah s.d 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9*	9	10-11+*	12-13+*	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	12	-	-	-	-	3	3	25	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	14	-	-	-	-	14	14	100	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	-	-	-	-	2	2	40	
X	XX	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)	3	-	-	-	-	2	2	25	
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	39	-	-	-	-	6	6	15	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (tahun periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Tingkat Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X	XX	01	2.02	01	Penyusunan Perencanaan Kebumuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang daerah milik SKPD (Dokumen)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
				02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24	-	-	-	-	4	6	25	-	
X	XX	01	2.00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	-	-	-	-	3	3	38	-	
X	XX	01	2.00	01	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	-	
X	XX	01	2.00	03	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	21	-	-	-	-	12	12	24	-	
X	XX	01	2.00	04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	-	-	-	-	3	3	38	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah n- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	9	10-11+12-13	11-100	
X	XX	01	2.01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (orang)	9	-	-	-	-	3	3	33	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
X	XX	01	2.08	01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik Penetrangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penetrangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	-	-	-	-	3	3	100	
X	XX	01	2.09	02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	3	-	-	-	-	4	4	133	
X	XX	01	2.08	03	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	-	-	-	-	4	4	100	
X	XX	01	2.08	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diiapkan(paket)	3	-	-	-	-	3	3	66	
X	XX	01	2.00	05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	3	-	-	-	-	3	3	100	
X	XX	01	2.00	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	-	-	-	-	12	12	25	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peningkat Daerah s.d Revisi Peningkat Daerah s.d 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-14-15	11-100	
X	XX	01	2.08	01	Fasilitasi Kunjungan Tama	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tama (laporan)	8	-	-	-	-	2	2	25	
X	XX	01	2.08	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	40	-	-	-	-	12	12	30	
X	XX	01	2.09	01	Penstrukturan Arisp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penstrukturan Arisp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.08	01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	-	-	-	-	-	-	-	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	70	-	-	-	-	73.17	73.17	94	
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Mebelur	Tersedianya mebelur yang disediakan (unit)	13	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	-	-	-	-	2	2	17	
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peningkat Daerah s.d Renja Peningkat Daerah s- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Ket
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	TITIK KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	XX	01	2.05	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	-	-	-	-	4	4	80	-
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	-
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	42	-	-	-	-	12	12	28	-
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	42	-	-	-	-	12	12	28	-
X	XX	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	43	-	-	-	-	12	12	28	-
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	91	-	-	-	-	85	85	93	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Kemara Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah s.d 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-13-15	11-100	
X	XX	01	2.00	01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya (Unit)	18	-	-	-	-	18	18	100	
X	XX	01	2.00	01	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	73	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	26	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.00	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.00	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	-	-	-	-	1	1	100	
X	XX	01	2.00	18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	71	-	-	-	-	14	14	20	
X	XX	01	2.00	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	3	-	-	-	-	3	3	100	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pengantar Daerah s.d Rencana Pengantar Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-14 + 15	11-100%	
1	24					Perencanaan		-	-	-	-	-				
3	41	42				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		-	-	-	-	-				
							Persepsi umun masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
							Persepsi realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
7	84	85	241			Penyusunan Perencanaan dan Pemanduan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota yang Disiapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD) (Dokumen)	10	-	-	-	-	3	3	30	
8	88	89	241	91		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD- RKPD (Sesuai Ketuntasan Ikt RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6	-	-	-	-	2	2	33	
9	84	92	241	93		Koordinasi, Pengolahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2021)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-1 (2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Ket
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9%	9	10-11 s.d 12	11-100%	
					Dokumen Keputusan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	4	-	-	-	-	1	1	25	
1	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	4	-	-	-	-	1	1	25	
2	01	03	2.01	01	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab Kota (berita acara)	4	-	-	-	-	1	1	25	
3	01	03	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	1.500	-	-	-	-	1.600	1.600	89	
4	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota yang Ditetapkan (RPJPD RPJMD/RKPD (Dokumen)	10	-	-	-	-	3	3	30	
5	01	01			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	4	-	-	-	-	1	1	25	
6	01	01	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	-	-	-	-	1	1	100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pembangun Daerah s.d Rencana Pembangun Daerah s.d 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9%	9	10-11+%	12-13%	
					Kabupaten Kota										
1	01	02	2.01		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
2	01	02	2.01	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	13	-	-	-	-	2	2	12	
3	01	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerjasama)	16	-	-	-	-	13	13	81	
4	01	02	2.01	03	Monitoring, Evaluasi dan Peryusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)	8	-	-	-	-	5	5	63	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	8	-	-	-	-	2	2	25	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pembangun Daerah s.d Rencana Pembangun Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-14 n-2	11-100%	
3	41	02	204	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	
3	41	02	204	01	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	
3	41	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
3	41	03	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
3	41	03	201	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkembangan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12	13	
3	41	42	201	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	13	-	-	-	-	13	13	100	
3	41	42	201	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	4	-	-	-	-	1	1	25	
3	41	42	201	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD-RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	4	-	-	-	-	1	1	25	
3	41	42	201	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manual yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan	4	-	-	-	-	1	1	25	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-13+14	15-100		
					Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RKPD)										
3	41	01	201	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	6	-	-	-	-	6	6	100		
3	41	01	201	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6	-	-	-	-	6	6	100		
3	41	01	201	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	-	-	-	-	4	4	25		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Ket
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
					1	2	3	4	5	6	7	8-9	10	11-12	
3	41	01	2.62		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi program RPMD ke Renstra dan RKPD ke ranja bidang perekonomian dan SDA (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
3	41	01	2.62	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPMD, RPMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	
3	41	01	2.62	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana Ranja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	4	-	-	-	-	4	4	100	
3	41	01	2.62	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Ranja Bidang Perekonomian	4	-	-	-	-	4	4	100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-13-15	11-100	
1	01	01	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD/RPMD pada Sidang Perencanaan (Laporan)	4	-	-	-	-	1	1	25	
2	01	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPIP, RPMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPIP, RPMD dan RKPD) (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	
3	01	01	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	-	-	-	-	5	5	100	
4	01	01	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	-	-	-	-	5	5	100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Ket
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-14-15	16-100	
1	01	01	2.02	01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Rencana dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	-	-	-	-	1	1	25	
2	01	01	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kawilayahan	Persentase konsistensi program RPMD ke Rencana dan RKPD ke rencana bidang Infrastruktur dan Kawilayahan (%)	100	-	-	-	-	100	100	100	
3	01	01	2.05	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPMD, RPMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	
4	01	01	2.07	01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana Rencana Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	-	-	-	-	4	4	100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana Perangkat Daerah n- 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Ket
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Target Kinerja RENJA Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	01	01	2.01	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	-	-	-	-	4	4	100	
9	01	01	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD-RPMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	4	-	-	-	-	1	1	25	
9	01				Penelitian dan Pengembangan			-	-	-	-				
9	01	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			-	-	-	-				
						Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	5	-	-	-	-	1	1	20	
						Jumlah Inovasi yang dinasilkan (Dokumen)	12	-	-	-	-	3	3	25	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1	-	-	-	-	1	1	100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Peningkat Daerah s.d Rencana Peningkat Daerah s.d 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana sampai Tahun berjalan		Cat
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
					1	2	4	5	6	7	8-10	9	11-13-15-6	11-100	
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	-	-	-	-			-	
3	05	02	3.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	25	
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	-	-	-	-			-	
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1	-	-	-	-			-	
3	05	02	3.03	14	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Dokumen)	1	-	-	-	-	1	1	100	
					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	-	-	-	-			-	
3	05	02	3.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	-	-	-	-	3	3	25	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Kemara Perangkat Daerah s.d Revisi Perangkat Daerah s.d 3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		Cat							
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					Target Kinerja RENJA Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1					2	3	4	5	6	7	8-10	9	11-14+15	11-100								
				11	Penelitian, Pengembangan, dan Perekryasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekryasan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	12	-	-	-	-	3	3	25								

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra periode 2017-2022 sedangkan tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2023-2026. Kondisi ini mengakibatkan ada perbedaan pada target dan indikator program serta sub kegiatan.

Hasil pelaksanaan Renja 2022 dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2022 dapat dicermati pada Tabel II.1 dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja yang tidak memenuhi target kinerja pada program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- b. Realisasi kinerja sebagian besar program pada tahun 2022 relatif terpenuhi.
- c. Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja pada beberapa sub kegiatan pada program penunjang
- d. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya tidak dilakukan penyesuaian kembali antara target kinerja dan anggaran yang disediakan. Faktor penyebab tercapainya target kinerja diantaranya tersedianya sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, adanya rencana pelaksanaan kegiatan serta adanya kerjasama dengan banyak pihak baik secara internal maupun lintas sector dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor penyebab realisasi kinerja melebihi target pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi yakni semakin sering dilakukan koordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan mengakibatkan meningkatnya realisasi kinerja pada output sub kegiatan tersebut.
- e. Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya capaian kinerja dari rencana yang sudah ditetapkan dalam renstra yakni
 - Tidak tersedianya aparatur yang memiliki kapasitas memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Komposisi dan kapasitas aparatur pada BPPPPD Kabupaten Flores Timur belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai aparatur perencana. Selain secara jumlah masih mengalami kekurangan apabila dibandingkan dengan hasil analisis beban kerja tahun 2019 dan secara kapasitas juga belum memadai karena sebagian besar pejabat fungsional belum

mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional. Sementara itu dari tahun 2018 sampai 2022 terdapat 6 tenaga yang ditingkatkan kapasitasnya dari target 24 orang.

- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung perencanaan dan penganggaran terutama adanya tuntutan penggunaan teknologi dan informasi dalam perencanaan yang semakin kompleks.
 - Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah
- f. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor penyebab tersebut yakni perlu adanya pengalokasian anggaran berdasarkan analisa kebutuhan pada BPPPPD terutama yang berkaitan dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang berdampak pada capaian etahusi secara renja maupun secara renstra serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan selalu memperhatikan capaian kinerja.

3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Flores Timur

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IOK	Target Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026												
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD:		✓	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke RKPD telah mencapai 100 % hingga tahun 2023 merupakan awal pelaksanaan RPJMD 2023-2026.
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)		✓	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Jumlah hasil kerkbang		✓	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan kajian Evaluasi RPJMD 2023-2025 Kabupaten Flores Timur dan hasilnya dimanfaatkan untuk penyusunan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												rancangan awal RPJPD periode berikutnya yang dimulai tahun 2023.
4	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah (%)		√	50	100%	100%	100%	12,34		100%	100%	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah belum mencapai 100 % karena belum semua kebijakan inovasi ditetapkan di daerah.
Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan Penunjang sesuai Permendagri 66 Tahun 2017												
Penunjang Urusan												
1	Perencanaan Pembangunan											
1-01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RPJPD sudah tersedia dan masih berlaku

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IOK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RPJMD sudah tersedia dan masih berlaku. Untuk tahun 2023-2025 menggunakan RPD 2023-2025
1.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RKPD dihasilkan setiap tahun
1.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	Dokumen RTRW bukan lagi menjadi kew. di tingkat BPPP namun oleh Dinas PUPH
1.05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke RKPD telah mencapai 100% hingga tahun 2023 merupakan awal pelaksanaan RPD 2023-2025.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD		√	100%	100%	100%	100%	95,16		100%	100%	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke RKPD telah mencapai 100 % karena dipengaruhi oleh penyusunan anggaran terhadap prioritas pembangunan.
4	Penelitian dan Pengembangan											
4.01	Persentase implementasi rencana kegiatan		√	80 %	100%	100%		100%		100%	100%	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah belum mencapai 100 % karena belum semua kebijakan inovasi diterapkan di daerah.
4.02	Persentase pemanfaatan hasil kegiatan		√	100%	100%	100%		100%		100%	100%	
	Penerapan SIDA											
4.03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		√	50	9,39	12,5	15,6	6,12		12,5	15,6	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IOK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		√	50	100%	100%	100%	12,34		100%	100%	

Dari table II.2 dapat diketahui bahwa untuk penunjang urusan perencanaan pembangunan, ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RTRW pada indikator kinerja tahun 2021 dan 2022 ada, karena dokumen tersebut telah tersedia pada tahun sebelumnya. Untuk dokumen RTRW bukan lagi menjadi kewenangan BPPPPD namun sudah menjadi tanggungjawab Dinas PU-PR. Dengan demikian dokumen tersebut sudah ada, dan masih berlaku selama tahun 2018-2022. Selain ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2022 sebesar 100 % karena merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD tahun 2023-2026, sedangkan konsistensi penjabaran RKPD ke APBD Tahun 2022 sebesar 95,16 %. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan anggaran yang berkaitan dengan adanya prioritas pembangunan yang turut mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran.

Selain urusan perencanaan, BPPPPD juga melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk tahun 2022 BPPPPD menyelenggarakan kegiatan penelitian pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul kajian Evaluasi Kebijakan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. kerjasama dengan pihak Universitas Nusa Gendara Kupang. Untuk penerapan SIDA belum mencapai target karena masih rendahnya penerapan inovasi di daerah.

1.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan hasil evaluasi renja dan renstra perangkat daerah serta analisis kinerja pelayanan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan, tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

- a. Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta dokumen yang dihasilkan belum optimal yang mengakibatkan rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
- b. Belum adanya dukungan data yang memadai berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan rendahnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi disebabkan oleh penyusunan dokumen perencanaan belum berkualitas (target dan sasaran tidak jelas, tidak terukur), tidak partisipatif dan tidak tepat waktu.
- c. Belum adanya sistem pengembangan SDM perencana dan penelitian serta analisis kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, serta kurangnya respon terhadap posisi evaluasi, penelitian dan kajian serta inovasi dalam proses perencanaan mengakibatkan lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025.

BPPPPD sebagai sebuah lembaga teknis daerah yang bertugas membantu pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah yang mengemban tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang ke 4 (empat) yakni, *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, dengan sasaran *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pemerintahan pelayanan public*.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah membutuhkan perhatian yang lebih serius dan lebih fokus karena ada tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan selalu berubah-ubah;
2. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan semakin menurun.
3. Kebutuhan data dan informasi untuk perencanaan semakin kompleks.
4. Terbatasnya kewenangan pejabat perencana pada masing-masing OPD
5. Koordinasi yang belum maksimal antar OPD (*ego-rector*)
6. Tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Adanya koordinasi dan pendampingan dari pemerintah tingkat pusat dan provinsi semakin intens.
2. Berlakunya Undang-Undang Desa yang memberi kewenangan perencanaan dan penganggaran pada desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Penggunaan aplikasi data dan informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya perubahan struktur dan tata kerja organisasi.
5. Pelaksanaan forum lintas sector
6. Peningkatan kapasitas ASN

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
3. Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antar rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan hasil konsultasi public.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dilakukan dengan mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target asaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan EPPPPD sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat perbedaan jumlah sub kegiatan, anggaran dan kinerja antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Selain adanya penambahan anggaran pada hasil analisis dikarenakan oleh adanya penambahan volume target kinerja, bertambahnya anggaran juga dipengaruhi oleh standar biaya yang semakin meningkat pada tahun 2024. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk tahun 2024 tidak ada usulan dari masyarakat untuk program dan kegiatan masyarakat yang ditujukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 memuat prioritas dan kebijakan pembangunan nasional. Sebagai RKP tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 mengusung tema *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"* dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing Usaha, Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Pelaksanaan Pemilu 2024.

Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yakni (1) *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan*, (2) *Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan*, (3) *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing*, (4) *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan*, (5) *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar*, (6) *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim*, dan (7) *Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik*.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur mengemban PN (7) dimana PN (7) dilaksanakan melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, Reformasi Birokrasi dan tata kelola Program yang mendukung diantaranya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika diimbangi oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPPPPD

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tujuan dan sasaran Renja BPPPPD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renja
BPPPPD Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2024
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100
	Meningkatnya hasil ketibangan	Jumlah hasil ketibangan	1 dok
	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan renja dalam periode Renstra 2023-2026. Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPPPD selama satu tahun ke depan merupakan penerjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dalam upaya

reformasi birokrasi yang didasarkan pada arah kebijakan dan permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah terlihat dalam dokumen RKPD tahun 2013 yakni pada prioritas Reformasi birokrasi, dengan sasaran (1) meningkatnya koordinasi lintas sector dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah (2) meningkatnya inovasi daerah.

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel III.2 berikut :

RAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja sangat penting yakni sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan dokumen rencana kerja resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pada tahun anggaran 2024 ini terdapat 4 program, 17 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 5,489,661,104, seperti yang terlihat pada table IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.5.01.5.0 0.02.0000	DAFTAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5.455.571.104,00					5.547.104.250,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100,00	2.791.871.104,00			Penunjang Prioritas	100,00	3.200.587.250,00
		Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	73,20					75,00	
		Persentase ASN yang Memiliki Kecakapan Kompetensi (%)	73,08					82,31	
		Persentase Pencapaian dan Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100,00					100,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			91.000.000,00			Penunjang Prioritas		100.557.600,00
5.01.01.2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	15.000.000,00	(Kabupaten / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana: Daerah Utama-DAN	Penunjang Prioritas	3	67.740.900,00
5.01.01.2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	12.000.000,00	(Kabupaten / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana: Transfer Utama-DAN	Penunjang Prioritas	1	10.805.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	12.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	4	16.214.000,00
5.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	4	6.313.500,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.143.400.314,00			Peningkat Prioritas		3.387.101.354,00
5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25/14	1.667.000.314,00	(LOKASI/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	25/14	1.230.671.634,00
5.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	71.300.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	1	46.314.200,00
5.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3	15.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	3	15.913.500,00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			Peningkat Prioritas		25.913.500,00
5.01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	1	5.000.000,00
5.01.01.2.03.006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	4	10.000.000,00
5.01.01.2.03.008	Pondokan/Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pendaftaran/Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	1.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	2	10.913.500,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			68.060.000,00			Peningkat Prioritas		88.338.881,00
5.01.01.2.05.003	Pendidikan dan Pengajaran Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengajaran Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	1	5.304.500,00
5.01.01.2.05.005	Monevring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja Pegawai (Dokumen)	13	8.000.000,00	(LAPORAN/ OPD) KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkat Prioritas	13	10.452.500,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	5	50.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	22.579.581,00
5.01.01.2.06	Administratif Umum Perangkat Daerah			183.000.000,00			Penunjang Prioritas		300.252.996,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.000.000,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	8.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	8.400.000,00
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	6.467.200,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	30.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	36.900.000,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	37.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	78.301.267,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	2.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.101.800,00
5.01.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	35.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	41.578.690,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000,00	Dalam Rangka Lur Daerah KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	101.048.080,00
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.250.000,00
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.980.000,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		72.800.000,00
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	80.000.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	72.800.000,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			185.500.000,00			Penunjang Prioritas		258.000.000,00
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.550.000,00	Larantuka / OPD KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.201.350,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	80.000.000,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	84.872.000,00
5.01.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	102.400.000,00
5.01.01.2.00	Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.570.130,00			Penunjang Prioritas		108.381.000,00
5.01.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemaman Kendaraan Gerns Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	18	65.470.100,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	PENDAPATAN ASL/DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	36	73.338.000,00
5.01.01.2.00.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	2.000.000,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	10.600.000,00
5.01.01.2.00.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.000.000,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	21.218.000,00
5.01.01.2.00.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.800.000,00
5.01.01.2.00.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	00	5.000.000,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	77	18.000.000,00
5.01.01.2.00.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	7.500.000,00	Larasika / OPD KAB FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.600.000,00
5.01	PERENCANAAN			2.397.790.000,00					2.215.753.000,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan mazyarakat yang diakomodir dalam APBD (%) Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RPMD yang diakomodir dalam APBD (%)	100 100	1.325.800.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	100 100	1.585.580.000,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.400.800.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		1.115.380.000,00
5.01.03.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemutakhiran dan Iku Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RPMD (Sesuai Keputusan JWS RPJMD (Iku Rancangan Ramahotak) (Dokumen)	2	145.000.000,00	Larasika, K/pang JAWABA	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	44.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.02.2.01 0002	Koordinasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dukungan Kelembagaan Lainnya	Jumlah Tesisan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	51.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	27.500.000,00
5.01.02.2.01 0003	Penyelenggaraan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	38.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	27.800.000,00
5.01.02.2.01 0004	Koordinasi Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	27.500.000,00
5.01.02.2.01 0005	Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	137.600.000,00	19 Kecamatan, Larantuka dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	140.600.000,00
5.01.02.2.01 0006	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Uraian yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Uraian)	1000	40.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1000	21.900.000,00
5.01.02.2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disetujui (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	870.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	3	804.880.000,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			70.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00
5.01.02.2.02 0009	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	70.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	80.000.000,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			217.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		205.500.000,00
5.01.02.2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	80.000.000,00	Larantuka, Kupang	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	45.900.000,00
5.01.02.2.03 0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanannya (Kerja Sama)	10	80.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	10	35.000.000,00
5.01.02.2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berbasis Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	77.000.000,00	Larantuka, Kupang	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	105.000.000,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			130.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		122.100.000,00
5.01.02.2.04 (1)	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dilevel (Dokumen)	1	45.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	55.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	85.000.000,00	Forest Timur, Kubang Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	87.100.000,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGINISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Rencana dan RKPD ke Rerja (%)	100	571.950.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	100	620.189.000,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			270.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		248.405.910,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	40.000.000,00	Larangan, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	40.000.000,00
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	13	20.000.000,00	Larangan	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	13	20.548.500,00
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	20.000.000,00	SS Kecamatan, KAE FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	54.054.368,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas/Relasi/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.548.500,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	30.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	45.188.750,00
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	20.000.000,00	Larangan	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	20.548.500,00

KODE	PERANGKAT DAERAH/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.00.2.01.0007	Penaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	20.000.000,00	Larantuba	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	35.925.572,00
5.01.00.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Raja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	80.000.000,00	Larantuba, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	30.548.300,00
5.01.00.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perakohomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			130.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		246.766.159,00
5.01.00.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Perakonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perakonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Larantuba, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	47.668.000,00
5.01.00.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuba	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	30.548.300,00
5.01.00.2.02.0003	Penaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perakonomian (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuba	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	34.645.200,00
5.01.00.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perakonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Raja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perakonomian (Laporan)	1	25.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	30.548.300,00
5.01.00.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	47.668.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAGRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.00.2.02.0008	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang GDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	15.000.000,00	Larung	Dana Transfer Umum-DAU	Tidak Kelas Pemeliharaan	5	20.548.500,00
5.01.00.2.02.0007	Penaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	15.000.000,00	Larung	Dana Transfer Umum-DAU	Tidak Kelas Pemeliharaan	5	34.304.967,00
5.01.00.2.02.0009	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang GDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	25.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tidak Kelas Pemeliharaan	1	20.548.500,00
5.01.00.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			121.550.000,00			Tidak Kelas Pemeliharaan		125.613.905,00
5.01.00.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tidak Kelas Pemeliharaan	1	46.531.166,00
5.01.00.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	15.000.000,00	Larung	Dana Transfer Umum-DAU	Tidak Kelas Pemeliharaan	4	20.548.500,00
5.01.00.2.03.0003	Penaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	15.000.000,00	Larung	Dana Transfer Umum-DAU	Tidak Kelas Pemeliharaan	4	35.386.437,00
5.01.00.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	55.550.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tidak Kelas Pemeliharaan	1	20.548.500,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			300.000.000,00					100.838.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian yang difinansikan (Dokumen)	1	300.000.000,00			Tidak Kelas Pemeliharaan	1	100.838.000,00
		Jumlah inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3					3	

KODE	PERANAKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ISUE KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRASAJARAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
5.35.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			200.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		
5.35.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	200.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah/ KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan		
5.35.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		100.838.000,00
5.35.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	2	100.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah/ KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	100.830.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2024. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPPPPD Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPPPD Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi BPPPPD dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2024. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BPPPPD Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Tahun 2024.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur



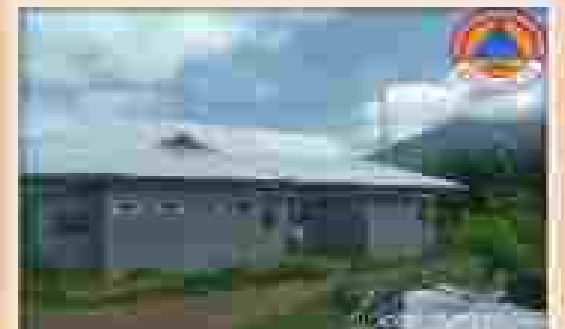
Arindiana Corebima, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196907181997032002



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

JLN. SARABITI – KEL. SAROTARI TIMUR TELP/FAX (0383) 22276
email : bpbd_kab.flotim@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023–2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja PD menjadi landasan atau pedoman bagi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja PD ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Flores Timur



ABDUR RAZZAQ JAKRA, SH

Penjabat Utama Muda

NIP. 19611203 199003 1 005

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERATURAN BUPATI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	3
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	3
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	29
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	35
2.5 PENELAAHAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	46
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	48
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2022	9
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel II.2.1	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Permasalahan Pelayanan Provinsi/Kabupaten/Kota	30
Tabel II.2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong K/L	32
Tabel II.4	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	36
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023Kabupaten Flores Timur	44
Tabel III.2	Tujuan dan Sasaran BPBD Kab. Flores Timur	48
Tabel III.2.1	Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan	49
Tabel III.3.1	Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah	50
Tabel IV.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	52



SALINAN

**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Mendukung :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengkadaan Kerasukan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 11, selajamane telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0022).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0065).
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2028 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024.

BAK/

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur selaja unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP4PD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang/perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintahan yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta arahan yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Mekanisme Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PMAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan dari RPD yang memuat arahan, kebijakan, strategi, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2024, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN RUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PERYELENGGANAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam merencanakan Rancangan Akdir Berja PD Tahun 2024; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan RPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Berja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BPPPD melakukan koordinasi antara Berja PD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.
- (2) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Berja PD Tahun 2024.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Juli 2023
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

|||

DONIS ALEXANDER RDU

Ditandatangani di Larantuka
pada tanggal 3 Juli 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

|||

PETRUS PEGO MANAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11

Sesuai dengan perintah
KEPALA DAERAH HUKUM


HERMANUS LOKA DATON
PEMERINTAH
NIP.19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja Organisasi Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

*Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*).*

Proses penyusunan Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Flores Timur. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berpedoman pada dokumen RKPD, dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan penanggulangan Bencana Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Ranstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dengan arah Pembangunan Nasional, Provinsi, dan mendukung arah perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;*

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tetang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

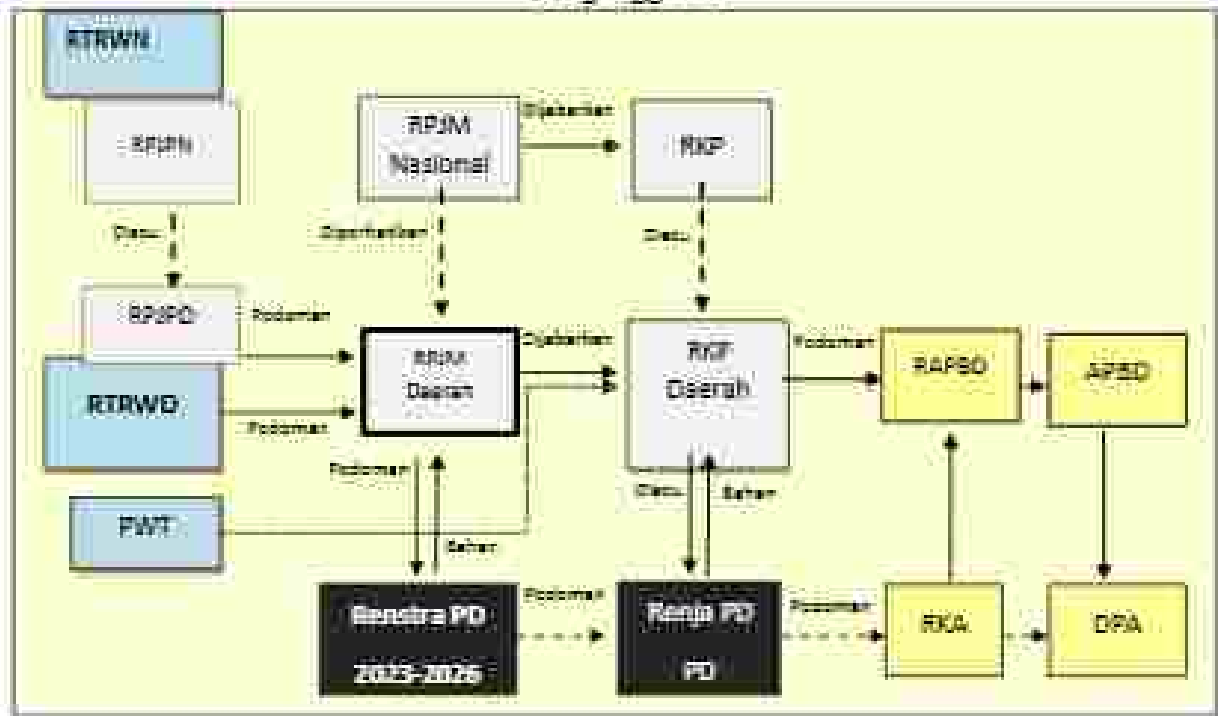
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Penyusunan RKPD ini mengacu pada RPIPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu juga menggunakan RENJA Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, pada tahapan penganggaran, RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan RAPBD. Dengan

demikian RKPD merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul ketekaitan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di Daerah.

Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1.1
Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 7 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pengjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan Daerah.

2. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur adalah:

A. Tujuan Internal

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2. Menyediakan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam masa sekarang dan yang ingin di capai pada periode Tahun 2024, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan.

B. Tujuan Eksternal

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Flores Timur yang berorientasi untuk pembangunan yang mengurangi kerentanan/risiko terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya Penanggulangan Bencana, baik dalam kondisi Pra Bencana, Saat Bencana, maupun Pasca Bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki perhatian yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Flores Timur.
4. Menintegrasikan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana dengan program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di Organisasi Perangkat Daerah lain, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

3. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan penaggulangan Bencana Daerah, agar substansi Antar Bab dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Memuat Tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Proses Penyusunan Renacana Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah, Keterkaitan Antara Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dokumen RKPD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Menguraikan Apa Yang Menjadi Landasan Hukum di Dalam Penyusunan Renacana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan Tentang Maksud Dan Tujuan Dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan Pokok Bahasan Dalam Penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta susunan Garis Besar Isi Dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan penanggulangan Bencana Daerah (di

perpanjang nama Organisasi Perangkat Daerah)

- 2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- 2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah**
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dan Penanggulangan Bencana Daerah**
- 3.3. **Program Dan Kegiatan**

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisa capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*Outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*Output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022). Rencana Kerja 2022 merupakan tahun Lima dari periode RPJM 2017– 2022. Terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan dalam penyusunan renja tahun 2018-2020 dengan penyusunan renja pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan pendekatan regulasi yang digunakan pada periode 2018-2020 adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan penyusunan renja tahun 2021 dan 2022 menggunakan Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
s.d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

[illegible]

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kode					Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023- 2025	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kebijakan Kegiatan sempai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan 2023					
D R D P A N	R E G I O N A L	S E K T O R	P R O G R A M	K E A Y A				Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)				
				1						2				3	4	5	6
1	11	01	1.01	01	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengadaan Yuridiksi Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Jasa Administrasi Keuangan(bulan)	60	12	12	100	12	36	60				
1	11	01	1.01														
1	11	01	1.01	01	Pengelolaan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah Kantor	Jumlah pengelolaan melalui bentuk perangkat kantor (bulan)	30	6	6	100	6	24	60				
1	11	01	1.01	04	Pengelolaan Belanja Logistik Kantor	Jumlah belanja jasa logistik Kantor (bulan)	30	10	10	7	40	31	7				
					Pengelolaan Belanja Logistik Kantor	Jumlah belanja jasa logistik Kantor (bulan)	30	10	10	40	100	31	60				
1	11	01	1.01	05	Pengelolaan Barang Eksternal dan Pengelolaan	Jumlah layanan barang eksternal dan pengelolaan (bulan)	30	12	12	100	12	36	60				
1	11	01	1.01	06	Pengelolaan Belanja Belanja dan Pemasangan Pemasangan	Jumlah belanja belanja (bulan)	1.475	1.000		600/70	1.000	1.100	40				
1	11	01	1.01	08	Fasilitas Kantor dan Fasilitas	Jumlah layanan dan fasilitas kantor dan (bulan)	1.000	100	100	100	11	1.100	71				
1	11	01	1.01	09	Pengelolaan Kapasitas Kantor dan Kantor	Pengelolaan Kapasitas Kantor dan Kantor (bulan)	11	11	10	20	91	11	60				
1	11	01	1.01		Pengelolaan Jasa Perangkat Umum Perangkat Daerah												
1	11	01	1.01	04	Pengelolaan Jasa Perangkat Umum Kantor	Jumlah layanan jasa perangkat dan jasa perangkat (bulan)	12	12	12	100	12	40	100				

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kode					Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Perangkat Daerah Tahun 2017- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebijakan Kegiatan sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan 2023		
A	B	C	D	E				F	G	H = (F/G)		I = (J+K+L+M)	N = (J/N)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (F/G)	9	10 = (J+K+L+M)	11 = (J/N)
1	01	01			Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		100%			100%		
1	01	01	01	01	Maintenance Unitas Perangkat Daerah	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Aparatur	8	0%	-					
1	01	01	01	02	Penyediaan Fasilitas dan Sarana (Kantor Kantor)	Merakit Fasilitas Gedung Kantor (Unit)	4	3	-			3	75	
1	01	01	01	03	Pembinaan Ruang Muka Daerah Penyediaan Unitas Perencanaan Daerah									
1	01	01	01	04	Penyediaan Jasa Pembinaan, Rupa Pembinaan, Pagar dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional dan	Jumlah unit kendaraan Operasional yang dipelham (Unit)	21	2	1	2	100	21	95	
1	01	01	01	05	Pembinaan Kelembagaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelham (Unit)	1	1	1	1	100	1	100	
1	01	01	01	06	Pembinaan Kelembagaan Gedung dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Perakitan gedung kantor yang dipelham (Unit)	20	11	15	4	-	15	75	
1	01	01	01	07	Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dehman laporan raport kinerja dan Keuangan OPD (Dehman)								
1	01	01	01	08	Kendaraan dan Perawatan Capaian Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Unitas Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (dehman)	40	2	10	2	50	42	55	
1	01	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran realisasi kinerja (%)	100%	95%		95%				

Keywords: EPPAD; Kabupaten Flores Timur; Tahun 2024

[illegible]

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kode					Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Kegiatan Program Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kegiatan Kabupaten Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Kabupaten Tahun 2023	Tertutupan Realisasi Capaian Target Rangka Pertanggungjawaban 2023			
A	B	C	D	E				F	G	H		I	J	K	L
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01	02			Peningkatan kualitas pemerintahan daerah (%)	100%	0								
2	01	02	101		Peningkatan Penyelenggaraan dan Efisiensi Kerja Birokrasi	Peningkatan kualitas pemerintahan daerah (%)	100%								
3	01	03	102	01	Kemampuan Kerja dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kota	Indikator kemampuan pemerintahan terdistribusi (Kualitas Pelayanan Masyarakat)	100%	0					0%		
4	01	03	103	01	Memperlancar Layanan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Melalui Aplikasi Komunitas	Indikator layanan administrasi dan pelayanan masyarakat terdistribusi (Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Komunitas)	100%	0	0%	0%	0%	0%	0%		
5	01	03	104	01	Memperlancar Layanan Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Melalui Aplikasi Komunitas	Indikator layanan administrasi terdistribusi (Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Komunitas)	100%	0			0%	0%	0%		
6	01	03	105	01	Pelayanan Pengaduan dan Kelengkapan Administrasi	Pelayanan administrasi pemerintahan terdistribusi (%)									
7	01	03	106	01	Memperlancar Pelayanan dan Efisiensi Kerja Birokrasi	Indikator pelayanan administrasi terdistribusi (Kualitas Pelayanan Masyarakat)	100%	0	0%	0%	0%	0%	0%		
8	01	03	107	01	Pelayanan Pengaduan dan Efisiensi Kerja Birokrasi	Pelayanan administrasi pemerintahan terdistribusi (%)									
9	01	03	108	01	Pelayanan Pengaduan dan Efisiensi Kerja Birokrasi	Pelayanan administrasi pemerintahan terdistribusi (%)									
10	01	03	109	01	Pelayanan Pengaduan dan Efisiensi Kerja Birokrasi	Pelayanan administrasi pemerintahan terdistribusi (%)									
11	01	03	110	01	Pelayanan Pengaduan dan Efisiensi Kerja Birokrasi	Pelayanan administrasi pemerintahan terdistribusi (%)									
12	01	03	111	01	Pelayanan Pengaduan dan Efisiensi Kerja Birokrasi	Pelayanan administrasi pemerintahan terdistribusi (%)									

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kode						Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Daerah Tahun 2023-2024	Realisasi Target Kinerja Saat Program dan Kegiatan berjalan sampai bulan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2023	Pencapaian Realisasi Capaian Target Realisasi Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan 2023		
A	B	C	D	E					F	G	H		I = (G/H)	J = (I - 100%)	K = (J/100%)
1.					2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10 = (8 - 9) %	11 = (100% - 9)	
1	a	b			Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke	Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100		27,5	27					
						Persentase Keterlibatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		21,7	18					
						Persentase ASN yang Memiliki Kualifikasi Manajemen (%)	100		24,7	22					
						Persentase Peningkatan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		14						
						Persentase Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64		100						
1	a	b	c	d	Peningkatan Dukungan Pemantauan Perangkat Daerah	Jumlah Dukungan Pemantauan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		100						
1	a	b	c	d	Koordinasi Peningkatan Dukungan RKA-APSD	Jumlah Dukungan RKA - APBD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Dukungan RKA APBD (Dokumen)	3		100						
1	a	b	c	d	Koordinasi dan Peningkatan Laporan Kinerja Kinerja dan Sistem Informasi Kinerja APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kinerja APBD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kinerja APBD (Laporan)	24		2						
1	a	b	c	d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24		2						

Revisi: Early EPSCs: Kompotasi: Flores: Desember Tahun 2024

Klasifikasi					Indikator Kinerja Program (Gurubawa Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2022- 2023	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kebijakan Kegiatan Sampai Selesai tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Rencana Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peningkatan Daerah s.d Tahun berjalan 2023	
No	Kode	Nama	Kategori	Target Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
2	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
3	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
4	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
5	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
6	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
7	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
8	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
9	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
10	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
11	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
12	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
13	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
14	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
15	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
16	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
17	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
18	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
19	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			
20	20	40	2.00	1	Administrasi Keuangan Peningkatan Daerah	100%		1	1	100%			

Revisi: Early EPSCs: Kompotasi: Flores: Desember Tahun 2024

[illegible]

Referensi: Early EPSCs Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Revisi: Early EPSCs: Kompotasi: Flores: Desember Tahun 2024

[illegible]

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kode						Indikator Kinerja Program (Substansi) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tahun 2023- 2025	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kegiatan Kegiatan Kinerja Kabupaten Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023	Pencapaian Realisasi Kegiatan Target Realisasi Pemerintah Kabupaten s.d Tahun Anggaran 2023	
1	2	3	4	5					Target Kinerja Program Kabupaten Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan s.d Tahun Anggaran 2023	Tingkat Kegiatan Realisasi Target Kabupaten (%)
1	05	05	242	04	Pengembangan Kualitas Tirta Berekur Cipta (TBC) (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Program TBC yang dikembangkan Kabupaten Kota s.d	100		40	77%				
1	05	05	242	04	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Kabupaten Kota dikembangkan yang Kabupaten (Kabupaten)	1		01	-				
4	05	05	242		Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kabupaten)	100		41					
1	05	05	245	02	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Program Berekur Cipta dan Berekur Cipta yang Kabupaten s.d	100		75,34	75%				
1	05	05	245	02	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Kabupaten Kota yang dikembangkan Kabupaten s.d	100		1	-				
1	05	05	245	04	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Kabupaten Kota yang dikembangkan Kabupaten s.d	100		94	94%				
4	05	05	245		Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kabupaten)	100		76	75%				
1	05	05	246	01	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Kabupaten Kota yang dikembangkan Kabupaten s.d	100		4	4%				
1	05	05	246	01	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Kabupaten Kota yang dikembangkan Kabupaten s.d	100		1	-				
1	05	05	246	04	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Kabupaten Kota yang dikembangkan Kabupaten s.d	100		15	15%				
1	05	05	246	04	Pengembangan Kualitas Berekur Cipta (Kawasan Kabupaten) Kota	Salah Kabupaten Kota yang dikembangkan Kabupaten s.d	100		4	4%				

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa masih banyak kegiatan yang belum memenuhi target renstra baik itu program rutin maupun program Penanggulangan Bencana Hal ini disebabkan ada beberapa hambatan antara lain:

1. Target yang dipasang dalam Renstra Terlalu Tinggi sehingga tidak tercapai dalam pelaksanaannya
2. Target yang dipasang dalam Renstra terlalu Tinggi Namun Dukungan anggaran masih sangat kurang sehingga berpengaruh langsung pada capaian yang sudah ditargetkan
3. Dalam tabel Datas Dapat terbaca Ada beberapa sub kegiatan yang capaiannya melebihi target hal ini disebabkan karena dalam perjalanan kebutuhan akan program bertambah (perubahan SBU dan SSH)
4. Untuk Program Penanggulangan Bencana Ada Beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan kaerasa keterbatasan anggaran
5. Untuk Tabel Renstra Tahun 2023-2026 Terkhusus Pada Tahun 2023 Capaian Untuk Dua Triwulan Sudah Bisa Dapat capai Namun Hasil Akhir Pada Penyelenggaraan Program Untuk Tahun 2023 Belum Bisa diukur karena masih dalam tahun berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menyusun dan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain melaksanakan kedua fungsi badan tersebut di atas, unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur juga menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian;
 - Pengkomandoan; dan
 - Pelaksana.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Flores Timur.

c. Kewenangan

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai kewenangan :

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana;
3. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam penanggulangan bencana;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana pada wilayah;
5. Perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
6. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana;
7. Pengajuan Penetapan Status Bencana;

8. Pengkoordinasian terhadap Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana;
9. Pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang penataan ruang, TMB dan peraturan lain dengan pencegahan bencana
10. Penetapan tempat tujuan pemindahan penduduk dari daerah bencana ke daerah yang aman;
11. Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman;
12. Pemulihan sarana fisik dan non fisik yang rusak/hempuh akibat bencana;
13. Pengawasan terhadap peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Penanggulangan Bencana dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator sesuai tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana terdapat dalam tabel II.2.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BPED Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SP30 Standar Nasional	RDK	Target Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	11	11	11	11
1	Jumlah Pelaksanaan Jasa Sengketa Mediasi			100	100	100	100	100	0	100	100	
2	Jumlah kasus layanan jasa konsultasi, mediasi, dan arbitrase			10	10	10	10	10	0	10	10	
3	Jumlah Akreditasi (Kategori) (unit)			20	20	20	20	20	0	20	100	
4	Jumlah layanan jasa administrasi, kepegawaian			10	10	10	10	10	0	10	10	
5	Jumlah orang yang menerima layanan Jitapgap ANP			20	20 (10)	20 (10)	40	20	20	20 (10)	40	
6	Jumlah Dokumen Penelusuran dan Pengujian Yurisdiksi Kasus (SKPD)			4	10	10	20	10	0	10	20	
7	Jumlah Laporan, Kasus, Bimbingan Teknis, dan pelatihan SKPD dan Laporan Koordinasi Penuntutan Laporan Kasus Bimbingan Teknis dan pelatihan SKPD			0	10	10	20	10	0	10	20	
8	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Pengawasan Laporan Hasil Mediasi Pada SKPD			0	1	1	2	0	0	1	1	
9	Jumlah Dokumen Penuntutan dan Pengawasan Administrasi Laporan dan			0	10	10	20	0	0	10	00	
10	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (DMS)			0	1	1	2	10	0	1	1	

Revisi Kerja RPSP Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

11	Jumlah laporan yang disampaikan keantar :			13	1	1	2	1	0	1	1	
12	Jumlah Juru Adat Tula Kuntia :			10	2	2	4	46	1	2	3	
13	Jumlah layanan Sengketa sengketa dan penggabungan :			12	2	2	4	12	1	2	3	
14	Jumlah pertemuan timbal balik / pertemuan langsung antar :			8	2	2	4	8	3	2	7	
15	Jumlah Laporan, Pertanggungjawaban, Rapat Koordinasi Dan Komunikasi SKPD / Laporan :			11	8	8	16	29	7	8	18	
16	Jumlah tenaga pendamping dan teknis pemerintahan :			21	12	12	24	24	6	12	18	
17	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD :			7	11	11	8	11	11	11	11	
18	Jumlah Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah :			11	5	5	4	11	1	2	3	
19	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemantauan / Dokumen RKA SKPD :			11	5	5	4	11	1	2	3	
20	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemantauan / Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) :			11	8	8	12	1	6	6	12	

Relevansi Kerja SPES Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

11	Jumlah Laporan Tahunan Komite Pengantar Daerah			0	0	0	12	0	2	0	0	
12	Jumlah Dokumen Baku (Acuan Dan Penataan Perundang-Undangan Yang Disiapkan)			1	1	0	1	0	0	0	0	
13	Jumlah Fasilitas Kampingan Tera (Kajenari)			500	12	12	24	500	0	12	10	
14	Jumlah Jala Kelengkapan Gedung Kantor			3	0	1	1	3	2	1	3	
15	Jumlah Alat Gedung Kantor Yang Diperiksa			1	2	1	1	0	1	1	1	
16	Jumlah Gedung Kantor Dan Rangkaian Kamenya Yang Diperiksa Maksimal (Unit)			1	0	1	1	1	1	1	1	
17	Jumlah unit kendaraan operasional yang diperiksa			1	1	0	11	0	1	0	11	
18	Jumlah Paket Hutan Legitimasi Kantor Yang diajukan (Pkt)			0	1	1	2	0	1	1	2	
19	Jumlah unit Peralatan gedung kantor yang diperiksa			50	1	1	64	0	1	1	64	
20	Jumlah Aparatur yang mengahai pendidkhan dan pelatihan formal			1	0	0	0	0	0	0	0	

Relevansi Kerja SPES Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

71	Berikut 3k, Penetapan Status Gunung Merapi dan SKPDH Yang Ditetapkan paling Lama 1x34 Juni Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan ke/Upat (Dok)	✓	✓	6	1	1	2	4	4	1	1	
72	Terlaksananya Kincir-kincir dan Fasilitas Rumah Lupa Per. Panti, Panti, Panti, dan penyediaan ke daerah bencana	✓	✓	10	100	100	200	10	150	100	200	
73	Berikut Kriteria Yang Harus Disediakan, Ditingkatkan dan dewan Per. Jenis Kegiatan Bencana	✓	✓	0	30	30	100	40	1	50	31	
74	Berikut Dokumen Kegiatan Pendidikan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bencana Dikawatir	✓	✓	0	1	1	2	40	0	1	1	
75	Berikut sedang-pangan yang tersedia bagi korban bencana	✓	✓	2	0	0	0	12	0	0	0	
76	Berikut Peserta Himpun DHC pada saat Lapangan Dikawatir	✓	✓	00	00	00	60	40	0	20	20	
77	Berikut kegiatan penyelenggaraan terhadap Bencana Ekstrem (Bencana Cepat, Bencana Bencana Kab.Kata)	✓	✓	1	4	4	4	4	4	4	4	
78	Berikut Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang Dilegitimasi (Dok)	✓	✓	0	1	2	4	0		2	2	
79	Terlaksananya Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Informasi Pemasok Bencana Sama	✓	✓	10	0	0	0	40	0	0	0	
80	Terlaksananya Data, Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana (Pengelolaan Operasi)	✓	✓	10	0	0	4	0	0	0	0	
81	Terlaksananya Insidensi Manajemen Penyelenggaraan Bencana Bencana Masyarakat (SOSEA, I.)	✓	✓	8	100	120	240	10	65	120	250	

Revisi Kerja SPES Kelengkapan Files Tender Tahun 2024

43	Berkas Dokumentasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Monev/ Pengkaderan (Dok)	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Berkas Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal/ Artikel/ Yang Mempunyai Pelatikan/ Peningkatan Dan Manfaat Lainnya	✓	✓	0	0	0	120	120	75	0	120	
45	Berkas Aspek FISIK	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Tidak adanya Identifikasi dan Profilasi Kelembagaan (IDP)	✓	✓	10	0	0	0	10	0	0	0	
47	Tidak adanya Sistem TMS/ Kartu nama atau Sertifikat	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Berkas, Dokumen, Komposisi, Aduar/ Laporan Dan Komposisi File/ Pengumpulan Monev	✓	✓	0	1	1	2	10	0	1	1	
49	Berkas Dokumen Rencana Kerja/ rencana Monev/ Prolitas	✓	✓	0	0	0	0	10	1	0	1	
50	Berkas Peta Pelatikan/ Pengumpulan dan Pelaksanaan Peta Monev (Thematic and Longt Assessment (TALA)	✓	✓	0	0	0	0	10	0	0	0	
51	Berkas Kerja/ Data (Herd/ Kerja Monev)	✓	✓	0	0	0	0	10	0	0	0	
52	Tidak adanya laporan/ Kegiatan/ Ilmu/ Informasi/ Dan Terpadu/ Diseminasi/ Kajian	✓	✓	1	0	0	0	10	0	0	0	
53	Berkas Dan/ Data/ Informasi/ Monev	✓	✓	0	1	1	2	1	1	1	2	
54	Tidak adanya Identifikasi/ Profilasi/ Monev/ dan/ Kegiatan/ Peta Monev	✓	✓	10	0	0	0	1	0	0	0	
55	Berkas Peta/ Pelatikan/ Pengumpulan dan Pelaksanaan Peta Monev (Thematic)	✓	✓	0	0	0	0	10	0	0	0	
56	Berkas dan/ data/ dan/ kegiatan/ yang/ Diseminasi	✓	✓	1	0	0	0	1	0	0	0	
57	Berkas Dokumen/ Penyelenggaraan/ Peta/ Monev/ Kegiatan/ Kerja/ Identifikasi/ Penyelidikan/ Pelaksanaan/ Peta/ Monev/ Organisasi/ Rencana/ Pelaksanaan/ Dan/ Pelaksanaan/ Peta/ Monev (Dok)	✓	✓	0	0	0	12	0	1	0	0	

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa

1. Untuk Capaian Program kegiatan Pada Tahun Anggaran 2022 (N-2) secara keseluruhan semuanya berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.
2. Untuk Pencapaian target pada tahun anggaran 2023 (N-1) secara keseluruhan belum bisa diwujudkan karena masih dalam pelaksanaan.

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi. Berdasarkan indikator kinerja dan kondisi permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Belum Dilaksanakannya Kajian Risiko Bencana
3. Belum Lengkapnya Dokumen Rencana Kontigensi Dalam rencana Penanggulangan Bencana
4. Masih kurangnya Kapabilitas aparaturnya yang menangani masalah kebencanaan
5. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan penanggulangan bencana masih kurang memadai
6. Ketersediaan Logistik Yang Belum Memadai
7. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasi prosedur (SOP) Yang Baik
8. Masih rendahnya wawasan masyarakat tentang kebencanaan
9. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personel yang khusus menangani bencana masih sangat minim
10. Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsive gender

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

Tabel II.2.1

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Dan Permasalahan Pelayanan Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Melaksanakan Revisi Kajian Resiko Bencana berdasarkan 9 Jenis Ancaman Bencana Di Kabupaten Flores Timur	- Kurangnya Alokasi Anggaran Untuk Melakukan Revisi Dokumen Peta
2.	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana yang terorganisir dan tepat guna (Rencana Kontigensi)	- Masih kurangnya referensi terkait kebencanaan
3.	Meningkatnya jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	- Masih kurangnya SDM/ Aparatur yang memahami kebencanaan
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Monitoring Evaluasi Kebencanaan
5.	Meningkatnya penanganan terhadap bencana kekeringan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Penanganan Bencana Kekeringan
6.	Terlaksananya Identifikasi / Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Identifikasi/ Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana

7.	Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)	Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)
8.	Terlaksananya Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
9.	Tersedianya sistem informasi terpadu di bidang kebencanaan	- Belum adanya sarana penyebaran informasi kebencanaan yang lebih cepat dan akurat
10.	Meningkatnya frekuensi Koordinasi Forum PRB	- Kurangnya Alokasi Dana untuk koordinasi dan fasilitasi Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana)
11.	Bertambahnya jumlah anggota TSBD/K	- Belum ada kelanjutan dari pembentukan anggota TSBD/K
12.	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana	- Kurangnya alokasi dana
13.	Jumlah Peserta Bimtek TRC	- Masih kurangnya SDM Anggota TRC - Belum ada kegiatan untuk memfasilitasi Anggota TRC
14.	Terlaksananya Pengadaan Stok Penyanggah (<i>Buffer Stock</i>) bagi Korban Bencana	- Kurangnya alokasi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mengambil berbagai langkah kebijakan yaitu :

Tabel II.2.2

Faktor Penghambat Dan Pendorong Renstra K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi Kabupaten Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan Revisi Kajian Resiko Bencana berdasarkan 9 Jenis Ancaman Bencana Di Kabupaten Flores Timur	- Kurangnya Alokasi Anggaran Untuk Melakukan Revisi Dokumen Peta	- Kabupaten Flores Timur Merupakan Daerah Yang memiliki Tingkat Ancaman Bencana Yang Sangat Tinggi	- Memberikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi daerah yang memiliki Ancaman potensi bencana. - Untuk memberikan intervensi kepada lembaga pemerintah dan swasta dalam menentukan arah kebijakan.
2	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana yang terorganisir dan tepat guna (Rencana Kontigensi)	- Masih kurangnya referensi terkait kebencanaan.	-	-

3	Meningkatnya jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.	- Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami kebencanaan		Adanya kesadaran para pihak (Pemerintah, Kalangan Swasta Dunia Usaha, dan masyarakat) bahwa Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab bersama.
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Monitoring Evaluasi Kebencanaan	- Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan - Masih banyak warga masyarakat yang tinggal di daerah terpapar (Jalur merah).	
5	Meningkatnya penanganan terhadap bencana kekeringan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Penanganan Bencana Kekeringan	- Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kekeringan.	
6	Terlaksananya Identifikasi/ Penilaian Kerusakan dan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Identifikasi/ Penilaian kerusakan dan kerugian pasca		

	Kerugian Pasca Bencana	bencana		
7	Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)	Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)		
8	Terlaksananya Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
9	Tersedianya sistem informasi terpadu di bidang kebencanaan	- Belum adanya sarana penyebaran informasi kebencanaan yang lebih cepat dan akurat	Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kepulauan	
10	Meningkatnya frekwensi Koordinasi Forum PRB	- Kurangnya Alokasi Dana untuk koordinasi dan fasilitas Forum PRB		
11	Bertambahnya jumlah anggota TSBD/K	- Belum ada kelanjutan dari pembentukan anggota TSBD/K		

12	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana	- Kurangnya alokasi dana		
13	Jumlah Peserta Bimtek TRC.	- Masih kurangnya SDM Anggota TRC - Belum ada kegiatan untuk memfasilitasi Angkor TRC		
14	Terlaksananya Pengadaan Stok Penyanggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana	- Kurangnya alokasi		

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Review atau telaan terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Hasil telaan terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.4
Hasil Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RPMD						Hasil Telaah, Revisi/Perbaikan					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan	Loke	Indikator Kinerja	Target Capaian	Penganggaran (Rp)	Program/Kegiatan	Loke	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keterangan Rinc (Rp)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SASAKA PEMERINTAHAN DAERAH			100%	1.700.000.000	SASAKA PEMERINTAHAN DAERAH			100%	1.700.000.000	
1	Program Penguatan Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Lembaga	Tingkat Realisasi Administrasi Pemerintahan (%)	100%	1.457.274.488	Program Penguatan Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Lembaga	Tingkat Realisasi Administrasi Pemerintahan (%)	100%	1.457.274.488	
	Program Penguatan Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Lembaga	Persentase Akreditasi Badan Desa Kabupaten/Kota	100%		Program Penguatan Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD/Lembaga	Persentase Akreditasi Badan Desa Kabupaten/Kota	100%		
		OPD/Lembaga	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi kompetensi (%)	100%			OPD/Lembaga	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi kompetensi (%)	100%		
		OPD/Lembaga	Persentase Pemahaman dan Penguasaan Sistem Kerja dan Keuangan (%)	100%			OPD/Lembaga	Persentase Pemahaman dan Penguasaan Sistem Kerja dan Keuangan (%)	100%		
2	Pelaksanaan Penganggaran dan Eksekusi Kinerja Perangkat Daerah			4	40.000.000	Pelaksanaan Penganggaran dan Eksekusi Kinerja Perangkat Daerah			4	40.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD/Lembaga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dok	11.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lembaga OPD, BAK, Pokja Timor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dok	10.000.000	
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKS-SKPD	OPD/Lembaga	Jumlah Laporan Dokumen RKS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKS-SKPD (Dokumen)	6 Lap	10.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKS-SKPD	Lembaga OPD, BAK, Pokja Timor	Jumlah Laporan Dokumen RKS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKS-SKPD (Dokumen)	6 Lap	7.000.000	

Rencana Kerja RPMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja RPMD	CPO/Lanmanua	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja RPMD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja RPMD (Laporan)	4 Lap	11.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja RPMD	Lanmanua/CPO, Web, Forum Timor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja RPMD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Risiko Realisasi Kinerja RPMD (Laporan)	4 Lap	10.000.000	
5	Berkas Kinerja Peringkat Daerah	CPO/Lanmanua	Jumlah Laporan Berkas Kinerja Peringkat Daerah (Laporan)	4 Lap	11.400.000	Berkas Kinerja Peringkat Daerah	Lanmanua/CPO, Web, Forum Timor	Jumlah Laporan Berkas Kinerja Peringkat Daerah (Laporan)	4 Lap	10.000.000	
6	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah			12	1.100.000.000	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah			12	1.100.000.000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	CPO/Lanmanua	Jumlah Gaji yang Diserahkan Gaji dan Tunjangan (Gaji dan Tunjangan) (Gaji dan Tunjangan)	12/12 Dg/Bln	1.711.600.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Lanmanua/CPO, Web, Forum Timor	Jumlah Gaji yang Diserahkan Gaji dan Tunjangan (Gaji dan Tunjangan) (Gaji dan Tunjangan)	12/12 Dg/Bln	1.077.400.000	
8	Penyediaan Administrasi Pemenuhan Tugast ASN	CPO/Lanmanua	Jumlah Dokumen yang Penyediaan Administrasi Pemenuhan Tugast ASN (Dok)	12 Dok	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pemenuhan Tugast ASN	Lanmanua/CPO, Web, Forum Timor	Jumlah Dokumen yang Penyediaan Administrasi Pemenuhan Tugast ASN (Dok)	12 Dok	10.000.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester RPMD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester RPMD (Laporan)	CPO/Lanmanua	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester RPMD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester RPMD (Laporan)	12 Lap	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester RPMD	Lanmanua/CPO, Web, Forum Timor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester RPMD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester RPMD (Laporan)	12 Lap	10.000.000	
10	Administrasi Barang RPMD Daerah pada Peringkat Daerah			-	1.000.000	Administrasi Barang RPMD Daerah pada Peringkat Daerah			-	1.000.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang RPMD Daerah pada RPMD	CPO/Lanmanua	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang RPMD Daerah pada RPMD (Laporan)	1 Lap	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang RPMD Daerah pada RPMD	Lanmanua/CPO, Web, Forum Timor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang RPMD Daerah pada RPMD (Laporan)	1 Lap	1.000.000	

Rencana Kerja RPJSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

2	Pembangunan Berang Untri Daerah pada 2020	OPD/LuarNegeri	Jumlah Laporan Pembangunan Berang Untri Daerah pada 2020 (Laporan)	0 Lem	0.000.000	Pembangunan Berang Untri Daerah pada 2020	LuarNegeri/OPD, web, Portal Timor-L	Jumlah Laporan Pembangunan Berang Untri Daerah pada 2020 (Laporan)	0 Lem	0.000.000	
10	Administrasi Kepegawaian Kelengkapan Daerah			-	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Kelengkapan Daerah			-	10.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Basarnas Untuk Kelengkapannya	OPD/LuarNegeri	Jumlah Pakaian Pengadaan Pakaian Dinas Basarnas Untuk Kelengkapannya (Pakaian)	1 Pakaian	0.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Basarnas Untuk Kelengkapannya	LuarNegeri/OPD, web, Portal Timor-L	Jumlah Pakaian Pengadaan Pakaian Dinas Basarnas Untuk Kelengkapannya (Pakaian)	1 Pakaian	10.000.000	opsi pada ini Berperif dan Pengadaan agar bisa dilaksanakan karena selama ini Pengadaan pakaian Basarnas Kabupaten Macaput PDD belum pernah dilakukan
3	Koordinasi Dan Pelaksanaan Dalam Informasi Kepegawaian	OPD/LuarNegeri	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Dalam Informasi Kepegawaian (Dok)	1 Dok	0.000.000	Koordinasi Dan Pelaksanaan Dalam Informasi Kepegawaian	LuarNegeri/OPD, web, Portal Timor-L	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Dalam Informasi Kepegawaian (Dok)	1 Dok	0.000.000	
4	Monitoring Situasi Dan Perawatan Kewira Pagarul	OPD/LuarNegeri	Jumlah Dokumen Monitoring Situasi Dan Perawatan Kewira Pagarul (Dok)	4 Dok	0.000.000	Monitoring Situasi Dan Perawatan Kewira Pagarul		Jumlah Dokumen Monitoring Situasi Dan Perawatan Kewira Pagarul (Dok)	-		
9	Administrasi Umum Perangas Daerah			100%	10.400.000	Administrasi Umum Perangas Daerah			100%	10.400.000	
1	Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD/LuarNegeri	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	10.400.000	Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	LuarNegeri/OPD, web, Portal Timor-L	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	0.000.000	
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	OPD/LuarNegeri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LuarNegeri/OPD, web, Portal Timor-L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	0.000.000	

Rencana Kerja RPJSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

1	Pemeliharaan Fasilitas Rumah Tangga	OPD/LuaranKab	Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Tangga yang disediakan (Rp)	1 Rp	8.000.000	Pemeliharaan Fasilitas Rumah Tangga	LuaranKab/OPD, Kab. Flores Timur	Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Tangga yang disediakan (Rp)	1 Rp	8.000.000	
2	Pemeliharaan Bahan Logam Keras	OPD/LuaranKab	Jumlah Paket Bahan Logam Keras yang disediakan (Rp)	1 Rp	40.000.000	Pemeliharaan Bahan Logam Keras	LuaranKab/OPD, Kab. Flores Timur	Jumlah Paket Bahan Logam Keras yang disediakan (Rp)	1 Rp	40.000.000	
3	Pemeliharaan Barang Cetak dan penggantian	OPD/LuaranKab	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang disediakan (Rp)	1 Rp	25.000.000	Pemeliharaan Barang Cetak dan penggantian	LuaranKab/OPD, Kab. Flores Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang disediakan (Rp)	1 Rp	25.000.000	
4	Pemeliharaan Bahan Sediaan dan Pasokan Perawatan Liniangan	OPD/LuaranKab	Jumlah Dokumen Bahan Sediaan dan Pasokan Perawatan Liniangan yang disediakan (Dok)	1 Dok	1.000.000	Pemeliharaan Bahan Sediaan dan Pasokan Perawatan Liniangan	LuaranKab/OPD, Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen Bahan Sediaan dan Pasokan Perawatan Liniangan yang disediakan (Dok)	1 Dok	1.000.000	
5	Asuransi Kurungan Tandu	OPD/LuaranKab	Jumlah Laporan Realisasi Kurungan Tandu (Laporan)	12 Lap	12.000.000	Asuransi Kurungan Tandu	LuaranKab/OPD, Kab. Flores Timur	Jumlah Laporan Realisasi Kurungan Tandu (Laporan)	12 Lap	12.000.000	
6	Pembiayaan kesehatan tepat Koordinasi dan Ransuhasi SAKO	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Pembiayaan kesehatan tepat Koordinasi dan Ransuhasi SAKO (Laporan)	8 Lap	40.000.000	Pembiayaan kesehatan tepat Koordinasi dan Ransuhasi SAKO	Dalam dan luar Daerah Kab. Flores Timur	Jumlah Laporan Pembiayaan kesehatan tepat Koordinasi dan Ransuhasi SAKO (Laporan)	8 Lap	40.000.000	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAKO	OPD/LuaranKab	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAKO (Dok)	1 Dok	1.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAKO		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAKO (Dok)	-		

Rencana Kerja RPJSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

16	Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Pemukiman Daerah			-	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Pemukiman Daerah			-	10.000.000	
1	Pengadaan Usaha	OPD/Lembaga	Jumlah Paket (Batas yang ditetapkan (Rp))	1 Unit	6.000.000	Pengadaan Usaha	Lembaga/OPD, MAB, Pokja Timor	Jumlah Paket (Batas yang ditetapkan (Rp))	1 Unit	6.000.000	
2	Pengadaan Perawatan dan Mekanik Lainnya	OPD/Lembaga	Jumlah Unit Perawatan dan Mekanik lainnya yang ditetapkan (Unit)	1 Unit	6.000.000	Pengadaan Perawatan dan Mekanik Lainnya	Lembaga/OPD, MAB, Pokja Timor	Jumlah Unit Perawatan dan Mekanik lainnya yang ditetapkan (Unit)	1 Unit	6.000.000	Jumlah Pengadaan Sewa Bahan Logistik Untuk Kegiatan Perencanaan Jangka Jangka Panjang yang Lama Sesuai Rencanakan
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Lembaga	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang ditetapkan (Unit)	1 Unit	6.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lembaga/OPD, MAB, Pokja Timor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang ditetapkan (Unit)	1 Unit	6.000.000	
16	Penyediaan Jasa Persewaan Usaha Pemukiman daerah			-	240.494.804	Penyediaan Jasa Persewaan Usaha Pemukiman daerah			-	240.494.804	
1	Penyediaan Jasa Sewa (Waktu)	OPD/Lembaga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sewa (Waktu) (Laporan)	12 Lap	6.000.000	Penyediaan Jasa Sewa (Waktu)	Lembaga/OPD, MAB, Pokja Timor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sewa (Waktu) (Laporan)	12 Lap	6.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lainnya	OPD/Lembaga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lainnya yang ditetapkan (Laporan)	12 Lap	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lainnya	Lembaga/OPD, MAB, Pokja Timor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lainnya yang ditetapkan (Laporan)	12 Lap	60.000.000	
3	Penyediaan Jasa Penyediaan Umum Daerah	OPD/Lembaga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Umum Daerah yang ditetapkan (Laporan)	12 Lap	180.000.000	Penyediaan Jasa Penyediaan Umum Daerah	Lembaga/OPD, MAB, Pokja Timor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Umum Daerah yang ditetapkan (Laporan)	12 Lap	180.000.000	
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Pemukiman Daerah			-	100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Pemukiman Daerah			-	100.000.000	
1	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Pagar dan Perawatan Pemukiman Diklat Operasional dan Lapangan	OPD/Lembaga	Jumlah Pemeliharaan Diklat Operasional dan Lapangan (Pagar dan Perawatan Pemukiman Diklat)	12 Unit	90.000.000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Pagar dan Perawatan Pemukiman Diklat Operasional dan Lapangan	Lembaga/OPD, MAB, Pokja Timor	Jumlah Pemeliharaan Diklat Operasional dan Lapangan (Pagar dan Perawatan Pemukiman Diklat)	12 Unit	90.000.000	

Rencana Kerja RPMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

2	Pemeliharaan Mebel	OPD/Lembaga	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 unit	1.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	-	-	
3	Pemeliharaan Asat Tali Bermanfaat	OPD/Lembaga	Jumlah Asat Tali Bermanfaat yang dipelihara (unit)	1 unit	1.000.000	Pemeliharaan Asat Tali Bermanfaat		Jumlah Asat Tali Bermanfaat yang dipelihara (unit)	-	-	
4	Pemeliharaan Kesehatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD/Lembaga	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan Kesehatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Lembaga/OPD, Kab. Flores Timur)	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	15.000.000	
5	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Lembaga	Jumlah Sarana Prasana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	7 unit	8.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Lembaga/OPD, Kab. Flores Timur)	Jumlah Sarana Prasana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	7 unit	14.000.000	
2	Usaha Pemertahanan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Garam serta Pertambangan Masyarakat				218.000.000	Usaha Pemertahanan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Garam serta Pertambangan Masyarakat				210.000.000	
	Program Peninggalan Sarana		Persentase Pemertanian Rasio Sarana (%)	17,78	218.000.000	Program Peninggalan Sarana		Persentase Pemertanian Rasio Sarana (%)	17,78	210.000.000	
			Persentase Cakupan Peninggalan Sarana (%)	83,89				Persentase Cakupan Peninggalan Sarana (%)	83,89		
			Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rasio Sarana (%)	17,78				Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rasio Sarana (%)	17,78		
1	Pelayanan Informasi Rasio Sarana Kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan Sarana (%)	-	60.000.000	Pelayanan Informasi Rasio Sarana Kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan Sarana (%)	-	70.000.000	
2	Penyusunan Rasio Rasio Sarana Kabupaten/Kota	Lembaga	Jumlah Dokumen Rasio Rasio Sarana yang dipelihara (Dok)	2 Dok	28.000.000	Penyusunan Rasio Rasio Sarana Kabupaten/Kota	(Lembaga/OPD, Kab. Flores Timur)	Jumlah Dokumen Rasio Rasio Sarana yang dipelihara (Dok)	2 Dok	28.000.000	

Revisi Kerja RPSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Revisi Kerja BPSD Kabupaten Flores Tahun 2024

[illegible]

2.5 Penelaan Terhadap Usulan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah tahun 2024 ada beberapa usulan masyarakat yang berkaitan dengan rencana kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1

Unggahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	NAME OF THE COURSE PROGRAM/ COURSE TITLE/ SUB-SECTION	SEMESTER	NAME OF THE PROGRAM/ COURSE TITLE/ SUB-SECTION (Details)	Grading System	Grading
1	2	3	4	5	6
	1000 FOUNDATIONAL GENERAL SCIENCE				
	General Foundation Biology: Principles and Molecular Organization, Cell Biology, Biochemistry, Microbiology				
	1001 General Chemistry: General Science				
	1002 General Chemistry: General Science				
	1003 General Chemistry: General Science				
	1004 General Chemistry: General Science				
	1005 General Chemistry: General Science				
	1006 General Chemistry: General Science				
	1007 General Chemistry: General Science				
	1008 General Chemistry: General Science				
	1009 General Chemistry: General Science				
	1010 General Chemistry: General Science				
	1011 General Chemistry: General Science				
	1012 General Chemistry: General Science				
	1013 General Chemistry: General Science				
	1014 General Chemistry: General Science				
	1015 General Chemistry: General Science				
	1016 General Chemistry: General Science				
	1017 General Chemistry: General Science				
	1018 General Chemistry: General Science				
	1019 General Chemistry: General Science				
	1020 General Chemistry: General Science				
	1021 General Chemistry: General Science				
	1022 General Chemistry: General Science				
	1023 General Chemistry: General Science				
	1024 General Chemistry: General Science				
	1025 General Chemistry: General Science				
	1026 General Chemistry: General Science				
	1027 General Chemistry: General Science				
	1028 General Chemistry: General Science				
	1029 General Chemistry: General Science				
	1030 General Chemistry: General Science				
	1031 General Chemistry: General Science				
	1032 General Chemistry: General Science				
	1033 General Chemistry: General Science				
	1034 General Chemistry: General Science				
	1035 General Chemistry: General Science				
	1036 General Chemistry: General Science				
	1037 General Chemistry: General Science				
	1038 General Chemistry: General Science				
	1039 General Chemistry: General Science				
	1040 General Chemistry: General Science				
	1041 General Chemistry: General Science				
	1042 General Chemistry: General Science				
	1043 General Chemistry: General Science				
	1044 General Chemistry: General Science				
	1045 General Chemistry: General Science				
	1046 General Chemistry: General Science				
	1047 General Chemistry: General Science				
	1048 General Chemistry: General Science				
	1049 General Chemistry: General Science				
	1050 General Chemistry: General Science				
	1051 General Chemistry: General Science				
	1052 General Chemistry: General Science				
	1053 General Chemistry: General Science				
	1054 General Chemistry: General Science				
	1055 General Chemistry: General Science				
	1056 General Chemistry: General Science				
	1057 General Chemistry: General Science				
	1058 General Chemistry: General Science				
	1059 General Chemistry: General Science				
	1060 General Chemistry: General Science				
	1061 General Chemistry: General Science				
	1062 General Chemistry: General Science				
	1063 General Chemistry: General Science				
	1064 General Chemistry: General Science				
	1065 General Chemistry: General Science				
	1066 General Chemistry: General Science				
	1067 General Chemistry: General Science				
	1068 General Chemistry: General Science				
	1069 General Chemistry: General Science				
	1070 General Chemistry: General Science				
	1071 General Chemistry: General Science				
	1072 General Chemistry: General Science				
	1073 General Chemistry: General Science				
	1074 General Chemistry: General Science				
	1075 General Chemistry: General Science				
	1076 General Chemistry: General Science				
	1077 General Chemistry: General Science				
	1078 General Chemistry: General Science				
	1079 General Chemistry: General Science				
	1080 General Chemistry: General Science				
	1081 General Chemistry: General Science				
	1082 General Chemistry: General Science				
	1083 General Chemistry: General Science				
	1084 General Chemistry: General Science				
	1085 General Chemistry: General Science				
	1086 General Chemistry: General Science				
	1087 General Chemistry: General Science				
	1088 General Chemistry: General Science				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tekan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: *"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"*.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi *"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"* secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut:

- 3.1.1 Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
- 3.1.2 Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
- 3.1.3 Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan. Selain itu sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan dan misi yang telah dicanangkan adalah :

- 3.2.1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (*pemerintah dan masyarakat*) dalam upaya penanggulangan bencana.
- 3.2.2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan peningkatan sarana prasarana serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- 3.2.3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana yang lebih baik.

Dalam Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan isu – isu strategi pelayanan BPBD Provinsi adalah :

- a. Belum terwujudnya kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini provider telekomunikasi dalam membangun sistem informasi bencana secara global melalui sistem broadcast pesan layanan singkat (SMS) kepada seluruh masyarakat tentang peringatan dini dan kejadian bencana di Nusa Tenggara Timur.
- b. Belum optimalnya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dan Sumber Daya Manusia, peralatan dan finansial dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana.
- c. Belum optimalnya pengelolaan logistik, peralatan dan pengerahan Sumber Daya Manusia serta penanggulangan bencana untuk penanganan tanggap darurat.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JKU-PB).

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 3.3.1. Meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat
- 3.3.2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
- 3.3.3. Menwujudkan penanganan kondisi darurat yang didukung logistik, peralatan dan pengerahan sumber daya manusia secara cepat, tepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh:
 - 3.1. Terlaksananya Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memadai bagi korban bencana
 - 3.2. Menyediakan data dan informasi bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana
 - 3.3. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan pemangku kepentingan bidang kebencanaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tujuan Pembangunan Daerah, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Penanganan Bencana	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Mitigasi, Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	- Peningkatan Upaya Mitigasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran 3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;	1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPNM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah 2. Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 3. Penguatan sistem administrasi ASN 4. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu

3.3. Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Sebagai Mana Tertuang Dalam rancangan Awal Perangkat Daerah Pada RKPD Mencakup 2 Program 8 Kegiatan Dan 40 Sub Kegiatan Dengan Rincian Sebagai Berikut:

3.3.1. Program Pengujiang Urutan Pemerintahan Daerah

Program Prioritas/sasaran	Program	Indikator Program (Satuan)	Target	Perkiraan Maju
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana	Program Peningkatan Bencana	Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)	77,78	88,89
		Persentase Cakupan Peningkatan Bencana (%)	83,85	91,93
		Persentase Cakupan Rehabilitasi Dan rekonstruksi Pasca bencana (%)	17,79	19,79

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

[illegible]

Revisi Kerya JPSB Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Year	Month	Day	Event	Location	Time	Duration	Frequency	Category	Notes
2023	Jan	15	Annual Conference	London, UK	09:00	1 Day	1	Conference	Keynote by Sir David Attenborough
2023	Feb	10	Workshop on AI Ethics	London, UK	14:00	2 Days	1	Workshop	Guest speaker: Dr. Fei-Fei Li
2023	Mar	05	AI Summit	London, UK	09:00	1 Day	1	Summit	Panel discussion on AI regulation
2023	Apr	20	AI Hackathon	London, UK	09:00	3 Days	1	Hackathon	Prize pool of £10,000
2023	May	15	AI Conference	London, UK	09:00	1 Day	1	Conference	Keynote by Elon Musk
2023	Jun	10	AI Summit	London, UK	09:00	1 Day	1	Summit	Panel discussion on AI safety
2023	Jul	05	AI Conference	London, UK	09:00	1 Day	1	Conference	Keynote by Mark Zuckerberg
2023	Aug	20	AI Summit	London, UK	09:00	1 Day	1	Summit	Panel discussion on AI ethics
2023	Sep	15	AI Conference	London, UK	09:00	1 Day	1	Conference	Keynote by Sundar Pichai
2023	Oct	10	AI Summit	London, UK	09:00	1 Day	1	Summit	Panel discussion on AI regulation
2023	Nov	05	AI Conference	London, UK	09:00	1 Day	1	Conference	Keynote by Jeff Bezos
2023	Dec	20	AI Summit	London, UK	09:00	1 Day	1	Summit	Panel discussion on AI safety

Revisi Kerja BERS Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Revisi Kerja BERS Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Revisi Kargo BPS Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Revisi Kerja JFSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Revisi Kerja SPES Kelengkapan Files Tender Tahun 2024

[illegible]

Rencana Kerja BPED Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Rencana Kerja BPED Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

Revisi Kerja BERS Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

		Revisi Perancangan Unggah Beranda Galeri				2		2021-10-02 14:00						
		Revisi Perancangan dan Unggah Beranda Galeri				2		2021-10-02 14:00:10:00						
		Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Galeri Beranda dan Beranda				4		2021-10-02 14:00:10:00						
		Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda Galeri				40	10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00	Data Terdapat dalam Data Jurnal Jurnal			Daftar ulang menerima jurnal jurnal jurnal jurnal jurnal		
2021-10-02	Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda						10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00				Daftar ulang menerima jurnal	2021-10-02	2021-10-02
2021-10-02	Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda						10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00				Daftar ulang menerima jurnal	2021-10-02	2021-10-02
		Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda Galeri				4	10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00	Data Terdapat dalam Data Jurnal Jurnal			Daftar ulang menerima jurnal	2021-10-02	2021-10-02
2021-10-02	Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda						10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00				Daftar ulang menerima jurnal	2021-10-02	2021-10-02
2021-10-02	Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda						10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00	Data Terdapat dalam Data Jurnal Jurnal			Daftar ulang menerima jurnal	2021-10-02	2021-10-02
2021-10-02	Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda						10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00				Daftar ulang menerima jurnal	2021-10-02	2021-10-02
2021-10-02	Revisi Perancangan dan Unggah Beranda dan Beranda						10.000.000	2021-10-02 14:00:10:00	Data Terdapat dalam Data Jurnal Jurnal			Daftar ulang menerima jurnal	2021-10-02	2021-10-02

Rencana Kerja RPJSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Darurat	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan					100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Darurat	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan
100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Darurat	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan					100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Darurat	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan
100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Darurat	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan					100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Darurat	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan	100.00.100.0000	Penyediaan Logistik Penyediaan dan Distribusi Kebutuhan Bencana Alam Kecelakaan

[illegible]

Rencana Kerja IPSP Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operational Kegiatan Tahun 2024. Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Plt Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Flores Timur



ABDUL RAHMAN AKRA SH

Penyusunan, Drama Muda

NIP. 19631203 199003 1 003



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**



RENCANA KERJA
RENJA **2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perlindungannya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai indikator hasil dan kelancaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan terwujudnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menyusun perencanaan selanjutnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lasutika, Juli 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Flores Timur,



SEBASTIANA KLEDEN, SP
PEMUDA TK. I
NIP. 19660323 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR	
BAB I. PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan	1-4
1.4. Sistematika Penulisan	1-5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	
Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	II-15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-17
2.5. Penelaahan Urutan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-29
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V. PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rengs Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d tahun 2022	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	II-18
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	II-29
Tabel 3.3	Ringkasan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	III-4
Tabel 4	Rencana Kerja dan Pendanaan	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

I-2



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD.
- (3) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TKJ

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substantif*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua Renstra PD Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

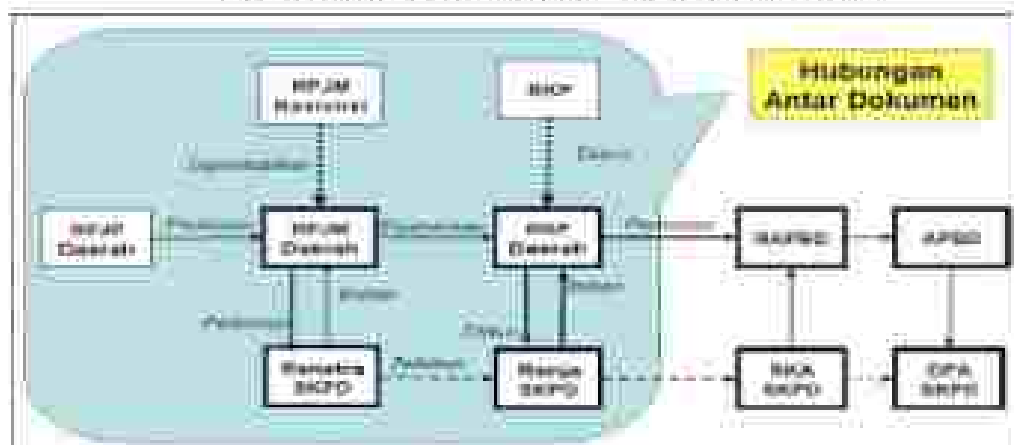
Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Permendagri Nomor 66 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta persiapan data dan informasi pembangunan daerah
2. Penyusunan Rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun 2022
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD

4. Pelaksanaan forum PD; dilakukan dengan membahas rancangan Ranja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi PD.
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Ranja PD berdasarkan hasil Musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Ranja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikator Ranja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Ranja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Ranja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Selanjutnya Ranja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Ranja PD dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Ranja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
23. Peraturan Bupati Flores Timur nomor 53 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur;
24. Peraturan Bupati Flores Timur nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur;
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENIA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan pengjabaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA PD Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENIA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkebunan dan Peternakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENIA Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, matriks dan tujuan serta sistematika dokumen RENIA.

BAB II. HASIL EVALUASI RENIA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pago Indikator Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB VII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2022 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana PD dan Pencapaian RESTRATRA PD s.d tahun 2022

KODE					Uraian Substansi/Unit Organisasi (Sesuai dan Sesuai Renc.)	Indikator Kinerja Strategis/Manajemen (Kategori/Indikator)	Target Kinerja Catatan: Program Berkas 120 maks. 400 (tahun 2022)	Kategori Target Kinerja (dari Program dan Kategori Kategori/Indikator Kategori/Indikator)	Tahun dan Realisasi Kinerja Terhadap Kategori/Indikator Tahun 2022			Tahun Kategori/Indikator Kategori/Indikator (tahun 2022)	Kategori/Indikator Capaian Kategori/Indikator P12 s.d tahun Kategori/Indikator	
INDUK	REKON	REKON	REKON	REKON					Tahun Kategori/Indikator	Realisasi Kategori/Indikator	Target Kategori/Indikator		Kategori/Indikator Kategori/Indikator (tahun 2022)	Kategori/Indikator Kategori/Indikator (tahun 2022)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					TOTAL PERENCANAAN/RESTRATRA									
1	1				Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten									
2	1	1			Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten	Target/Indikator: Adhikar/Indikator: Peningkatan	100	100	100	100	100			
						Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
						Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
3	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
4	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
5	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
6	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
7	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
8	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
9	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
10	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
11	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
12	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
13	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
14	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
15	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
16	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
17	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
18	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
19	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			
20	1	1	1	1	Peningkatan, Peningkatan dan Kategori/Indikator: Peningkatan Kategori/Indikator	Adhikar: Sesuai dan Sesuai Kategori/Indikator	100	100	100	100	100			

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	01	12	01	12	01	12	01	12	01	12	01	12	01	12	01	12	01	12
2	02	02	13	02	13	02	13	02	13	02	13	02	13	02	13	02	13	02	13
3	03	03	14	03	14	03	14	03	14	03	14	03	14	03	14	03	14	03	14
4	04	04	15	04	15	04	15	04	15	04	15	04	15	04	15	04	15	04	15
5	05	05	16	05	16	05	16	05	16	05	16	05	16	05	16	05	16	05	16
6	06	06	17	06	17	06	17	06	17	06	17	06	17	06	17	06	17	06	17
7	07	07	18	07	18	07	18	07	18	07	18	07	18	07	18	07	18	07	18
8	08	08	19	08	19	08	19	08	19	08	19	08	19	08	19	08	19	08	19
9	09	09	20	09	20	09	20	09	20	09	20	09	20	09	20	09	20	09	20
10	10	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21
11	11	11	22	11	22	11	22	11	22	11	22	11	22	11	22	11	22	11	22
12	12	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23	12	23
13	13	13	24	13	24	13	24	13	24	13	24	13	24	13	24	13	24	13	24
14	14	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25	14	25
15	15	15	26	15	26	15	26	15	26	15	26	15	26	15	26	15	26	15	26
16	16	16	27	16	27	16	27	16	27	16	27	16	27	16	27	16	27	16	27
17	17	17	28	17	28	17	28	17	28	17	28	17	28	17	28	17	28	17	28
18	18	18	29	18	29	18	29	18	29	18	29	18	29	18	29	18	29	18	29
19	19	19	30	19	30	19	30	19	30	19	30	19	30	19	30	19	30	19	30
20	20	20	31	20	31	20	31	20	31	20	31	20	31	20	31	20	31	20	31
21	21	21	32	21	32	21	32	21	32	21	32	21	32	21	32	21	32	21	32
22	22	22	33	22	33	22	33	22	33	22	33	22	33	22	33	22	33	22	33
23	23	23	34	23	34	23	34	23	34	23	34	23	34	23	34	23	34	23	34
24	24	24	35	24	35	24	35	24	35	24	35	24	35	24	35	24	35	24	35
25	25	25	36	25	36	25	36	25	36	25	36	25	36	25	36	25	36	25	36
26	26	26	37	26	37	26	37	26	37	26	37	26	37	26	37	26	37	26	37
27	27	27	38	27	38	27	38	27	38	27	38	27	38	27	38	27	38	27	38
28	28	28	39	28	39	28	39	28	39	28	39	28	39	28	39	28	39	28	39
29	29	29	40	29	40	29	40	29	40	29	40	29	40	29	40	29	40	29	40
30	30	30	41	30	41	30	41	30	41	30	41	30	41	30	41	30	41	30	41
31	31	31	42	31	42	31	42	31	42	31	42	31	42	31	42	31	42	31	42
32	32	32	43	32	43	32	43	32	43	32	43	32	43	32	43	32	43	32	43
33	33	33	44	33	44	33	44	33	44	33	44	33	44	33	44	33	44	33	44
34	34	34	45	34	45	34	45	34	45	34	45	34	45	34	45	34	45	34	45
35	35	35	46	35	46	35	46	35	46	35	46	35	46	35	46	35	46	35	46
36	36	36	47	36	47	36	47	36	47	36	47	36	47	36	47	36	47	36	47
37	37	37	48	37	48	37	48	37	48	37	48	37	48	37	48	37	48	37	48
38	38	38	49	38	49	38	49	38	49	38	49	38	49	38	49	38	49	38	49
39	39	39	50	39	50	39	50	39	50	39	50	39	50	39	50	39	50	39	50
40	40	40	51	40	51	40	51	40	51	40	51	40	51	40	51	40	51	40	51
41	41	41	52	41	52	41	52	41	52	41	52	41	52	41	52	41	52	41	52
42	42	42	53	42	53	42	53	42	53	42	53	42	53	42	53	42	53	42	53
43	43	43	54	43	54	43	54	43	54	43	54	43	54	43	54	43	54	43	54
44	44	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55	44	55
45	45	45	56	45	56	45	56	45	56	45	56	45	56	45	56	45	56	45	56
46	46	46	57	46	57	46	57	46	57	46	57	46	57	46	57	46	57	46	57
47	47	47	58	47	58	47	58	47	58	47	58	47	58	47	58	47	58	47	58
48	48	48	59	48	59	48	59	48	59	48	59	48	59	48	59	48	59	48	59
49	49	49	60	49	60	49	60	49	60	49	60	49	60	49	60	49	60	49	60
50	50	50	61	50	61	50	61	50	61	50	61	50	61	50	61	50	61	50	61
51	51	51	62	51	62	51	62	51	62	51	62	51	62	51	62	51	62	51	62
52	52	52	63	52	63	52	63	52	63	52	63	52	63	52	63	52	63	52	63
53	53	53	64	53	64	53	64	53	64	53	64	53	64	53	64	53	64	53	64
54	54	54	65	54	65	54	65	54	65	54	65	54	65	54	65	54	65	54	65
55	55	55	66	55	66	55	66	55	66	55	66	55	66	55	66	55	66	55	66
56	56	56	67	56	67	56	67	56	67	56	67	56	67	56	67	56	67	56	67
57	57	57	68	57	68	57	68	57	68	57	68	57	68	57	68	57	68	57	68
58	58	58	69	58	69	58	69	58	69	58	69	58	69	58	69	58	69	58	69
59	59	59	70	59	70	59	70	59	70	59	70	59	70	59	70	59	70	59	70
60	60	60	71	60	71	60	71	60	71	60	71	60	71	60	71	60	71	60	71
61	61	61	72	61	72	61	72	61	72	61	72	61	72	61	72	61	72	61	72
62	62	62	73	62	73	62	73	62	73	62	73	62	73	62	73	62	73	62	73
63	63	63	74	63	74	63	74	63	74	63	74	63	74	63	74	63	74	63	74
64	64	64	75	64	75	64	75	64	75	64	75	64	75	64	75	64	75	64	75
65	65	65	76	65	76	65	76	65	76	65	76	65	76	65	76	65	76	65	76
66	66	66	77	66	77	66	77	66	77	66	77	66	77	66	77	66	77	66	77
67	67	67	78	67	78	67	78	67	78	67	78	67	78	67	78	67	78	67	78
68	68	68	79	68	79	68	79	68	79	68	79	68	79	68	79	68	79	68	79
69	69	69	80	69	80	69	80	69	80	69	80	69	80	69	80	69	80	69	80
70	70	70	81	70	81	70	81	70	81	70	81	70	81	70	81	70	81	70	81
71	71	71	82	71	82	71	82	71	82	71	82	71	82	71	82	71	82	71	82
72	72	72	83	72	83	72	83	72	83	72	83	72	83	72	83	72	83	72	83
73	73	73	84	73	84	73	84	73	84	73	84	73	84	73	84	73	84	73	84
74	74	74	85	74	85	74	85	74	85	74	85	74	85	74	85	74	85	74	85
75	75	75	86	75	86	75	86	75	86	75	86	75	86	75	86	75	86	75	86
76	76	76	87	76	87	76	87	76	87	76	87	76	87	76	87	76	87	76	87
77	77	77	88	77	88	77	88	77	88	77	88	77	88	77	88	77	88	77	88
78	78	78	89	78	89	78	89	78	89	78	89	78	89	78	89	78	89	78	89
79	79	79	90	79	90	79	90	79	90	79	90	79	90	79	90	79	90	79	90
80	80	80	91	80	91	80	91	80	91	80	91	80	91	80	91	80	91	80	91
81	81	81	92	81	92	81	92	81	92	81	92	81	92	81	92	81	92	81	92
82	82	82	93	82	93	82	93	82	93	82	93	82	93	82	93	82	93	82	93
83	83	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94
84	84	84	95	84	95	84	95	84	95	84	95	84	95	84	95	84	95	84	95
85	85	85	96	85	96	85	96	85	96	85	96	85	96	85	96	85	96	85	96
86	86	86	97	86	97														

1					2	3	4	5	6	7	8-10	11	12-14	15-18
					Jumlah Gedung Rector For Kesehatan (Rector yang dipisahkan dari)	1	1	1	1	1				
					Jumlah Gedung Rector dan Praktek dan pelayanan kesehatan (Rector yang dipisahkan dari)	10	10	10	10	10				
					Jumlah Gedung dan Praktek kesehatan umum yang dipisahkan dari	1	1	1	1	1				
1	17	18			Program Pengembangan Kesehatan Rector dan Kesehatan Masyarakat (Rector)	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Program Kesehatan Rector, Pelayanan dan Pelayanan Kesehatan Rector dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rector									
1	17	18	1.0	11	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	12	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	13	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	14	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	15	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	16	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	17	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	18	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	19	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1.0		Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector									
1	17	18	1.0	20	Pelayanan dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector dan Pelayanan Rector	10	10	10	10	10				
1	17	18	1											

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Tahanan Pasukan Pertama:	Jumlah Pasuk yang ditugaskan ke/keatasnya (orang)	0	0	0	100	0		
1	22	07	10	01	Pembatalan Kapten Kibinawa Pembatalan Pasukan (1) (Kibinawa)	Disetujui perusakan rumah dan sisa-sisa hasil produksi Jumlah yang dipusahkan (kg)	0	0	1	1	100		
1	22	07	10	02	Pembatalan Kapten Kibinawa Pasukan (1) Kibinawa	Jumlah pasuk perusakan dan pulak sisa-sisa yang dipusahkan (kg)	100	100	10	10	100		
						Jumlah limbah dan limbah dari Jumlah yang dipusahkan jumlahnya limbah dari jumlah limbah (kg)	100	0	10	10	100		
						Jumlah perusakan rumah dan sisa-sisa perusakan rumah (kg)	100	100,00	100	100	100		
1	22	07	10	03	Pembatalan dan Pembatalan Kibinawa Pasukan Kibinawa Pembatalan Kibinawa	Jumlah pasuk perusakan limbah Jumlah limbah dari limbah rumah	0	0	0	0	0		

KODE					Uraian Kegiatan sesuai Penjelasan (Tahap dan Program dan)	Indikator Kinerja Program (sesuai Kerangka acuan)	Target Kinerja Capaian Program (Sasaran PDR kompetensi Periode 2015)	Realisasi Target Kinerja (Terdapat Program dan Kegiatan Laporan 12 Tahun 2015)	Tingkat dan Realisasi Target Program dan Capaian Tahun 2015			Target Program dan Capaian Berkas PDR Agustus 2015	Tingkat dan Realisasi Target Program dan Capaian (PDR dan Tahun Berikut)	
URUTAN	KEMENTERIAN	DEPARTEMEN	PROVINSI	KABUPATEN					Target Kinerja PDR (Tahun 2015)	Realisasi Kinerja PDR (Tahun 2015)	Target Realisasi (%)		Target Kinerja Program dan Capaian (12 Tahun 2015)	Target Kinerja Realisasi Target Sesuai (%)
													100/100	100/100
KELOMPOK 1: KEMENTERIAN RI														
1	RI				Program Pemasangan Sistem Pemeriksaan Daerah Kesehatan Kota									
2	RI	RI			Program Pemasangan Sistem Pemeriksaan Daerah Kesehatan Kota	Target pelayanan Administrasi Kesehatan (%)	100					100	100	100
						Persentase Efektivitas Kerja dan Pelayanan Administrasi (%)	100					100	100	100
						Persentase ADP yang memenuhi kriteria pelayanan (%)	100					100	100	100
						Persentase Penerimaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	100					100	100	100
3	RI	RI	DI		Pelayanan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Daerah									
4	RI	RI	DI	DI	Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan jangka panjang (JRP)	3					3	3	100
5	RI	RI	DI	DI	Kendali dan Pelaksanaan Kegiatan (KAP/KEK)	Jumlah Dokumen KAP/KEK dan Laporan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan (KAP/KEK) (JRP)	9					9	9	100
6	RI	RI	DI	DI	Kendali dan Pelaksanaan Kegiatan (KAP/KEK) dan Evaluasi Kinerja (KAP/KEK)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja KAP/KEK dan Laporan Realisasi	11					11	11	100
7	RI	RI	DI	DI	Kendali dan Pelaksanaan Kegiatan (KAP/KEK) dan Evaluasi Kinerja (KAP/KEK)	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Daerah (JRP)	10					10	10	100
8	RI	RI	DI	DI	Administrasi Keuangan Pelayanan Daerah									
9	RI	RI	DI	DI	Persentase (KAP/KEK) dan Kegiatan	Jumlah yang telah menerima GSP dan Laporan ADP (JRP)	10/14					10/14	10/14	100
10	RI	RI	DI	DI	Persentase (KAP/KEK) dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan (KAP/KEK)	10/1					10/1	10/1	100
11	RI	RI	DI	DI	Persentase (KAP/KEK) dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Administrasi dan Anggaran Realisasi Anggaran KAP/KEK dan	12					12	12	100
12	RI	RI	DI	DI	Kendali dan Pelaksanaan Kegiatan (KAP/KEK) dan Evaluasi Kinerja (KAP/KEK)	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan (KAP/KEK) dan Anggaran Realisasi (KAP/KEK)	13					13	13	100

1				2		3		4	5	6	7	8-10	9	10-15	16-20	
a	bb	BB	CC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
					Lembaga Kerja MIA Daerah pada Peringkat Daerah											
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Perencanaan Kebijakan Kerja MIA Tahun 2019	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja MIA Daerah MPO (Makassar)	1						0	0	0	
1	aa	BB	CC	DD	Pelatihan dan Penguatan Kapabilitas Kerja MIA Daerah pada KMP	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja MIA Daerah MPO (Makassar)	1						1	1	10	
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja MIA Daerah pada KMP	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja MIA Daerah pada KMP (Makassar)	10							0	0	0
1	aa	BB	CC	DD	Adaptasi Kegiatan Peringkat Daerah											
1	aa	BB	CC	DD	Pelatihan dan Penguatan Adaptasi Kegiatan	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja Adaptasi Kegiatan	10							0	0	0
1	aa	BB	CC	DD	Pelatihan dan Penguatan Kerja MIA	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	10							10	10	10
1	aa	BB	CC	DD	Pelatihan dan Penguatan Kebijakan Kerja dan Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							0	0	0
1	aa	BB	CC	DD	Pelatihan dan Penguatan Kebijakan Kerja dan Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	100
1	aa	BB	CC	DD	Adaptasi Kerja Peringkat Daerah											
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	10							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok Kerja Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Kerja	Jumlah Peserta/Kelompok Kerja dan Peserta MIA Kerja (Makassar)	1							1	1	10
1	aa	BB	CC	DD	Pertemuan Kerja/Kelompok											

[illegible]

1					2	3	4	5	6	7	8+9+10	11	12+13+14	15+16
1	27	84	1.8 5		Pengelolaan Pekarisan Jati Luhurmentan dan Jati Madi Vasertan dalam Daerah Kebudayaan Rito									
1	27	84	1.8 5	42	Pengelolaan pesisir pantai yang menjadi situs budaya	Jumlah pengurusan jati madi vasertan (kg/ha)	4					1	1	7
1	27	84	1.8 6		Pelaksanaan dan Pengurusan Pengurusan Teluk Kuchatan Majlis Daerah Vasertan									
1	27	84	1.8 5	30	Pengurusan pesisir pantai kawasan pantai budaya	Jumlah pengurusan pesisir pantai dan pesisir budaya (kg/ha)	4					1	1	17
1	27	87			Program Penyelidikan Perikanan	Pemeriksaan Leleburan Rantai Rantai Madi Rito	11.1					1.74	1.74	1.2
1	27	87	1.8 5		Pelaksanaan Pengurusan Perikanan									
1	27	87	1.8 5	12	Pengurusan Perikanan Kawasan Perikanan di Kawasan Jati Madi	Jumlah Kelengkapan Perikanan di Kawasan dan Data yang Ditayangkan (kg/ha) (kg/ha)	15					1.2	1.2	1.2

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Produktivitas komoditi perkebunan per ha per tahun (%)		√	2.54	2.73	2.78	2.80	2.36	2.40*	2.45	2.50	Perhitungan ini berdasarkan produktivitas total komoditi perkebunan per ha per tahun dibagi luas panen (luas area tanaman menghasilkan). Data ini mengacu pada Statistik Perkebunan (Angka Tetap maupun Angka Sementara). *Untuk realisasi tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2022 karena data angka sementara belum ada.
2	Produktivitas Peternakan (daging dan Telur)		√	69,91	70	70.13	70.25	64.5	64.7*	65	65.5	Dihitung berdasarkan jumlah produksi daging dan telur dibagi jumlah populasi ternak. *Capaian tahun 2023 merupakan estimasi karena populasi ternak belum terdara.
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)		√	30	100	100	100	200	100	100	100	Target dan capaian IKK dihitung berdasarkan jumlah kasus tahun berjalan dikurangi jumlah kasus tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya. Kasus yang dihitung adalah rabies dan ASF. Nilai minus berarti terjadi peningkatan kasus yaitu pada rabies. Untuk rabies, yang dihitung adalah kasus kematian pada manusia.

Dari tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan. Untuk indikator peningkatan produktivitas komoditi perkebunan per hektar per tahun dihitung berdasarkan produktivitas rata-rata komoditi perkebunan (seluruh komoditi) dibagi luas panen (luas areal tanaman menghasilkan). Data tahun 2022, produktivitas komoditi perkebunan adalah 838 kg/ha dengan luas panen 35.451,92 ha. Untuk tahun 2023, capaian dihitung berdasarkan angka semesta (ASEM) statistik perkebunan tahun 2022 dan estimasi produktivitas tahun berjalan (2023) sebesar 850 kg/ha.

Indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, difokuskan pada penyakit rabies dan ASF. Untuk rabies terjadi peningkatan sebanyak 5 kasus pada tahun 2022 setelah sebelumnya pada tahun 2021 tidak ada kasus (0) sehingga terjadi peningkatan kasus mencapai 500%. Untuk ASF, terdapat 50 kasus pada tahun 2022 setelah sebelumnya terdapat 67603 pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan angka penurunan kasus yang cukup signifikan mencapai 99,9%. Capaian tahun 2023, diperkirakan tidak ada kasus.

2.3. Isu-Isu Strategis di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan dan Peternakan, diberi wewenang sebagai berikut : a. Merumuskan Kebijakan Teknis di bidang Pertanian (sub urusan Perkebunan dan Peternakan) dan uraian prasarana pendukungnya; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Produktivitas tanaman perkebunan

Produktivitas perkebunan rakyat menjadi permasalahan yang masih sulit untuk diselesaikan. Pengelolaan tanaman perkebunan yang sangat bergantung pada kondisi iklim, kurangnya intervensi berupa intensifikasi dan kondisi perkebunan rakyat yang didominasi tanaman tua menjadi penyebab menurunnya produktivitas.

2. Produktivitas ternak

Kebutuhan akan daging dan telur untuk konsumsi masyarakat menjadi persoalan utama. Peternak lokal Flores Timur belum mampu mencukupi kebutuhan daging dan telur sehingga harus didatangkan dari luar Flores Timur. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang harus mendatangkan ternak (ayam, sapi dan kambing) serta telur dari luar wilayah Flores Timur untuk mencukupi konsumsi masyarakat. Pola pengembangan ternak yang tidak terfokus dan dalam skala kecil menjadi penyebab utama terbatasnya produksi.

3. Harga jual komoditi perkebunan

Harga jual produk komoditi perkebunan masih sulit untuk dikendalikan. Harga pada komoditi-komoditi utama perkebunan yaitu jambu mente, kelapa dan kakao mengalami fluktuasi setiap bulannya. Komoditi-komoditi ini dijual petani dalam bentuk mentah (gelondongan) kepada para pengumpul-pengumpul lokal. Rantai pemasaran yang terlalu panjang menyebabkan harga komoditi sulit dikendalikan. Selain itu, budaya jom masih ditemui karena desakan kebutuhan ekonomi yang menyebabkan harga tidak menguntungkan petani.

4. Kelembagaan pekebun dan peternak

Kelembagaan petani memiliki peranan penting dalam pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan. Kelembagaan pekebun maupun peternak yang memiliki peranan dalam memperbaiki peningkatan kemampuan manajerial serta pengaplikasian metode budidaya yang baru masih belum mampu bekerja secara optimal. Pekebun dan peternak masih menemui banyak permasalahan yang harus dihadapi sendiri karena lemahnya kelembagaan pekebun ini. Kurangnya partisipasi dan minat kaum muda untuk menggeluti sektor perkebunan dan peternakan sangat mempengaruhi kinerja lembaga tadi. Lemahnya kelembagaan juga berdampak kepada rendahnya posisi tawar pekebun dan peternak dalam menjalankan proses produksinya. Minimnya partisipasi petani di dalam kelompok juga menjadi alasan belum berjalan secara aktif kelembagaan tersebut.

5. Pelayanan Kesehatan Hewan

Saat ini, di Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan) Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang melayani 19 Kecamatan. Untuk setiap Puskesmas memiliki wilayah kerja antara 1 (satu) s/d 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah tenaga pelayanan 2

sampai 3 orang. Selain itu, belum semua Puskesmas memiliki sarana prasarana serta sumber daya manusia yang memadai sehingga pelayanan kesehatan hewan belum berjalan secara optimal. Melihat luas wilayah kerja, tingginya permintaan pelayanan serta semakin banyaknya jenis penyakit hewan, maka ketersediaan tenaga ahli (Dokter Hewan) yang memadai menjadi kebutuhan penting.

Kasus penyakit strategis yaitu rabies yang kembali merebak menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Kurangnya vaksinasi rabies bagi HPP menjadi penyebab utama meningkatnya kasus ini.

6. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kesehatan masyarakat veteriner (Keumavet) berkaitan dengan konsumsi pangan asal hewan. Dinas Perkebunan dan Peternakan harus memastikan bahwa pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi syarat ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Sosialisasi dan pengawasan keamanan pangan asal hewan menjadi hal yang sangat penting dan melibatkan semua stake holder, mulai dari dinas-dinas terkait, peternak, distributor, pengusaha makanan dan masyarakat selaku konsumen.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil review dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEUTUKAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	PAGU (Rp)	URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
URUSAN					URUSAN					
PEMERINTAHAN DAS					PEMERINTAHAN DAS					
PETERNAKAN					PETERNAKAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAS KOTA		Tingkat Pelaksanaan Administrasi Peternakan (%)	100	11,111,111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAS KOTA		Tingkat Pelaksanaan Administrasi Peternakan (%)	100	11,111,111	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Agribisnis (%)	100				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Agribisnis (%)	100		
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi kompetensi (%)	100				Persentase ASN yang memiliki kompetensi kompetensi (%)	100		
		Persentase Peningkatan dan Penguasaan Capaian Kinerja dan Kinerja (%)	100				Persentase Peningkatan dan Penguasaan Capaian Kinerja dan Kinerja (%)	100		
Pengembangan, Penguasaan dan Evaluasi Kinerja Penguasaan Daerah		Pengembangan, Penguasaan dan Evaluasi Kinerja Penguasaan Daerah		11,111,111	Pengembangan, Penguasaan dan Evaluasi Kinerja Penguasaan Daerah				11,111,111	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penghapusan Daerah	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen perencanaan penghapusan daerah (DPA)	2	16.875.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penghapusan Daerah	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen perencanaan penghapusan daerah (DPA)	2	11.000.000	Mengembangkan anggaran RKPD
Kondisi dan Penyusunan Dokumen RK.A-RKPD	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen RK.A-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RK.A-RKPD (ada)	2	3.500.000	Kondisi dan Penyusunan Dokumen RK.A-RKPD	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen RK.A-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RK.A-RKPD (ada)	2	3.500.000	Mengembangkan anggaran RKPD
Kondisi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan RKPD	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja RKPD (aparat)	3	14.000.000	Kondisi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja RKPD	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja RKPD (aparat)	3	7.000.000	Mengembangkan anggaran RKPD
Analisis Kinerja Penghapusan Daerah	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penghapusan Daerah (aparat)	4	3.500.000	Evaluasi Kinerja Penghapusan Daerah	Kantor Dinas Perkelurahan dan Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penghapusan Daerah (aparat)	4	3.000.000	Mengembangkan anggaran RKPD
Adaptasi Eksternal Penghapusan Daerah		Terdapatnya Dokumen Laporan Eksternal Evaluasi Tripartit/dua/dua-tiga RKPD dan Laporan Evaluasi Penyusunan Laporan Eksternal (ada)		2.175.191.100	Adaptasi Eksternal Penghapusan Daerah				2.191.117.360	
Penyusunan Gap dan Tinjauan ASN	Lazimda, Kab. Flores Timur	Jumlah orang yang melakukan Gap dan Tinjauan ASN (orang/bulan)	30/14	2.175.192.500	Penyusunan Gap dan Tinjauan ASN	Lazimda, Kab. Flores Timur	Jumlah orang yang melakukan Gap dan Tinjauan ASN (orang/bulan)	30/14	2.321.717.360	Mengembangkan anggaran RKPD
Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lazimda, Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (ada)	12	10.000.000	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lazimda, Kab. Flores Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (ada)	12	75.000.000	Mengembangkan anggaran RKPD

Kerjasama dan Pelayanan Lapangan Kecamatan Bulungan/ Tiruvahan/ Samarinda GAPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Kecamatan Bulungan/ Tiruvahan/ Samarinda SKPD dan Laporan Kecamatan Pelayanan Lapangan Kecamatan Bulungan/ Tiruvahan/ Samarinda SKPD (Lapangan)	2	1.000.000	Kerjasama dan Pelayanan Lapangan Kecamatan Bulungan/ Tiruvahan/ Samarinda SKPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Kecamatan Bulungan/ Tiruvahan/ Samarinda SKPD dan Laporan Kecamatan Pelayanan Lapangan Kecamatan Bulungan/ Tiruvahan/ Samarinda SKPD (Lapangan)	2	1.000.000	Mengembangkan dengan RKPD
Admistrasi Kecamatan Darah pada Peningkatan Daerah		Jumlah Laporan Peningkatan Kecamatan Darah pada SKPD (Lap)		1.000.000	Admistrasi Kecamatan Darah pada Peningkatan Daerah				1.000.000	
Pelayanan Pemerintah Kecamatan Bulungan MUK Darah SKPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Kecamatan Bulungan MUK Darah SKPD (Lap)	1	1.000.000	Pelayanan Pemerintah Kecamatan Bulungan MUK Darah SKPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Kecamatan Bulungan MUK Darah SKPD (Lap)	1	1.000.000	Mengembangkan dengan RKPD
Eksistensi dan Pelayanan Lapangan Bulungan MUK Darah pada SKPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Eksistensi dan pelayanan lapangan Bulungan MUK Darah pada SKPD (Lapangan)	2	1.000.000	Eksistensi dan Pelayanan Lapangan Bulungan MUK Darah pada SKPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Eksistensi dan pelayanan lapangan Bulungan MUK Darah pada SKPD (Lapangan)	2	1.000.000	Mengembangkan dengan RKPD
Peningkatan Bulungan MUK Darah pada SKPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Peningkatan Bulungan MUK Darah pada SKPD (Lapangan)	1	1.000.000	Peningkatan Bulungan MUK Darah pada SKPD	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Peningkatan Bulungan MUK Darah pada SKPD (Lapangan)	1	1.000.000	Mengembangkan dengan RKPD
Admistrasi Kecamatan Peningkatan Daerah		Jumlah Laporan Kecamatan Peningkatan Daerah pada Meningkatkan Peningkatan dan Peningkatan (Lapangan)		1.000.000	Admistrasi Kecamatan Peningkatan Daerah				1.000.000	
Peningkatan dan Peningkatan Admistrasi Kecamatan	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Peningkatan dan Peningkatan Admistrasi Kecamatan (Lap)	12	2.000.000	Peningkatan dan Peningkatan Admistrasi Kecamatan	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Peningkatan dan Peningkatan Admistrasi Kecamatan (Lap)	12	2.000.000	Mengembangkan dengan RKPD
Meningkatkan Peningkatan dan Peningkatan Kecamatan	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Meningkatkan, Peningkatan dan Peningkatan Kecamatan Peningkatan (Lap)	12	2.000.000	Meningkatkan Peningkatan dan Peningkatan Kecamatan Peningkatan	Luaranada, Kab. Pekanbaru	Jumlah Laporan Meningkatkan, Peningkatan dan Peningkatan Kecamatan Peningkatan (Lap)	12	2.000.000	Mengembangkan dengan RKPD

Pembelian dan Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	10.000.000	Pembelian dan Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	10.000.000	Menggunakan Angka RRPD
Absorpsi Uang Pembelian		Pembelian Pembelian Pembelian		10.000.000	Absorpsi Uang Pembelian				10.000.000	
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	1.000.000	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	1.000.000	Menggunakan Angka RRPD
Pembelian Pembelian dan Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	2	3.000.000	Pembelian Pembelian dan Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	2	3.000.000	Menggunakan Angka RRPD
Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	1.700.000	Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	1.000.000	Menggunakan Angka RRPD
Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	3.000.000	Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	3.000.000	Menggunakan Angka RRPD
Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	2	10.000.000	Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	2	3.000.000	Menggunakan Angka RRPD
Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	2	1.000.000	Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	1	100.000	Menggunakan Angka RRPD Batas K/L Per K/L
Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	12	20.000.000	Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	12	12.000.000	Menggunakan Angka RRPD
Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	12	40.000.000	Pembelian Pembelian Pembelian	Lampiran, K/L Pembelian	Jumlah Pengerjaan Pembelian yang Pembelian (Pembelian)	12	20.000.000	Menggunakan Angka RRPD

Pemeriksaan Daerah		Pemeriksaan Urutan Pemeriksaan Daerah (U)			Pemeriksaan Daerah					
Pemeriksaan Jasa Surat-memecat	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah laporan pemeriksaan jasa surat-memecat (laporan)	12	5.000.000	Pemeriksaan Jasa Surat-memecat	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah laporan pemeriksaan jasa surat-memecat (laporan)	12	1.000.000	Menghasilkan laporan RKPD
Pemeriksaan Jasa Konstruksi Rumah Desa dan Desa Lirisik	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah laporan pemeriksaan jasa konstruksi, rumah desa dan desa lirisik yang diserahkan (laporan)	12	10.000.000	Pemeriksaan Jasa Konstruksi Rumah Desa dan Desa Lirisik	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah laporan pemeriksaan jasa konstruksi, rumah desa dan desa lirisik yang diserahkan (laporan)	12	4.000.000	Menghasilkan laporan RKPD
Pemeriksaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah laporan pemeriksaan jasa pelayanan umum kantor yang diserahkan (laporan)	12	20.000.000	Pemeriksaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah laporan pemeriksaan jasa pelayanan umum kantor yang diserahkan (laporan)	12	22.000.000	Menghasilkan laporan RKPD
Pendapatan Eksternal Miskin Daerah Pemeringan Urutan Pemeriksaan Daerah		Pemeriksaan PMSD Pemeriksaan Urutan Pemeriksaan Daerah (U)		120.402.540	Pendapatan Eksternal Miskin Daerah Pemeringan Urutan Pemeriksaan Daerah				47.300.000	
Pemeriksaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kebutuhan Desa Operasional dan lainnya	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan operasional dan lainnya yang diserahkan dan diserahkan pajak dan perawatannya (laporan)	18	20.000.000	Pemeriksaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kebutuhan Desa Operasional dan lainnya	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan operasional dan lainnya yang diserahkan dan diserahkan pajak dan perawatannya (laporan)	18	10.000.000	Menghasilkan laporan RKPD
Pemeriksaan Miskin	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah Miskin yang dipelihara (laporan)	5	11.000.000	Pemeriksaan Miskin	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah Miskin yang dipelihara (laporan)	5	2.000.000	Menghasilkan laporan RKPD
Pemeriksaan Pemeliharaan dan Miskin Lainnya	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah Pemeliharaan dan Miskin Lainnya yang dipelihara (laporan)	5	5.000.000	Pemeriksaan Pemeliharaan dan Miskin Lainnya	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah Pemeliharaan dan Miskin Lainnya yang dipelihara (laporan)	5	2.000.000	Menghasilkan laporan RKPD
Pemeriksaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (rehabilitasi) (laporan)	5	5.000.000	Pemeriksaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (rehabilitasi) (laporan)	5	2.000.000	Menghasilkan laporan RKPD
Pemeriksaan Rehabilitasi Rumah dan Perawatan	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah Rumah dan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (laporan)	5	3.000.000	Pemeriksaan Rehabilitasi Rumah dan Perawatan Gedung Kantor	Luwamta, Kab. Flores Timur	Jumlah Rumah dan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (laporan)	5	1.000.000	Menghasilkan laporan RKPD

Penyuluhan Kualitas SDG Rural/Tanaman (4)	PT Kencana, Kab. Ponorogo Taman	Jumlah Paket umum: Penyuluhan Kualitas SDG Rural/Tanaman (Dikemas)	4	264.264.769	Penyuluhan Kualitas SDG Rural/Tanaman	PT Kencana, Kab. Ponorogo Taman	Jumlah Paket umum: Penyuluhan Kualitas SDG Rural/Tanaman (Dikemas)	4	262.262.769	Jumlah Paket Umum: Kualitas SDG Rural/Tanaman (Dikemas) penyuluhan kualitas SDG Rural/Tanaman penyuluhan kualitas SDG Rural/Tanaman
Penyuluhan Masa dan Perawatan Berkah Sifat Tanah dan Tanaman Pakan Terakutasi Pakan dalam Darat Kegiatan Kom				20.000.000	Penyuluhan Masa dan Perawatan Berkah Sifat Tanah dan Tanaman Pakan Terakutasi Pakan dalam Darat Kegiatan Kom				11.000.000	
Penyuluhan Pakan Rural Pakan Pakan Rural/SDG Hijau Pakan Taman	PT Kencana, Kab. Ponorogo Taman	Jumlah Penyuluhan Rural Pakan Pakan, Rural/SDG Hijau Pakan Terakutasi yang Rural (Kegiatan)	1	20.000.000	Penyuluhan Pakan Sifat Pakan Pakan Rural/SDG Hijau Pakan Taman	PT Kencana, Kab. Ponorogo Taman	Jumlah Penyuluhan Rural Pakan Pakan, Rural/SDG Hijau Pakan Terakutasi yang Rural (Kegiatan)	1	11.000.000	Menyediakan Jenis BKPD
Penyuluhan dan Pakan Pakan dan Perawatan Berkah Sifat Tanah dan Ruman Pakan Terakutasi dalam Darat Kegiatan Kom				14.000.000	Penyuluhan dan Pakan Pakan dan Perawatan Berkah Sifat Tanah dan Ruman Pakan Terakutasi dalam Darat Kegiatan Kom				14.000.000	
Penyuluhan Pakan Rural/SDG Taman dan IPT, Rural Pakan Pakan	PT Kencana, Kab. Ponorogo Taman	Jumlah Penyuluhan Pakan Berkah Sifat Taman dan IPT, Rural Pakan Pakan (Kegiatan)	1	14.000.000	Penyuluhan Pakan Rural/SDG Taman dan IPT, Rural Pakan Pakan	PT Kencana, Kab. Ponorogo Taman	Jumlah Penyuluhan Pakan Berkah Sifat Taman dan IPT, Rural Pakan Pakan (Kegiatan)	1	14.000.000	Menyediakan Jenis BKPD
PROGRAM PENGHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN KETERANGAN PERTANIAN		Catatan pemerintah Pakan pemerintah (%)	32.40	33.000.000	PROGRAM PENGHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN KETERANGAN PERTANIAN		Catatan pemerintah Pakan pemerintah (%)	32.40	14.000.000	

Pembayaran Masyarakat Dalam Pengabdian Masyarakat		Jumlah Kader Terampil (orang)	15		Pembayaran Masyarakat Dalam Pengabdian Masyarakat	Terampil a	Jumlah Kader Terampil (orang)	15	25.000.000	Pembayaran masyarakat
Pada proses Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan (kelompok)		Jumlah Wilayah yang Dilakukan Survei dan Terampil pada Hewan (kelompok)	15		Pada proses Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan	15 Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Survei dan Terampil pada Hewan (kelompok)	15	25.750.000	Pembayaran masyarakat
Pada proses Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan		Jumlah Kegiatan Proyek yang Dilakukan dengan Penjabatan, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan (orang)	5		Pada proses Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan	15 Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Kegiatan Proyek yang Dilakukan dengan Penjabatan, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan (orang)	5	10.000.000	Pembayaran masyarakat
Pada proses Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan		Jumlah Wilayah yang Dilakukan Survei dan Terampil pada Hewan (orang)	1		Pada proses Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan	15 Kecamatan, Kab. Flores Timur	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Survei dan Terampil pada Hewan (orang)	1	400.700.000	Pembayaran masyarakat
Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan dari Kelompok Kuda				10.000.000	Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan dari Kelompok Kuda				40.000.000	
Pengadaan dan pemeliharaan hewan ternak produktif di desa-desa pengabdian hewan dan produk hewan	Kab. Flores Timur (17 Desa)	Jumlah pengabdian dan pemeliharaan hewan ternak produktif di desa-desa pengabdian hewan dan produk hewan (orang)	1	25.000.000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pembayaran masyarakat
Pada proses Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan	Kab. Flores Timur dan Kab. Kupang	Jumlah kegiatan Asesment, Penjabatan, dan Terampil pada Hewan (orang)	1	25.000.000	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pembayaran masyarakat

2.5. Penelaahan Ujulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan umian masyarakat diperoleh dari proses pelaksanaan mengenai tingkat Kecamatan, hasil riset Anggota DPRD, kunjungan kerja Kepala Daerah dan proposal dari masyarakat. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur

[illegible]

2	Program Penyelidikan dan Pengkajiannya Senang Persekitaran Kepuasan Penyelidikan Bandar Daya GEMILAK (KID) Bersepadu, Tindakan dan Mekanisme Pengurusan Kampung/Kota Satu Kajian Penyelidikan Kualitatif (SKQ) Bersepadu Temuan • Penyelidikan Kualitatif	Ku. Walinggung : Daya Walila, Nivalanta Ku. Hahira : Daya Wawawa Ku. R. Maudir : Daya Bungkuran Ku. Tanjung Bungk : Daya Lantingaya, Kuluha, Hahira, Palimandang Ku. Saba Tamar : Daya Kuluha Ku. Adaman Tamar : Daya Kalinggungah Ku. Adaman : Daya Lantingaya Ku. Adaman Tamar : Daya Bungk, Daya Hahira, Lantingaya Ku. Saba Tamar : Daya Kuluha, Hahira, Kuluha	Saluran pemerhatian senang persekitaran bersepadu pengurusan kampung/kota SKQ Bersepadu Temuan	200 Ha	Manorahang
	• Penyelidikan Kuantitatif	Ku. Adaman Tamar : Daya Kalinggungah, Lantingaya, Tamar, Tamar, Lantingaya Ku. Kuluha : Daya Lantingaya, Manorahang, Pulau Kuluha, Lantingaya Ku. Walinggung : Daya Bungk, Nivalanta, Hahira, Kuluha Ku. Hahira : Daya Manorahang, Lantingaya, Lantingaya, Tamar Ku. R. Maudir : Daya Bungkuran Ku. Saba Tamar : Daya Tamar Ku. Adaman Bungk : Daya Bungkuran, Walinggung, Tamar, Hahira Ku. Adaman Tamar : Daya Bungk, Lantingaya, Hahira, Nivalanta, Nivalanta Ku. Waring Waring : Daya Kuluha, Puluha Ku. Kuluha : Daya Kuluha, Kuluha Ku. Adaman : Daya Tamar, Lantingaya Ku. Adaman Tamar : Daya Bungk, Hahira, Waring Waring Ku. Adaman Tamar : Daya Kalinggungah, Lantingaya, Tamar, Tamar, Lantingaya Ku. Walinggung : Daya Kuluha, Puluha Ku. Walinggung : Daya Nivalanta, Daya Kuluha Ku. Hahira : Daya Lantingaya, Tamar, Lantingaya, Tamar Ku. R. Maudir : Daya Bungkuran Ku. Adaman Bungk : Daya Bungkuran, Bungk Tamar, Nivalanta, Lantingaya, Hahira Ku. Adaman Tamar : Daya Kuluha, Bungk, Kuluha, Lantingaya, Nivalanta Ku. Kuluha : Daya Lantingaya, Nivalanta Ku. R. Maudir : Daya Lantingaya, Hahira Ku. R. Bungk : Daya Tamar Ku. Adaman : Daya Kalinggung, Tamar, Lantingaya, Lantingaya Ku. Adaman Tamar : Daya Bungk, Hahira, Hahira, Lantingaya, Kuluha Ku. Saba Tamar : Daya Kuluha Ku. Walinggung : Daya Walinggung		100 Ha	Manorahang
	• Penyelidikan Kualitatif	Ku. Adaman Tamar : Daya Kalinggungah, Lantingaya, Tamar, Tamar, Lantingaya Ku. Walinggung : Daya Kuluha, Puluha Ku. Walinggung : Daya Nivalanta, Daya Kuluha Ku. Hahira : Daya Lantingaya, Tamar, Lantingaya, Tamar Ku. R. Maudir : Daya Bungkuran Ku. Adaman Bungk : Daya Bungkuran, Bungk Tamar, Nivalanta, Lantingaya, Hahira Ku. Adaman Tamar : Daya Kuluha, Bungk, Kuluha, Lantingaya, Nivalanta Ku. Kuluha : Daya Lantingaya, Nivalanta Ku. R. Maudir : Daya Lantingaya, Hahira Ku. R. Bungk : Daya Tamar Ku. Adaman : Daya Kalinggung, Tamar, Lantingaya, Lantingaya Ku. Adaman Tamar : Daya Bungk, Hahira, Hahira, Lantingaya, Kuluha Ku. Saba Tamar : Daya Kuluha Ku. Walinggung : Daya Walinggung		100 Ha	Manorahang
	• Penyelidikan Kuantitatif	Ku. Saba Tamar : Daya Kuluha Ku. Walinggung : Daya Walinggung		100 Ha	Manorahang
3	Program Penyelidikan Persekitaran Kepuasan Penerimaan Penyelidikan Persekitaran Satu Kajian Penyelidikan Kualitatif (SKQ) Bersepadu Temuan	Ku. Walinggung : Daya Kuluha, Nivalanta Ku. R. Maudir : Daya Bungkuran Ku. Saba Tamar : Daya Lantingaya Ku. Saba Tamar : Daya Kuluha, Lantingaya, Lantingaya Ku. Adaman Bungk : Daya Walinggung, Bungk Tamar, Nivalanta	Saluran pemerhatian Persekitaran dan Kampung/Kota SKQ Bersepadu Temuan	24 Ha	Manorahang

	• <u>Peningkatan Kapasitas Petani</u> <u>Yamawa Pesisir Barat</u>	- Ks. Adipati Tama, Dns Duvatu, Nanyawa, Labidale - Ks. Chikupili, Dns Lumbaya - Ks. Wilikupa, Lumbaya - Ks. H. Hiding, Dns Hutan - Ks. Mawani, Dns Kikimasing - Ks. Adonari Tugali, Dns Lewidale, Nanyawa, Lumbaya - Ks. Sela Sela, Dns Talla, Nanyawa, Hutanjawa, Kikimasing, Talla			
	• <u>Peningkatan Kapasitas Petani</u>	- Ks. Walunggang, Dns Huta, Huta - Ks. Tanjung Baga, Dns Nanyawa, Kallala - Ks. Sela Huta, Dns Kikimasing - Ks. Adonari Huta - Ks. Adonari Tama, Dns Lumbaya, Kikimasing, Nanyawa, Labidale - Ks. Chikupili, Dns Lumbaya - Ks. H. Hiding, Dns Lumbaya - Ks. Adonari Tugali, Dns Lewidale, Lumbaya		14 unit	Nanyawa

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penederhanaan Regulasi, Penederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*. Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 8 (delapan) arah kebijakan yaitu (1) *Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem*; (2) *Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan*; (3) *Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan*; (4) *Penguatan daya saing usaha*; (5) *Pembangunan rendah karbon dan transisi energi*; (6) *Percapaian pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas*; dan (7) *Pembangunan Ibu Kota Nusantara*; dan (8) *Pelaksanaan Pemilu*.

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Tema pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sejalan dengan tema RKP yaitu : *"Percapaian transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas"* dengan fokus pada 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu : (1) *Perekonomian masyarakat*; (2) *Sumber Daya Manusia*; (3) *Infrastruktur dan Lingkungan Hidup*; (4) *Tata Kelola Pemerintahan*. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika diimbangi oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebagai OPD teknis pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub sektor perkebunan dan peternakan, dalam penyusunan Renja diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang

termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA). Tujuan dan sasaran tersebut adalah:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
Terwujudnya daya saing daerah	Terwujudnya daya saing ekonomi	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1,45	2,35

Selanjutnya, untuk mengukur terwujudnya pelaksanaan pembangunan tahun 2024, dirumuskan sasaran dan target kinerja dari prioritas pembangunan “Perekonomian Masyarakat” sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Target Kinerja
1	Perekonomian Masyarakat	1.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (point)	103,5
		1.3 Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,35
			Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	27,46

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan pertimbangan faktor-faktor berikut :

1. Pencapaian misi daerah yang tertuang dalam dalam RPJPD
2. Penyakit hewan strategis yang kembali mewabah yaitu rabies
3. Intervensi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
4. Keberlanjutan program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya
5. Pendayagunaan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 terdiri dari 3 program prioritas dan 2 program penunjang, 19 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten Flores Timur dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penguji/ pengujian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan kapasitas aparatur;

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terutama Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, merupakan penggabungan beberapa kegiatan baik sektor perkebunan dan peternakan. Sektor perkebunan terpusat pada pengembangan komoditi perkebunan; pemeliharaan kebun buah jambu mente di desa Bokang Wajomatang Kecamatan Tinehena, , Kebun Kelor di Kelurahan Waibahn Kecamatan Larantuka, serta kebun dinas Tuskrwiki desa Dulipali Kec. Be Bura. Selain itu sub kegiatan ini juga mengakomodir pencegahan dan pengendalian OPT perkebunan. Untuk sektor peternakan, pembibitan ternak terfokus pada lokasi kebun Dinas Tuskrwiki, sementara IB sapi tersebar di 10 kecamatan.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terfokus pada penyusunan database perkebunan dan peternakan serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner.
5. Program Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kemandirian Petani di Kecamatan dan Desa difokuskan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani berupa pelatihan, bimtek ataupun sekolah lapang (SL).
6. Total pagu indikatif tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.832,518,747,- (*lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan sumber dana berasal dari DAU.

Rumusan rencana program prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Rincian Rencana Program dan Kegiatan Persingkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Masing Tahun 2025

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
ABJABAH URUSAN	ABJABAH DAERAH	ABJABAH URUSAN	ABJABAH PROGRAM	ABJABAH KEGIATAN			LOKASI	TARGET KAPASITAS SISTEM	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
3	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
					DANA PERKOTAAN DAN PELUSUKAN			1.000.000.000					1.000.000.000
3	17	82			PROGRAM PEMBERHAAN DAN PENGEMPGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemeliharaan sarana pertanian (%)	40	1.414.000.000	-	-	12		583.000.000
3	27	82	2.01		Program dan Kegiatan Sarana Pertanian			115.000.000					177.500.000
				01	Pengembangan Program Sarana Peternakan Pertanian Sistem dengan Kemitraan Tahap dan Spesifik Lokasi	Indikator Pengembangan Program Sarana Peternakan Pertanian Sistem dengan Kemitraan Tahap dan Spesifik Lokasi (Gawron)	1	11.000.000	Dana Transfer Umum (DAU)	1			27.500.000
3	27	82	2.01	02	Pengembangan Program Sarana Peternakan Pertanian	Indikator Pengembangan Program Sarana Peternakan Pertanian (Laporn)	2	120.000.000	Dana Transfer Umum (DAU)	1			1.000.000.000

[illegible]

1	27	92	2.81		Pengembangan dan Penguatan Pengabdian dan Pemberdayaan Berbasis SBC Terpadu dan Kapasitas Pakar Terpadu dalam Daerah Kabupaten Kota				16,370,000			17,000,000
2	27	92	2.82	90	Pengembangan Produk Berbasis SBC Terpadu dan HPT, Pakar Pakar Pakar	Sistem Pengembangan Produk Berbasis SBC Terpadu dan HPT, Kapasitas Pakar Pakar (Lapangan)	17 Kecamatan, 100 Desa Desa	1	14,000,000	Desa Terpadu Kapasitas (SBC)	1	17,000,000
3	27	93			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRABAKAR PERTANTAN	Cakupan pemenuhan Prabakar pertanian (%)		42.42	140,000,000		54.00	1,042,500,000
4	27	93	2.83		Pengembangan Prasarana Pertanian				42,000,000			42,500,000
5	27	93	2.84	94	Konsultasi dan Sistematisasi Prasarana Pembiayaan Pertanian Lainnya	Sistematisasi dan Sistematisasi Prasarana Pembiayaan Pertanian Lainnya (Lapangan)	Pasar Lumbung, Pasar Desa, Pasar Waduk, Pasar Terpadu, Pasar Waduk, Pasar Mark, Pasar Lumbung dan Prasarana Data Statistik & Lumbung	2	40,000,000	Desa Terpadu Kapasitas (SBC)	2	42,500,000
6	27	93	2.85		Pengembangan Prasarana Pertanian				100,000,000			1,000,000,000
7	27	93	2.86	95	Pengembangan, Ketersediaan dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Sistem pemenuhan prasarana lainnya yang meliputi, Ketersediaan dan Ketersediaan (SBC)	Parkir, Prasarana SBC Sistem Mark	1	100,000,000	Desa Terpadu Kapasitas (SBC)	1	1,000,000,000
8	27	97			PROGRAM PENYULUHAN PERTANTAN	Persentase Layanan Pemas: Tingkat Madya (%)		1.47	100,000,000		18.30	330,000,000
9	27	97	2.87		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				100,000,000			330,000,000
10	27	97	2.88	96	Pengembangan Kapasitas Ketersediaan Prasarana Ketersediaan dan Data	Sistem Ketersediaan Prasarana Ketersediaan dan Data yang Meliputi dan Ketersediaan (SBC)	Ketersediaan dan Ketersediaan	15	100,000,000	Desa Terpadu Kapasitas (SBC)	20	1,000,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah Muka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, diuraikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO	KODE	GURUP BERANGGUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDUKSI ON PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Tipe dan Periode Rencana DPO	SKALAS LOKASI RENCANA DPO TAHUN 2024	KANTORAN LOKASI TARGET RENCANA DPO TAHUN 2024	CATATAN RENCANA DAN REHANSUR PENDANAAN						KELUARAN TAKSIKAS	PANGKASAN RASIO RENCANA LAMUN 2024		PENANGANAN DANA PERANGKUN LAMUN	
							TARGET BILA	PACU RENCANA (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGHARGAAN			TAKSIKAS	PACU RENCANA (Rp)		
											YB	ORBITA			YB		ORBITA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	WILAYAH PEMERINTAHAN TULUNG WILAYAH PERKOTAAN BANGKALAN						5.000.000.000							5.000.000.000		
	2.27	WILAYAH PERKOTAAN BANGKALAN						5.000.000.000							5.000.000.000		
1	2.27.01	PROGRAM PENGURANG BANGKALAN PERKOTAAN BANGKALAN KOTA BANGKALAN						2.000.000.000				Perangkat Perantara			2.000.000.000	DINAS PERKOTAAN DAN PERKOTAAN	
			Digital Pelayanan Administrasi Pemerintahan (5)				100										
			Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat (5)				100										
			Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat (5)				100										
			Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat (5)				100										
	2.27.01.2.01	Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Fasilitas Perantara Bangkalan						2.000.000.000							2.000.000.000	DINAS PERKOTAAN DAN PERKOTAAN	

1.2.01.01.01.01	Pengukuran Saluran Perikanan Perangkap Darat						14.000.000				Pengumpul Perikanan			14.000.000	0043 (KURANGAN DAK) (KURANGAN)
		Jumlah Dokumen Perikanan Perangkap Darat (Dokumen)	0.00	0.00	3			Lebaran (KURANGAN PERULU)	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Perangkap Darat	3			
1.2.01.01.01.02.01	Konsumsi dan Pengukuran Saluran RMA-SIPO						1.000.000				Pengumpul Perikanan	Perangkap Darat		1.000.000	0043 (KURANGAN DAK) (KURANGAN)
		Jumlah Dokumen SIPA-SIPO dan Laporan Harat Kordinasi Pengukuran Saluran RMA-SIPO (Dokumen)	0.00	0.00	3			Kantor Dinas Perikanan dan Perikanan (KURANGAN PERULU)	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Perangkap Darat	3			
1.2.01.01.01.02.02	Konsumsi dan Pengukuran Saluran Capaian Kinerja dan Kinerja Harat (Kordinasi) Kinerja SIPA						1.000.000				Pengumpul Perikanan	Perangkap Darat		1.000.000	0043 (KURANGAN DAK) (KURANGAN)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perikanan Kinerja SIPA dan Laporan Harat Kordinasi Pengukuran Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perikanan Kinerja SIPA (Laporan)	0.00	0.00	3			Kantor Dinas Perikanan dan Perikanan (KURANGAN PERULU)	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Perangkap Darat	3			
1.2.01.01.01.02.03	Enkabel Kinerja Perangkap Darat						4.000.000				Pengumpul Perikanan	Perangkap Darat		4.000.000	0043 (KURANGAN DAK) (KURANGAN)
		Jumlah Laporan Enkabel Kinerja Perangkap Darat (Laporan)	0.00	0.00	4			Kantor Dinas Perikanan dan Perikanan (KURANGAN PERULU)	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Perangkap Darat	4			
1.2.01.01.02.03	Administrasi Pengumpul Perangkap Darat						2.300.111.384					Perangkap Darat		2.300.111.384	0043 (KURANGAN DAK) (KURANGAN)

2.27	01.2	02.02	01	Penyusunan dan Peninjauan ASB					1.000.000.000				Penyusunan Proses	Penyusunan Dokumen		1.000.000.000	0043 PENGENDALAN DOK PENGENDALAN
				Jumlah Output yang diperoleh dari Peninjauan ASB (Berkas)	0.00	0.00	20			Contoh KAS (Rencana Kerja)	Disk Terdapat Jumlah Dok Akses Jumlah			Penyusunan Dokumen	20		
2.27	01.2	02.02	02	Penyusunan Administrasi Peninjauan Tipe ASB					1.000.000				Penyusunan Proses	Penyusunan Dokumen		1.000.000	0043 PENGENDALAN DOK PENGENDALAN
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Peninjauan Tipe ASB (Dokumen)	0.00	0.00	12			Contoh KAS (Rencana Kerja)	Disk Terdapat Jumlah Dok Akses Jumlah			Penyusunan Dokumen	12		
2.27	01.2	02.02	03	Administrasi Peninjauan Laporan Keuangan Materi (Materi) Sesuai dengan 2012					1.000.000				Penyusunan Proses	Penyusunan Dokumen		1.000.000	0043 PENGENDALAN DOK PENGENDALAN
				Jumlah Laporan Keuangan Materi Peninjauan Sesuai dengan 2012 dan Laporan Keuangan Peninjauan Laporan Keuangan Materi Peninjauan Sesuai dengan 2012 Laporan	0.00	0.00	2			Contoh KAS (Rencana Kerja)	Disk Terdapat Jumlah Dok Akses Jumlah			Penyusunan Dokumen	2		
2.27	01.2	02		Administrasi Sesuai dengan Sesuai dengan Peninjauan Dokumen					1.000.000					Penyusunan Dokumen		1.000.000	0043 PENGENDALAN DOK PENGENDALAN
2.27	01.2	02.02	01	Penyusunan Peninjauan Administrasi Materi Sesuai dengan 2012					1.000.000					Penyusunan Dokumen		1.000.000	0043 PENGENDALAN DOK PENGENDALAN
				Jumlah Dokumen Administrasi Materi Sesuai dengan 2012 (Dokumen)	0.00	0.00	4			Contoh KAS (Rencana Kerja)	Disk Terdapat Jumlah Dok Akses Jumlah			Penyusunan Dokumen	4		

1.21	01.2	02.00	01	Perencanaan dan Pelaksanaan Laporan Tahunan MRA, Laporan Kerja SAKO						4.000.000					Perangko Daerah		2.000.000	0045 P01H000045 045/ P01H000045	
				Jumlah Laporan Pencapaian dan Penyusunan Laporan Tahun MRA Daerah pada SAKO Kabupaten		0.00	0.00	1			Contoh K42 R00000 T0000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangko Daerah	1			
1.21	01.2	02.00	06	Perencanaan dan Pelaksanaan Bering MRA Daerah pada SAKO						4.000.000					Perangko Daerah		1.000.000	0045 P01H000045 045/ P01H000045	
				Jumlah Laporan Pencapaian dan Penyusunan Bering MRA Daerah pada SAKO Kabupaten		0.00	0.00	6			Contoh K42 R00000 T0000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangko Daerah	6			
1.21	01.1	01.00	01	Administrasi Kabupaten Perangko Daerah						15.000.000					Perangko Daerah		15.000.000	0045 P01H000045 045/ P01H000045	
1.21	01.2	04.00	01	Perencanaan dan Pelaksanaan Administrasi Kabupaten						1.000.000				Perangko Daerah	Perangko Daerah		1.000.000	0045 P01H000045 045/ P01H000045	
				Jumlah Dokumen Pencapaian dan Penyusunan Administrasi Kabupaten/Daerah		0.00	0.00	12			Contoh K42 R00000 T0000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangko Daerah	12			
1.21	01.2	02.00	03	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Peningkat						1.000.000					Perangko Daerah	Perangko Daerah		1.000.000	0045 P01H000045 045/ P01H000045
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Peningkat (Dokumen)		0.00	0.00	12			Contoh K42 R00000 T0000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangko Daerah	12			
1.21	01.1	02.00	06	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Masyarakat Tugas dan Fungsi						10.000.000					Perangko Daerah	Perangko Daerah		10.000.000	0045 P01H000045 045/ P01H000045
				Jumlah Kegiatan Berbasis Masyarakat Tugas dan Fungsi		0.00	0.00	1			Contoh K42 R00000 T0000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangko Daerah	1			

2.21	01.2	06.00	01	Administrasi Jumlah Penyalah Dana						42.000.000						Penyalah Dana		42.000.000	0043 RUHUSUNAN DAN PENGHAKILAN
2.21	01.2	06.00	01	Pengadaan Kunjungan Insidien Lokasi/Pemrosesan Bongkisan Insidien						2.000.000						Pengumpul Pustaka	Penyalah Dana	2.000.000	0043 RUHUSUNAN DAN PENGHAKILAN
				Jumlah Paket Kunjungan Insidien Lokasi/Pemrosesan Bongkisan Tabak yang Didasarkan Paket		0.00	0.00	2			Lampiran KAG RUMAH TANGGA	Dana Tertentu Umum Dana Alokasi Umum				Penyalah Dana	2		
2.21	01.2	06.00	02	Pengadaan Pelayanan dan Peningkatan Kualitas						4.000.000						Pengumpul Pustaka	Penyalah Dana	4.000.000	0043 RUHUSUNAN DAN PENGHAKILAN
				Jumlah Paket Pelayanan dan Peningkatan Kuantitas yang Didasarkan Paket		0.00	0.00	4			Lampiran KAG RUMAH TANGGA	Dana Tertentu Umum Dana Alokasi Umum				Penyalah Dana	4		
2.21	01.2	06.00	03	Pengadaan Pelayanan Rumah Tangga						1.000.000						Pengumpul Pustaka	Penyalah Dana	1.000.000	0043 RUHUSUNAN DAN PENGHAKILAN
				Jumlah Paket Pelayanan Rumah Tangga yang Didasarkan Paket		0.00	0.00	4			Lampiran KAG RUMAH TANGGA	Dana Tertentu Umum Dana Alokasi Umum				Penyalah Dana	4		
2.21	01.2	06.00	04	Penyediaan Bahan Lengkap Rumah						10.000.000						Pengumpul Pustaka	Penyalah Dana	10.000.000	0043 RUHUSUNAN DAN PENGHAKILAN
				Jumlah Paket Bahan Lengkap Rumah yang Didasarkan Paket		0.00	0.00	4			Lampiran KAG RUMAH TANGGA	Dana Tertentu Umum Dana Alokasi Umum				Penyalah Dana	4		
2.21	01.2	06.00	05	Pengadaan Sampel Cukupan dan Pengiriman						1.000.000						Pengumpul Pustaka	Penyalah Dana	1.000.000	0043 RUHUSUNAN DAN PENGHAKILAN
				Jumlah Paket Sampel Cukupan dan Pengiriman yang Didasarkan Paket		0.00	0.00	2			Lampiran KAG RUMAH TANGGA	Dana Tertentu Umum DAN				Penyalah Dana	2.00		

2.27 01.2 01	Perbaikan Saluran Drainase Perumahan Jilid 1 Perumahan Damar						100.000.000					Perangai Damar		110.000.000	CR43 RUMAHSUKSES DAM PS.TUMBUKARAN
2.27 01.2 02	Perbaikan Saluran						75.000.000					Perangai Damar		75.000.000	CR43 RUMAHSUKSES DAM PS.TUMBUKARAN
		Jumlah Paket Saluran yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	10			Lampiran K43 RUMAHSUKSES	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangai Damar	2.00		
2.27 01.2 03	Perbaikan Perumahan Paksi Mekar Lestari						20.000.000					Perangai Damar		20.000.000	CR43 RUMAHSUKSES DAM PS.TUMBUKARAN
		Jumlah Unit Perumahan dan Gedung Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1			Lampiran K43 RUMAHSUKSES	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangai Damar	1		
2.27 01.2 04	Perbaikan Saluran Drainase						1.000.000					Perangai Damar		1.000.000	CR43 RUMAHSUKSES DAM PS.TUMBUKARAN
		Jumlah Unit Apartemen Berstruktur yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1			Lampiran K43 RUMAHSUKSES	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangai Damar	1		
2.27 01.2 05	Perbaikan Saluran Gas Perumahan Damar						20.000.000					Perangai Damar		20.000.000	CR43 RUMAHSUKSES DAM PS.TUMBUKARAN
		Jumlah Unit Saluran dan Perumahan Gedung Berstruktur Berstruktur Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1			Lampiran K43 RUMAHSUKSES	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangai Damar	1		
2.27 01.2 06	Perbaikan Saluran Gas Perumahan Damar						20.000.000					Perangai Damar		20.000.000	CR43 RUMAHSUKSES DAM PS.TUMBUKARAN
		Jumlah Unit Saluran dan Perumahan Gedung Berstruktur Berstruktur Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	1			Lampiran K43 RUMAHSUKSES	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum			Perangai Damar	1		
2.27 01.2 07	Perbaikan Saluran Gas Perumahan Damar						20.000.000					Perangai Damar		20.000.000	CR43 RUMAHSUKSES DAM PS.TUMBUKARAN

		Penelitian dan Layanan													
			Jumlah Rancangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperoleh dan diujikan, Riset dan Reflektifnya (R2)	0.00	0.00	10		Lembar K42 (R2002 T100)	Dana Tertela Umum Dana Alokasi Umum			Penghap Dana	10		
121 01.2 06.00 06	Penelitian Materi						1.000.000				Penghap Pustaka	Penghap Dana		1.000.000	0045 P011000046 DAN P011000446
			Jumlah Abstrak yang Diperoleh (R20)	0.00	0.00	8		Lembar K42 (R2002 T100)	Dana Tertela Umum Dana Alokasi Umum			Penghap Dana	8		
121 01.2 06.00 06	Penelitian Pustaka dan Materi Lainnya						1.000.000				Penghap Pustaka	Penghap Dana		1.000.000	0045 P011000046 DAN P011000446
			Jumlah Rancangan dan Abstrak Lainnya yang Diperoleh Dana	0.00	0.00	1		Lembar K42 (R2002 T100)	Dana Tertela Umum Dana Alokasi Umum			Penghap Dana	1		
121 01.2 06.00 06	Penelitian/Revisi/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000				Penghap Pustaka	Penghap Dana		1.000.000	0045 P011000046 DAN P011000446
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperoleh/Direvisi/Perbaikan atau (R20)	0.00	0.00	1		Lembar K42 (R2002 T100)	Dana Tertela Umum Dana Alokasi Umum			Penghap Dana	1		
121 01.2 06.00 III	Penelitian/Revisi/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000				Penghap Pustaka	Penghap Dana		1.000.000	0045 P011000046 DAN P011000446
			Jumlah Rancangan dan Rancangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperoleh/Direvisi/Perbaikan atau	0.00	0.00	10		Lembar K42 (R2002 T100)	Dana Tertela Umum Dana Alokasi Umum			Penghap Dana	10		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Paket Terpadu													
			Jumlah Pengadaan Bahan Pakan Pakan, Benih/Bibit ikan, Pakan Ternak yang Berasal Suplai		0.00	0.00	1		(12) Karaman, KAG, RUMAH TANGGA	Data Terpadu, Jumlah, Data Akar, Lahan			Kampung Terpadu	1	
1.27.02.2.01		Pengadaan Pakan Pakan, Benih/Bibit ikan, Pakan Ternak yang Berasal Suplai						18.000.000					Kampung Terpadu		18.000.000
1.27.02.2.02		Pengadaan Pakan Pakan, Benih/Bibit ikan, Pakan Ternak yang Berasal Suplai						18.000.000					Kampung Terpadu		18.000.000
1.27.02.2.03		Pengadaan Pakan Pakan, Benih/Bibit ikan, Pakan Ternak yang Berasal Suplai						18.000.000					Kampung Terpadu		18.000.000
			Jumlah Pengadaan Pakan Pakan, Benih/Bibit ikan, Pakan Ternak yang Berasal Suplai		0.00	0.00	1		(12) Karaman, KAG, RUMAH TANGGA	Data Terpadu, Jumlah, Data Akar, Lahan			Kampung Terpadu	1	
1.27.02.2.04		PRUGAM PENYULUHAN DAN PENCEKAMAN KETERANGAN						14.000.000					Kampung Terpadu		14.000.000
			Detail pengalihan program pengalihan			32.00				Data Terpadu, Jumlah, Data Akar, Lahan			Kampung Terpadu		
1.27.02.2.05		Pengadaan Pakan Pakan, Benih/Bibit ikan, Pakan Ternak yang Berasal Suplai						18.000.000					Kampung Terpadu		18.000.000
1.27.02.2.06		Pengadaan Pakan Pakan, Benih/Bibit ikan, Pakan Ternak yang Berasal Suplai						18.000.000					Kampung Terpadu		18.000.000

			Jumlah setiap sambungan (Jenis)		0.05	0.05	10		12. Garambat (Cat. A, C & D Tipe)	Dens Terdapat Jenis Dens Aksi (Tipe)			Kategori Tipe	10		
2.27 04.2 01.02 01	Pembangunan Sambungan Pembangunan dan Sambungan pada Pondasi							10.000.000					Kategori Tipe		10.000.000	04.27 Pembangunan dan Cat. F (Pembangunan)
			Jumlah setiap yang dibutuhkan untuk dan sambungan pada Pondasi (Jenis)		0.05	0.05	10		12. Garambat (Cat. A, C & D Tipe)	Dens Terdapat Jenis Dens Aksi (Tipe)			10 Kategori	10		
2.27 04.2 01.02 02	Pembangunan Pembangunan Pembangunan dan Sambungan pada Pondasi							10.000.000					10 Kategori		10.000.000	04.27 Pembangunan dan Cat. F (Pembangunan)
			Jumlah setiap yang dibutuhkan dengan sambungan Pembangunan dan Sambungan pada Pondasi (Jenis)		0.05	0.05	10		12. Garambat (Cat. A, C & D Tipe)	Dens Terdapat Jenis Dens Aksi (Tipe)			Kategori Tipe	10		
2.27 04.2 01.02 03	Pembangunan Pembangunan Membangun dan Sambungan pada Pondasi							10.000.000					Kategori Tipe		10.000.000	04.27 Pembangunan dan Cat. F (Pembangunan)
			Jumlah setiap yang dibutuhkan dengan sambungan Pembangunan dan Sambungan pada Pondasi (Jenis)		0.05	0.05	10		12. Garambat (Cat. A, C & D Tipe)	Dens Terdapat Jenis Dens Aksi (Tipe)			Kategori Tipe	10		
2.27 04.2 01.02 04	Pembangunan Pembangunan Membangun dan Sambungan pada Pondasi							10.000.000					Kategori Tipe		10.000.000	04.27 Pembangunan dan Cat. F (Pembangunan)
			Jumlah setiap yang dibutuhkan dengan sambungan Pembangunan dan Sambungan pada Pondasi (Jenis)		0.05	0.05	10		12. Garambat (Cat. A, C & D Tipe)	Dens Terdapat Jenis Dens Aksi (Tipe)			Kategori Tipe	10		
2.27 04.2 01.02 05	Pembangunan Pembangunan Membangun dan Sambungan pada Pondasi							10.000.000					Kategori Tipe		10.000.000	04.27 Pembangunan dan Cat. F (Pembangunan)

BAB V, PENUTUP

RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan semua pihak dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-luar, antar-cabang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengacu pada tujuannya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan, di samping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2024. Pemilihan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realitas untuk dilaksanakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur. Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bermutu.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Flores Timur



A. SEBASTIANA KLEDEN, SP
PEMBINA TK.1
NIP. 19660825 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta tuntunan-Nya, sehingga penyusunan Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Rencana Kerja pada tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Dana Indikatif beserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur ini dapat mencerminkan kinerja kesinambungan Program & Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Flores Timur,

MARIANUS NOBO WATON, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19701208 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	38
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022	7
Tabel II.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel II.3.	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	21
Tabel II.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	30
Tabel III.1.	Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	40
Tabel IV.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara Renja pada Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran	2
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

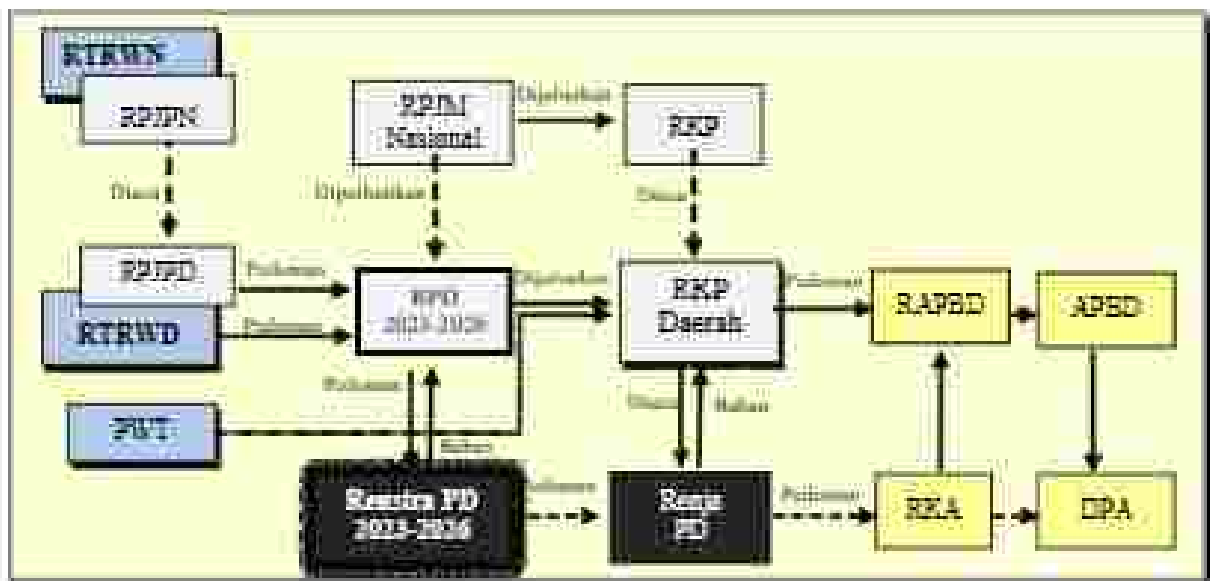
Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendataan indikator, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur merupakan pengjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA - Perangkat Daerah (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA- PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah).

Keterkaitan Renja PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 . LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No-4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No-);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2013;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1),Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores

- Timur No 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 - s. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
 - t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026
 - u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Ranstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Tahun 2024.
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kendala pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh Karen itu, dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022.

Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2024 belum mengakomodasi rencana strategi nasional sehingga belum ada kegiatan dan pendanaan tahun ini untuk sarana dan prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa baik dalam bentuk dokumen material maupun digital;
- b. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim;
- c. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
- d. Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan di seluruh kecamatan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- a. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan administrasi kependudukan;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung program proses penerbitan administrasi kependudukan;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen kependudukan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, dapat diuraikan pada table II.1.

TABEL II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d 2023
Kabupaten Flores Timur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD) s/d Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(8+7+9)	11=(10/4)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
RENTRA 2017 - 2022										
2.12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota									
2.12.01.2.01	Pereencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	=	=	=	=	=			
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	=	=	=	=	=			

2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Harat Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35	28	7	7	100			
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	-	-	-			
2.12.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulat)	70	56	14	14	100			
2.12.01.2.02.03	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	48	12	12	100			
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-			
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	12	3	3	100			
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	85	68	13	13	100			

2.12.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	596.000	476.800	37.300	37.300	100			
2.12.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	48	1	1	100			
2.12.01.106.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.900	1.530	500	430	88			
2.12.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	289	216	30	30	100			
2.12.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.12.01.107.05	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	1	1	2			
2.12.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)								
2.12.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.500	1200	150	150	100			
2.12.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	48	12	12	100			
2.12.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	270	216	54	54	100			

2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Direflegansi dan dibayarkan Pakseku (Unit)	65	48	13	13	100			
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Unit)	13	12	2	2	100			
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Unit)	31	28	12	12	100			
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.03	Program Pendaftaran Penduduk		241.000	192.800	5.000 KK, 10.000 KTP	6.723 KK, 13.650 KTP				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	141.600	192.800	13.000	10.403	134,02			
2.12.03	Program Pencatatan Sipil				6.000 Akta	9.166 Akta				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil									
2.12.03.2.01.01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	200.000	180.000	6.000	9.166	154,43			

2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Dirapikan (Dokumen)	350	280	1	1	100			
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	-	-	-	-	-			
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Urutan Administrasi Kependudukan				-	-	-			
2.12.04.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	10	8	2	2	100			
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	50	40	5	5	100			
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2	2	2	2	2			

2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan									
2.12.05.101	Penyusunan Profil Kependudukan	<i>Ternakanya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)</i>	2	2	1	2	2			
2.12.05.101.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)</i>	2	2	1	2	2			
BENTRA 2013 - 2014										
2.12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota			2	1	1	2			
2.12.01.101	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2	1	1	2			
2.12.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	1	1	1	1	1	1	1	0,00%
2.12.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	12	1	1	1	1	3	2	16,67%
2.12.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	1	1	1	1	1	1	1	100,00%

2.12.01.101.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	+	-	-	-	2	1	12,50%
2.12.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			+	-	-	-			
2.12.01.102.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-Bulan)	140	+	-	-	-	35	35	25,00%
2.12.01.102.03	Pelaksanaan Peratmusahan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Peratmusahan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	+	-	-	-	1	1	100,00%
2.12.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan Sem ester SKPD dan Laporan Koordinasi Pengusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Sem ester SKPD (Laporan)	8	+	-	-	-	2	-	0,00%
2.12.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-	-			
2.12.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	-	-	-	-	3	3	30,00%
2.12.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	24	-	-	-	-	6	2	8,33%
2.12.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	8	+	-	-	-	2	1	12,50%
2.12.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	+	-	-	-	1	-	0,00%

2.12.01.2.06.01	Facilitasi Kunjungan Tim	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tim (Laporan)	48	-	-	-	-	12	4	3.33%
2.12.01.2.06.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	-	-	-	-	12	11	22.92%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	-	-	-	-	1	-	0.00%
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	-	-	-	-	12	1	2.08%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	-	-	-	-	12	3	6.25%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	-	-	-	-	12	6	12.50%
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	-	-	-	-	10	10	25.00%

2.12.01.109.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	-	-	-	-	3	2	16,67%
2.12.01.109.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	144	-	-	-	-	16	16	11,11%
2.12	Urutan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-	-	-	-			
2.12.01	Program Pendaftaran Penduduk									
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
2.12.02.1.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12					3	3	25,00%
2.12.03	Program Pencatatan Sipil									
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil									
2.12.03.1.01.02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	8					2	2	25,00%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.04.1.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									
2.12.04.1.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Dinyajikan (Dokumen)	4					1	-	0,00%

2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	12					3	+	0,00%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan									
2.12.04.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	48					12	-	0,00%
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	30					5	2	6,67%
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	+					1	1	14,29%
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan									
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersampainya Profil Data Perkembangan dan Projeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)								
2.12.05.2.01.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Projeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang	400					100	+	0,00%

		atau (Colomene)									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Flores Timur : Capaian SPM Standar Nasional dan IKK dapat ditunjuk pada Table II.2

TABEL II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Kinerja Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
1	Rasio Penduduk BerKTP per Seribu Penduduk		+	100	100	100	90,43	90	90,34	100	90,43	
2	Rasio Bayi Berakta Kelahiran		+	57,3	42,59	63,38	80,08	57,43	43,59	63,38	80,08	
3	Rasio Pasangan Berakta Nikah		+	22,36	22,79	24,97	32,81	23,13	100	24,97	32,81	

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan dalam penataan dan pelayanan pada bidang administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyusunan data serta koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Peningkatan kualitas pemberi layanan/operator administrasi kependudukan di kabupaten, guna mendukung pelayanan dan penyebaran informasi.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan karena merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- a. Penyebaran penduduk yang tidak merata dikarenakan keadaan geografis/wilayah yang tidak mendukung dan jarak baik melalui darat dan lintas laut;
- b. Kurangnya peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- d. Belum terlaksananya pemutakhiran data base kependudukan secara merata;
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi diri dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan.

Sedangkan Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- a. Angka pertumbuhan dan mobilitas penduduk masih tinggi;
- b. Peningkatan kapasitas ASN;
- c. Terakurasi data base sebagai sumber informasi yang valid guna mendukung pelayanan sekaligus pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan;
- d. Adanya komitmen dan dukungan dari pihak-pihak pengambil kebijakan terhadap arah penataan pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Adanya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.4. Review Terhadap Rancangan Renja

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD. RKPD Tahun 2024 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2024 serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir di dalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur terdapat 1 (satu) program rutin dan 4 (empat) program yang menjadi tanggung jawab tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

1. Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Dengan tetap mengacu pada visi, tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur maka pada tahun 2024 Program dan Kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur.

Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dimana didalamnya terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 secara umum dapat digambarkan dalam table II.4.

TABEL II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1		3	4	5		6		7	8	10 = 8-9
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.830.437.763					3.902.988.537	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA				3.431.837.763					3.226.488.537	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		37.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		37.000.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3 Dok	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	3	12.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	15.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Lap	11.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2.658.364.970	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		2.888.388.537	
	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laramuka (OPD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	35 Orang/14 Bulan	2.632.864.970	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laramuka (OPD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	41/14	2.776.908.657	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengedaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	20.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengedaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	71.399.880	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	2 Lap	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	-	1.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)		10.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	1.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		10.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	35 Dok	1.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laramuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	15	10.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)		101.572.793	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)		115.500.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	24.172.793	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	26.580.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rancangan awal
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	24.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	900.000						Mengalami pengurangan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Lap	5.000.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Kupang, Kab. Lelaya	Perselenggaraan Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	12 Lap	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persediaan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		594.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persediaan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		130.160.000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Lap	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rancangan awal
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Lap	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	74.960.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rancangan awal
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Lap	518.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laramuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	514.000.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rancangan awal
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		40.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		35.440.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laramuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Lapangan yang Dipelihara dan Dikeluarkan Pajaknya	10 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laramuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dikeluarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	16.440.000	Mengalami penambahan anggaran dari rancangan awal
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laramuka (OPD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirakit/Rehabilitasi (Unit)	3 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laramuka (OPD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirakit/Rehabilitasi (Unit)	3	4.000.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rancangan awal
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laramuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laramuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	5.000.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rancangan awal

			Lampiran yang Dipengaruhi/Direhabilitasi (Unit)			Bangunan Lainnya		Lampiran yang Dipengaruhi/Direhabilitasi (Unit)			total
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				398.600.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				576.500.000	
	Program Pendaftaran Penduduk		Rasio Penduduk ber-KTP (%)	100	115.000.000	Program Pendaftaran Penduduk		Rasio Penduduk ber-KTP (%)	100	329.000.000	
			Rasio Penduduk ber-KK (%)	100				Rasio Penduduk ber-KK (%)	100		
			Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA					Rasio Anak Usia 0- 17 Tahun yang Memiliki KIA	11,8		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-	115.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				329.000.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	250 Desa/Kel	Jumlah Laporan Haris Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3 Laporan	113.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	250 Desa/Kel	Jumlah Laporan Haris Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	329.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rencana awal
	Program Pencatatan Sipil		Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	63,38	138.600.000	Program Pencatatan Sipil		Rasio Penduduk ber-Akta Kelahiran (%)	63,38	100.000.000	
			Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	24,97				Rasio Penduduk ber-Akta Nikah (%)	24,97		
	Pelayanan Pencatatan Sipil			-	138.600.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Pelunasan Akta (%)		100.000.000	
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	250 Desa/Kel	Jumlah Laporan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Laporan)	2 Layanan	138.600.000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	250 Desa/Kel	Jumlah Laporan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Laporan)	2	100.000.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rencana awal

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Larantuka	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)		95.000.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Larantuka	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	3,13	107.500.000	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				40.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)		71.580.000	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Larantuka	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1 Dok	20.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Larantuka	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	12.500.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rencana awal
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Larantuka	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3 Dok	20.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Larantuka	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	60.000.000	Mengalami penambahan anggaran dari rencana awal
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)	1	40.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)		20.000.000	
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Larantuka	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Informasi	12 Lap	20.000.000	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Larantuka	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Informasi	3	10.000.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rencana awal

			<i>Administrasi Kependudukan (Laporan)</i>				<i>Administrasi Kependudukan (Laporan)</i>			
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Larangan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3 Dok	20.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Larangan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3	10.000.000	Mengalami pengurangan anggaran dari rencana awal
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				15.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				15.000.000	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Larangan	Jumlah Laporan Harat Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Laporan)	1 Lap	15.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Larangan	Jumlah Laporan Harat Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Laporan)	1	15.000.000	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan Berdasarkan Profil Kependudukan (%)		50.000.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan Berdasarkan Profil Kependudukan (%)		40.000.000	
Penyusunan Profil Kependudukan		Terminanya Profil Dan Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100 Dok	50.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan		Terminanya Profil Dan Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100	40.000.000	

	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Laramuka	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100 Dok	50.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Laramuka	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100	40.000.000	Menjalani penurunan anggaran dari rencana awal
--	---	----------	---	---------	------------	---	----------	---	-----	------------	--

3.5. Penelaahan Terhadap Umlan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, disamping dari pihak pemerintah, juga mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stakeholders seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Usulan dari masyarakat ini kemudian dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Flores Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan Administrasi Kependudukan tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada Table II.5.

TABEL II.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Riangtele - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	300 Orang	Ditindak lanjut
2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Ongalweng - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	197 Orang	Ditindak lanjut
3	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Tanah Lela - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4 Orang	Ditindak lanjut
4	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Salaweling I - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	167 Orang	Ditindak lanjut

			(Laporan)		
5	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Balawaling I - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
6	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Ba Pati - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	300 Orang	Ditindak lanjuti
7	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Riangpala - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	324 Orang	Ditindak lanjuti
8	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Homa - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
9	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Pejirian - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	200 Orang	Ditindak lanjuti
10	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kinkamuk - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
11	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Bukit Sebur II - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	60 Orang	Ditindak lanjuti
12	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Baya - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
13	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lewupas - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
14	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Oesayang - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1000 Orang	Ditindak lanjuti
15	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Oesayang - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
16	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kenotan - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	300 Orang	Ditindak lanjuti
17	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Kenotan - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2000 Orang	Ditindak lanjuti

18	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lewibela - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	200 Orang	Ditindak lanjuti
19	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Haka Harowura - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	600 Orang	Ditindak lanjuti
20	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Haka Harowura - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	375 Orang	Ditindak lanjuti
21	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Lewibela - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	200 Orang	Ditindak lanjuti
22	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Wewir - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	150 Orang	Ditindak lanjuti
23	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Wewir - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	450 Orang	Ditindak lanjuti
24	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Pandaj - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
25	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Walebe - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	30 Orang	Ditindak lanjuti
26	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Nawukote - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1000 Orang	Ditindak lanjuti
27	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Ojandetan - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	150 Orang	Ditindak lanjuti
28	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Hewa - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	150 Orang	Ditindak lanjuti
29	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Waula - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
30	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Waula - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	300 Orang	Ditindak lanjuti

31	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Kaniere - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
32	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lamamu - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
33	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Lamamu - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
34	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Sulengwaweng - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	175 Orang	Ditindak lanjuti
35	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kalike - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	45 Orang	Ditindak lanjuti
36	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Kalike - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	32 Orang	Ditindak lanjuti
37	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kalike Alimutan - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	58 Orang	Ditindak lanjuti
38	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Duli Jaya - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
39	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lerebaliang - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	375 Orang	Ditindak lanjuti
40	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Tenawahang - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
41	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Tenawahang - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
42	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Bekang Wolomatang - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
43	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Bekang Wolomatang - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti

44	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Watahari - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
45	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Watobuku - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	104 Orang	Ditindak lanjuti
46	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Watobuku - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	350 Orang	Ditindak lanjuti
47	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Labelen - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	743 Orang	Ditindak lanjuti
48	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Labelen - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	743 Orang	Ditindak lanjuti
49	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kawuta - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	30 Orang	Ditindak lanjuti
50	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Kawuta - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	30 Orang	Ditindak lanjuti
51	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Loro - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
52	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lelayung II - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	217 Orang	Ditindak lanjuti
53	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Balawaling Noten - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	350 Orang	Ditindak lanjuti
54	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lamselirwa - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	336 Orang	Ditindak lanjuti
55	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Lewopulu - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	150 Orang	Ditindak lanjuti
56	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lewopulu - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	170 Orang	Ditindak lanjuti

			Penduduk (Laporan)		
57	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Wapone - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	150 Orang	Ditindak lanjuti
58	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Belaweling - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	60 Orang	Ditindak lanjuti
59	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Belaweling - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
60	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Neisamawangi - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	30 Orang	Ditindak lanjuti
61	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lantahayung - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
62	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lewopne - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	700 Orang	Ditindak lanjuti
63	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Neisamedike - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1101 Orang	Ditindak lanjuti
64	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Boleng - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
65	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Lewopne - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	300 Orang	Ditindak lanjuti
66	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Haruhala - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60 Orang	Ditindak lanjuti
67	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Dukang - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	20 Orang	Ditindak lanjuti
68	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Terang - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100 Orang	Ditindak lanjuti

			(Layanan)		
69	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kwaselegi Lamawato - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	30 Orang	Ditindak lanjuti
70	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Bilal - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
71	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Bilal - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	70 Orang	Ditindak lanjuti
72	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Dewata - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	30 Orang	Ditindak lanjuti
73	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lelenbala - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
74	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Lelenbala - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
75	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Narasasina - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	848 Orang	Ditindak lanjuti
76	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Kawale - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
77	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Lewukhuk - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	300 Orang	Ditindak lanjuti
78	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Blegantwa - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	506 Orang	Ditindak lanjuti
79	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Latadilau - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
80	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kolaka - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	200 Orang	Ditindak lanjuti
81	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Sandana - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1 Orang	Ditindak lanjuti

82	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Aransine - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	50 Orang	Ditindak lanjuti
83	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lewuwang - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	300 Orang	Ditindak lanjuti
84	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Riangbering - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	150 Orang	Ditindak lanjuti
85	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Lewotobi - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60 Orang	Ditindak lanjuti
86	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Lamawalang - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	200 Orang	Ditindak lanjuti
87	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Mokansarak - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
88	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Mokansarak - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100 Orang	Ditindak lanjuti
89	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Tikaukan - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	115 Orang	Ditindak lanjuti
90	Pelayanan Pencatatan Sipil	Desa Tikaukan - Kab. Flores	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	150 Orang	Ditindak lanjuti
91	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Desa Kolmasang - Kab. Flores	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	124 Orang	Ditindak lanjuti

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diharapkan mampu dilakukan berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan yang merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 beserta berbagai aturan dibawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2024 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional telah menyprogramkan 5 (lima) program Strategis Nasional, sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data Kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP Elektronik;
4. Bidang pencatatan sipil “ Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya ”;
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mendukung visi, tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Flores Timur dan Renstra Dinas PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Mewujudkan akurasi, validasi serta konsistensi data kependudukan terhadap data dokumen autentik lain;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas koordinasi, komunikasi dan transformasi data kependudukan berbasis SIAX Online.

3.2.2. Sasaran

1. Peningkatan kecepatan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

2. Peningkatan kualitas pencatatan biodata penduduk pada database kependudukan berdasarkan sumber data dokumen autentik lain;
3. Peningkatan dan pengembangan sistem aplikasi, dan pembangunan jaringan komunikasi data antar lembaga.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada Rencana Kerja Tahun 2024 untuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Flores Timur dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yang termuat dalam Renja ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 seperti yang tertera pada Tabel III.1. berikut :

TABEL III.1
Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Flores Timur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3		4	5	7	6	9	10
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				576.500.000				630.000.000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA				576.500.000				630.000.000
2	12	1		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100				100	
						Persentase Keterisian Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100				100	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		100				100	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100				100	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				576.500.000				630.000.000
2	12	02		II	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP (%)		100				100	
						Rasio Penduduk ber-EK (%)		100	329.000.000			100	100.000.000
						Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA (%)		11,8				100	

2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan KTP, KK dan KIA (%)		100	329.000.000	APBD II (DAU)		100	200.000.000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	250 Desa/Kel	3	329.000.000	APBD II (DAU)		3	200.000.000
2	12	03		III	Program Pencatatan Sipil	Rasio Penduduk ber-Akta Kelahiran (%)		63,38	100.000.000			63,38	250.000.000
						Rasio Penduduk ber-Akta Nikah (%)		24,97				24,97	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Akta (%)			100.000.000	APBD II (DAU)		100	250.000.000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	250 Desa/Kel	2	100.000.000	APBD II (DAU)		2	250.000.000
2	12	04		IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	Larantuka	3,13	107.500.000			3,13	130.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				72.500.000	APBD II (DAU)			35.000.000
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Ditampilkan (Dokumen)	Larantuka	1	12.500.000	APBD II (DAU)		1	10.000.000
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	Larantuka	1	60.000.000	APBD II (DAU)		3	25.000.000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20.000.000	APBD II (DAU)			70.000.000
2	12	04	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	Larantuka	2	10.000.000	APBD II (DAU)		5	25.000.000

1	12	04	203	04	Penyelenggaraan Pemantapan Data Kependudukan	Ambil Dokumen Penyelenggaraan Pemantapan Data Kependudukan (Dokumen)	Larasuka	5	10.000.000	APBD II (DAU)	5	45.000.000
1	12	04	204		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				15.000.000	APBD II (DAU)		25.000.000
1	12	04	204	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Ambil Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	Larasuka	2	15.000.000	APBD II (DAU)	2	25.000.000
1	12	05		V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan Berdasarkan Profil Kependudukan (%)			40.000.000			50.000.000
1	12	05	201		Penyusunan Profil Kependudukan	Terminasinya Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100	100	40.000.000	APBD II (DAU)	100	50.000.000
1	12	05	201	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Ambil Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyekti Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	Larasuka	100	40.000.000	APBD II (DAU)	100	50.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berisi program dan kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mendukung visi, tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berisi 5 (lima) program prioritas yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pendaftaran Penduduk, (3) Program Pencatatan Sipil, (4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan (5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Secara Umum, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2024, dan prakiraan maju tahun 2025 pada Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel IV.1. berikut :

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PEAKIRAAN TAHUN 2024	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3						4	5	7
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL								3.802.968.537						4.075.823.360
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			3.276.488.537						3.445.823.360
2	12	1		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100					PP	100	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						100	
						Persentase Pemenuhan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						100	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		57.000.000		APBD II (DAU)		KP		37.500.000
2	12	1	2.10	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	18.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	10.000.000
2	12	1	2.10	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	2	12.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	5.300.000

2	12	1	2.10	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	13.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		2	11.000.000
2	12	1	2.10	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		2	11.000.000
2	12	1	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		2.858.388.537		APBD II (DAU)	KP		2.671.923.360
2	12	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	35	2.776.988.657	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		35	2.437.563.360
2	12	1	2.02	03	Pemenuhan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	71.399.890	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		1	31.160.000
2	12	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		2	2.500.000
2	12	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)		10.000.000					1.000.000
2	12	1	2.03	05	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	10.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		1	1.000.000
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		10.000.000					1.500.000

2	12	1	2.05	03	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	15	10.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		35	1.500.000
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kesiediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)	100	115.500.000		APBD II (DAU)	FP	100	99.000.000
2	12	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		5	1.300.000
2	12	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	26.500.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		6	20.000.000
2	12	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	24.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		2	13.000.000
2	12	1	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		12	5.000.000
2	12	1	2.06	09	Desyvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000	Larutnaka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)		12	48.500.000
2	12	1	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		130.160.000		APBD II (DAU)			594.900.000
2	12	1	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		12	1.300.000
2	12	1	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	74.960.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		12	73.000.000
2	12	1	2.03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)		12	518.400.000
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		35.440.000		APBD II (DAU)	KP		40.000.000

2	12	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diperbaiki Pajak dan Perbaikannya (Unit)	10	26.400.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)			10	20.000.000
2	12	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	3	4.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)			3	5.000.000
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	36	5.000.000	Larutnaka (OPD)	APBD II (DAU)			36	15.000.000
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			576.500.000					143	630.000.000
2	12	02		II	Program Pendaftaran Penduduk	Ratio Penduduk ber-KTP (%) Ratio Penduduk ber-AK (%) Ratio Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA (%)	100 100 11,89	329.000.000			PN-7	PU-4	100 100 100	200.000.000
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			329.000.000		APBD II (DAU)	KP-7	KU-4		200.000.000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Harat Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	329.000.000	150 Data/Kel	APBD II (DAU)			3	200.000.000
2	12	03		III	Program Pencatatan Sipil	Ratio Penduduk ber-Akta Kelahiran (%) Rasi Penduduk ber-Akta Nikah (%)	63,38 24,97	100.000.000			PN-7	PU-4	42,89 22,79	250.000.000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			100.000.000		APBD II (DAU)	KP-7	KU-4		250.000.000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pendaftaran Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2	100.000.000	150 Data/Kel	APBD II (DAU)			2	250.000.000

1	11	04		IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)		107.500.000	Laromoka		PP		130.000.000
2	11	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)		72.500.000		APBD II (DAU)	KP		35.000.000
2	11	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Ditayangkan (Dokumen)	1	12.500.000	Laromoka	APBD II (DAU)		1	10.000.000
2	11	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3	40.000.000	Laromoka	APBD II (DAU)		3	35.000.000
2	11	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)		20.000.000		APBD II (DAU)	KP	1	70.000.000
2	11	04	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Harat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12	10.000.000	Laromoka	APBD II (DAU)		12	25.000.000
2	11	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5	10.000.000	Laromoka	APBD II (DAU)		10	45.000.000
2	11	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			15.000.000		APBD II (DAU)	KP		15.000.000
2	11	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Harat Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2	15.000.000	Laromoka	APBD II (DAU)		2	35.000.000

3	11	05		V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan Berdasarkan Profil Kependudukan (%)		40.000.000			PP		50.000.000
2	11	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100	40.000.000		APBD II (DAU)	KP	100	50.000.000
2	11	05	2.01	62	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100	40.000.000	Lampirkan	APBD II (DAU)	100	100	50.000.000

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Keberhasilan akan seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Besar harapan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini, semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untuk bisa menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dalam Rencana Kerja (Renja) ini menyadari belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan sangat diharapkan masukan dalam bentuk usul saran untuk menyempurnakan Renja ini.

Demikianlah Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur ini dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Juli 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Flores Timur,

MARIANUS NOBO WATON, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701203 199803 1 010



RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS
PERIKANAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perikanan untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

Larantuka,

2023

PLT. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,



IL. VIKTOR TALU HURINT
PEMBINA TKI
NIP. 196603051998031006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1-2
1.2 LANDASAN HUKUM	3-5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	17
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	20
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	25
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	32
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	35
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	36
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB IV : PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perikanan Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substantif*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perikanan Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Perikanan Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

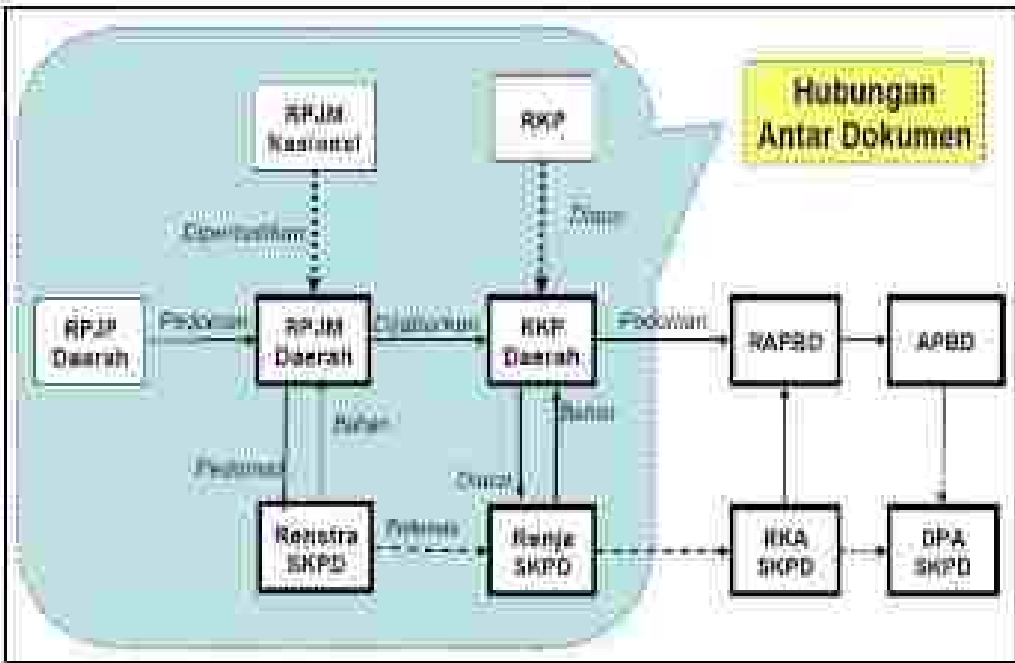
1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Nomor Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja

PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah

- 5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- 6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya disuulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Selanjutnya Renja PD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2023. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar1.1
Segan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dmas Perikanan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur;
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

[illegible]

[illegible]

KODE					URUTAN PROGRAM/ANAK GABUNGAN/ PROGRAM KEMASAN	NOMOR DAN KETERANGAN PROGRAM KEMASAN	Jumlah Ketersediaan Program dan/atau Jumlah Periode 2021/2022	Maksimal Jumlah Ketersediaan dan/atau Jumlah Periode sampai dengan tahun 2025	Jumlah dan Maksimal Ketersediaan Program dan Kegiatan Tahun 2021			Jumlah Program dan Kegiatan Maksimal Tahun 2022	Maksimal Maksimal Ketersediaan Jumlah Ketersediaan dan/atau Jumlah Periode 2022	
									Jumlah Ketersediaan Tahun 2021	Maksimal Ketersediaan Tahun 2021 (%)	Jumlah Maksimal (%)		Maksimal Ketersediaan Program dan Kegiatan Tahun 2022	Maksimal Ketersediaan Jumlah Ketersediaan (%)
3	25	11	1.11	11	Penyediaan Buku dan Materi Sumber Daya Manusia	Jumlah Produk (dan formatasi lain) Ketersediaan (dan/atau)	1100	-	11	11	110	1	1	1
1	25	12	1.12	12	Pengadaan Produk dan/atau Produk Pengadaan	Jumlah Salinan Produk (dan/atau)	120	-	100	120	120	-	120	1
1	25	13	1.13		Pengadaan dan Penyediaan Produk Pengadaan (dan/atau)		-	-	13.470.00	13.700.0	13	-	13.50	-
1	25	14	1.14	14	Pengadaan Penyediaan Produk Pengadaan (dan/atau)	Jumlah Salinan Produk (dan/atau) Pengadaan (dan/atau)	4	-	1	1	10	4	1	40
1	25	15			Program Pengadaan Pengadaan				125	140	104	11		
1	25	16	1.16		Pengadaan Pengadaan (dan/atau)		-	100	10.79	1.000			10	100
1	25	17	1.17	17	Pengadaan Produk Pengadaan (dan/atau)	Jumlah Salinan Produk (dan/atau) Pengadaan (dan/atau)	100	-	11	11	100	100	10	10
1	25	18			Program Pengadaan Pengadaan (dan/atau)		10	-	100	1.077	100.00	10	1.077	1.114

KODE					URAIAN PROGRAM/ANAK PROGRAM/PROYEK/KELOMPOK	MUSYAWARAH KERJA/KELOMPOK/KELOMPOK	Kerangka Kerja/Program/Program dan Kegiatan Tahun 2021/2022	Mendukung Kerangka Kerja/Program/Program dan Kegiatan Tahun 2021/2022	Kerangka Kerja/Program/Program dan Kegiatan Tahun 2021/2022			Kerangka Kerja/Program/Program dan Kegiatan Tahun 2021/2022	Kerangka Kerja/Program/Program dan Kegiatan Tahun 2021/2022	
1	2	3	4	5										
1	2	3	4	5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia di wilayah kerja dan wilayah kerja lainnya yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan kerja									
1	2	3	4	5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia di wilayah kerja dan wilayah kerja lainnya yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan kerja	Jumlah, Distribusi, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan kerja								
1	2	3	4	5	Program Pengelolaan dan pemantauan hasil pekerjaan	Jumlah, Distribusi, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan kerja								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Periklanan Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan

NO.	INDIKATOR	SPSI/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)		V	18,33	-	-		27,95	-	-	-	
2	Produksi perikanan tangkap		V	20,56	20,56			15.900	20,56			Produksi perikanan tangkap cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan penambahan penyedia sarana tangkap
3	Produksi perikanan budidaya		V	26,67	26,67			133	26,67			Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan, karena terbatasnya pakan ikan yang diberikan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ikan dan adanya serangan hama dan penyakit
4	Konsumsi ikan		V	99,64	99,74	62	63		99,74	62	63	Angka konsumsi ikan mengalami penurunan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan, dan juga kurang luasnya distribusi ikan ke daerah pedalaman pegunungan

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Cakupan bina kelompok nelayan			17,75	18,33			19,50	18,33			
6	Produksi perikanan			70,00	70,00	100	100	16,035	70,00	100	100	
7	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		4	-	-	58,39	62,04	-	-	58,39	62,04	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Beberapa isu penting yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lainnya adalah :

1. Rendahnya mutu produksi perikanan sehingga kurang berdaya saing
2. Kurangnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah untuk sector perikanan
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mendukung pengembangan pariwisata dari sektor perikanan.
4. Kurangnya kuantitas pelayanan aparaturnya kepada masyarakat
5. Terjadinya praktek illegal fishing
6. Belum adanya pemasaran hasil secara periodik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur 2023 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel 2.4 Sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Account receivable at year
ending, 2000
2000, 2001, 2002
2003, 2004, 2005
2006, 2007, 2008
2009, 2010, 2011
2012, 2013, 2014
2015, 2016, 2017
2018, 2019, 2020
2021, 2022, 2023
2024, 2025, 2026
2027, 2028, 2029
2030, 2031, 2032
2033, 2034, 2035
2036, 2037, 2038
2039, 2040, 2041
2042, 2043, 2044
2045, 2046, 2047
2048, 2049, 2050
2051, 2052, 2053
2054, 2055, 2056
2057, 2058, 2059
2060, 2061, 2062
2063, 2064, 2065
2066, 2067, 2068
2069, 2070, 2071
2072, 2073, 2074
2075, 2076, 2077
2078, 2079, 2080
2081, 2082, 2083
2084, 2085, 2086
2087, 2088, 2089
2090, 2091, 2092
2093, 2094, 2095
2096, 2097, 2098
2099, 2100, 2101
2102, 2103, 2104
2105, 2106, 2107
2108, 2109, 2110
2111, 2112, 2113
2114, 2115, 2116
2117, 2118, 2119
2120, 2121, 2122
2123, 2124, 2125
2126, 2127, 2128
2129, 2130, 2131
2132, 2133, 2134
2135, 2136, 2137
2138, 2139, 2140
2141, 2142, 2143
2144, 2145, 2146
2147, 2148, 2149
2150, 2151, 2152
2153, 2154, 2155
2156, 2157, 2158
2159, 2160, 2161
2162, 2163, 2164
2165, 2166, 2167
2168, 2169, 2170
2171, 2172, 2173
2174, 2175, 2176
2177, 2178, 2179
2180, 2181, 2182
2183, 2184, 2185
2186, 2187, 2188
2189, 2190, 2191
2192, 2193, 2194
2195, 2196, 2197
2198, 2199, 2200
2201, 2202, 2203
2204, 2205, 2206
2207, 2208, 2209
2210, 2211, 2212
2213, 2214, 2215
2216, 2217, 2218
2219, 2220, 2221
2222, 2223, 2224
2225, 2226, 2227
2228, 2229, 2230
2231, 2232, 2233
2234, 2235, 2236
2237, 2238, 2239
2240, 2241, 2242
2243, 2244, 2245
2246, 2247, 2248
2249, 2250, 2251
2252, 2253, 2254
2255, 2256, 2257
2258, 2259, 2260
2261, 2262, 2263
2264, 2265, 2266
2267, 2268, 2269
2270, 2271, 2272
2273, 2274, 2275
2276, 2277, 2278
2279, 2280, 2281
2282, 2283, 2284
2285, 2286, 2287
2288, 2289, 2290
2291, 2292, 2293
2294, 2295, 2296
2297, 2298, 2299
2300, 2301, 2302
2303, 2304, 2305
2306, 2307, 2308
2309, 2310, 2311
2312, 2313, 2314
2315, 2316, 2317
2318, 2319, 2320
2321, 2322, 2323
2324, 2325, 2326
2327, 2328, 2329
2330, 2331, 2332
2333, 2334, 2335
2336, 2337, 2338
2339, 2340, 2341
2342, 2343, 2344
2345, 2346, 2347
2348, 2349, 2350
2351, 2352, 2353
2354, 2355, 2356
2357, 2358, 2359
2360, 2361, 2362
2363, 2364, 2365
2366, 2367, 2368
2369, 2370, 2371
2372, 2373, 2374
2375, 2376, 2377
2378, 2379, 2380
2381, 2382, 2383
2384, 2385, 2386
2387, 2388, 2389
2390, 2391, 2392
2393, 2394, 2395
2396, 2397, 2398
2399, 2400, 2401
2402, 2403, 2404
2405, 2406, 2407
2408, 2409, 2410
2411, 2412, 2413
2414, 2415, 2416
2417, 2418, 2419
2420, 2421, 2422
2423, 2424, 2425
2426, 2427, 2428
2429, 2430, 2431
2432, 2433, 2434
2435, 2436, 2437
2438, 2439, 2440
2441, 2442, 2443
2444, 2445, 2446
2447, 2448, 2449
2450, 2451, 2452
2453, 2454, 2455
2456, 2457, 2458
2459, 2460, 2461
2462, 2463, 2464
2465, 2466, 2467
2468, 2469, 2470
2471, 2472, 2473
2474, 2475, 2476
2477, 2478, 2479
2480, 2481, 2482
2483, 2484, 2485
2486, 2487, 2488
2489, 2490, 2491
2492, 2493, 2494
2495, 2496, 2497
2498, 2499, 2500
2501, 2502, 2503
2504, 2505, 2506
2507, 2508, 2509
2510, 2511, 2512
2513, 2514, 2515
2516, 2517, 2518
2519, 2520, 2521
2522, 2523, 2524
2525, 2526, 2527
2528, 2529, 2530
2531, 2532, 2533
2534, 2535, 2536
2537, 2538, 2539
2540, 2541, 2542
2543, 2544, 2545
2546, 2547, 2548
2549, 2550, 2551
2552, 2553, 2554
2555, 2556, 2557
2558, 2559, 2560
2561, 2562, 2563
2564, 2565, 2566
2567, 2568, 2569
2570, 2571, 2572
2573, 2574, 2575
2576, 2577, 2578
2579, 2580, 2581
2582, 2583, 2584
2585, 2586, 2587
2588, 2589, 2590
2591, 2592, 2593
2594, 2595, 2596
2597, 2598, 2599
2600, 2601, 2602
2603, 2604, 2605
2606, 2607, 2608
2609, 2610, 2611
2612, 2613, 2614
2615, 2616, 2617
2618, 2619, 2620
2621, 2622, 2623
2624, 2625, 2626
2627, 2628, 2629
2630, 2631, 2632
2633, 2634, 2635
2636, 2637, 2638
2639, 2640, 2641
2642, 2643, 2644
2645, 2646, 2647
2648, 2649, 2650
2651, 2652, 2653
2654, 2655, 2656
2657, 2658, 2659
2660, 2661, 2662
2663, 2664, 2665
2666, 2667, 2668
2669, 2670, 2671
2672, 2673, 2674
2675, 2676, 2677
2678, 2679, 2680
2681, 2682, 2683
2684, 2685, 2686
2687, 2688, 2689
2690, 2691, 2692
2693, 2694, 2695
2696, 2697, 2698
2699, 2700, 2701
2702, 2703, 2704
2705, 2706, 2707
2708, 2709, 2710
2711, 2712, 2713
2714, 2715, 2716
2717, 2718, 2719
2720, 2721, 2722
2723, 2724, 2725
2726, 2727, 2728
2729, 2730, 2731
2732, 2733, 2734
2735, 2736, 2737
2738, 2739, 2740
2741, 2742, 2743
2744, 2745, 2746
2747, 2748, 2749
2750, 2751, 2752
2753, 2754, 2755
2756, 2757, 2758
2759, 2760, 2761
2762, 2763, 2764
2765, 2766, 2767
2768, 2769, 2770
2771, 2772, 2773
2774, 2775, 2776
2777, 2778, 2779
2780, 2781, 2782
2783, 2784, 2785
2786, 2787, 2788
2789, 2790, 2791
2792, 2793, 2794
2795, 2796, 2797
2798, 2799, 2800
2801, 2802, 2803
2804, 2805, 2806
2807, 2808, 2809
2810, 2811, 2812
2813, 2814, 2815
2816, 2817, 2818
2819, 2820, 2821
2822, 2823, 2824
2825, 2826, 2827
2828, 2829, 2830
2831, 2832, 2833
2834, 2835, 2836
2837, 2838, 2839
2840, 2841, 2842
2843, 2844, 2845
2846, 2847, 2848
2849, 2850, 2851
2852, 2853, 2854
2855, 2856, 2857
2858, 2859, 2860
2861, 2862, 2863
2864, 2865, 2866
2867, 2868, 2869
2870, 2871, 2872
2873, 2874, 2875
2876, 2877, 2878
2879, 2880, 2881
2882, 2883, 2884
2885, 2886, 2887
2888, 2889, 2890
2891, 2892, 2893
2894, 2895, 2896
2897, 2898, 2899
2900, 2901, 2902
2903, 2904, 2905
2906, 2907, 2908
2909, 2910, 2911
2912, 2913, 2914
2915, 2916, 2917
2918, 2919, 2920
2921, 2922, 2923
2924, 2925, 2926
2927, 2928, 2929
2930, 2931, 2932
2933, 2934, 2935
2936, 2937, 2938
2939, 2940, 2941
2942, 2943, 2944
2945, 2946, 2947
2948, 2949, 2950
2951, 2952, 2953
2954, 2955, 2956
2957, 2958, 2959
2960, 2961, 2962
2963, 2964, 2965
2966, 2967, 2968
2969, 2970, 2971
2972, 2973, 2974
2975, 2976, 2977
2978, 2979, 2980
2981, 2982, 2983
2984, 2985, 2986
2987, 2988, 2989
2990, 2991, 2992
2993, 2994, 2995
2996, 2997, 2998
2999, 3000, 3001
3002, 3003, 3004
3005, 3006, 3007
3008, 3009, 3010
3011, 3012, 3013
3014, 3015, 3016
3017, 3018, 3019
3020, 3021, 3022
3023, 3024, 3025
3026, 3027, 3028
3029, 3030, 3031
3032, 3033, 3034
3035, 3036, 3037
3038, 3039, 3040
3041, 3042, 3043
3044, 3045, 3046
3047, 3048, 3049
3050, 3051, 3052
3053, 3054, 3055
3056, 3057, 3058
3059, 3060, 3061
3062, 3063, 3064
3065, 3066, 3067
3068, 3069, 3070
3071, 3072, 3073
3074, 3075, 3076
3077, 3078, 3079
3080, 3081, 3082
3083, 3084, 3085
3086, 3087, 3088
3089, 3090, 3091
3092, 3093, 3094
3095, 3096, 3097
3098, 3099, 3100
3101, 3102, 3103
3104, 3105, 3106
3107, 3108, 3109
3110, 3111, 3112
3113, 3114, 3115
3116, 3117, 3118
3119, 3120, 3121
3122, 3123, 3124
3125, 3126, 3127
3128, 3129, 3130
3131, 3132, 3133
3134, 3135, 3136
3137, 3138, 3139
3140, 3141, 3142
3143, 3144, 3145
3146, 3147, 3148
3149, 3150, 3151
3152, 3153, 3154
3155, 3156, 3157
3158, 3159, 3160
3161, 3162, 3163
3164, 3165, 3166
3167, 3168, 3169
3170, 3171, 3172
3173, 3174, 3175
3176, 3177, 3178
3179, 3180, 3181
3182, 3183, 3184
3185, 3186, 3187
3188, 3189, 3190
3191, 3192, 3193
3194, 3195, 3196
3197, 3198, 3199
3200, 3201, 3202
3203, 3204, 3205
3206, 3207, 3208
3209, 3210, 3211
3212, 3213, 3214
3215, 3216, 3217
3218, 3219, 3220
3221, 3222, 3223
3224, 3225, 3226
3227, 3228, 3229
3230, 3231, 3232
3233, 3234, 3235
3236, 3237, 3238
3239, 3240, 3241
3242, 3243, 3244
3245, 3246, 3247
3248, 3249, 3250
3251, 3252, 3253
3254, 3255, 3256
3257, 3258, 3259
3260, 3261, 3262
3263, 3264, 3265
3266, 3267, 3268
3269, 3270, 3271
3272, 3273, 3274
3275, 3276, 3277
3278, 3279, 3280
3281, 3282, 3283
3284, 3285, 3286
3287, 3288, 3289
3290, 3291, 3292
3293, 3294, 3295
3296, 3297, 3298
3299, 3300, 3301
3302, 3303, 3304
3305, 3306, 3307
3308, 3309, 3310
3311, 3312, 3313
3314, 3315, 3316
3317, 3318, 3319
3320, 3321, 3322
3323, 3324, 3325
3326, 3327, 3328
3329, 3330, 3331
3332, 3333, 3334
3335, 3336, 3337
3338, 3339, 3340
3341, 3342, 3343
3344, 3345, 3346
3347, 3348, 3349
3350, 3351, 3352
3353, 3354, 3355
3356, 3357, 3358
3359, 3360, 3361
3362, 3363, 3364
3365, 3366, 3367
3368, 3369, 3370
3371, 3372, 3373
3374, 3375, 3376
3377, 3378, 3379
3380, 3381, 3382
3383, 3384, 3385
3386, 3387, 3388
3389, 3390, 3391
3392, 3393, 3394
3395, 3396, 3397
3398, 3399, 3400
3401, 3402, 3403
3404, 3405, 3406
3407, 3408, 3409
3410, 3411, 3412
3413, 3414, 3415
3416, 3417, 3418
3419, 3420, 3421
3422, 3423, 3424
3425, 3426, 3427
3428, 3429, 3430
3431, 3432, 3433
3434, 3435, 3436
3437, 3438, 3439
3440, 3441, 3442
3443, 3444, 3445
3446, 3447, 3448
3449, 3450, 3451
3452, 3453, 3454
3455, 3456, 3457
3458, 3459, 3460
3461, 3462, 3463
3464, 3465, 3466
3467, 3468, 3469
3470, 3471, 3472
3473, 3474, 3475
3476, 3477, 3478
3479, 3480, 3481
3482, 3483, 3484
3485, 3486, 3487
3488, 3489, 3490
3491, 3492, 3493
3494, 3495, 3496
3497, 3498, 3499
3500, 3501, 3502
3503, 3504, 3505
3506, 3507, 3508
3509, 3510, 3511
3512, 3513, 3514
3515, 3516, 3517
3518, 3519, 3520
3521, 3522, 3523
3524, 3525, 3526
3527, 3528, 3529
3530, 3531, 3532
3533, 3534, 3535
3536, 3537, 3538
3539, 3540, 3541
3542, 3543, 3544
3545, 3546, 3547
3548, 3549, 3550
3551, 3552, 3553
3554, 3555, 3556
3557, 3558, 3559
3560, 3561, 3562
3563, 3564, 3565
3566, 3567, 3568
3569, 3570, 3571
3572, 3573, 3574
3575, 3576, 3577
3578, 3579, 3580
3581, 3582, 3583
3584, 3585, 3586
3587, 3588, 3589
3590, 3591, 3592
3593, 3594, 3595
3596, 3597, 3598
3599, 3600, 3601
3602, 3603, 3604
3605, 3606, 3607
3608, 3609, 3610
3611, 3612, 3613
3614, 3615, 3616
3617, 3618, 3619
3620, 3621, 3622
3623, 3624, 3625
3626, 3627, 3628
3629, 3630, 3631
3632, 3633, 3634
3635, 3636, 3637
3638, 3639, 3640
3641, 3642, 3643
3644, 3645, 3646
3647, 3648, 3649
3650, 3651, 3652
3653, 3654, 3655
3656, 3657, 3658
3659, 3660, 3661
3662, 3663, 3664
3665, 3666, 3667
3668, 3669, 3670
3671, 3672, 3673
3674, 3675, 3676
3677, 3678, 3679
3680, 3681, 3682
3683, 3684, 3685
3686, 3687, 3688
3689, 3690, 3691
3692, 3693, 3694
3695, 3696, 3697
3698, 3699, 3700
3701, 3702, 3703
3704, 3705, 3706
3707, 3708, 3709
3710, 3711, 3712
3713, 3714, 3715
3716, 3717, 3718
3719, 3720, 3721
3722, 3723, 3724
3725, 3726, 3727
3728, 3729, 3730
3731, 3732, 3733
3734, 3735, 3736
3737, 3738, 3739
3740, 3741, 3742
3743, 3744, 3745
3746, 3747, 3748
3749, 3750, 3751
3752, 3753, 3754
3755, 3756, 3757
3758, 3759, 3760
3761, 3762, 3763
3764, 3765, 3766
3767, 3768, 3769
3770, 3771, 3772
3773, 3774, 3775
3776, 3777, 3778
3779, 3780, 3781
3782, 3783, 3784
3785, 3786, 3787
3788, 3789, 3790
3791, 3792, 3793
3794, 3795, 3796
3797, 3798, 3799
3800, 3801, 3802
3803, 3804, 3805
3806, 3807, 3808
3809, 3810, 3811
3812, 3813, 3814
3815, 3816, 3817
3818, 3819, 3820
3821, 3822, 3823
3824, 3825, 3826
3827, 3828, 3829
3830, 3831, 3832
3833, 3834, 3835
3836, 3837, 3838
3839, 3840, 3841
3842, 3843, 3844
3845, 3846, 3847
3848, 3849, 3850
3851, 3852, 3853
3854, 3855, 3856
3857, 3858, 3859
3860, 3861, 3862
3863, 3864, 3865
3866, 3867, 3868
3869, 3870, 3871
3872, 3873, 3874
3875, 3876, 3877
3878, 3879, 3880
3881, 3882, 3883
3884, 3885, 3886
3887, 3888, 3889
3890, 3891, 3892
3893, 3894, 3895
3896, 3897, 3898
3899, 3900, 3901
3902, 3903, 3904
3905, 3906, 3907
3908, 3909, 3910
3911, 3912, 3913
3914, 3915, 3916
3917, 3918, 3919
3920, 3921, 3922
3923, 3924, 3925
3926, 3927, 3928
3929, 3930, 3931
3932, 3933, 3934
3935, 3936, 3937
3938, 3939, 3940
3941, 3942, 3943
3944, 3945, 3946
3947, 3948, 3949
3950, 3951, 3952
3953, 3954, 3955
3956, 3957, 3958
3959, 3960, 3961
3962, 3963, 3964
3965, 3966, 3967
3968, 3969, 3970
3971, 3972, 3973
3974, 3975, 3976
3977, 3978, 3979
3980, 3981, 3982
3983, 3984, 3985
3986, 3987, 3988
3989, 3990, 3991
3992, 3993, 3994
3995, 3996, 3997
3998, 3999, 4000
4001, 4002, 4003
4004, 4005, 4006
4007, 4008, 4009
4010, 4011, 4012
4013, 4014, 4015
4016, 4017, 4018
4019, 4020, 4021
4022, 4023, 4024
4025, 4026, 4027
4028, 4029, 4030
4031, 4032, 4033
4034, 4035, 4036
4037, 4038, 4039
4040, 4041, 4042
4043, 4044, 4045
4046, 4047, 4048
4049, 4050, 4051
4052, 4053, 4054
4055, 4056,

[illegible]

Dr. George A. (John) Gorman
 1930-1931, 1932-1933
 Walter Gorman, 1934-1935
 Walter Gorman, 1936-1937
 Walter Gorman, 1938-1939
 Walter Gorman, 1940-1941
 Walter Gorman, 1942-1943
 Walter Gorman, 1944-1945
 Walter Gorman, 1946-1947
 Walter Gorman, 1948-1949
 Walter Gorman, 1950-1951
 Walter Gorman, 1952-1953
 Walter Gorman, 1954-1955
 Walter Gorman, 1956-1957
 Walter Gorman, 1958-1959
 Walter Gorman, 1960-1961
 Walter Gorman, 1962-1963
 Walter Gorman, 1964-1965
 Walter Gorman, 1966-1967
 Walter Gorman, 1968-1969
 Walter Gorman, 1970-1971
 Walter Gorman, 1972-1973
 Walter Gorman, 1974-1975
 Walter Gorman, 1976-1977
 Walter Gorman, 1978-1979
 Walter Gorman, 1980-1981
 Walter Gorman, 1982-1983
 Walter Gorman, 1984-1985
 Walter Gorman, 1986-1987
 Walter Gorman, 1988-1989
 Walter Gorman, 1990-1991
 Walter Gorman, 1992-1993
 Walter Gorman, 1994-1995
 Walter Gorman, 1996-1997
 Walter Gorman, 1998-1999
 Walter Gorman, 2000-2001
 Walter Gorman, 2002-2003
 Walter Gorman, 2004-2005
 Walter Gorman, 2006-2007
 Walter Gorman, 2008-2009
 Walter Gorman, 2010-2011
 Walter Gorman, 2012-2013
 Walter Gorman, 2014-2015
 Walter Gorman, 2016-2017
 Walter Gorman, 2018-2019
 Walter Gorman, 2020-2021
 Walter Gorman, 2022-2023
 Walter Gorman, 2024-2025
 Walter Gorman, 2026-2027
 Walter Gorman, 2028-2029
 Walter Gorman, 2030-2031
 Walter Gorman, 2032-2033
 Walter Gorman, 2034-2035
 Walter Gorman, 2036-2037
 Walter Gorman, 2038-2039
 Walter Gorman, 2040-2041
 Walter Gorman, 2042-2043
 Walter Gorman, 2044-2045
 Walter Gorman, 2046-2047
 Walter Gorman, 2048-2049
 Walter Gorman, 2050-2051
 Walter Gorman, 2052-2053
 Walter Gorman, 2054-2055
 Walter Gorman, 2056-2057
 Walter Gorman, 2058-2059
 Walter Gorman, 2060-2061
 Walter Gorman, 2062-2063
 Walter Gorman, 2064-2065
 Walter Gorman, 2066-2067
 Walter Gorman, 2068-2069
 Walter Gorman, 2070-2071
 Walter Gorman, 2072-2073
 Walter Gorman, 2074-2075
 Walter Gorman, 2076-2077
 Walter Gorman, 2078-2079
 Walter Gorman, 2080-2081
 Walter Gorman, 2082-2083
 Walter Gorman, 2084-2085
 Walter Gorman, 2086-2087
 Walter Gorman, 2088-2089
 Walter Gorman, 2090-2091
 Walter Gorman, 2092-2093
 Walter Gorman, 2094-2095
 Walter Gorman, 2096-2097
 Walter Gorman, 2098-2099
 Walter Gorman, 2100-2101
 Walter Gorman, 2102-2103
 Walter Gorman, 2104-2105
 Walter Gorman, 2106-2107
 Walter Gorman, 2108-2109
 Walter Gorman, 2110-2111
 Walter Gorman, 2112-2113
 Walter Gorman, 2114-2115
 Walter Gorman, 2116-2117
 Walter Gorman, 2118-2119
 Walter Gorman, 2120-2121
 Walter Gorman, 2122-2123
 Walter Gorman, 2124-2125
 Walter Gorman, 2126-2127
 Walter Gorman, 2128-2129
 Walter Gorman, 2130-2131
 Walter Gorman, 2132-2133
 Walter Gorman, 2134-2135
 Walter Gorman, 2136-2137
 Walter Gorman, 2138-2139
 Walter Gorman, 2140-2141
 Walter Gorman, 2142-2143
 Walter Gorman, 2144-2145
 Walter Gorman, 2146-2147
 Walter Gorman, 2148-2149
 Walter Gorman, 2150-2151
 Walter Gorman, 2152-2153
 Walter Gorman, 2154-2155
 Walter Gorman, 2156-2157
 Walter Gorman, 2158-2159
 Walter Gorman, 2160-2161
 Walter Gorman, 2162-2163
 Walter Gorman, 2164-2165
 Walter Gorman, 2166-2167
 Walter Gorman, 2168-2169
 Walter Gorman, 2170-2171
 Walter Gorman, 2172-2173
 Walter Gorman, 2174-2175
 Walter Gorman, 2176-2177
 Walter Gorman, 2178-2179
 Walter Gorman, 2180-2181
 Walter Gorman, 2182-2183
 Walter Gorman, 2184-2185
 Walter Gorman, 2186-2187
 Walter Gorman, 2188-2189
 Walter Gorman, 2190-2191
 Walter Gorman, 2192-2193
 Walter Gorman, 2194-2195
 Walter Gorman, 2196-2197
 Walter Gorman, 2198-2199
 Walter Gorman, 2200-2201
 Walter Gorman, 2202-2203
 Walter Gorman, 2204-2205
 Walter Gorman, 2206-2207
 Walter Gorman, 2208-2209
 Walter Gorman, 2210-2211
 Walter Gorman, 2212-2213
 Walter Gorman, 2214-2215
 Walter Gorman, 2216-2217
 Walter Gorman, 2218-2219
 Walter Gorman, 2220-2221
 Walter Gorman, 2222-2223
 Walter Gorman, 2224-2225
 Walter Gorman, 2226-2227
 Walter Gorman, 2228-2229
 Walter Gorman, 2230-2231
 Walter Gorman, 2232-2233
 Walter Gorman, 2234-2235
 Walter Gorman, 2236-2237
 Walter Gorman, 2238-2239
 Walter Gorman, 2240-2241
 Walter Gorman, 2242-2243
 Walter Gorman, 2244-2245
 Walter Gorman, 2246-2247
 Walter Gorman, 2248-2249
 Walter Gorman, 2250-2251
 Walter Gorman, 2252-2253
 Walter Gorman, 2254-2255
 Walter Gorman, 2256-2257
 Walter Gorman, 2258-2259
 Walter Gorman, 2260-2261
 Walter Gorman, 2262-2263
 Walter Gorman, 2264-2265
 Walter Gorman, 2266-2267
 Walter Gorman, 2268-2269
 Walter Gorman, 2270-2271
 Walter Gorman, 2272-2273
 Walter Gorman, 2274-2275
 Walter Gorman, 2276-2277
 Walter Gorman, 2278-2279
 Walter Gorman, 2280-2281
 Walter Gorman, 2282-2283
 Walter Gorman, 2284-2285
 Walter Gorman, 2286-2287
 Walter Gorman, 2288-2289
 Walter Gorman, 2290-2291
 Walter Gorman, 2292-2293
 Walter Gorman, 2294-2295
 Walter Gorman, 2296-2297
 Walter Gorman, 2298-2299
 Walter Gorman, 2300-2301
 Walter Gorman, 2302-2303
 Walter Gorman, 2304-2305
 Walter Gorman, 2306-2307
 Walter Gorman, 2308-2309
 Walter Gorman, 2310-2311
 Walter Gorman, 2312-2313
 Walter Gorman, 2314-2315
 Walter Gorman, 2316-2317
 Walter Gorman, 2318-2319
 Walter Gorman, 2320-2321
 Walter Gorman, 2322-2323
 Walter Gorman, 2324-2325
 Walter Gorman, 2326-2327
 Walter Gorman, 2328-2329
 Walter Gorman, 2330-2331
 Walter Gorman, 2332-2333
 Walter Gorman, 2334-2335
 Walter Gorman, 2336-2337
 Walter Gorman, 2338-2339
 Walter Gorman, 2340-2341
 Walter Gorman, 2342-2343
 Walter Gorman, 2344-2345
 Walter Gorman, 2346-2347
 Walter Gorman, 2348-2349
 Walter Gorman, 2350-2351
 Walter Gorman, 2352-2353
 Walter Gorman, 2354-2355
 Walter Gorman, 2356-2357
 Walter Gorman, 2358-2359
 Walter Gorman, 2360-2361
 Walter Gorman, 2362-2363
 Walter Gorman, 2364-2365
 Walter Gorman, 2366-2367
 Walter Gorman, 2368-2369
 Walter Gorman, 2370-2371
 Walter Gorman, 2372-2373
 Walter Gorman, 2374-2375
 Walter Gorman, 2376-2377
 Walter Gorman, 2378-2379
 Walter Gorman, 2380-2381
 Walter Gorman, 2382-2383
 Walter Gorman

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencana bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program kegiatan dalam Renja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April Tahun 2023 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum komunikasi publik Tahun 2024.

Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024

Dinas Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Jumlah produksi perikanan Tangkap (Ton)		
	Kegiatan Pengelolaan Peningkatan Iktan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dimanfaatkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Lerantuka	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	Usulan ini sesuai dengan rencana OPD

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok Nelayan Tersebar di 19 Kecamatan, Kec Tanjung Bunga (Kolaka, Patanreawaling, Katuladeng, Sunar Hadigala, Waihae, Lewobunga, Sinamalaka, Sandona, Latoniwo 1, Gekong Derang, Bahinga, Aransina); Kec Ile Bura (Nobo Kunga, Nurri, Bawana), Kec Wulanggitang (Pantai Oa, Wanda, adinjietung); Kec Leranuka (Wabutan, Lewolera, Mokannarak, Amagapont, Pantai Besar, Pantai, Sarotari Timur, Waihali, Wari, Pohan Bao, Sarotari Tengah, Pohan Sirih, Balala, Sarotari); Kec Adonara (Sagu, Adonara); Kec Solor Barat (Balaweling 1, Balaweling 2, Daniwato, Pamakryo, Ritasabang, Tanah Lela, Limawaling, Lewotanahole, Lamale, Lamawohong); Kec Adonara Timur (Lamahala Irya, Wiburak, Terung, Bioto, Watanpa); Kec Ile Mandiri (Tiwatobi, Watututa, Wailolong, Lewoloha); Kec Deman Pagong (Gama, Lewokluak, Lewumuda, Kawalelo); Kec Wihama (Wiwuring); Kec Solor Timur (Motan Wunin, Watanhura, Watobuku, Wuhubisong, Labalen, Labayong II, Watohari, Mahanga, Lewohado, Kawuta); Kec Tisihena (Serimuko, Watowara, Bokang Wolomatang); Kec Wulanggitang (Pantai Oa, Wanda), Kec Ile Boleng (Nobo, Duabolong, Bolang, Nelaamawangi II); Kec Werau Uluado (Oyangbarang, Samasoge); Kec Lewolema (Bantala); Kec Solor Selatan (Solengwasang, Katera, Ongalerang, Kalike Aumatu)	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10,3	Ujikan masyarakat ini sesuai dengan rencana kerja OPD
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Leranuka, Kecamatan Tisihena Desa Lewolaga	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TP)	4	Ujikan sesuai dengan Rencana kerja OPD
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		- Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton) - Presentase pengelolaan perikanan budidaya (%)	- 171 ton - 88,38% (910/1030)	

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya Volume	Catatan
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudidaya (Kelompok)		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Larantuka, Kec. Deman Pagong (Larokluuk)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	128	Uraian sesuai dengan rencana kerja OPD
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Kelompok Nelayan Tersebar di 19 Kecamatan, Kec. Solor Barat (Deniwara, Tanah Lela), Kec. Solor Timur (Moton Wutan, Watohari, Labelen), Kec. Trehana (Adahang), Kec. Adonara Tengah (Nubalema, Oe Sayung), Wotan Usumada (Panda), Solor Selatan (Sulengwasang), Tinjau Bungah (Sinamaleka), Kec. Tj. Bunga (Aransina, Letunilwo 1, Letunilwo 2, Waibao), Wulanggitang (Boru Kedang, Nawakoten)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	128	Uraian ini sesuai dengan rencana kerja OPD
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Tersebar di 19 Kecamatan, Kec. Wotan Ulu Mado (Samasaga), Kec. Solor Timur (Motuwutan, Watobuku, Lahayang 1, Lahayang 2, Watohari, Lamawai, Watuhusa 1, Watuhusa 2), Kec. Solor Selatan (Kanere), Kec. Adonara Timur (Lamahala Jaya, Terang, Waimank), Kec. Re Boieng (Boieng), KEC. Adonara (Boieng, Wairuring), Kec. Adonara Tengah (Nubalema), Kec. Wulanggitang (Ojandenu)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	4	Uraian sesuai dengan Rencana Kerja OPD
3	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan Dan Perikanan		Cakupan Pengawasan Sumber Daya Kelautan (%)		
	Kegiatan Pengamanan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten Kota				

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten Kota	Kabupaten Flores Timur, Kec. Waihaman (Plede), TanjungBunga (Witboe), Solor Barat (Ritaebang), Kec. Wulanggiting (Ojandenu), Lerantuka (Ekasapta), Kec. Adonara Timur (Lamahela Irya), Kec. Tj. Bunga (Lamatuta, Nusampta)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten Kota (Dokumen)	1	Usulan ini sesuai dengan ranje OPD
4	Program: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Lerantuka	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko(Dokumen)	1	Usulan ini sesuai dengan RENJA OPD
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemastaran Skala Mikro dan Kecil	Kelompok Nelayan Tersebar di 19 Kecamatan, Kec Solor Timur (Kawuta, Labelen), Kec Lantulu (Lewolere), Kec Mulangitang (Ojandenu), Kec Solor Selatan (Keners), Deman Pagong (Lewokllok), Kec Solor Barat (Tanah Lela)	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perikanan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	Usulan masyarakat sesuai dengan Rangka OPD
	Kegiatan Penyediaan dan Penyeluran Bahan Baku Industri Pengolahan dan Industri 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota				
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Kelompok Nelayan Tersebar di 19 Kecamatan, Kec Solor Barat (Dawuto, Tanah Lela), Kec Solor Timur (Moton Wutan, Watohari, Labelen), Kec Titahana (Adahang), Kec Adonara Tengah (Nukolema), Wotan Usumado (Panda), Solor Selatan (Sulungwasang), Tanjungbunga (Simamaliza)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	Usulan masyarakat sesuai dengan Rangka OPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, yang dilaksanakan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional. Salah satu Prioritas Nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan yakni PNI : *Menggerakkan kehidupan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan*.

Kebijakan Nasional tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur (Dinas Perikanan) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2023
Terwujudnya daya Saing Ekonomi	Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (perikanan)	Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (perikanan)	1,45	1,85
	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (perikanan)	Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (perikanan)	0,3 1	1,25

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni *"Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi dan daya saing daerah"* dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan. Sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambaran Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1		2		3	4
1	Perekonomian Masyarakat	1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sector pertanian (dalam arti luas)	Laju pertumbuhan PDRB sector pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1,85

3.3 Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas pada Dinas Perikanan yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) Program Prioritas, 5 (lima) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rencana Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	RENCANA MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KID			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0-25	0-0	0-0	01		DINAS PERIKANAN							
0	25				Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan				8.413.550.370			10.407.045.435
0	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan ruang dan prasarana (%)		38,19	2.611.118.590	APBD II	38,96	4.725.264.855
0	25	03	101		Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan empang air lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah produksi dan kontribusi hasil kelompok nelayan (%)		14.000	2.611.118.590	APBD II	14.100	4.725.264.855
0	25	03	101	01	Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang tersedia (dok)	Kab. Flores Timur	1	192.869.465	APBD II (DAU)	1	

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kab. Flores Timur 2023

3	25	03	101	02	Persediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia (unit)	Laka, Pasiurwaling, Noho, Pantai, Ga, Waiula, Nubalen (Mesa, Ketimang, Waibahu, Lewolera, Makintarak, Amagarapati, Sagu, Balaweling 1, Balaweling 2, Pantai Besar, Postoh, Amagarapati (pancing Layur), Ratu Lodang, Pasiurwaling, Kanga, Saroteri Timur, Makintarak, Lamahala Jaya, (Kepal), Sagu, Adonra, Lika, Tiwatu, Bama Ratu Lodang (Gillmer)	1373	7.415.249.121	APBD II			
3	25	03	103		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan TPI yang Ditelela (Layanan)							
3	25	03	103	02	Belanja Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Amagarapati						
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan	Prosentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)		0,43	898.639.775			0,76	900.137.920
3	25	06	101		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro Kecil	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (2019)	Kab. Flores Timur	1	61.611.850	APBD II (DAU)		1	59.000.839

Rencana Kerja Dinas Perikanan, Kab. Flores Timur 2023

3	25	06	2.01	01	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko (risk)	Kab. Flores Timur	1	61.611.830	APSD II (DAU)	1	59.000.839
3	25	06	2.02		Perbinaan Nium dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Kelompok)		70	67.483.037	APSD II	83	67.483.037
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atas Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perikanan Berusaha pada Usaha pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waikurak (1), Segu (1), Adonara (1) Nobo (1), Gayak (1), Nelaamawangi (1), Nelaerai (1), Duablabang(1)	70	67.483.037	APSD II	83	67.483.037
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan (Kelompok)		80	73.804.844		93	73.804.844
3	25	06	2.03	02	Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen bidang pemita pertambangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah (dokumen)	Terong (1), Lamahala Jaya (1), Waikurak (1), Segu (1), Adonara (1) Nobo (1), Gayak (1), Nelaamawangi (1), Nelaerai (1), Duablabang(1)	80	73.804.844		93	73.804.844

Rencana Kerja Dinas Perikanan K

2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perikanan, disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2024. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendasak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Larantuka,

2023

PLT. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,



Ir. VIKTOR TALU HURINT
PENISINA TKI
NIP. 196503051998031005



KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA Tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Flores Timur

JOHANES BRECHMANS TUBAN TUKAN, ST, MT

(Pembina / Pejabat IV/b)

NIP. 197264131999031005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Peraturan Bupati Flores Timur	
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-6
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah	III-1
3.3 Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	I-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-7
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	II-11
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	II-17
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024.....	III-2
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	III-3
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	1-2
------------	---	-----



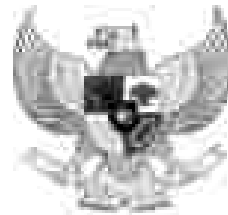
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

td

DORIS ALEXANDER RHH

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

td

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TKJ
NIP.197804262002121007

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan public Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substantif*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan penyusunan Tahun pertama Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permenkumham Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan, orientasi mengenai Renja PD serta penyajian data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal, dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2022.
3. Penyusunan Rancangan, dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Pemurnan Stunting;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Penutupakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan selanjutnya di jadikan sebagai acuan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paga Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Mayu Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kendala - kendala pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja tahun 2022 merupakan tahun terakhir Renstra 2017 – 2022 untuk Program Peningjang Urusan Kabupaten masi dengan Indikator yang sama, sedangkan pada program Urusan tahun 2022 capaian : ____ % dan untuk tahun Renstra tahun 2023 – 2026 dengan Program ____ Kegiatan ____ Sub Kegiatan ____ Untuk capaian kinerja program sampai dengan triwulan II sudah mencapai ____%.

Sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur didasarkan pada lajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penyapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	SPM Sektor Nasional	IKK	Target Kinerja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Tambahan
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Proportionalitas panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		4	88,98	74,33	75,58	78,25	76,57		79,58	76,25	Jaringan jalan dalam Kondisi baik (Salah 50%)
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		4	0,0041	0,0041	0	0			0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
3	Pembinaan kawasan pertukangan yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		4	0	0	0	0	0		0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)		4	96,32	96,32	0	0			0		Selap tahun dilaksanakan pembangunan jalan > 40 KM/jam
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m		4	1,87	1,87	0	0	0		0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
6	Persentase sempadan jalan yang disekelilingi pagar besi atau bangunan rumah liar		4	0	0	0	0	0		0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
7	Persentase rumah tinggal bermartil	4	4	100	72,54	72,21	72,21	16,06		72,21	72,21	Sertifikasi rumah sudah mencapai 16,06%
8	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak terhambat		4	100	100	0	100	48,92		0	100	Tidak dianggarkan kegiatan ini
9	Tidak terjadi gertangan > 2 kali setahun		4	0,0018	0,0018	0	0	0		0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
10	Persentase pembangunan tapak di wilayah jalan penghubung dan drain surgal rakas longsor		4	80	80	0	0	0		0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
11	Persentase mgas kabupaten dalam kondisi baik		4	55	21,58	22,08				22,08		Tidak dianggarkan kegiatan ini

12	Rasio Jaringan Nigral		4	6,44	7,34	14,47	21,71	0		14,47	21,71	Kegiatan dilaksanakan di tahun 2022
13	Persentase penduduk berakses air minum	4	4	100	86,87	87,44	86,43	74,62		87,44	74,62	Penduduk berakses air minum sudah mencapai 74,62 %
14	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan		3	100	75,14	91,86				91,86		Tidak dianggarkan kegiatan ini
15	Persentase akses kesehatan umum		4	0,3	17,23	16,23	0	0		16,23		Tidak dianggarkan kegiatan ini
16	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		4	00	50	50	50	0		50	50	Tidak dianggarkan kegiatan ini
17	Rasio tempat ibadah pemeluk penduduk		4	1,07	1,07	0	0	0		0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
18	Luaran RTM public sebesar 20% dari total wilayah kota/kabupaten perkotaan		4	1,7	1,7	0	0	0		0		Tidak dianggarkan kegiatan ini
19	Akses air minum aman		3	0	0	0	0	0		0		Penduduk yang berakses air minum aman mencapai 00,50%
20	Kepuasan terhadap RTM		4	0	100	100	100	100		100	100	Jumlah dokumen pada RTM

Dari hasil capaian kinerja masing-masing indikator, analisa yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pada sasaran meningkatkan kemantapan jalan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 76,87 dari target renstra tahun 2022 sebesar 89,98, hal ini belum mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran.
1. Pada sasaran persentase penduduk berakses air minum capaian kinerja tahun 2022 sebesar 74,62 dari target renstra tahun 2022 sebesar 100, hal ini belum mencapai target dikarenakan keterbatasan dalam alokasi anggaran DAK.
1. Pada sasaran meningkatkan Akses sanitasi aman dan layak capaian kinerja tahun 2022 sebesar 16,06 dari target renstra tahun 2022 sebesar 100.
4. Pada sasaran persentase irigasi dalam kondisi baik, capaian kinerja tahun 2022 0 dari target renstra tahun 2022 sebesar 95 hal ini belum mencapai target dikarenakan tidak dianggarkan ditahun 2022.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskan isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kualitas Jalan;
1. Belum Optimalnya ketersediaan dan kualitas saluran irigasi;
3. Belum Optimalnya akses air minum masyarakat;
4. Belum Optimalnya akses sanitasi aman dan layak bagi masyarakat;
5. Belum optimalnya jaringan drainase dalam kota;
6. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungannya;
7. Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan ruang.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur tahun 2024 adalah sebagaimana yang tersaji pada table 2.4 sebagai berikut :

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (bottom-upplanning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun dari prangkat daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada prangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal bulan Maret Tahun 2023 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi publik Tahun 2023. Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.5 sebagai berikut :

Tabel 1.5

Uraian Program dan Kegiatan Dari Para Pemungku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Peternakan Umum dan Peternakan Rong

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program/Under Dapa AB (LHA)		Program/Under Dapa AB (LHA)		
2	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti pada Wilayah Sangat (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota		Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti pada Wilayah Sangat (WS) dalam 1 (satu) Daerah		
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Jernail dan Bangunan Pengeran Panti Lainnya		Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti Lainnya yang Dibangun		
1		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
2		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
3		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
4		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
5		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
6		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
7		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
8		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
9		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
10		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti
11		Dapa AB (LHA), Kabupaten		100 M	Program/Under Dapa AB (LHA) dan Bangunan Pengeran Panti

[illegible]

No.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1.1	Perbaikan SPAM Miringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah Pemeliharaan Sambungan Rawaak yang Terpenuhi Melalui Pemangfutan IRI Capaian dengan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Pada SPAM IRI Perkotaan atau SPAM Tersebut Tersebut (SR)		
1		Kabupaten Karawang, Karawang, Jawa Barat		100 SR	Dilaksanakan berdasarkan APBD dan sumber dana lainnya
111	Program Pengembangan Jalan		Pemeliharaan jalan yang diaspal		
1	Kegiatan Pengembangan Jalan Kabupaten Kota		Panjang Jalan Kabupaten Kota		
1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Jalan		Panjang jalan yang diaspal		
	Ran Jalan Kabupaten – Kabupaten Karawang, Jawa Barat		1.000	Ran jalan Kabupaten – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Kabupaten – Kabupaten Karawang, Jawa Barat (SR)
	Ran Jalan Kota – Kabupaten Karawang – Jawa Barat		1.000	Ran jalan Kota – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Kota – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
	Ran Jalan Kecamatan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat		1.000	Ran jalan Kecamatan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Kecamatan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan		Panjang jalan yang di rehabilitasi		
1		Ran Jalan Kabupaten – Kabupaten Karawang, Jawa Barat	1.000	Ran jalan Kabupaten – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Kabupaten – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
2		Ran Jalan Kota – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	1.000	Ran jalan Kota – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Kota – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
3		Ran Jalan Kecamatan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	1.000	Ran jalan Kecamatan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Kecamatan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
4		Ran Jalan Desa – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	1.000	Ran jalan Desa – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Desa – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
5		Ran Jalan Kelurahan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	1.000	Ran jalan Kelurahan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan Kelurahan – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
6		Ran Jalan RW – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	1.000	Ran jalan RW – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan RW – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)
7		Ran Jalan RT – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	1.000	Ran jalan RT – Kabupaten Karawang – Jawa Barat	Ran Jalan RT – Kabupaten Karawang – Jawa Barat (SR)

No.	Program/Kegiatan	Isi/Isi	Indikator/Kriteria	Berkas/Volume	Catatan
1		Keputusan Menteri - Peraturan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
2		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
3		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
4		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
5		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
6		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
7		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
8		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
9		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
10		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
11		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
12		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
13		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
14		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
15		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
16		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
17		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
18		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
19		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
20		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
21		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
22		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
23		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan
24		Kep. 10/2010 - Keputusan No. 10/2010		17.5 MB (Penerbitan)	Keputusan Menteri yang telah diterbitkan

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 8 (delapan) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Tema pembangunan diarahkan pada 8 (delapan) Arah Kebijakan yang meliputi :

- ❖ Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- ❖ Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- ❖ Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- ❖ Penguatan Daya Saing Usaha;
- ❖ Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- ❖ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- ❖ Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- ❖ Pelaksanaan Pemilu 2024.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini mengantarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun
2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2024
Tercapainya dan saling Infrastruktur	Meningkatnya kualitas/ kuantitas Jalan dan Jembatan	Tingkat kemampatan jalan (%)	73,07	75,38 %
	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian (Bendungan)	Persentase jaringan irigasi (%)	21,08	22,08 %
	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	Akses air minum aman (%)	86,17	86,47 %
		Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,11	72,21 %

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni: “*Percapaian Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas*” dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan. Sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambaran Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Prioritas	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	22,08
		3.2	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	Akses air minum aman (%)	86,47
				Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,21
		3.4	Meningkatnya kualitas kuantitas Jalan dan Jembatan	Tingkat kemampatan jalan (%)	75,38
		3.7	Meningkatnya system pengolahan limbah yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang terkelola melalui 3 R (%)	0,28

3.3. Program dan kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 (lima) Program Prioritas, sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, 3 times per week, 100-min, low-impact aerobically and resistance training program on the body composition, muscle strength, and aerobic capacity of 10 sedentary, middle-aged women. The subjects were randomly assigned to either the exercise or control group. The exercise group performed a low-impact aerobically and resistance training program, while the control group performed no exercise. The results showed that the exercise group had a significant decrease in body fat percentage, an increase in muscle strength, and an increase in aerobic capacity compared to the control group. The control group had no significant changes in body composition, muscle strength, or aerobic capacity. The results of this study suggest that a 12-week, 3 times per week, 100-min, low-impact aerobically and resistance training program can improve body composition, muscle strength, and aerobic capacity in sedentary, middle-aged women.

IV-2

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, disamping program - program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran - sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

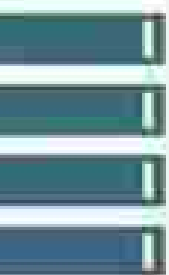
Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Larantuka, Agustus 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Flores Timur

JOHANES BRECHMAN SUDAN TUKAN, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197264131999031005



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2023

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS KESEHATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPMP dan RPMD, serta tata cara perubahan RPIP dan RPMD dan Renja Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 13 Tahun 2022 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Renja PD 2024 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja PD 2024 ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan RENJA PD 2024 ini senantiasa kami harapkan.

Larantuka, Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur



Dr. Agustinus Gus Silimbar
NIP. 19790815 200604 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
PERBUB RENJA	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	49
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	79
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	79
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	79
3.3 Program dan Kegiatan	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	101
BAB V PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	51
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	77
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024	80
Tabel 3.2	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	80
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	
	Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur	81
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Renja PD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	1
--	---



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD.
- (3) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TKJ

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

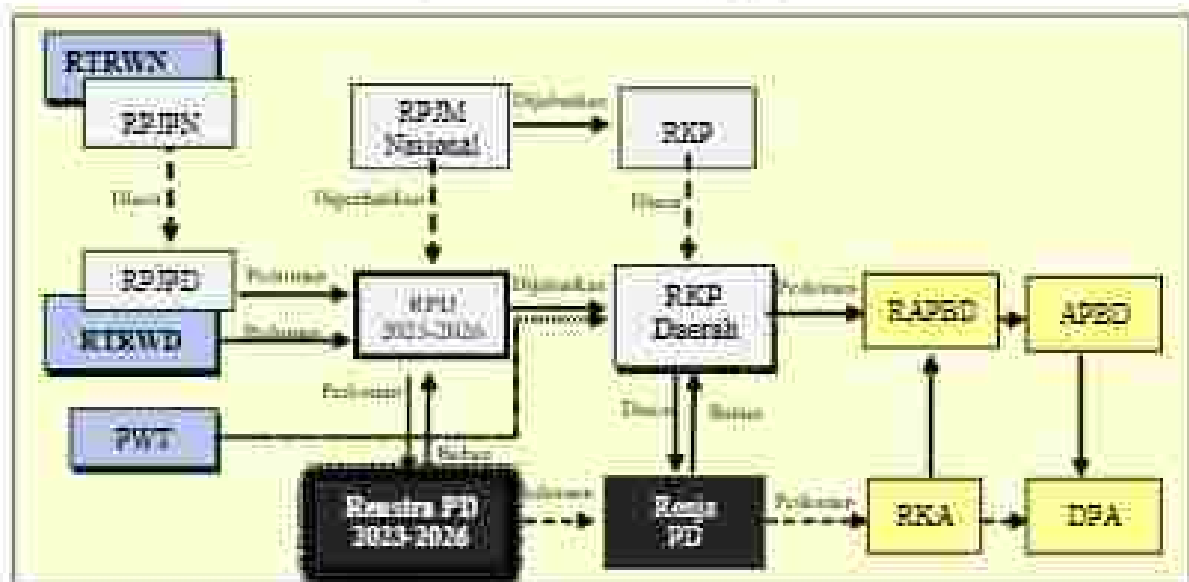
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Talapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain, dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Dinas Kesehatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Penutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Penutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur;
 22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026;
 23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
 24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
 25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU meliputi: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra , Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN meliputi: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2022 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
												K		
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	01	01	1.04	01	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SIPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Tiktisat Kinerja SIPD (dok)	60	60	18	16	100	7	67	111
4	02	01	1.07		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	03	01	1.08	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)		56	14	14	100	14	70	100

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Outpu t)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
			K	K	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	K	K		K	K
					1	2	3	4	5= (7/6)	6
1.00.01.01.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Penyusunan administrasi keuangan (bulan)	60	48	12	12	100	12	60	100
1.00.01.02.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.00.01.02.02	Pemickaraan Pelatnan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya (orang)	528	390	528	528	100	528	528	100
1.0.01.02.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Outpu t)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perang kat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					K	K	K		K	K				
					1	2	3	4	5	6	7	8	10=54/65	10=100/100
1	00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (jenis)	50	38	10	10	100	2 (10)	48	96
1	00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	11	6	0	0	0	1	7	54,5
						Jumlah peralatan kantor yang diadakan (unit)	95	5	0	0	0	1	5	29,4
1	00	01	2.06	04	Penyediaan bahan pokok kantor	Jumlah jenis alat/bahan kebersihan	18	28	20	20	100	1	29	100

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(10/9)	11=(11/9)	
						Jumlah jenis ATK yang disediakan (jenis)	112	81	26	13	46	1	35	83	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Jumlah paket barang bekas dan penggantian (lembar)	377.000	384.970	43.000	42.000	100	43.000	489.970	81	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan (jenis)	2	2	2	1	50	2	2	100	
1	01	01	1.06	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat karyawan, karyawan dan tamu (dos)	5000	713	800	32	6	12	757	15	
1	01	01	1.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	1160	167	35	10	29	20	197	17	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan					
			K	K	K	K	K	K	K	K				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (9/4) x 100	11= (3/4) x 100				
		Urusan Pemerintahan Daerah												
1	00	001	1.001	00	Penyetoran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK kendaraan dan pajak kendaraan roda 4 yang dilulus (buah)	40	12	3	3	100	6	21	52,5
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit)	22	6	6	6	6	100	6	21	77,7
1	00	001	1.002	00	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	5	3	1	1	100	1	5	100

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=54/100	11=100/100	
			Upaya Kesehatan Masyarakat								
4	02	02	2.03								
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan LKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.03	01	Lanjutan pembangunan rumah sakit Adonara beserta sarana dan prasarana pendukung (unit)	13	1	1	1	100	84,6

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(10/9)	11=(11/9)	12
1	02	02	2.03	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun (unit)	0	0	0	0	
1	02	02	2.03	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah pembangunan rumah dokter dan poliklinik puskesmas (unit)	10	9	0	0	90
1	02	02	2.03	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas (unit)	2	0	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10-2023	10-2024
						Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap (unit)	2	1	0	0	0	0	1	50
1	02	02	2.02	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah puskesmas yang direhab (unit)	5	3	2	2	100	0	5	100
1	02	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang direhab sedang/berat (unit)	20	5	0	0	0	1	5	20
						Jumlah dokumen pelayanan sarana kesehatan (dok)	0	0	0	0	0	19	0	-
1	02	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dokter dan peramedis yang direhabilitasi (unit)	8	0	0	0	0	0	0	-

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
											K	K
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100		
		Jumlah bahan logistik yang disediakan (unit)						1	1	-		
		Jumlah ambulance/mobil jenazah yang disediakan (unit)						1				
		Jumlah prasarana air bersih yang disediakan (unit)		3	3	3	100	0	0	-		
1	02	03	0401	04	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis alat kesehatan yang tersedia di puskesmas (set)	17	8	8	100	75	900
		Jumlah sarana dan prasarana kesehatan lingkungan yang disediakan (set)		3	0	0	0		3			

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5/9x100	11=(10/4)x100	
		Jumlah alat dan bahan fogging yang disediakan (unit)		2					2		
		Tersedia alat dan bahan pengendalian penyakit mulut									
		Jumlah pengadaan alat kesehatan rumah sakit									
		Jumlah alat kesehatan risiko kehamilan yang disediakan									
		Jumlah alat antropometri yang disediakan (set)		284				275	425		
1	01	01	0001	04	Pengadaan Obat, Vaksin						
		Jumlah obat-obatan dan kelengkapan RS yang disediakan									
		Jumlah item obat, vaksin dan perbekal dan obat program (jenis)	210	262	1	1	100	1	262	124	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan					
			K	K	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi	K	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					K	K	K=(K1/K2)		K	K				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Tersedia sistem manajemen obat dan akses mli e-logistik												
		Jumlah ibu hamil KKR yang mendapat obat dan kapsul vitamin												
4	02	02	02.02	02	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item obat, vaksin dan perbekas dan obat program (paket)	75	141	2	2	100	2	141	188
1	02	02	02.02	02	Pemeliharaan Rutin dan Benah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan jenis alat kesehatan yang dipelihara dan diperbaiki (buah)		360	6	6	100	1118	1474	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5/9)*100	11=(10/9)*100	12				
11	01	01	1.01												
11	02	01	2.01	01	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (orang/bumi)	31.970	16.500	4.500	3.528	78	4500	34.948	113	-
11	03	01	3.01	01	Pengabdian Pelayanan Ibu Bersalin	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (orang/bumi)	21.962	16.742	4.500	3.943	85	4.150	34.837	116	-

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Outpu t)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perang kat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10-2023	10-2023 (%)	
1	00	01	2.03	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (orang/bayi)	21.048	16.371	4.443	3.826	87	4.100	24.347	115	-
1	01	01	2.03	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (orang/balita)	95.654	68.748	19.559	18.328	93	18.856	105.892	110	-
						Jumlah modal dan suplai program di 21 puskesmas (pusk)						21			
						Jumlah kecamatan yang dilaksanakan sosialisasi (kac)	19					19			
						Jumlah bayi kanguru yang diadakan (buah)	42					42			

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=54/100	11=100/11	
1	00	01	203	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Penulikan Dasar	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	159.488	55.251	54.248	1.707	3	13.357	71.315	44,7	
						Jumlah orientasi pelayanan penjangkauan anak sekolah bagi tenaga pengelola UKS (kali)	4					4			
1	00	01	203	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	358.543	135.243	94.511	53.997	70	49.498	344.108	68	
						Jumlah sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan bagi remaja luar sekolah (kali)	4					4			

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=5A/100	11=10A/11	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	130.106	52.329	30.097	27.181	123	17.658	107.178	82	
						Penyegaran pengelola pelayanan kesehatan lansia (kal)	4					1			
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	205.476	84.885	38.993	10.087	26	45.515	90.487	44	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	7.319	3.930	1.028	1.219	118	643	5.792	79	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	782	543	12	498	3920	422	1.469	187	

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (9/8)*100	11= (10/9)*100	
1	02	01	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberculosis	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	29.530	6.596	8.303	2.183	26	1.721	10.490	35	
1	02	01	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terpapar HIV	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	32.822	10.593	8.822	5.943	60	5.436	21.338	65	-
1	02	01	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (jenis)			1			19	19		-
1	02	01	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terganggu Akibat Krisis Kesehatan Akibat	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (jenis)		1	1	1	100		1		-

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5A/10B	11=10A/11	
1	00	01	2.03	13	Bencana dan atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat						
					Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	7.525					
					Jumlah balita gigi buruk diberi PMT						
					Jumlah ibu hamil KEK diberi PMT						
					Jumlah dokumen monvul gigi						
					Jumlah surveilans yang dilakukan (kal)	5	4		80		
1	00	01	2.03	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Oraga						
					Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (kolompok)	45	19	52	2	45	

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
															K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=54/95	11=100/95	
1	00	00	000	01	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (desa)		250	250	250	100	2	250		-
					Jumlah desa dilaksanakan pemisahan STM dan delerasi (desa)	162	120	0	22	9	9	142	87		
					Jumlah sumber air minum pedesaan yang dipertiksa								-		
					Jumlah guru UAS yang dilakukan orientasi sanitasi								-		
					Jumlah peningkatan sanitasi di tempat-tempat umum								-		
12	00	00	000	02	Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (desa)		250	250	250	100	250	250		-

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/10)	11=(9/11)	12=(9/12)
		Jumlah jenis media promosi dan informasi yang dikembangkan (jenis)	58								
		Jumlah dokumen laporan inovasi									
		Jumlah upaya promosi kesehatan									
		Jumlah sosialisasi germas di lingkup kab. Ponorogo									
1	02	02	1.03	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Anusmur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						
		Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (satompak)		4	0	0	0	1	4		1

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5/9x100	11=10/9x100		
		Jumlah petaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yang dibina (tempat)	21		19			35	4	19		
1	00	01	001	01	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (desa)	250	150	250	100	250	
		Jumlah kasus penyakit berpotensi KLB yang dilacak (kasus)	130	15	0	0	0		15	11,5		
1	00	01	001	01	Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jera	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (orang)	228	128	146	64	201	
1	00	01	001	01	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat pada hari besar keagamaan dan nasional (kali)	15	6	3		4	
1	00	01	001	01	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko	Peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat (kali)					2	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan				
			K	K	K	K	K	K	K	K			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi
											100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			</										

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan					
			K	K	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi	K	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					K	K	K=(K1/K2)		K	K	K			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/9)	11=(10/11)	12=(10/12)			
		Jumlah sosialisasi yang terlaksana												
		Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi												
		Jumlah orang yang dipelika												
		Jumlah dokumen teknis yang dihasilkan												
1	02	01	1.02	04	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk miskin yang diayam (orang)	223.000	84.728	15.000	15.000	100	2	120.238	27

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10=5x10/8	11=10x11/8	
1	01	01	2.03	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (orang)	Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia	1100	432	432	432	100	432	432	39	
1	01	01	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota										
1	01	01	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah sarana kefarmasian memiliki mutu layanan kefarmasian									

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	K	K		K	K
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah sarana kefarmasian memiliki mutu layanan kefarmasian (P10, MESO, layanan resep,prodktas obat) (Apotik (Puskasmas dan Swasta))								
		Jumlah puskesmas yang menerapkan PDR, Jumlah Nakes mengikuti Simtak PDR (Puskasmas)								
		Jumlah dokumen laporan monitoring obat dan perbekas, Jumlah dokl monitoring PDR, Jumlah Dokumen Penertanaan Obat dan Perbekas								

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	K	K		K	K
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100
		(Dokumen)								
		Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pendidikan (Orang)								
		Jumlah Kader dan Nakes yang dilatih (orang)	400							
		Jumlah Petugas Kesehatan Lingkungan yang diorientasi RPAM (Orang)								
		Jumlah Tenaga Terlatih pelayanan kinerja konselor dan Bidan PMTCT (Orang)	40							
		Jumlah tenaga lab VCT yang terlatih (Orang)	30							

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100
		Terlaksananya pelatihan SDIDTK (Puskasmas)								
		Jumlah Dokter umum puskesmas yang mengikuti pemyegaran penanggulangan emergensi pada anak (Dokter)								
		Jumlah dokter yang dilatih APN (Dokter dan Bidan)								
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelatihan petugas lab untuk deteksi dini sumbu (Puskesmas)								
		Jumlah Pengabdian PTM (Paket)								

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
														K	K
1					2	3	4	5	6	7	8-100%	9	10-54/100	11-100/100	
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman										
1	02	04	2.03		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
1	02	04	2.03	01	Pengembangan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peredaran Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal	Jumlah UMOT yang memenuhi syarat (UMOT)	5	5	15	15	126	0	24	460	

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	K	K	K	K	K	K		
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100	
					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
1	01	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga										
1	01	04	2.03	21	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut	Jumlah IRTP yang memenuhi syarat sertifikat produksi (Sarana)	20	106	15	14	106	1	122	610	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100	
			Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh industri								
1	10	34	234	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan							

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5A/9	11=10A/9
					Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
1	20	34	2.04	20	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sarana (Pangan dan Kosmetik) yang diperiksa (Sarana)	145	7				37	7	5
						Jumlah Depot air minum isi ulang yang diperiksa (Depot)	120	63	63	89	141	0	152	124

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)*100	11=(10/9)*100
		Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diperiksa (TPM)								
		Jumlah Restoran yang diawasi dan dikendalikan keamanan dan kesehatan Makanan (lokasi / Restoran)								
1	42	01	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							
1	42	01	Advokasi, Pemberdayaan, kemilasan, peningkatan							

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka dapat diketahui dalam renstra Dinas Kesehatan termuat 66 sub-kegiatan dengan 193 indikator. Indikator yang terlaksana sebanyak 61 indikator (59,2 %) dan indikator yang tidak terlaksana sebanyak 42 indikator (40,8 %). Capaian indikator diakhir tahun renstra adalah yang sesuai dengan target sebanyak 11 indikator (18 %), indikator yang belum memenuhi target sebanyak 37 indikator (60,6 %), dan indikator yang capaian diatas target sebanyak 13 indikator (21 %) : ada beberapa indikator yang tidak memiliki target sebanyak 31 indikator (38,27 %). Indikator yang tidak memiliki target umumnya berasal dari menu DAK baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik yang belum termuat indikatornya diawal perencanaan Renstra Dinas Kesehatan.

1.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table berikut ini.

Tabel 11.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Angka Harapan Hidup (Foin)	√	√	66,8	67	65,7	66,1	65,75	66,4	65,7	66,1	Angka harapan Hidup masih berada di bawah rata rata angka Harapan Hidup Propinsi dan Nasional.
2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KLB)	√	√	146	103	124	99	149	227	124	99	AKI masih merupakan isu prioritas dalam pembangunan Kesehatan.
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KLB)	√	√	11	16	9,9	1,7	11,3	11,3	9,9	1,7	AKB masih merupakan isu prioritas dalam pembangunan Kesehatan.
4	Prevalensi Stunting(%)	√	√	30	28	17	16	20,9	18,71	17	16	Stunting menjadi isu nasional yang harus menjadi prioritas daerah, untuk mencapai target kinerja

												nasional sebesar 14 % maka diperlukan dukungan konvergensi secara maksimal.
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100		100	100	100	100	83,9	88,4	100	100	Adanya K1 Akses,Rasus Abortus atau pindah wilayah.
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	100		100	100	100	100	99,2	99,5	100	100	Adanya kematian ibu
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100		100	100	100	100	97,9	99,4	100	100	Adanya kematian bayi
8	Pelayanan Kesehatan Balita (%)	100		100	100	100	100	93	98,5	100	100	Adanya Kematian Balita
9	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar(%)	100		99	85	100	100	35,34	62,7	100	100	Pembelajaran Online
10	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100		50	36	100	100	34,8	40	100	100	Ada Seseorang yang belum terjangkau
11	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100		100	100	100	100	46,11	55	100	100	0/S Lansia yang masih rendah
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100		99	100	100	100	12,1	17	100	100	Banyak Penderita Hipertensi yang belum terjangkau oleh Nakes
13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100		99	100	100	100	32,9	77,9	100	100	Banyak Penderita Diabetes Mellitus yang belum terjangkau oleh Nakes

14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100		100	100	100	100	100	111	100	100	Orang dengan gangguan jiwa yang dilayani jauh lebih banyak dari target
15	Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	100		92	94	100	100	77,9	23,1	100	100	Adanya kematian penderita TB, Putus berobat
16	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100		93	94	100	100	37,2	66,4	100	100	Penderita HIV/AIDS belum terjangkau oleh Nakes, Perusahan Minder dari Pasien HIV/AIDS

Berdasarkan tabel II.2 diatas, secara umum diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Kesehatan masih dibawah standar. Hampir semua indikator yang menjadi gambaran pelayanan Dinas Kesehatan belum tercapai. Dari 16 indikator kinerja pelayanan, indikator yang sudah memenuhi standar sebanyak 3 indikator sedangkan yang belum memenuhi standar sebanyak 13 indikator.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Kesehatan diatas menunjukkan beberapa indikator telah mencapai target dan beberapa indikator lainnya belum mencapai target. Adapun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor yang mendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sumber daya yang berkompeten belum mencukupi sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

b) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai standar menjadi faktor pendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sarana dan prasarana belum lengkap dan sesuai standar sehingga menjadi factor penghambat pencapaian kinerja.

c) Kerjasama Lintas Sektor

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan membutuhkan peran serta lintas sektor. Dinas Kesehatan tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dari evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagian sudah tercapai dan sebagian belum tercapai seperti terlihat dalam indikator kinerja pada tabel II.2 diatas. Indikator kinerja yang sudah cukup berhasil dicapai yaitu penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi stunting. Pencapaian target pada angka kematian bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kunjungan neonatal yang selalu dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan, kegawatdaruratan yang cepat ditangani oleh tenaga kesehatan, gizi bayi yang selalu dipantau dan imunisasi yang rutin diberikan. Pada pencapaian indikator prevalensi stunting ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti pemberian PMT kepada balita stunting, ada perubahan pola perilaku masyarakat dan adanya pendampingan penimbangan yang tepat. Sedangkan indikator angka kematian ibu, angka harapan hidup dan beberapa indikator SPM masih sangat rendah capaiannya. Dengan melihat capaian kinerja diatas maka dapat diketahui hal kritis permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan isu strategis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur yaitu ;

1. Masih Tingginya Kematian Ibu dan masih adanya kematian bayi
2. Masih adanya kasus stunting dan Gizi buruk
3. Masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
4. Masih rendahnya kepesertaan jaminan kesehatan
5. Sarana prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai
6. Kualitas tenaga kesehatan yang belum memadai

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah

1. Perubahan perilaku hidup masyarakat yang masih lambat
2. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi lintas sector dalam Upaya penurunan kasus gizi buruk maupun stunting karena penyebabnya yang multidimensi sehingga tidak semata tugas sector kesehatan, tetapi harus melalui aksi multisektoral.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat atau masyarakat yang masih apatis untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular pada posbindu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di desa.
4. Kurang adanya bimbingan teknis atau pelatihan penyegaran ilmu bagi tenaga kesehatan.
5. Data kebutuhan akan obat dan perbekalan kesehatan, peralatan kesehatan maupun sarana prasarana yang masih belum memadai di puskesmas maupun di Dinas Kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2023 sudah memuat fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026. Secara garis besar program, kegiatan dan Sub Kegiatan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD di masing-masing program dan kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara umum program kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2024 sudah sesuai dengan analisis kebutuhan Dinas Kesehatan. Tetapi sedikit berbeda pada pagu indikatif pembangunan puskesmas dan rehab puskesmas dimana dari hasil analisis kebutuhan untuk pembangunan puskesmas dan Rehab Puskesmas pagu indikatif lebih besar dari pagu awal RKPD karena menyesuaikan dengan bangunan prototype sesuai arahan Kementerian Kesehatan RI. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel II.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS KESEHATAN				99.866.508.779				99.866.508.779	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota				58.748.166.960				58.748.166.960	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	58.748.166.960		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	58.748.166.960	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	76			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	76		
		Tersedianya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53			Tersedianya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53		

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	100			<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (doi)</i>	12	121.000.000		<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (doi)</i>	12	121.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (doi)</i>	3	44.000.000	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (doi)</i>	3	44.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (doi)</i>	2	5.500.000	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (doi)</i>	2	5.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)</i>	7	33.000.000	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)</i>	7	33.000.000	
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)</i>	4	31.500.000	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)</i>	4	31.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terdapatnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi perputaran laporan keuangan (dsk)	1	57.751.556.960		Terdapatnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi perputaran laporan keuangan (dsk)	1	57.751.556.960	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/30)	794/12	57.642.656.960	Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/30)	794/12	57.642.656.960	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	1	81.400.000			1	81.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi perputaran laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2	27.500.000	Larantuka	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi perputaran laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2	27.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	27.500.000		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	27.500.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.000.000			2	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penataan dan Berang Muka Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penataan dan Berang Muka Daerah pada SKPD	4	17.500.000	Larantuka	Jumlah Laporan Penataan dan Berang Muka Daerah pada SKPD	4	17.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya ID Aparatur Yang Berhukum	3	38.000.000		Tersedianya ID Aparatur Yang Berhukum	3	38.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1	11.000.000	Larantuka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1	11.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	22.000.000	Larantuka	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	22.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	5.000.000	Larantuka	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	67	149.650.000		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	67	149.650.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	2.200.000	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	2.200.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang disediakan (paket)	1	26.000.000	Larantuka	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang disediakan (paket)	1	26.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	3.200.000	Larantuka	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	3.200.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persyariaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan(paket)	1	22.000.000	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan(paket)	1	22.000.000	
Persyaraan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan(paket)	2	33.000.000	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan(paket)	2	33.000.000	
Persyariaan Bahan Bicara dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah dokumen bahan bicara dan peraturan perundang-undangan yang disediakan(dok)	2	2.500.000	Larantuka	Jumlah dokumen bahan bicara dan peraturan perundang-undangan yang disediakan(dok)	2	2.500.000	
Facilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Lap)	12	16.500.000	Larantuka	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Lap)	12	16.500.000	
Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	44.000.000	Larantuka	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	44.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	250.000	Larantuka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	250.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah (unit)	85	15.000.000		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah (unit)	85	15.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	5	15.000.000	Larantuka	Jumlah unit aset tak berwujud lainnya yang disediakan	5	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	518.510.000		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	518.510.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat(laporan)	12	1.450.000	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat(laporan)	12	1.450.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan(laporan)	12	93.500.000	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	93.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(laporan)	1	433.560.000	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	433.560.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	36	126.950.000		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	36	126.950.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan paguannya (unit roda 4)	6 unit roda 4	48.850.000	Larantuka	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan paguannya	6 unit roda 4	48.850.000	
Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah mebel yang dipelihara(unit)	13	6.500.000	Larantuka	Jumlah mebel yang dipelihara(unit)	13	6.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Perabotan dan Meubel Lainnya	Larantuka	Jumlah Perabotan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara (unit)	15	30.000.000	Larantuka	Jumlah Perabotan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara (unit)	15	30.000.000	
Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Larantuka	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (aset)	1	1.100.000	Larantuka	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1	1.100.000	
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	22.000.000	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	22.000.000	
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	3 lapis, protier 2, or 3 unit	7.500.000	Larantuka	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	3 lapis, protier 2, or 3 unit	7.500.000	
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	1	11.000.000	Larantuka	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	1	11.000.000	
Urutan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
				37.618.341.819				41.118.341.819	
		Cakupan PHBS(%)	59%	39.116.141.819		Cakupan PHBS	59%	32.616.141.819	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Penanganan Penyakit Menular	88,8%			Cakupan Penanganan Penyakit Menular	88,8%		
		Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular	88,7%			Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular	88,7%		
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama	82,28%			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama	82,28%		
		Persentase Pemenuhan Standar dan Prastandarisasi Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar	72,8%			Persentase Pemenuhan Standar dan Prastandarisasi Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar	72,8%		
		Angka Gini Buruk	0,1%			Angka Gini Buruk	0,1%		
		Cakupan Desa/Kelurahan STRM	87,2%			Cakupan Desa/Kelurahan STRM	87,2%		
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	98%			Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	98%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard	100%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard	100%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard	100%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard	100%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard	100%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard	100%		

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard	100%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard	100%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard	100%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard	100%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard	100%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard	100%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard	100%			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard	100%		
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19	85%			Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19	85%		
		Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan	85 %			Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan	85 %		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten Kota				18.383.400.000				22.383.400.000	
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kec. Adonara Timur, desa Saeana	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi ratio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	1 unit	3.010.000.000	Kec. Adonara Timur, desa Saeana	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi ratio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	1 unit	3.010.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Pembangunan Puskesmas	Kec. Tanjung Bunga, Kec. Baboleng, Kec. Solor Barat, Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Timur	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit)	1 unit	2.380.000.000	Kec. Tanjung Bunga, Kec. Baboleng, Kec. Solor Barat, Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Timur	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit)	1 unit	2.000.000.000	Pembangunan Puskesmas sesuai design prototype
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Puskesmas Menanga, Puskesmas Waikilbang, Puskesmas Waiwerang, Pusk. Santona, Pusk. Ritnebang	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	1 unit	1.074.000.000	Puskesmas Menanga, Puskesmas Waikilbang, Puskesmas Waiwerang, Pusk. Santona, Pusk. Ritnebang	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	1 unit	350.000.000	Rasionalisasi kebutuhan
Pengembangan Puskesmas	Kec. Demna Pagong, Kec. Titihena	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM sesuai standar			Kec. Demna Pagong, Kec. Titihena	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM sesuai standar	1 unit	3.250.000.000	Adanya kajian monev terkait di kecamatan Demna Pagong pada masing-masing

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kec. Deman Pagong, Puskesmas Mananga	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh pemerintah			Kec. Deman Pagong, Puskesmas Mananga	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh pemerintah	1 unit	300.000.000	Adanya tawar masyarakat di Kecamatan Deman Pagong dan Solar Tinaru pada musrenbang
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kec. Wotamunada, Kec. Lewulena, Kec. Adonara, Kec. Tithana, Kec. Wutihama, Kec. Adonara Timur, Kec. Lita, Kec. Tanjung Bunga	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh pemerintah kesehatan lainnya	1 unit	1.042.400.000	Kec. Wotamunada, Kec. Lewulena, Kec. Adonara, Kec. Tithana, Kec. Wutihama, Kec. Adonara Timur, Kec. Lita, Kec. Tanjung Bunga	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh pemerintah kesehatan lainnya	1 unit	1.042.400.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Puskesmas Waiwerang, Puskesmas Waihibang	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 unit	310.000.000	Puskesmas Waiwerang, Puskesmas Waihibang	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 unit	310.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecamatan Larantuka, kec. Baboleng	Aruslak sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 unit	205.000.000	Kecamatan Larantuka, kec. Baboleng	Aruslak sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 unit	205.000.000	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Lewotiga, Puskesmas Laro, Puskesmas Deman Pegang, Puskesmas Kalike, Puskesmas Waimana, Puskesmas Iebura	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	4 unit	1.360.000.000	Puskesmas Lewotiga, Puskesmas Laro, Puskesmas Deman Pegang, Puskesmas Kalike, Puskesmas Waimana, Puskesmas Iebura	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	4 unit	1.360.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21 puskesmas	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	88 unit	1.507.000.000	21 puskesmas	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	88 unit	1.507.000.000	
Pengadaan Obat, Vaksin	21 puskesmas	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	3 paket	2.539.000.000	21 puskesmas	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	3 paket	2.539.000.000	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	21 puskesmas	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6 paket	1.100.000.000	21 puskesmas	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6 paket	1.100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11 puskesmas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	123 unit	78.000.000	21 puskesmas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	123 unit	78.000.000	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	21 puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 paket	178.000.000	21 puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 paket	178.000.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		10.139.041.810		Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		10.139.041.810	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21 puskesmas	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.934 orang	373.100.000	21 puskesmas	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.934 orang	373.100.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21 puskesmas	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.771 orang	371.110.000	21 puskesmas	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.771 orang	371.110.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	21 puskesmas	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.507 orang	756.133.000	21 puskesmas	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.507 orang	756.133.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21 puskesmas	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.776 orang		21 puskesmas	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.776 orang		

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	21 puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.437 orang	125.779.200	21 puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.437 orang	125.779.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	21 puskesmas	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84.878 orang	156.600.401	21 puskesmas	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84.878 orang	156.600.401	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	21 puskesmas	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.883 orang	78.740.327	21 puskesmas	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.883 orang	78.740.327	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	21 puskesmas	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49.911 orang	5.000.000	21 puskesmas	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49.911 orang	5.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	21 puskesmas	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.233 orang	1.950.000	21 puskesmas	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.233 orang	1.950.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jwa Berat	21 puskesmas	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jwa berat sesuai standar	437 orang	12.250.000	21 puskesmas	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jwa berat sesuai standar	437 orang	12.250.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	21 puskesmas	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.812 orang	23.990.000	21 puskesmas	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.812 orang	23.990.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	21 puskesmas	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.458 orang	303.395.000	21 puskesmas	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.458 orang	303.395.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 dok	31.100.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 dok	31.100.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana sesuai standar	1 dok	180.000.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana sesuai standar	1 dok	180.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 dok	176.010.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 dok	176.010.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dok	45.530.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dok	45.530.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dok	311.527.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dok	311.527.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17 dok	140.102.200	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17 dok	140.102.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dok	2.000.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dok	2.000.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dok	82.865.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dok	82.865.000	
Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	21 puskesmas	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	500 orang	6.000.000	21 puskesmas	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	500 orang	6.000.000	
Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	21 puskesmas	Jumlah penyyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan			21 puskesmas	Jumlah penyyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan			

RANCANGAN AWAL EKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	11 puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1 dok	22.100.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1 dok	22.100.000	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 dok	39.700.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 dok	39.700.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dok	57.000.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dok	57.000.000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dok	4.920.000.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dok	4.920.000.000	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah	21 puskesmas	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan sekolah	41.601 orang	1.209.091	21 puskesmas	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan sekolah	41.601 orang	1.209.091	

RANCANGAN AWAL EMKD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan Nasional	21 puskesmas	2 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional yang didistribusikan	3 1 paket	4 17.600.000	21 puskesmas	5 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional yang didistribusikan	6 1 paket	7 17.600.000	8
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21 puskesmas	9 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	10 6 unit	11 26.400.000	21 puskesmas	12 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	13 6 unit	14 26.400.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	21 puskesmas	15 Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	16 11 dok	17 300.000.000	21 puskesmas	18 Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	19 11 dok	20 300.000.000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	21 puskesmas	21 Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	22 12 dokumen	23 378.500.000	21 puskesmas	24 Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	25 12 dokumen	26 378.500.000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	21 puskesmas	27 Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	28 1 Lap	29 6.650.000	21 puskesmas	30 Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	31 1 Lap	32 6.650.000	

RANCANGAN AWAL EKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan diri dan respon wabah	6 dok	2.000.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan diri dan respon wabah	6 dok	2.000.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	21 puskesmas	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 unit	16.400.000	21 puskesmas	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 unit	16.400.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	21 puskesmas	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas (Keluarga)	8824 keluarga	42.000.000	21 puskesmas	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas (Keluarga)	8824 keluarga	42.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				92.900.000				92.900.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Larantuka	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	2 dok	16.400.000	Larantuka	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	2 dok	16.400.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Larantuka	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dok	21.500.000	Larantuka	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dok	21.500.000	

RANCANGAN AWAL EMKD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Larantuka	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	Tunt	44.000.000	Larantuka	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	Tunt	44.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kapasitas	10	8.035.100.000		Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kapasitas	10	8.035.100.000	
Pemberian Ilmu Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kota				33.500.000				33.500.000	
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Larantuka	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1 dok	1.500.000	Larantuka	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1 dok	1.500.000	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dok	32.000.000	21 puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dok	32.000.000	
Pencantruan Kebumuhan dan Pelayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota				7.855.000.000				7.855.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persertaan dan Distribusi serta Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Larantuka	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan	4 dok	45.000.000	Larantuka	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan	4 dok	45.000.000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Larantuka	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	346 orang	7.780.400.000	Larantuka	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	346 orang	7.780.400.000	
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26 Fakas	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	1 dok	29.600.000	26 Fakas	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	1 dok	29.600.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Flores Timur				146.600.000				146.600.000	
Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Larantuka	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	150 orang	146.600.000	Larantuka	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	150 orang	146.600.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman		Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	423.500.000		Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	423.500.000	

RANCANGAN AWAL EKSPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Calculus Funding
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				133.900.000				133.900.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19 Kec	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dok	109.000.000	19 Kec	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dok	109.000.000	
Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19 Kec	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi komitmen izin	15 Sarana	49.900.000	19 Kec	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikol, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi komitmen izin	13 Sarana	49.900.000	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah IRTP yang memenuhi syarat sertifikat produksi (Sarana)		45.000.000		Jumlah IRTP yang memenuhi syarat sertifikat produksi (Sarana)		45.000.000	

RANCANGAN AWAL EKSPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Irit Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	19 Kec	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Irit Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Des	45.000.000	19 Kec	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Irit Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Des	45.000.000	
Penerbitan Sertifikat Lark Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				48.000.000				48.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lark Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19 Kec	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lark Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Des	48.000.000	19 Kec	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Lark Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Des	48.000.000	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Marker pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				171.000.000				171.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeriksaan Port Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	19 Kec	Amlak produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan port market dalam rangka tindak lanjut	1 dok	171.000.000	19 Kec	Amlak produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan port market dalam rangka tindak lanjut	1 dok	171.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA	11,2	43.500.000		Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA	11,2	43.500.000	
Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan pemerte masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota				27.500.000				27.500.000	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19 Kec	Amlak dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat(Dok)	10	27.500.000	19 Kec	Amlak dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat(Dok)	10	27.500.000	
Relaksasi dan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota				14.000.000				14.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19 Kec	Amlak dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 dok	14.000.000	19 Kec	Amlak dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 dok	14.000.000	

Berdasarkan Tabel II.3 diatas terlihat bahwa rancangan awal renja dan rancangan akhir renja tidak jauh berbeda. Perbedaan hanya terlihat pada kegiatan fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang diusulkan saat merenbang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2024. Usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan pada 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat pada wilayahnya masing-masing yang sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Usulan masyarakat sebagian besar pada program dan kegiatan pembangunan maupun pengadaan sarana prasarana baik pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.4 berikut ini:

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Kecamatan	Desa			
Pembangunan Puskesmas	Tanjung Bunga	Argasing	Jumlah puskesmas yang dibangun	1 Unit	Diterima sesuai dengan Tusi OPD
Pengembangan Puskesmas	Adonara Tengah, Itebolele, Titehena	3 Puskesmas Lita Kec. Adonara Tengah, Puskesmas Itebolele Kec. Itebolele, Puskesmas Lita Kec. Titehena	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM sesuai standar	3 Unit	Diterima sesuai dengan Tusi OPD
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Adonara Tengah, Solor Selatan, Titehena, Witihama, Wotenuhudo, Adonara Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor Barat, Adonara Barat	3 Pustu Wewit, Kec. Adonara Tengah, Pustu Nurebelen, Kec. Tebura, Pustu Bobu Atagamu, Kec. Solor Selatan, Pustu Serinuho, Kec. Titehena, Pustu Manihama, Kec. Witihama, Pustu Kawala, Kec. Wotan, Ulumade, Pustu Dawata, Kec. Adonara Timur, Pustu Lamatutu, Kec. Tanjung Bunga, Pustu Kallanang, Kec. Adonara, Pustu Tanahlain, Kec. Adonara Barat	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	10 Sarana	Diterima sesuai dengan Tusi OPD

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Wulangitang	>1 mobil Ambulance Puskesmas Baru Kec. Wulangitang	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Sarana	Diterima sesuai dengan Tuntutan OPD
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pendukung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dehura, Titehena, Adonara Timur, Adonara, Solor Selatan, Adonara Tengah, Larantuka, Titehena	> Desa Srawan Kec. Ia Bura, Desa Konga Kec. Titehena, Desa Lamatewelu Kec. Adonara Timur, RS. Adonara, Desa Kallantang Kec. Adonara, Desa Kanena Kec. Solor Selatan, Desa De Sayang Kec. Adonara Tengah, Pustu Luvolewa Kec. Larantuka, Desa Lirabolang Kec. Titehena Rumah Sakit Adonara, Desa Hekahardwura, Desa Harawura, Desa Khaton, Desa Lawipon, Desa Kokobabo, Desa Biya, Desa Nubelama, Desa De Sayang Kec. Adonara Tengah	Jumlah alat kesehatan/alat pendukung medis fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	17 alat	Diterima sesuai dengan Tuntutan OPD

Berdasarkan Tabel diatas usulan dari Masyarakat dan Fokir sebanyak lima Program dan semua program yang diumumkan diterima semuanya karena berkaitan dengan tupoksi Dinas Kesehatan

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 memiliki 7 prioritas yang merupakan penjabaran sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Kementerian Kesehatan RI mendukung prioritas nasional ke tiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing. Prioritas nasional ini telah dijabarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rencana kerja dengan beberapa prioritas seperti :

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui GERMAS
5. Penguatan Sistem Kesehatan

Sejalan dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur juga mendukung prioritas nasional ketiga yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 dan pada program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores dalam rencana kerja setiap tahunnya.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Dinas Kesehatan termuat dalam RPD dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026 yaitu Terwujudnya Daya Saing SDM dan Meningkatnya Derajat Kesehatan dengan beberapa sasaran yang dicapai yaitu :

1. Meningkatkatnya Angka Harapan Hidup
2. Menurunnya Angka Kesakitan
3. Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat
4. Menurunnya Angka Kematian Ibu
5. Menurunnya Angka Kematian Bayi
6. Menurunnya Prevalensi Stunting
7. Meningkatnya Cakupan Vaksin Covid-19

Tabel. III.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Terwujudnya Daya Saing SDM	Memngkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	65,60
	Memurutnya Angka Kesakitan	Angka Kesakitan	13,43
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,45
	Memurutnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	99
	Memurutnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	8,7
	Memurutnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	13
	Meningkatnya Cakupan Vaksin Covid-19 (vaksin kedua)	Cakupan Vaksin Covid-19	85

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Indikator- indikator Bidang Kesehatan yang menjadi faktor pertimbangan dan mendukung Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Indikator SPM	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gagnguan Jiwa	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100

12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100
----	---	-----

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan dirumuskan dalam 5 program, 17 kegiatan dan 63 sub kegiatan. Kegiatan tersebar di wilayah Kabupaten Flores Timur pada 19 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel III.2

Tabel III.3

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Sama)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01				Urusan Bidang Kesehatan				63.493.815.401				64.730.751.200
1	01	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHE5		58%	47.420.415.451			61%	65.563.201.200
						Cakupan Penanganan Penyakit Menular		93,3%				95%	
						Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular		83,7%				85%	
						Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama		52,29%				71,294%	
						Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar		72,80%				76,4%	
						Angka Gizi Buruk		0,2%				0,1%	
						Cakupan Desa/Kelurahan ITBM		87,2%				73,6%	
						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		96%				97%	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
WILAYAH	KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	KOTA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUTAHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard		100,0%				100%	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard		100,0%				100%	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard		100,0%				100%	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard		100%				100%	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard		100,00%				100%	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard		100,0%				100%	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard		100,0%				100%	
						Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19		85%				95%	
						Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan		86%				70%	
1	02	01	231		Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPG				31.219.483.823				20.639.800.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
WILAYAH	KEWILAYAHAN	KEKABUPATEN	KEMERDEKAAN	SUB KEMERDEKAAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUTAHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.01	0001	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sederajat berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sederajat baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000 (unit)	Kec. Adonara Timor, desa Saosina	3 unit	6.700.000.000	DAU, DAK		3 unit	5.170.000.000
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun (unit)	Kec. Timung Bunga, Kec. Solari Barat	1 unit	5.000.000.000	DAU		1 unit	2.851.000.000
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun (unit)	Puskesmas Lita - Desa Lita, Adonara Timor Tengah	1 unit	350.000.000	DAU		2 unit	1.300.200.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Sasaran)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
KEWILAYAHAN	DAERAH	KABUPATEN	KOTA	KEKAYAAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Amplah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sdm agar sesuai standar (unit)	Kec. Lantutan - Puskesmas Ola (Mobil Ambulance) Kec. Deman Pagang - Puskesmas Deman Pagang Kec. Triabana - Puskesmas Lempaga Kec. Lantutan - Puskesmas Nagi (Pengadaan Air, Sanitasi dan IPAL)	5 unit	1.258.000.000	DAK DAU		5 unit	1.315.100.000
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Amplah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang selektif dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Kec. Adonara Barat - Puskesmas Wainadina	1 unit	300.000.000	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
01	02	03	04	05			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat pemungung medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	21 puskesmas	88 unit	6.899.453.825	DAK, DAI		105 unit	1.657.500.000
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Pemungung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat pemungung medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara sesuai standar /Lamp	21 Puskesmas – Kab Flores Timur	113 unit	100.000.000	DAU, DAK		1.348 unit	351.500.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan (paket)	21 puskesmas – Kab Flores Timur	7 paket	7.500.000.000	DAU, DAK		8 paket	4.315.000.000
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	21 puskesmas – Kab Flores Timur	4 paket	110.000.000	DAU, DAK		4 paket	276.000.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				16.175.931.456				35.126.601.200
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	21 puskesmas – Kab Flores Timur	4.954 orang	562.320.000	DAU, DAK		5.611 orang	2.132.820.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
01	02	03	04	05			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANAPAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	11 puskesmas – Kab Flores Timur	4.772 org	383.504.000	DAU, DAK		5.120 org	2.106.810.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas – Kab Flores Timur			DAU, DAK			
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Suku	Jumlah suku yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas – Kab Flores Timur						
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas – Kab Flores Timur	13.457 org	57.000.000			13.567 org	1.134.036.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas – Kab Flores Timur						
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas – Kab Flores Timur						
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas – Kab Flores Timur						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
01	02	03	04	05			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas - Kab Flores Timur	9.904 org	468.188.585			10.816 org	205.885.000
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	11 puskesmas - Kab Flores Timur						
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberculosis	Jumlah orang terduga menderita tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas - Kab Flores Timur						
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 puskesmas - Kab Flores Timur	5.585 org	460.000.000			1.480 org	677.400.000
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	11 puskesmas						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
1	2	3	4	5			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Aksi Berpotensi Bencana	Amiok dokumen hari/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Aksi Berpotensi Bencana sesuai standar	21 puskesmas						
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Amiok dokumen hari/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 puskesmas	12 dok	2.400.000.000			12 dok	1.327.630.300
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Amiok dokumen hari/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21 puskesmas	2 dok	30.000.000			2 dok	260.150.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Amiok dokumen hari/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21 puskesmas	2 dok	36.700.000			2 dok	1.040.400.000
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Amiok dokumen hari/ Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21 puskesmas	12 dok	175.200.000			12 dok	1.274.980.000
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupuntur, Acupuntur Mandiri dan Tradisional Lainnya	Amiok dokumen hari/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupuntur Mandiri dan Tradisional Lainnya	21 puskesmas	1 dok	25.000.000			1 dok	60.500.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
WILAYAH	BUDJET DAERAH	PERMINTAAN	KELOMPOK	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	1.02	0020	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan	11 puskesmas	2 dok	60.320.000			2 dok	421.500.000
1	02	02	1.02	0021	Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11 puskesmas						
1	02	02	1.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyuluhan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11 puskesmas						
1	02	02	1.02	0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	11 puskesmas						
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pencegahan Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pencegahan Krisis Kesehatan	11 puskesmas						
1	02	02	1.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	11 puskesmas	2 dok	410.419.000			2 dok	1.404.340.000
1	02	02	1.02	0026	Pengelolaan Imunisasi Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Imunisasi Kesehatan Masyarakat	11 puskesmas	2 dok	9.398.585.000			2 dok	6.242.400.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
WILAYAH	KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	KOTA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	1.02	0037	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyimkes dan Sekolah	Amiok orang yang memerikan layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan keehatan (fasyimkes) dan sekolah	11 puskesmas						
1	02	02	1.02	0038	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Amiok Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional yang distribusikan	11 puskesmas	1 paket	50.000.000			1 paket	24.200.000
1	02	02	1.02	0039	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Amiok Fasilitas pelayanan keehatan (fasyimkes) yang melayani komunitasarak jauh atau fasyimkes esialat pelayanan telemedicine untuk mendapatkan aket pelayanan keehatan yang berkualitas	11 puskesmas						
1	02	02	1.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Amiok dokumen operasional/ pelayanan puskesmas	11 puskesmas	11 dok	150.000.000			11 dok	13.168.200.000
1	02	02	1.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Amiok Fasilitas keehatan yang akreditasi di kabupaten kota	11 puskesmas	12 dok	888.775.000			15 dok	1.045.650.000
1	02	02	1.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Masak)	Amiok laporan dari Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Masak)	11 puskesmas						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
WILAYAH	KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KUDUS	SUB KUDUS			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kecepatan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	21 puskesmas						
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Pusat Safety Center (PSC 119) terdistribusi, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	21 puskesmas	1 unit	10.000.000			5	56.300.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				25.000.000				95.800.000
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Larantuka						
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Larantuka	1 dek	25.000.000			1 dek	95.800.000
1	02	02	2.05	03	Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	Larantuka						
1	03	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kapasitas		15	5.647.900.000			20	8.639.800.000
1	02	03	2.01		Pemberian Imunisasi Praktis Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota				25.000.000				42.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
WILAYAH	KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	SUB KECAMATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	03	2-01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Ambil dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Larantuka						
1	02	03	2-01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Ambil dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	21 puskesmas	1 dok	25.000.000			1 dok	42.000.000
1	02	03	2-03		Pertemuan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota				5.397.800.000				5.397.800.000
1	02	03	2-03	0001	Pemenuhan dan Distribusi serta Pemertan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ambil dokumen hasil pemenuhan dan distribusi serta pemertan sumber daya manusia kesehatan	Larantuka	1 dok	60.000.000			4 dok	75.000.000
1	02	03	2-03	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Ambil sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pengawasan kesehatan	Larantuka	529 org	5.292.800.000			300 org	5.292.800.000
1	02	03	2-03	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ambil dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	26 Puskesmas	1 dok	25.000.000			1 dok	40.000.000
1	02	03	2-03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia				265.100.000				265.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
WILAYAH	KEWILAYAHAN	KEKABUPATEN	KECAMATAN	SUB KECAMATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUTAHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	1.03	0001	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Laromuka	153 org	265.100.000			250 org	250.000.000
1	02	04			Program Sedisan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan		20,66	425.500.000			25,33	147.500.000
1	02	04	1.01		Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				405.500.000				130.000.000
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19 Kec	5 dok	405.500.000			3 dok	120.000.000
1	02	04	1.01	0003	Fasilitasi Penemuan Komunitas Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi persyaratan izin	19 Kec						
1	02	04	1.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Prodik				20.000.000				20.500.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Sesuai)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
WILAYAH	BIDANG / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	04	103	0001	Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga								
					Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai lain Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai lain Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	19 Kec	1 lsk	20.000.00			1 lsk	27.500.000
1	02	04	104		Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
1	02	04	104	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	19 Kec						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN (Sesuai)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Makan Pemasakan dan Depot Air Minum (DAPM)							
1	02	04	3.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Amniah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut	19 Kec						
1	03	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIRBLA		11,2 %	100.000.000			15,6%	38.240.000
1	02	03	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota				100.000.000				38.736.000
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Amniah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	19 Kec	12 des	100.000.000			12 des	38.250.000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Sesuai)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	19 Kec						
					PUSKESMAS	Pelaksanaan Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas)	22	21	11.532.950.000	APBD II (Dana Kampanye RSN)			32.005.944.350

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan pada Daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				PRIORITAS		PEKERJAAN MAJU TAHUN 2015	
1	2	3	4	5			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.,)	LOKASI	SUMBER DANA	9	10	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.,)
1					Urusan Pemerintahan Wilayah Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	6	6	01		DAFTAR KEGIATAN			112.417.000,00						112.558.354.457,00
I	II				Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			59.033.726.532,00						58.836.135.267,00
I	II	01			Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	59.045.140.350					100	58.748.166.960
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	77,5						77	
						Persentase ASN yang memiliki kompetensi	61						66	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100						100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xi	01	2.01		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xi	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)		54.000.000						168.900.000
x	xi	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	1	15.000.000,00	OPD/Lanunika	DAU			3 dok	34.200.000,00
x	xi	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SEPD(dok)	1	12.000.000,00	OPD/Lanunika	DAU			1 dok	6.050.000,00
x	xi	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rintisan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rintisan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rintisan Realisasi Kinerja SEPD(laporan)	6	12.000.000,00	OPD/Lanunika	DAU			7 dok	34.300.000,00
x	xi	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000	OPD/Lanunika	DAU			4 lap	42.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2015	
URUSAN	BIDANG/URUSAN	PROGRAM	SUBPROGRAM	SUBKEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xi	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (G&G)		58.449.559.522						57.691.752.267
x	xi	01	2.02	0001	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah persediaan Gaji dan Tunjangan ASN (cif bulan)	312/14	58.328.159.522	OPD Larantuka	DAU			302/14	57.691.752.267
x	xi	01	2.02	0002	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Asli persediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dok)	1	188.400.000	OPD Larantuka	DAU			1	88.540.000
x	xi	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7	33.000.000	OPD Larantuka	DAU			7	30.000.000
x	xi	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (G&G)		7.500.000,00						20.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	ix	01	2.03	0006	Pemenuhan Sarang Mili Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pemenuhan Sarang Mili Daerah pada SKPD (lok)	4	7.500.000	OPD Laramuka	DAU			4	10.000.000
x	ix	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.500.000						37.100.000
x	ix	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	5.000.000,00	OPD Laramuka	DAU			1	11.700.000,00
x	ix	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	7.380.000,00	OPD Laramuka	DAU			4	15.000.000,00
x	ix	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan sarana dan prasarana kantor (%)		151.700.000,00						183.985.000
x	ix	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	1.000.000	OPD Laramuka	DAU			3	2.420.000
x	ix	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	1	23.000.000	OPD Laramuka	DAU			1	27.000.000
x	ix	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	7.500.000	OPD Laramuka	DAU			1	1.500.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	XX	01	2.06	0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diserahkan	1	20.000.000	OPD Laramuka	DAU			1	20.000.000
x	XX	01	2.06	0005	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	1	30.000.000	OPD Laramuka				1	30.000.000
x	XX	01	2.06	0006	Persediaan Bahan Baku dan Peraturnan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturnan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.200.000	OPD Laramuka	DAU			1	1.200.000
x	XX	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12	15.000.000	OPD Laramuka	DAU			12	18.150.000
x	XX	01	2.06	0009	Persyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Persyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	55.000.000	OPD Laramuka	DAU			20	72.800.000
x	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DoK)	1	1.000.000	OPD Laramuka	DAU			1	925.000
x	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		10.000.000,00						10.000.000,00
x	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	10.000.000	OPD Laramuka	DAU			1	10.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xi	01	2.08		Pelayanan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemungut Urutan Pemerintahan Daerah (%)		297.493.000						249.192.000
x	xi	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Masyumi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat masyumi (laporan)	12	1.500.000	OPD Laramuka	DAU			12	1.815.000
x	xi	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	189.985.000	OPD Laramuka	DAU			12	192.850.000
x	xi	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	128.000.000	OPD Laramuka	DAU			1	444.523.000
x	xi	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urutan Pemerintahan Daerah (%)	1	50.987.000						168.455.000
x	xi	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinan (lap)	6	20.987.000	OPD Laramuka	DAU			6	54.453.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2015	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB PROGRAM	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)	15	30.000.000	OPD Lamsuka	DAU			15	30.000.000
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara (unit)	1	10.000.000	OPD Lamsuka	DAU			1	10.000.000
1	02				Urutan Bidang Kesehatan									
1	02	02			Program Penunahan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS	39						61	
						Cakupan Penanganan Penyakit Menular	93,3						95	
						Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular	83,7						85	
						Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama	52,29						71,29	
						Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	72,80						76,40	
						Angka Gizi Buruk	0,2						0,1	
						Cakupan Desa Ketahanan STBM	67,2						73,6	
						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	98						97	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
WILAYAH	BUDAYA/KEBUDAYAAN	PELAKU/KELOMPOK	KELOMPOK	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard	100						100	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard	100						100	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard	100						100	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard	100						100	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard	100						100	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard	100						100	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard	100						100	
						Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19	85						95	
						Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan	85						70	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.01		Pervelitan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			31.219.483.825						20.699.200.000
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit baru yang memiliki ratio tempat tidur per kepala jumlah penduduk minimal 1 : 1000 (unit)	1	5.700.000.000	Kec. Adonara Timur (RS Adonara), Kec. Selor Timur	DAU, DAK-Fiskal			1	1.270.000.000
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun (unit)	1	5.000.000.000	Kec. Tanjung Bunga, Kec. Selor Barat	DAU, DAK-Fiskal			1	2.851.000.000
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun (unit)	1	1.350.000.000	Kec. Adonara Tengah - Puskesmas Lite	DAU, DAK-Fiskal			1	1.300.200.000
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Aler Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (unit)	5	3.250.000.000	Kec. Larantuka - Puskesmas Oka (Alat Ambulance) Kec. Demen Pagong - Puskesmas Demen Pagong Kec. Tirabene - Puskesmas Lewolaga Kec. Larantuka - Puskesmas Nagi (Pasgadan Air,	DAU, DAK-Fiskal			5	2.315.100.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Berkas dan PAI					
1	02	02	2.01	0009	Rahabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana perawatan dan alat keehatan yang telah dibakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	1	300.000.000	Kec. Adonara Batu (Puskesmas Wairadan)	DAU, DAK-Fisik				
1	02	02	2.01	0010	Rahabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana perawatan dan alat keehatan yang telah dibakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	1	700.000.000	Kec. Tanjung Bunga (Pusat Lametu), Kec Titahara (Pusat Serimbu)	DAU, DAK-Fisik			1	1.753.300.000
1	02	02	2.01	0011	Rahabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan perawatan rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dibakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1	300.000.000	Kec. Tanjung Bunga	DAU			1	520.200.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	31	6.899.483.825	21 puskesmas	DAU, DAK- Fisik			183	1.657.500.000
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Servis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	123	100.000.000	Kab Flores Timur	DAU, DAK Non Fisik			1345	381.500.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket)	7	7.505.000.000	Kab Flores Timur	DAU, DAK Non Fisik			1	4.313.000.000
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	120.000.000	Kab Flores Timur	DAU, DAK Non Fisik - BOKKB			4	278.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.02		Pelayanan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Ragukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota			18.155.831.858						35.158.601.200
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4834	562.320.000	21 puskesmas	DAUDAK Non Fiskal - BOKKB			5615	2.132.620.000
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4772	583.564.000	21 puskesmas	DAUDAK Non Fiskal - BOKKB			5390	2.166.810.000
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13457	57.000.000	21 puskesmas	DAUDAK Non Fiskal - BOKKB			13560	1.134.038.000
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19024	468.108.656	21 puskesmas	DAUDAK Non Final - BOKKB			10816	283.885.000
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar								
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.565	400.000.000	21 puskesmas	DAUDAK Non Final - BOKKB			5680	877.600.000
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	12	1.400.000.000	21 puskesmas	DAUDAK Non Final - BOKKB			12	1.887.630.200
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan	1	20.000.000	21 puskesmas	DAK Non Final - BOKKB			1	280.150.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2015	
URUTAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	SUB PROGRAM			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kesehatan Kerja dan Olahraga								
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	55.700.000	21 puskesmas	DAUDAK Non Fisik - BOKKB			1	1.040.400.000
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	175.250.000,00	21 puskesmas	DAK Non Fisik - BOKKB			12	2.236.980.000
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	25.000.000,00	21 puskesmas	DAU				80.500.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	80.320.000	21 puskesmas	DAK Non Fisik - BOKKB			14	423.500.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dok	410.419.000	21 puskesmas	DAK Non Fisik - BOKKB			1 dok	1.404.540.000
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Imunitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Imunitas Kesehatan Masyarakat	2 dok	9.898.585.000	21 puskesmas	DAU			2 dok	6.242.400.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional yang dikirim/diurukan	1 paket	50.000.000	21 puskesmas				1 paket	24.200.000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	21 dok	250.000.000	21 puskesmas				21 dok	13.148.200.000
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	12 dok	698.775.000	21 puskesmas				15 dok	1.045.650.000
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	20.000.000	21 puskesmas				5 unit	36.300.000
1	02	02	2.03		Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			25.000.000						96.800.000
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dok	25.000.000	Larantuka				1 dok	96.800.000
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kapasitas	15	5.647.900.000					20	5.699.800.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB-PROGRAM	SUB-KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	03	2.01		Pemberian Ijin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kota			15.000.000						42.000.000
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dok	15.000.000	Kabupaten Flores Timur	DAU			1 dok	42.000.000
1	02	03	2.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota			5.397.100.000						1.397.100.000
1	02	03	2.03	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	1 dok	60.000.000	Kab Flores Timur	DAU			4 dok	75.000.000
1	02	03	2.03	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	529 org	5.282.800.000	Kab. Flores Timur	DAU			500 org	5.282.800.000
1	02	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1 dok	25.000.000	Kab. Flores Timur	DAU			1 dok	40.000.000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis			265.100.000						250.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	03	2.03	0001	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota									
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	153 org	265.100.000	Larantuka	Dana Transfer Umum- DAU/DAK Non Fiskal- BOK			250 org	250.000.000
1	02	04			Program Sedisan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan	10,66	425.500.000					26,33	147.500.000
1	02	04	2.01		Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			405.500.000						120.000.000
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dok	405.500.000	Kab Flores Timor	DAK Non Fiskal- BOKKB- Pengawasan obat dan makanan			3 dok	120.000.000
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Iain Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat			20.000.000						27.500.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga									
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dok	20.000.000	Kab. Flores Timor	Dana Transfer Umum- DAU			1 dok	20.000.000
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa yang menyapkan PERDES KIBBL4	11,2 %	35.000.000					15,4 %	43.500.000
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota			100.000.000						30.250.000
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	12 dok	100.000.000	Kab. Flores Timor	Dana Transfer Umum- DAU			14 dok	30.250.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014				PRIORITAS		PRAKTIKAN MAJU TAHUN 2015	
URUSAN	BIDANG / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P S	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					FUSKESMAS	Pelaksanaan Kegiatan di Puskesmas (Puskesmas)	11	3.805.093.095		APBD II (Dana Kegiatan K)				9.248.187.750

BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja (Ranja) Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPIMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Rerja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memperhatikan Kaidah – Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah

Rencana kerja tahun 2024 ini dijadikan sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2024 menuju ke APBD untuk pelaksanaan Ranja

Demikian Rencana Kerja (Ranja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini disusun sesuai ketentuan berdasarkan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Larantuka, Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Flores Timur


/ dr. Agustinus Oct. Simuntur
NIP. 19790813 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)**

TAHUN 2024



DINAS SOSIAL

KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

RENJA merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun yang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

RENJA Dinas Sosial Tahun 2024 disusun melalui sebuah proses yang cukup panjang sejak perumusan rancangan awal, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RENJA. RENJA Dinas Sosial Tahun 2024 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun 2024 dan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan.

Kami berharap Dokumen RENJA Tahun 2024 dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta mendukung dalam pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670420 199703 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renga Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja	14
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V PENUTUP	57



DAFTAR TABEL

Halaman

TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rengja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rengja Perangkat Daerah s.d 2023	5
TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur	15
TC.32 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	35
TC.33 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	43





BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Memerintah

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Serita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Serita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Serita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	PERATURAN	BUPATI	TENTANG
	PERANGKAT	DAERAH	KABUPATEN
	TAHUN 2024	FLORES	TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah;
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPO adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
11. Indikator Kinerja adalah tunda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*);
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pencapaian sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pelaksanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021/

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Loranuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENGABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ini

DORIS ALEXANDER RINI

Diundangkan di Loranuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ini

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan resmi dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUSHO GATI

PEMBINA TIKI

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja (RENIA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam upaya pengintegrasian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2022).

RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025, yakni *"Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing"*. Berdasarkan visi tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya daya saing daerah
 1. Terwujudnya daya saing ekonomi
 2. Terwujudnya daya saing sumber daya manusia (SDM)
 3. Terwujudnya daya saing infrastruktur
- b. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
 1. Terpenuhiya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata
 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- c. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas
 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 3. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan KB
 4. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
 5. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
 6. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah dokumen rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut Dinas Sosial berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1317);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0053);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0055);
 10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
 11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
 12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini adalah melaksanakan visi, tujuan, dan sasaran RPIPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025 yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Dengan demikian dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- Bab II memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2021 yang berisi evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan penelaahan terhadap usulan masyarakat
- Bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah
- Bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
- Bab V penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur meliputi 3 (tiga) hal, yaitu - (a) realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (b) realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan (c) realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dapat diuraikan pada tabel TC.29.

Tabel TC. 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah
5D 2022 Provinsi Kabupaten Kota Flores Timur
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial**

Renstra 2017 - 2022

Kode					Unitas Bidang/Unitas Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Dasar) Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/KELOMPOK POKOK DOKUMEN TAHUN 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Pelaksanaan Kegiatan dan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah dan Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan n-1 Tahun Berjalan (tahun 2021)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja
1	2	3	4	5									10-12-13	14-15-16
1	01	01	01		Unitas Pemerintahan Wilayah Yang Berbatasan Dengan Pelaksanaan Dasar									
2	01	01	01		RENJA SOSIAL									
3	01	01	01		Program Pemasangan Unitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota									
4	01	01	01		Program Pemasangan Unitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tertelaksananya Pemasangan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100%			
5	01	01	01		Program Pemasangan Unitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tertelaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100%			
6	01	01	01		Program Pemasangan Unitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tertelaksananya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	100	100%			
7	01	01	01	10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan								
8	01	01	01	10	Kendali dan Penguasaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan Kinerja	Tertelaksananya Dokumen Laporan Capaian Kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Delapan)	100	100	100	100	100%			
9	01	01	01	10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
10	01	01	01	10	Prosedur Gaji dan Tunjangan ASN	Tertelaksananya Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	100	100	100	100	100%			

Kode					Unitas Bidang Unitas Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Sasaran) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Sasaran) Peningkatan Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja (Real) Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (%)			Target Program dan Kegiatan (Sasaran) Peningkatan Daerah Tahun 2022	Tertalisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Peningkatan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2022	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Target Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7/9)	11=(10/9)
1	01	01	20	03	Pelayanan Administrasi Pengujian Taptiklati Kewarganegaraan SKPD	Terselenggaranya administrasi kewarganegaraan (orang)	30	30	12	12	100%			
1	01	02	20	04	Administrasi Umum Peningkatan Daerah									
1	01	03	20	05	Pelayanan Kegiatan Insidial Lintas Peningkatan Berbagi Kantor	Jumlah kegiatan insidial lintas peningkatan kabupaten/kota (Kor-kor-kor-kor) (orang)	14	14	6	6	100%			
1	01	04	20	06	Pelayanan Peningkatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Peningkatan pengantar kantor yang dilakukan (orang)	10	17	0	0	0			
						Jumlah pelayanan pengantar kantor yang dilakukan (orang)	4	4	6	6	100%			
1	01	05	20	07	Pelayanan Logistik Kantor	Terselenggaranya dan Koordinasi Kantor (orang)	20	33	12	12	100%			
						Jumlah ATK yang dilakukan (orang)	130	103	12	20	100%			
1	01	06	20	08	Pelayanan Citra dan Peningkatan	Terselenggaranya citra dan peningkatan (orang)	10000	40000	40000	40000	100%			
1	01	07	20	09	Pelayanan Badan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	Jumlah Badan Peningkatan yang dilakukan (orang/kota)	100	140	12	1	10%			
1	01	08	20	10	Pelayanan Kegiatan dan Peningkatan	Terselenggaranya kegiatan dan peningkatan kantor (orang) (orang/kota)	177	194	125	125	100%			
1	01	09	20	11	Pelayanan Kegiatan dan Peningkatan SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan peningkatan (Kor-kor-kor-kor)	100	134	100	60	100%			
1	01	10	20	12	Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan									

Kode					Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Sasaran) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Kinerja Peningkatan Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja (Realisasi Program dan Kinerja Kegiatan s.d Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (%)			Target Program dan Kegiatan (Kinerja Peningkatan Daerah) Tahun 2023	Tertalisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Peningkatan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2022	Tertalisasi Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Target Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5/4)*100	11=(10/9)
6	02	01	20	01	Pengadaan Jasa (Sewa) Melayan	Terselenggaranya jasa sewa rumah (Layanan Melayan dan Pengantar)	300	1330	133	133	100%			
6	02	01	20	02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Listrik Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (listrik)	90	36	12	12	100%			
6	02	01	20	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Administrasi yang dilayani (Orang)	20	20	20	20	100%			
6	02	01	20		Pemeliharaan Ruang Milik Daerah termasuk Urusan Pemerintahan Daerah									
6	02	01	20	02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Sisa Pemeliharaan, Pajal dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Logistik	Terselenggaranya pemeliharaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional (unit)	17	17	11	11	100%			
						Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional (unit)	6	6						
6	02	01	20	02	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100%			
6	02	01	20	02	Pemeliharaan Fasilitas Kantor dan Perawatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan pemeliharaan gedung kantor (unit)	34	34	3	3	100%			
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	02	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, s.d Tahun FPMN lainnya (%)	100	100	100	100				

Kode	Unitas Bidang Utama Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan Sasaran	Target Kinerja Capaian Program (Kisaran Perkiraan) Daerah Tahun 2022	Kisaran Target Kinerja Real Program dan Kisaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (%)			Target Program dan Kegiatan (Kisaran Perkiraan) Daerah Tahun 2023	Petaian Realisasi Capaian Target Kinerja Perkiraan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Perkiraan Daerah Tahun 2022	Realisasi Kinerja Perkiraan Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Kisaran Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Kisaran (%)
1						2	3	4	5	6-7-8	9	10-11-12-13	14	
						Persentase keterbacaan sosial yang dibentangkan (%)	97,43	97,43	97,43	100				
1	06	02	10			Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Adat Terpencil (KAT)								
1	06	02	10	01		Facilitas Pembinaan Sosial KAT	Jumlah KK Warga KAT yang dilayani (KK)	343	333	44	44	100%		
							Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat)	10	5	6	6	100%		
1	06	02	10			Pengembangan Sarung adat (adat) Kabupaten Kota								
1	06	02	10		01	Kualitas dan Dokumentasi Perbuatan dan Ciptaan Seni Budaya dan Pengorganisasian dan Rongga	Jumlah Dunia Cipta dan masyarakat yang berperan dalam upaya pemertanian, adat, kebudayaan, kerajinan sosial (orang)	40	0	0	0	0		
1	06	02	10			Pengembangan Sektor Sektor Kerajinan Sosial Daerah Kabupaten Kota	Persentase pertumbuhan Pabrik Adat, KAT dan PUSK lainnya (%)							
1	06	02	10	06		Pengembangan Komunitas Sektor Sektor Kerajinan Sosial Kabupaten Kota	Jumlah kelompok usaha yang mengadakan pelatihan kerajinan (orang)	333	0	0	0	0		
							Jumlah KUB yang dibentangkan (orang)	1300	300	0	0	0		
							Jumlah Wanita Sektor Sosial Ekonomi yang dibentangkan (orang)	573	0	0	0	0		
							- Jumlah Adat adat yang dibentangkan (orang)	343	13324	13373	10034	140%		
							- Jumlah KUB yang dibentangkan KUB		643	144	153	110%		
							Jumlah kelompok Kerajinan Sosial Perkotaan yang dibentangkan (orang)	30	0	0	0	0		

[illegible]

Kode					Uraian Bidang Utama Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan Sasaran	Target Kinerja Capaian Program (Kisaran Perkiraan Daerah) Tahun 2022	Kisaran Target Kinerja Real Program dan Kisaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (%)			Target Program dan Kegiatan (Kisaran Perkiraan Daerah) Tahun 2023	Pencapaian Realisasi Capaian Target Kinerja Perkiraan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Perkiraan Daerah Tahun 2021	Realisasi Kinerja Perkiraan Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Kisaran Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Kisaran (%)
1	04	04	2.0	01	Pengelolaan Perumahan	Jumlah Lahan Laku Pasti yang mendapatkan keabsahhan dan perlindungan sosial (orang)-> Daerah Melawan	22	22	24	338	100%	2	12-13-14	11-13.4
						Jumlah Panti Nyaan Sosial yang mendapat Bantuan (Lumajang)	10	9	9	9	100%			
1	04	04	2.0	02	Pengelolaan Air Bersih	Jumlah Lahan Laku Pasti yang mendapatkan keabsahhan dan perlindungan sosial (orang)-> Air Bersih			21	21	100%			
						Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang mendapat bantuan (orang)	40	00	0	0				
1	04	04	2.0	03	Pemberian Bantuan Psikis, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Trauma dan Efek Trauma yang mendapatkan perlindungan dan keabsahhan (orang)	30	0	0	0	0			
						Jumlah Lahan Laku Pasti yang mendapatkan keabsahhan dan perlindungan sosial (orang)-> Pelayanan Bantuan Psikis, Mental, Spiritual dan sosial	70	0	0	0	0			
						Jumlah anak sekolah yang mendapatkan analisis terkait kapasitas pengembangan program dan anak serta analisis internal lainnya (orang)	30	11	30	30	100%			
						Jumlah anak yang diberikan pelayanan terpadu (orang)	22	0	0	0	0			
						Jumlah dan Penyandang penyakit sosial yang diberikan dan (orang)	30	11						

Kode					Uraian Bidang Utama Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan Sasaran	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Penyerapan Daerah) Tahun 2023	Kendala Target Kinerja Realisasi Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Penyerapan Daerah) Tahun 2023	Prestasi Realisasi Capaian Target Kinerja Penyerapan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Penyerapan Daerah Tahun 2023	Realisasi Kerja Penyerapan Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	20	04	23	01	2	3	4	5	6	7	8-10	9	10-12-1-48	11-12-9-4
1	06	04	23	01	Pelayanan Administrasi Kependudukan, Akta Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Asli	Jumlah Layanan Liris Duit yang menggunakan Efisiensi dan Pelayanan Administrasi Kependudukan								
1	06	04	23	01	Pelayanan Akta Kependudukan dan Kependudukan Asli	Pengelolaan pendaftaran, pengurusan dan pembuatan akta Orang Dengan Kelainan (ODK) (orang)	200	15	11	14	117%			
1	06	04	23	1	Rehabilitasi Sosial Perempuan Menderita Kependudukan Sosial (PKKS) Layanan Bantu Koneksi MTW AIDS dan MAPZA Di Luar Panti Sosial									
1	06	04	23	01	Pelayanan Bimbingan Fidu, Moral, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelayanan penerusan bagi PKKS / Klien di Trauma Center semesta bagi Individu Tersebut (Klien orang)	110	140	40	30	201%			
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	11		0					
1	06	05	23		Perlindungan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)								
1	06	05	23	01	Kepuasan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	120	1	0	0	113%			
1	06	05	23	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Calon Daerah Kabupaten Kota									
1	06	05	23	1	Pelayanan Fakir Miskin Calon Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pelayanan Peningkatan Data Terpadu Kependudukan Sosial (DTKS) (Gubernur)	100	1,144	1	1	100%			
1	06	05	23	01	Pengelolaan Data Fakir Miskin Calon Daerah Kabupaten Kota	Tertanamnya koordinasi pelaksanaan PKM (s.d)	1340	1000	0	1	301%			
1	06	06			Program Peningkatan Ekonomi	Persentase pelayanan dan rehabilitasi Kewirausahaan sosial (%)	100		100					

Kode						Uraian Bidang Utama Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan Sasaran	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Penyerapan Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Real Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (%)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Penyerapan Daerah) Tahun 2022	Pencapaian Realisasi Capaian Target Kinerja Penyerapan Daerah s.d Tahun Berjalan	
										Target Kinerja Penyerapan Daerah Tahun 2021	Realisasi Kinerja Penyerapan Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	06	06	13			Pertumbuhan Sosial Kultural Berbasis Akademi Sosial Kabupaten Koro	Jumlah orang yang mengikuti pelayanan kesehatan (orang)								
1	06	06	13		C	Pelayanan Malak	- Jumlah orang yang mengikuti pelayanan kesehatan (orang) s.d Malak	1000	1204	200	5	10%			
							Jumlah kampung yang memiliki Kemitraan Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik / perbatasan yang ditunjuk (unit)	2	4						
1	06	06	13		02	Pelayanan Samping	- Jumlah orang yang mengikuti pelayanan kesehatan (orang) s.d Samping								
1	06	06	13		03	Pelayanan Target Pemangsaan Persepsi	- Jumlah orang yang mengikuti pelayanan kesehatan (orang) s.d Target Pemangsaan persepsi								
1	06	06	13		04	Pelayanan Khusus Bagi Kelompok Rentan	- Jumlah orang yang mengikuti pelayanan kesehatan (orang) s.d Pelayanan Khusus								
1	06	06	13		05	Pelayanan Dukungan Pendidikan	- Jumlah orang yang mengikuti pelayanan kesehatan (orang) s.d Dukungan Pendidikan								
1	06	06	13			Pengembangan Perilaku dan Masyarakat Terhadap Keterampilan Berbasis Masyarakat Kota									
1	06	06	13		01	Kemitraan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan Kemitraan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kemitraan Kabupaten Kota (kampung)			11	11	100%			
1	06	06	13		02	Kemitraan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tama Siaga Bencana	Jumlah kampung Target yang difasilitasi (kampung)	41	41	42	42	100%			
1	06	07				Program Pengelolaan Tama Malak Pendidikan									

Kode					Unitas Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perwujudan Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perwujudan Daerah) Tahun 2023	Pembinaan Realisasi Capaian Target Kinerja Perwujudan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Perwujudan Daerah Tahun 2023	Realisasi Kerja Perwujudan Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	20	00	23		Pembinaan Target Mekanisme Pelaksanaan Nasional Kabupaten Kota						0-100		10-15-1-0	11-10.0
1	20	00	23	02	Pembinaan Target Mekanisme Pelaksanaan Nasional Kabupaten Kota	Terdapatnya pemeliharaan sistematis terpadu (Sistem)	3	1	1	1	100%			

Renstra 2023 - 2026

Kode					Unitas Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perwujudan Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perwujudan Daerah) Tahun 2023	Pembinaan Realisasi Capaian Target Kinerja Perwujudan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Perwujudan Daerah Tahun 2023	Realisasi Kerja Perwujudan Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WADAH YANG BERNKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0-100		10-15-1-0	11-10.0
1	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
						Target Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan (%)	100					100		

Kode					Uraian Bidang Utama Peningkatan Daerah Das Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peningkatan Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Madya Program dan Kebijakan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Peningkatan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Kebijakan Target Kinerja (%)
						Peningkatan Keterampilan Sosial dan Finansial Aparatur (s)	100					100		
						Peningkatan ASN yang memiliki kompetensi lengkap (s)	100					100		
						Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Capaian Kinerja dan Kerangka (s)	100					100		
1	04	11	1		Peningkatan, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Peningkatan Daerah	Terdapatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (s)	100					10		
1	04	11	2	01	Peningkatan Efisiensi Peningkatan Peningkatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Daerah (s)	4					4		
1	04	11	2	02	Koordinasi dan Peningkatan Efisiensi RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Efisiensi RKA- SKPD (s)	4					4		
1	04	11	2	03	Koordinasi dan Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Berkas Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Berkas Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Berkas Kinerja SKPD (s)	4					4		
1	04	11	2	04	Evaluasi Kinerja Peningkatan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peningkatan Daerah (Laporan)	12					4	1	20%
1	04	11	100		Aktivitas Kegiatan Peningkatan Daerah	Terdapatnya dokumen Laporan Kegiatan Berjalan Terjadwal Sesuai RKA dan Laporan Koordinasi Peningkatan Laporan Kegiatan (s)	10					4		
1	04	11	100	01	Peningkatan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	24					24	24	100%

Kode					Uraian Bidang Utama Pemerintahan Dalam Das Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pencapaian Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Misi Program dan Kebijakan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Pencapaian Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Program Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Pencapaian Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pencapaian Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	04	11	202	03	Pelayanan Pemerintahan dan Pengajian Vertikal Kecamatan SKPD	Jumlah Dokumen Pemerintahan dan Pengajian Vertikal Kecamatan SKPD (Dok)	4	2	4	4	100%	3	10-15-143	11-11114
1	04	11	202	05		Jumlah Laporan Kegiatan Balas Tawaban Komunitas SKPD dan Laporan Koordinasi Pelayanan Laporan Kegiatan Balas Tawaban Komunitas SKPD (laporan)	3					3		
1	04	11	202			Jumlah laporan pemerintahan Barang Milik Daerah pada SKPD (lapor)	24					4		
1	04	11	202	08	Pemerintahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pemerintahan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24					4		
1	04	11	202		Administrasi Kependudukan Pencapaian Daerah	Jumlah Dokumen Pagarat Berkas dan Target yang Mengikuti Pendaftaran dan Pelayanan (orang)	10					4		
1	04	11	202	04		Jumlah Dokumen Misi Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Informasi Kependudukan (Dok)	1					1		
1	04	11	202	05	Ministry Pelayanan dan Pelayanan Kependudukan Pagarat	Jumlah Dokumen Ministry Evaluasi dan Pelayanan Kependudukan Pagarat (Dok)	4					1		
1	04	11	202	06	Pelayanan dan Pelayanan Pagarat Berkas dan Target yang Mengikuti Pendaftaran dan Pelayanan (orang)	Jumlah Pagarat Berkas dan Target dan Target yang Mengikuti Pendaftaran dan Pelayanan (orang)	11							
1	04	11	202	11	Penyusunan Tahap Pengembangan Pelayanan Pencapaian Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Tahap Pengembangan Pelayanan Pencapaian Kegiatan (orang)	7							

Kode	Uraian Bidang Utama Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Kinerja Program) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Kinerja Program) Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023				
					Target Kinerja Program Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (10/9)	11 (11/10)			
1	04	01	104		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100			100			
1	04	01	104	01		Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana Kantor yang Disediakan (paket)	1			1		
1	04	01	104	02		Pemeliharaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan (paket)	4			4		
1	04	01	104	03		Pemeliharaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1			1		
1	04	01	104	04		Pemeliharaan Ruang Logistik Kantor	Jumlah Paket Ruang Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1			1		
1	04	01	104	05		Pemeliharaan Ruang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan (paket)	4			4		
1	04	01	104	06		Pemeliharaan Sistem Keamanan dan Peningkatan Keamanan	Jumlah Paket Sistem Keamanan dan Peningkatan Keamanan yang Disediakan (paket)	1			1		
1	04	01	104	08		Fasilitas Kantor	Jumlah Paket Fasilitas Kantor yang Disediakan (paket)	14			14		
1	04	01	104	09		Pengelolaan Ruang Kantor	Jumlah Paket Pengelolaan Ruang Kantor yang Disediakan (paket)	42			42		
1	04	01	104			Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (unit)	100					
1	04	01	104	02		Pengadaan Kantor Dinas	Jumlah Unit Kantor Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan (unit)	3					

Kode					Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Madya Program dan Kabupaten Kabupaten a.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kabupaten Tahun Lalu (a-2)			Target Program dan Kabupaten (Rencana Strategis Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Kabupaten Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Kabupaten Tahun 2023	Realisasi Kinerja Kabupaten Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kabupaten a.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	04	11	207	02	Pengelolaan Moodline	Jumlah Paket Mody yang Disalurkan (unit)	10		4		100%	1	10-15-14	11-100%
1	04	11	207	03	Pengelolaan Fasilitas dan Akses Layanan	Jumlah Unit Fasilitas dan Akses Layanan yang Disalurkan (unit)	1							
1	04	11	207	03	Pengelolaan dan Tab Berwujud	Jumlah Unit dan Tab Berwujud yang Disalurkan (unit)	1							
1	04	11	207	04	Pengelolaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disalurkan (unit)	1							
1	04	11	207	05	Pengelolaan Sistem dan Perantara Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sistem dan Perantara Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disalurkan (unit)	1							
1	04	11	207	06	Pengelolaan Sistem dan Perantara Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sistem dan Perantara Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disalurkan (unit)	1							
1	04	11	208		Pengelolaan dan Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan dan penguatan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100					100		
1	04	11	208	01	Pengelolaan Peta Dasar Wilayah	Jumlah Laporan Pemetaan Peta Dasar Wilayah (laporan)	40					10		
1	04	11	208	02	Pengelolaan Peta Kemukiman, Bangunan Dapur dan Lahan	Jumlah Laporan Pemetaan Peta Kemukiman, Bangunan Dapur dan Lahan yang Disalurkan (laporan)	40					1000		
1	04	11	208	04	Pengelolaan Peta Kebijakan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Pemetaan Peta Kebijakan Urusan Kantor yang Disalurkan (laporan)	40					10	4	10%
1	04	11	209		Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100					100		



Kode	Unitas Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Component) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangikan Daerah) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Pelaksanaan Kegiatan s.d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Anggaran Daerah Tahun 2015)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Perangikan Daerah s.d Tahun Berjalan		
					Target Kinerja Perangikan Daerah Tahun 2014	Realisasi Kinerja Perangikan Daerah Tahun 2014	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2014)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)	
1	34	11	208	12			100%	11	11-13-14-15	11-110-14	
		Pengelolaan dan Pemeliharaan, Bina Pemeliharaan, Poda dan Pemeliharaan Kandang Operasional dan Lapangan	Jumlah Kandang Kuda Operasional dan Lapangan yang Dipekerti dan diterangkan Poda dan Pemeliharaannya (unit)	11				11			
1	34	11	208	12				1			
1	34	11	208	12				1	1	100%	
1	34	11	208	12				30	1	34%	
1	34	12			PROGRAM HEMBERDAYAAN SOSIAL						
					Pemerataan pendistribusian KAT (%)	100		34			
					Pemerataan pemerataan distribusi sosial yang efisien dan berkelanjutan dalam pemerataan distribusi kesejahteraan sosial (%)	34		34			
1	34	12	1		Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Terpencil (KAT)	100		34			
1	34	12	1	11	Fasilitas Pembiayaan Sosial KAT	Jumlah Kelompok pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Sosial Kewenangan Kabupaten Kota	100				
1	34	12	1	12	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan KAT	Jumlah Kelompok pada KAT yang Mendapat Pengembangan Kewenangan Kabupaten Kota	100		34	34	100%

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan				Definisi Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Strategis Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Tersebut Daerah s.d Tahun Terakhir	
								Target Kinerja Strategis Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Strategis Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Terakhir (tahun 2023)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	04	02	1		Pengembangan Pemasaran Sumber Daya Manusia Sosial Daerah Kabupaten Klaten	24				100	1	10-15-143	11-1114
1	04	02	1	01	Pengembangan Pemasaran Sumber Daya Manusia Kewirausahaan Kabupaten Klaten	20							
1	04	02	1	02	Pengembangan Pemasaran Tenaga Kependidikan Sosial Kewirausahaan Kewirausahaan Kabupaten Klaten	15 TARIK					2		
1	04	02	1	03	Pengembangan Pemasaran Tenaga Sumber Daya Manusia Kewirausahaan Kabupaten Klaten	20					3		
1	04	02	1	04	Pengembangan Pemasaran Tenaga Sumber Daya Manusia Kewirausahaan Kabupaten Klaten	3					1		
1	04	02	1	05	Pengembangan Pemasaran Sumber Daya Manusia dan Program Lembaga Keagamaan Kewirausahaan Kabupaten Klaten	20					4	20	2024
1	04	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN ROGBAN TINDAK NIKERABAN	100					100		

Kode					Uraian Bidang Usaha Penerimaan Daerah Dari Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Samudra Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kawasan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Samudra Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Penerimaan Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Penerimaan Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Penerimaan Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	04	08	1		Pemilihan Warga Negara Migran Karbon Tindas Kekerasan dari Tindak Debatasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipengaruhi ke Desa Kelurahan Asal									
1	04	08	1	01	Fasilitas Pemilihan Warga Negara Migran Karbon Tindas Kekerasan dari Tindak Debatasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipengaruhi ke Desa Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Karbon Tindas Kekerasan yang dipengaruhi dari Tindak Debatasi di Daerah Persepsi untuk dipengaruhi ke Desa Kelurahan Asal Kecamatan Kabupaten Kota (orang)	30					2	2	100%
1	04	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemulihan rehabilitasi sosial dasar pemerintah rehabilitasi (%)	100					31,00	0,00	0%
1	04	04	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Pemerintah Disabilitas Terlewat, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlewat, serta Gelandangan Program di Luar Panti Sosial		17,4					14	0	0%
1	04	04	1	01	Pemulihan Pemerintah	Jumlah Orang yang Menjalankan Pemerintah Kelurahan Pemerintah Sosial dengan Membuat dan Menjalankan Kerangka Kabupaten Kota (orang)	100					20	30	30%

Kode					Uraian Bidang Utama Peningkatan Daerah Das Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kebijakan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Strategis Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Tersebut Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Kegiatan Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Kegiatan Target Kinerja (%)
1	06	04	1	02	Peningkatan Santitas	Jumlah orang yang menerima pelayanan dan bimbingan teknis, s yang tersedia dalam 1 tahun Kerangka Kegiatan Kota (orang)	200				100-100	20	20	20%
1	06	04	1	03	Peningkatan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Menerima Alat Bantu dan Alat Bantu. Proge Sistem Informasi Kerangka Kegiatan Kota (orang)	40					10		
1	06	04	2	02	Peningkatan Bimbingan Psik, Moral, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Moral, Spiritual dan Sosial Kerangka Kegiatan Kota (orang)	100					25	0	34%
1	06	04	1	04	Peningkatan Bimbingan Sosial Keluarga Peningkatan Disabilitas Tahanan Anak Tahanan, Lari dan Tahanan, serta Gangguan Program dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Keluarga Peningkatan Disabilitas Tahanan, Anak Tahanan, Lari dan Tahanan, serta Gangguan Program dan Masyarakat Kerangka Kegiatan Kota (orang)	100					20	0	20%
1	06	04	1	05	Peningkatan Peningkatan Materi Tahap Kepemimpinan Alat, Kebijakan, Sistem Misi dan Karya, Komunitas Anak	Jumlah Orang yang Terpapar Edukasi Peningkatan Materi: Tahap Kepemimpinan, Alat Kebijakan, Sistem Misi dan Karya Materi Anak bagi Peningkatan Disabilitas Kerangka Kegiatan Kota (orang)	80							

Kode					Uraian Bidang Utama Pemerintahan Dalam Das Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kebijakan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Strategis Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Tersebut Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	04	04	1	08	Pembinaan Akademi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kekayaan Kota (orang)	20				10-20%			
1	04	04	1	09	Pembinaan Layanan Dasar dan Pengobatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dasar dan Pengobatan Kewenangan Kekayaan Kota (orang)	20					4	9	45%
1	04	04	1	10	Pembinaan Layanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kewenangan Kekayaan Kota (orang)	20					3	5	25%
1	04	04	1	12	Pembinaan Layanan Pulih	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Pulih Kewenangan Kekayaan Kota (orang)	20					3		
1	04	04	1		Kebijakan Sosial Perundang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) Layanan Suku Kerkas MTN AIDS dan NARDA di Lupa Panti Sosial		55,20					20		
1	04	04	1	05	Pembinaan Layanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kewenangan Kekayaan Kota (orang)	40							
1	04	04	1	03	Pelayanan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pendidikan Sosial dengan Sumber Gizi Minimal Kewenangan Kekayaan Kota (orang)	40					11	30	25%
1	04	04	1	04	Pelayanan Sedang	Jumlah orang yang Mendapatkan gizi dan diorganisir layanan yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kekayaan Kota (orang)	40					10		

Kode					Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Dan Luar Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Berkas/Target) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kebijakan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Berkas/Target Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Tersebut Tahun s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Berkas/Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Berkas/Target Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Kinerja Target Kinerja (%)
1	06	04	1	02	Pengadilan Ala Bumi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga untuk Kemampuan Kemandirian Kategori Koma (orang)	40				100%		10-15-1-2	11-11114
1	06	04	1	04	Pendidikan Pendidikan Kendaraan di Luar Rumah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pendidikan Kemandirian Pendidikan Kendaraan di Luar Rumah Kemampuan Kategori Koma (orang)	40					10	20	10%
1	06	04	2	07	Pendidikan Kendaraan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Pendidikan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kemampuan Kategori Koma (orang)	40					10		
1	06	04	1	08	Pendidikan Kendaraan Sosial Seperti Keluarga Pendidikan Mental Kemampuan Sosial (PS-GS) Lainnya Selain Kategori MNV/AIDS dan NAFDA	Jumlah Peserta dalam Pendidikan Kendaraan Sosial seperti Keluarga Peningkatan Masalah Kemampuan Sosial (PS-GS) Lainnya Selain Kategori MNV/AIDS dan NAFDA Kemampuan Kategori Koma (orang)	40							
1	06	04	2	10	Pendidikan Kendaraan Kendaraan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga dan Kemampuan Kemandirian Kategori Koma (orang)	20							
1	06	02			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemerintah akan menerima yang dibagikan (%)	22,47					11,36		
						Pemerintah akan menerima yang mendapatkan bantuan (%)	200					200		
1	06	02	2		Pendidikan Anak-Anak Terlantar		22,47					11,36		

Kode					Uraian Bidang Utama Peningkatan Daerah Das Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Samungin Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kawasan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Samungin Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Tersebut Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	04	02	1	01	Peningkatan Rata Rata Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Anak-Anak Terlantar yang Memiliki Kemampuan Kebudayaan Kota (Jarak)	20				100-100			
1	04	02	1	02		Kendali Anak-Anak Terlantar yang Memiliki Kemampuan Kebudayaan Kota (Jarak)	30				100-100			
1	04	02	1	03		Peningkatan Terpadu Pelayanan Peningkatan Anak Terlantar	30				100-100			
1	04	02	1		Pengelolaan Rata Rata Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		100				100-100			
1	04	02	1	01		Peningkatan Rata Rata Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	30000				100-100			
1	04	02	1	02		Peningkatan Rata Rata Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	10000				100-100			

Kode					Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Dan/atau Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kebijakan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Strategis Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Tersebut Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	06	02	1	02	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perilaku Masyarakat Sosial Kecerdasan Kampung	200.000				100-100	114%		
1	06	02				Perilaku pelayanan dan pengawasan sosial kodeks bencana (s)	100					100		
						Perilaku dan informasi yang bencana (s)	40					14		
1	06	02	1.01		Perkembangan Sosial, Kultural Bencana Alam dan Sosial Kampung Kota		100							
1	06	02	1.01	01	Pengelolaan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan dan Kesiapan Masyarakat Tanggap Darurat (Pengembangan) Kampung Kampung Kota (s)	200					11	17%	1000%
1	06	02	1.01	02	Pengelolaan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kesiapan Layanan yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengembangan) dan Peta Bencana Kampung Kampung Kota (s)	200					20		
1	06	02	1.01	03	Pengelolaan Target Pengembangan Pengembangan	Jumlah Target Pengembangan Kampung Kampung Kota (s)	1					1		
1	06	02	1.01	04	Pengembangan Kultural Kampung Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Kultural Kampung Kota Kampung Kampung Kota (s)	100					10		

Kode					Uraian Bidang Usaha Penerimaan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome/Output/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Masi Program dan Kebijakan Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Strategis Daerah Tahun 2024)	Realisasi Realisasi Capaian Target Kinerja Tersebut Daerah s.d Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Kegiatan Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Kegiatan Daerah Tahun 2023	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Target Capaian Kegiatan Target Kinerja (%)
1	04	06	2.01	02		Pelayanan Dukungan Fiskal	Jumlah Kota/Kabupaten yang Mendapatkan Layanan Dukungan Fiskal/Kurangnya Kekurangan Kota (orang)	100			100-100	1	10-15-1-1	11-11111
1	04	06	2.02		Peningkatan Perencanaan Masyarakat Terhadap Ketersediaan Rencana Kebijakan Kota		100					100		
1	04	06	2.03	01		Kordinasi, Sosialisasi dan Pelibatan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelibatan Kampung Siaga Bencana Kurangnya Kabupaten Kota (Kampung)	10				1		
1	04	06	2.03	02		Kordinasi, Sosialisasi dan Pelibatan Taman Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Kordinasi, Sosialisasi dan Pelibatan Taman Siaga Bencana Kurangnya Kabupaten Kota (orang)	40				40	40	100%
1	04	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAMPAHLAWAN	Cahaya taman makam pahlawan yang Berada	100							
1	04	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota		100							
1	04	07	2.01	02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kota (makam)	1 Makam						

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/ unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur : Capaian SPM (Standar Nasional dan IKK dapat ditunjukkan pada tabel TC.30.

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM	IKK	Target Kinerja RPJPD				Realisasi Capaian		Pencapaian		Catatan Analisis
		Indikator Nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase PAKES yang memperoleh bantuan sosial	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PAKES yang memperoleh bantuan sosial		4	57%	1045%	233%	244%	1145%	1445%	1145%	233%	Tahun 2022, PAKES yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 1932 orang dari total PAKES yang seharusnya mendapatkan bantuan (DTAKD) 183019 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi anggaran 1
2	Persentase PAKES yang tercapai		4	57%	1071%	1133%	1044%	1044%	145%	1071%	1033%	Tahun 2022, PAKES yang tercapai sebanyak 1046 dari total PAKES yang seharusnya tercapai sebanyak 9991 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi anggaran 1
3	Persentase bantuan keuangan yang memenuhi bantuan sosial selama masa tanggap darurat		4	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022, bantuan keuangan yang memenuhi bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 7 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi anggaran 1
4	Persentase bantuan keuangan yang disalurkan sebagai tanggapan darurat		4	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022, bantuan keuangan yang disalurkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 7 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi anggaran 1
5	Persentase penyalangan aset baik darat, laut, udara yang tidak sesuai yang telah memenuhi jumlah sosial		4	524	100	100	100	1112		100	100	Tahun 2022, aset berupa aset tidak potensial yang telah memenuhi jumlah sosial sebanyak 3592 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi anggaran 1
Indikator berdasarkan RPJPD												
1	Persentase PAKES (%)		4		1045%	233%	244%	1145%	1445%	1145%	233%	Tahun 2022, PAKES yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 1932 orang dari total PAKES yang seharusnya mendapatkan bantuan (DTAKD) 183019 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi anggaran 1 (DTAKD 183019)
2	Persentase Tingkat ketidaktercapaian (%)		4		1071%	233%	240%	1071%		100%	233%	Jangka komparasi (sawit dan BPS). Data 2023 belum ada
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)												



No	Indikator	SPM	IKK	Target Kinerja IKPD				Kualitas Capaian		Tercapaian		Catatan Tambahan
		Isi		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Pemerataan (N) Perjangkauan Disabilitas Terlantar yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti Sosial	1	4	100	100	100	100	11	834%	100	100	Tahun 2021, Perjangkauan Disabilitas Terlantar yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti Sosial sebanyak 117 orang dan total Perjangkauan Disabilitas 1483 orang. Tahun 2022 ada SPD
2	Pemerataan (N) Anak Terlantar yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti Sosial	1		100	100	100	100	208	8.79%	100	100	Tahun 2022, Anak Terlantar yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti Sosial sebanyak 793 orang dan total Anak 175 orang. Tahun 2023, 3 Anak
3	Pemerataan (N) Lupa Ula Terlantar yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti	1		100	100	100	100	187	8.82%	100	100	Tahun 2022, Lupa Ula Terlantar yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti Sosial sebanyak 2666 orang dan total Lupa Ula Terlantar 3002 orang. Tahun 2023, 30 orang
4	Pemerataan (N) Gelandangan Pengemis yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti Sosial	1		100	100	100	100	8	8	100	100	Tahun 2022, anak ada Gelandangan Pengemis yang Terpapar Kebutaan Dananya di Luar Panti Sosial
5	Pemerataan (N) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpapar Kebutaan Dananya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana secara kolektif dan individu	1		100	100	100	100	100	1.25%	100	100	Tahun 2022, Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpapar Kebutaan Dananya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana secara kolektif dan individu sebanyak 79 orang. Tahun 2023, 8776 orang (prakiraan sementara 5)
Indikator Kinerja Utama												
1	Pemerataan (N) perjangkauan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpapar kebutaan dananya di Luar panti (Indikator SP1.1)		4	100	100	100	100	88.12	1.27%	100	100	Tahun 2021, total perjangkauan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpapar kebutaan dananya di Luar panti sebanyak 314 orang dibandingkan total kebutaan perjangkauan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis sebanyak 5403 orang. Tahun 2021, total tidak ada org
2	Pemerataan korban bencana alam dan sosial yang terpapar kebutaan dananya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana secara kolektif dan individu		1	100	100	100	100	100	1.25%	100	100	Tahun 2021, Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpapar kebutaan dananya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana secara kolektif dan individu sebanyak 79 orang. Tahun 2023, 8776 orang (prakiraan sementara 5)



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Peningkatan pelayanan sosial bagi PMKS
5. Tingginya beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Renja

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD Tahun 2024 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2024,serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur terdapat 1 (satu) program rutin dan 5 (Lima) Program yang menjadi tanggung jawab sesuai tupoksi Dinas Sosial, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Bencana

Dengan tetap mengacu pada visi, tujuan, dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur maka pada tahun 2024 Program dan Kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini sudah sesuai dengan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dimana didalamnya terdapat 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 secara umum dapat digambarkan dalam tabel TC.31.

Tabel TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Flores
Timor Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Pemb n
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	DINAS SOSIAL				4.117.199,889	DINAS SOSIAL				4.117.199,889	
	PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				2.417.199,889	PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				2.417.199,889	
			Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100	2.422.092.589			Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100	2.422.092.589	
			Persentase Ketuntasan Service dan Persentase Agensi (%)	100	200.000.000			Persentase Ketuntasan Service dan Persentase Agensi (%)	100	200.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kesehatan					Catatan dan Penjelasan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase AEM yang memiliki kawasan konservasi (%)	40,34	60.000.000			Persentase AEM yang memiliki kawasan konservasi (%)	40,34	60.000.000	
			Persentase Persentase dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100.000.000			Persentase Persentase dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100.000.000	
	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dik)	-	160.000.000	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dik)	-	160.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Lamelika, Koc, Lamelika)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebijakan					Catatan dan Pembic- ran
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Balans/Trivulsi Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Pemerintah Laporan Keuangan (dik)	-	1,965,348,529	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Balans/Trivulsi Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Pemerintah Laporan Keuangan (dik)	-	1,965,348,529	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang Pukul	1,500,348,529	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang Pukul	1,500,348,529	
	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	1 Dokumen	45,000,000	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	1 Dokumen	45,000,000	
	Kendali dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Balans/ Trivulsi Semester SKPD	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Laporan Keuangan Balans/ Trivulsi Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Pemerintah Laporan Keuangan Balans/ Trivulsi Semester SKPD	1 Laporan	20,000,000	Kendali dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Balans/ Trivulsi Semester SKPD	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Laporan Keuangan Balans/ Trivulsi Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Pemerintah Laporan Keuangan Balans/ Trivulsi Semester SKPD	1 Laporan	20,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Lemahulu		-	25,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Lemahulu		-	25,000,000	
	Rekamasi dan Pemeriksaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Laporan Rekamasi dan Pemeriksaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000	Rekamasi dan Pemeriksaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Lemahulu, Koc, Lemahulu)	Jumlah Laporan Rekamasi dan Pemeriksaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Penjelasan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11,000,000	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11,000,000	
	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	10,000,000	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	10,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial, Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial, Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	140,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	140,500,000	
	Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Lain-lain Pemasangan Sarungkar Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Paket Kebutuhan Dasar dan Lain-lain Pemasangan Sarungkar Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Lain-lain Pemasangan Sarungkar Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kori Larantuka)	Jumlah Paket Kebutuhan Dasar dan Lain-lain Pemasangan Sarungkar Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Penjelasan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Perlakuan dan Perlengkapan Kamar	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Perlakuan dan Perlengkapan Kamar yang Disediakan	4 Paket	8,000,000	Penyediaan Perlakuan dan Perlengkapan Kamar	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Perlakuan dan Perlengkapan Kamar yang Disediakan	4 Paket	8,000,000	
	Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Perlakuan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Perlakuan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kamar	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kamar yang Disediakan	1 Paket	11,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kamar	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kamar yang Disediakan	1 Paket	11,000,000	
	Penyediaan Barang Cuci dan Penggendian	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Barang Cuci dan Penggendian yang Disediakan	1 Paket	11,000,000	Penyediaan Barang Cuci dan Penggendian	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Barang Cuci dan Penggendian yang Disediakan	1 Paket	11,000,000	
	Penyediaan Bahan Bakar dan Pemutar Perendang-undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Pemutar Perendang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,000,000	Penyediaan Bahan Bakar dan Pemutar Perendang-undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Pemutar Perendang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tesis	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tesis	12 Laporan	30,000,000	Fasilitas Kunjungan Tesis	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tesis	12 Laporan	30,000,000	
	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Kemitraan SKPD	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Koordinasi dan Kemitraan SKPD	12 Laporan	60,000,000	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Kemitraan SKPD	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Koordinasi dan Kemitraan SKPD	12 Laporan	60,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	15,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	15,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebijakan					Catatan dan Penjelasan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11,000,000	Pengadaan Mebel	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan dan Meubel Lainnya	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Unit Perlengkapan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Perlengkapan dan Meubel Lainnya	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Unit Perlengkapan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)		-	187,433,000	Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)		-	187,433,000	
	Penyediaan Jasa Saran Masyarakat	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Saran Masyarakat	12 Laporan	1,450,000	Penyediaan Jasa Saran Masyarakat	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Saran Masyarakat	12 Laporan	1,450,000	
	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83,900,000	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83,900,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200,880,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200,880,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial, Lamatula		-	155,808,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial, Lamatula		-	155,808,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	11 Unit	83,800,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Dinas Sosial, Lamatula, Kec. Lamatula)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	11 Unit	83,800,000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Penjelasan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Asst Tak Berwujud	(Dinas Sosial, Larutulu, Kec. Larutulu)	Jumlah Asst Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	11,000,000	Pemeliharaan Asst Tak Berwujud	(Dinas Sosial, Larutulu, Kec. Larutulu)	Jumlah Asst Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	11,000,000	
	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larutulu, Kec. Larutulu)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Kebersihan	1 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larutulu, Kec. Larutulu)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Kebersihan	1 Unit	30,000,000	
	Pemeliharaan Kebersihan Rumah dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larutulu, Kec. Larutulu)	Jumlah Rumah dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Kebersihan	42 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Kebersihan Rumah dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larutulu, Kec. Larutulu)	Jumlah Rumah dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Kebersihan	42 Unit	30,000,000	
	ERIDAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1,300,000,000	ERIDAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1,300,000,000	
	PROGRAM PEMBIDAYAAN SOSIAL		Persentase pemberdayaan KAT (%)	8	150,000,000	PROGRAM PEMBIDAYAAN SOSIAL		Persentase pemberdayaan KAT (%)	8	150,000,000	
			Persentase peserta sumber keajaiban sosial yang dilatih dan berpartisipasi dalam penanganan masalah keajaiban sosial (%)	20				Persentase peserta sumber keajaiban sosial yang dilatih dan berpartisipasi dalam penanganan masalah keajaiban sosial (%)	20		
	Pengembangan Potensi Sumber Keajaiban Sosial Daerah Kabupaten Kota			-	150,000,000	Pengembangan Potensi Sumber Keajaiban Sosial Daerah Kabupaten Kota			-	150,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Pemula Penerima Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	11 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pemula Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	30 Orang	30,000,000	Peningkatan Kemampuan Pemula Penerima Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	11 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pemula Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	30 Orang	30,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Pembic- ran
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Pemula Terapi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten Kota	(18 Kecamatan, EAB, FLORES TIMUR)	Jumlah Terapi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten Kota	18 Orang	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Pemula Terapi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota	(18 Kecamatan, EAB, FLORES TIMUR)	Jumlah Terapi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten Kota	18 Orang	50,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Pemula Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten Kota	(Kecamatan Lematika, Lematika, Kota Lematika)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten Kota	1 Lembaga	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Pemula Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten Kota	(Kecamatan Lematika, Lematika, Kota Lematika)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten Kota	1 Lembaga	50,000,000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KETRASAN	18 Kecamatan	Perantara kasus yang ditangani (%)	100	75,000,000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KETRASAN	18 Kecamatan	Perantara kasus yang ditangani (%)	100	75,000,000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Kekerasan di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipulangkan ke Desa Kelurahan Asal			-	75,000,000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Kekerasan di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipulangkan ke Desa Kelurahan Asal			-	75,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Pembic- ran
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Facilitasi Pemadangan Warga Negera Migran Kerja Tindak Kekerasan dan Tindak Diskriminasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipadangan ke Desa Kelurahan Asal Kecamatan Kabupaten Kota	(18 Kecamatan (230 Desa Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Warga Negera Migran Kerja Tindak Kekerasan yang dipadangan dan Tindak Diskriminasi di Daerah Perumahan untuk dipadangan ke Desa Kelurahan Asal Kecamatan Kabupaten Kota	2 Orang	11,000,000	Facilitasi Pemadangan Warga Negera Migran Kerja Tindak Kekerasan dan Tindak Diskriminasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipadangan ke Desa Kelurahan Asal Kecamatan Kabupaten Kota	(18 Kecamatan (230 Desa Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Warga Negera Migran Kerja Tindak Kekerasan yang dipadangan dan Tindak Diskriminasi di Daerah Perumahan untuk dipadangan ke Desa Kelurahan Asal Kecamatan Kabupaten Kota	2 Orang	11,000,000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi sosial dalam penyandang disabilitas (%)	60,96	175,000,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi sosial dalam penyandang disabilitas (%)	60,96	175,000,000	
	Rehabilitasi Sosial Dalam Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Perempuan di Luar Panti Sosial				170,000,000	Rehabilitasi Sosial Dalam Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Perempuan di Luar Panti Sosial				170,000,000	
	Penyediaan Peralatan	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Peralatan Kesehatan Peralatan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kecamatan Kabupaten Kota	25 Orang	35,000,000	Penyediaan Peralatan	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Peralatan Kesehatan Peralatan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kecamatan Kabupaten Kota	25 Orang	35,000,000	
	Penyediaan Alat Bantu	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peralatan sesuai kebutuhan Kecamatan Kabupaten Kota	15 Orang	35,000,000	Penyediaan Alat Bantu	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peralatan sesuai kebutuhan Kecamatan Kabupaten Kota	15 Orang	35,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Pembic- ran
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Sumbangan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Sumbangan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kecamatan Kabupaten Kota	25 Orang	22,000,000	Pembinaan Sumbangan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Sumbangan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kecamatan Kabupaten Kota	25 Orang	22,000,000	
	Pembinaan Sumbangan Sosial kepada Keluarga Penderita Disabilitas Trafik, Anak Trafik, Lanjut Usia Trafik, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Sumbangan Sosial kepada Keluarga Penderita Disabilitas Trafik, Anak Trafik, Lanjut Usia Trafik, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	25 Orang	33,000,000	Pembinaan Sumbangan Sosial kepada Keluarga Penderita Disabilitas Trafik, Anak Trafik, Lanjut Usia Trafik, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Sumbangan Sosial kepada Keluarga Penderita Disabilitas Trafik, Anak Trafik, Lanjut Usia Trafik, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	25 Orang	33,000,000	
	Pembinaan Akademi Layanan Pendidikan dan Kerjasama Dasar	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akademi Layanan Pendidikan dan Kerjasama Dasar Kecamatan Kabupaten Kota	5 Orang	20,000,000	Pembinaan Akademi Layanan Pendidikan dan Kerjasama Dasar	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akademi Layanan Pendidikan dan Kerjasama Dasar Kecamatan Kabupaten Kota	5 Orang	20,000,000	
	Pembinaan Layanan Bantuan	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Bantuan Kecamatan Kabupaten Kota	5 Orang	10,000,000	Pembinaan Layanan Bantuan	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Bantuan Kecamatan Kabupaten Kota	5 Orang	10,000,000	
	Rehabilitasi Sosial Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Selain Keracuan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			-	105,000,000	Rehabilitasi Sosial Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Selain Keracuan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			-	105,000,000	

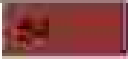
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Penjelasan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Lapangan Kaderisasi	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Kaderisasi Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	Pembinaan Lapangan Kaderisasi	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Kaderisasi Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	
	Pengadaan Perumahan	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan Kebutuhan Perumahan Bawah Gering Sederhana Gaji Minimal Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	Pengadaan Perumahan	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan : Kebutuhan Perumahan Sosial dengan Standar Gaji Minimal Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	
	Pengadaan Alat Bantu	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Pengerak Kebutuhan Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	Pengadaan Alat Bantu	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan : Alat Bantu Pengerak Kebutuhan Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	
	Pembinaan Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Psik. Mental, Spiritual dan Sosial Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	25,000,000	Pembinaan Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Psik. Mental, Spiritual dan Sosial Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	25,000,000	
	Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta dalam Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	25,000,000	Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta dalam Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kecamatan Kabupaten Kota	10 Orang	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Pembic ran
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar: Kewenangan Kabupaten Kota	2 Orang	11,000,000	Pembinaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar: Kewenangan Kabupaten Kota	2 Orang	11,000,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase anak terlantar yang diasuh(%)	10,33	450,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase anak terlantar yang diasuh(%)	10,33	450,000,000	
			Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-	250,000,000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-	250,000,000	
	Pengembangan Anak-Anak Terlantar	(Tersebut di 18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten Kota	4 Orang	41,000,000	Pengembangan Anak-Anak Terlantar	(Tersebut di 18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten Kota	4 Orang	41,000,000	
	Regulasi Anak-Anak Terlantar	(Sesuai Layanan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Bantuan Kewenangan Kabupaten Kota	4 Orang	70,000,000	Regulasi Anak-Anak Terlantar	(Sesuai Layanan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Bantuan Kewenangan Kabupaten Kota	4 Orang	70,000,000	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	(Sesuai Layanan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpenuhi Kewenangan Kabupaten Kota	4 Orang	63,000,000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	(Sesuai Layanan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpenuhi Kewenangan Kabupaten Kota	4 Orang	63,000,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota			-	150,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota			-	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Pembic- ran
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota yang Didata	129.904 Orang	71.900.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota yang Didata	129.904 Orang	71.900.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Penggunaan Fakir Miskin Kabupaten Kota	12.823 Keluarga	71.900.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	(18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Penggunaan Fakir Miskin Kabupaten Kota	12.823 Keluarga	71.900.000	
	Facilitas Bantuan Sosial Kecelakaan Kabupaten Kota	(Terdapat di 18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga Penerima Mantuan (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kecelakaan Kabupaten Kota	129.904 Keluarga	100.000.000	Facilitas Bantuan Sosial Kecelakaan Kabupaten Kota	(Terdapat di 18 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga Penerima Mantuan (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kecelakaan Kabupaten Kecelakaan Kabupaten Kota	129.904 Keluarga	100.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	150.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	150.000.000	
			Persentase dana kelurahan siap bencana (%)	12		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase dana kelurahan siap bencana (%)	12		
	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota			-	100.000.000	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota			-	100.000.000	
	Pengelolaan Makam	(Gesaik Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaman di 10 Hari dalam Masa Tanggung Jawab (Penggunaan) Kemungkinan Kabupaten Kota	10 Orang	30.000.000	Pengelolaan Makam	(Gesaik Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaman di 10 Hari dalam Masa Tanggung Jawab (Penggunaan) Kemungkinan Kabupaten Kota	10 Orang	30.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan dan Pembic- ran
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sarung	(Gorontalo Kejadian, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Kelengkapan Lainnya yang Terancam pada Masa Tanggap Darurat (Pencegahan) dan Pasca Bencana Kewaspadaan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	Penyediaan Sarung	(Gorontalo Kejadian, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Kelengkapan Lainnya yang Terancam pada Masa Tanggap Darurat (Pencegahan) dan Pasca Bencana Kewaspadaan Kabupaten Kota	10 Orang	30,000,000	
	Penyediaan Tangkap Pemangsaan Pemangsaan	(Gorontalo Kejadian, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Tangkap Pemangsaan Kewaspadaan Kabupaten Kota	1 Unit	30,000,000	Penyediaan Tangkap Pemangsaan Pemangsaan	(Gorontalo Kejadian, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Tangkap Pemangsaan Kewaspadaan Kabupaten Kota	1 Unit	30,000,000	
	Pemangsaan Khusus bagi Kelompok Rentan	(Terancam di 12 Kecamatan, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemangsaan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewaspadaan Kabupaten Kota	25 Orang	21,000,000	Pemangsaan Khusus bagi Kelompok Rentan	(Terancam di 12 Kecamatan, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemangsaan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewaspadaan Kabupaten Kota	25 Orang	21,000,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	(Gorontalo Kejadian, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Klien Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewaspadaan Kabupaten Kota	24 Orang	25,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	(Gorontalo Kejadian, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Klien Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewaspadaan Kabupaten Kota	24 Orang	25,000,000	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota				30,000,000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota				30,000,000	
	Keprotokolan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3 Kampung Siaga Bencana, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Kampung yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewaspadaan Kabupaten Kota	3 Kampung	30,000,000	Keprotokolan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3 Kampung Siaga Bencana, K.A.B. FLORES TIMUR)	Jumlah Kampung yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewaspadaan Kabupaten Kota	3 Kampung	30,000,000	

No	Rencana Awal RKPD					Rasi Analisis Kesehatan					Catatan dan Penilaian
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tercatat Siga Borneo	(18 Kecamatan, EAB, FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tercatat Siga Borneo Kecamatan Kabupaten Kota	41 Orang	40.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tercatat Siga Borneo	(18 Kecamatan, EAB, FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tercatat Siga Borneo Kecamatan Kabupaten Kota	41 Orang	40.000.000	



2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Kegiatan

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan kegiatan musrenbang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholder* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Flores Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2024. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel TC.32

Tabel TC.33
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Program Kegiatan	Level	Indikator Kinerja	Sasaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM KEMAMPUAN SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tuli/Tunarungtu, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Berwujudan Alat Bantu	(Dasar Balok Kain, Lantai/Kayu)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkat Keselamatan Keluarga Keluarga Kota	1 Unit Alat bantu duduk 1 Unit Kursi roda 1 Unit Tongkat	Pemberian rumah susun program dengan menggalang korpri dan Swastaka dengan foto keluarga masyarakat penerima dan dan dibayar yang sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya
	Berwujudan Alat Bantu	(Dasar Kain/kayu, Lantai/Kayu)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkat Keselamatan Keluarga Keluarga Kota	1 Unit Alat bantu duduk 1 Unit Kursi roda 1 Unit Tongkat	
	Berwujudan Alat Bantu	(Dasar Kain/kayu, Lantai/Kayu)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkat Keselamatan Keluarga Keluarga Kota	3 Unit Alat bantu duduk 3 Unit Kursi roda 3 Unit Tongkat	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
 - c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
 - d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 untuk mendukung visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kualitas hidup PMKS yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja yang tertuang dalam RPD
VIII : Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Ketepatan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Validasi Data Kemiskinan
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya		Menurunnya persentase penduduk miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat	Sistem Model Usaha Mempertajam upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial

Dari tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatas, maka dapat ditentukan sasaran strategi, indikator sasaran serta target capaian Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, sebagaimana termuat pada tabel 3.2 :

Sasaran Strategi, Indikator Sasaran Dan Target Capaian Renja Dinas Sosial
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Persentase PMKS	9,38%
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	9,85%

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, ditetapkan program prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan periode tahun 2023-2026. Program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah :

- a) Program Rehabilitasi Sosial
- b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Rencana Kerja Tahun 2024 untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang termuat dalam Renja ini sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021, dapat dilihat di Bab IV pada Tabel TC.33.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berisi program dan kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mendukung visi, tujuan, dan sasaran RPID Kabupaten Flores Timur Tahun Tahun 2005 - 2025. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berisi 7 (tujuh) program prioritas yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pemberdayaan Sosial; (3) Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan ; (4) Program Rehabilitasi Sosial; (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (6) Program Penanganan Bencana; dan (7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2023, dan prakiraan maju tahun 2024 pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel TC.33 berikut ini:

Tabel TC.33
Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Program Mpa. Tahun
2025 Kabupaten Flores Timur
Divisi Sosial

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKTISAS TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG / SUB BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KERUTURAN DANA / PACE INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRORITAS DAERAH		TARGET	KERUTURAN DANA / PACE INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					Urutan Pemeliharaan Wajah Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				4.351.339,539					4.351.472,041
					DINAS SOSIAL				4.351.339,539					4.351.472,041
a	m	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				1.314.348,368					1.314.472,041
						Tingkat Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)		100	1.654.440,000				100	1.314.472,041
						Persentase Keterlaksanaan Sistem dan Prakteknya Aparatur (%)		100	127.580,000				100	170,000,000
						Persentase ASN yang memiliki kualifikasi kompetensi (%)		40,56	18.000,000				40,56	40,000,000
						Persentase Peningkatan dan Penguatan Capaian Kinerja dan Kelompok (%)		100	45.880,000				100	70,000,000
a	m	01	2.01		Peningkatan, Penguatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			45.880,000					70,000,000
a	m	01	2.01	01	Pengantar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	KPD/Kependa, Lembaran Kas. Lembaran	1	12.000,000	Dana Transfer Daerah-Dana Desa / Dana Desa	Pemangung Prioritas		1	12.000,000
a	m	01	2.01	02	Kependataan dan Pengantar Dokumen RKA- RKPD	Jumlah Dokumen RKA- RKPD dan Laporan Hasil Kependataan Pengantar Dokumen RKA- RKPD (dok)	KPD/Kependa, RKA, Lembaran Kas. Lembaran	1	12.000,000	Dana Transfer Daerah-Dana Desa	Pemangung Prioritas		1	12.000,000

KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB-KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJUTAHUN 2024	
MUNICIPIAL	KABUPATEN	KOTA	KAWILAYAT	SUB KAWILAYAT			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)
										Saluran Daerah				
a	01	01	1.01	01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Layanan Capaian Kinerja dan Sistem Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Harat Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Capaian Kinerja dan Sistem Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	KEPEMERINTAHAN Layanan: KIR, Layanan:	1	15.000.000	Dana Pengelolaan Daerah dan Saluran Daerah	Peningkatan Pelayanan		1	15.000.000
a	01	01	1.01	02	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (Laporan)	KEPEMERINTAHAN Layanan: KIR, Layanan:	4	15.000.000	Dana Pengelolaan Daerah dan Saluran Daerah	Peningkatan Pelayanan		4	15.000.000
a	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Penyelenggaraan Daerah	Terdapatnya dokumen Laporan Kerjasama Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Kerjasama (Lak)			1.327.642.043					1.327.642.043
a	01	01	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan ASPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Penghasilan APBD (orang/bulan)	KEPEMERINTAHAN Layanan: KIR, Layanan:	2014	2.243.642.043	Dana Pengelolaan Daerah dan Saluran Daerah	Peningkatan Pelayanan		2014	2.243.642.043
a	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengelolaan Fasilitas Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembiayaan dan Pengelolaan Fasilitas Keuangan SKPD (Lak)	KEPEMERINTAHAN Layanan: KIR, Layanan:	1	41.000.000	Dana Pengelolaan Daerah dan Saluran Daerah	Peningkatan Pelayanan		1	41.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKTIKAAAN MAJU TAHUN 2024	
MUNISI-PALE	KABUPATEN	KORPORASI	KEMENTERIAN	KODU KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)
a	01	01	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (laporan)	OPD/CARANTERA Leresidulu, Kar. Leresidulu	1	10.000.000	Dana Transfer Umum Daerah	Pemangjang Prioritas		1	10.000.000
a	01	01	1.01		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD (dik)			7.500.000					10.000.000
a	01	01	1.03	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	OPD/CARANTERA Leresidulu, Kar. Leresidulu	1	3.300.000	Dana Transfer Umum Daerah	Pemangjang Prioritas		1	10.000.000
a	01	01	1.03	06	Pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan pemenuhan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	OPD/CARANTERA Leresidulu, Kar. Leresidulu	4	4.000.000	Dana Transfer Umum Daerah	Pemangjang Prioritas		4	10.000.000
a	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pagaran Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)			14.000.000					40.000.000
a	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dik)	OPD/CARANTERA Leresidulu, Kar. Leresidulu	1	1.000.000	Dana Transfer Umum Daerah	Pemangjang Prioritas		1	10.000.000
a	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dik)	OPD/CARANTERA Leresidulu, Kar. Leresidulu	1	3.000.000	Dana Transfer Umum Daerah	Pemangjang Prioritas		1	10.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
KABUPATEN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	LOKASI			TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET		KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	
														1
a	cc	cc	2.06	00	Pembelian Bahan Baku dan Peralatan Perikanan -ulungan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perikanan -ulungan yang Distribusikan (dokumen)	GOVIL/RENTAN Lokasi: Kar. Loranak	1	900.000	Dana Transfer Daerah Kab. Flores Timor	Pemang Prioritas		1	1.000.000
a	cc	cc	2.06	00	Pelatihan Karyawan Toko	Jumlah Laporan Pelatihan Karyawan Toko (laporan)	GOVIL/RENTAN Lokasi: Kar. Loranak	12	15.000.000	Dana Transfer Daerah Kab. Flores Timor	Pemang Prioritas		12	45.000.000
a	cc	cc	2.06	00	Pembelajaran Kapak Koordinasi dan Kerjasama KPD	Jumlah Laporan Pembelajaran Kapak Koordinasi dan Kerjasama KPD (laporan)	Kabupaten dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timor, Kab. FLORES TIMOR	15	30.000.000	Dana Transfer Daerah Kab. Flores Timor	Pemang Prioritas		15	60.000.000
a	cc	cc	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemasangan Urutan Pemertintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemasangan Urutan Pemertintah Daerah (unit)			15.000.000					1
a	cc	cc	2.07	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Distribusikan (unit)	GOVIL/RENTAN Lokasi: Kar. Loranak	1	12.000.000	Dana Transfer Daerah Kab. Flores Timor	Pemang Prioritas		1	1
a	cc	cc	2.08		Pembelian Jasa Pemasangan Urutan Pemertintahan Daerah	Pembelian pemasangan jasa pemasangan Urutan Pemertintah Daerah (%)			115.000.000					57.880.000
a	cc	cc	2.08	00	Pembelian Jasa Jasa Lainnya	Jumlah Laporan Pembelian Jasa Jasa Lainnya (laporan)	GOVIL/RENTAN Lokasi: Kar. Loranak	12	1.000.000	Dana Transfer Daerah Kab. Flores Timor	Pemang Prioritas		12	1.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PEKERJAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DATA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp,-)
a	01	01	1.01	02	Penyediaan Jasa Komerensial, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komerensial, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan (laporan)	OPD/LAPURTA, Laporan, KIR, Laporan	12	43.000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Pemangung Pemerintah		12	43.000,000
a	02	01	1.02	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan (laporan)	OPD/LAPURTA, Laporan, KIR, Laporan	11	144.000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Pemangung Pemerintah		11	144.000,000
a	03	01	1.03		Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Pemangung, Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Pemangung/urusan Pemerintahan Urusan, Pemerintah Daerah (%)			105.000,000					105.000,000
a	04	01	1.04	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Park dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diperawatan Park dan Perawatan (laporan)	OPD/LAPURTA, Laporan, KIR, Laporan	11	30.000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Pemangung Pemerintah		11	30.000,000
a	05	01	1.05	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (laporan)	OPD/LAPURTA, Laporan, KIR, Laporan	1	10.000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Pemangung Pemerintah		1	10.000,000
a	06	01	1.06	14	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarang dan Daerah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarang dan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (laporan)	OPD/LAPURTA, Laporan, KIR, Laporan	13	5.000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Pemangung Pemerintah		13	10.000,000
1	04				BIDANG URUSAN SOSIAL				1.194.031,200					1.194.031,200
1	04	02			PROGRAM FALSAFAHA TARIK				112.100,000					112.100,000



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
WILAYAH	KABUPATEN	KOTA	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)
					BOSKAL									
						Persebaran penduduk yang EAT (%)		75					100	
						Persebaran penduduk sumber keagamaan sosial yang Ekat dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat keagamaan sosial (%)		50	110.000.000				40	110.000.000
1	06	02	1.03		Pengembangan Potensi Sumber Keagamaan Sosial Daerah Kabupaten Kota				110.000.000					430.000.000
1	06	02	1.03	03	Pengembangan Komunitas Potensi Tenaga Keagamaan Sosial Ekonomi Kecamatan Kabupaten Kota	Jumlah Tenaga Keagamaan Sosial Ekonomi Kecamatan Kabupaten Kota yang Memiliki Kapasitas Kecamatan Kabupaten Kota (orang)	Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR	10	60.000.000	Dana Transfer Daerah Dana Alokasi Daerah	Pemangung Pemerintah	10	50.000.000	
1	06	02	1.03	04	Pengembangan Komunitas Potensi Sumber Keagamaan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Keagamaan Sosial yang Memiliki Kapasitas Kecamatan Kabupaten Kota	Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR	1	30.000.000	Dana Transfer Daerah Dana Alokasi Daerah	Pemangung Pemerintah	1	20.000.000	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persebaran kasus yang dilaporkan (%)		100	100.000.000				100	70.000.000
1	06	03	1.01		Pemuliharaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Debatasi di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipulihkan ke Daerah Kabupaten Asal				100.000.000					70.000.000
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemuliharaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Debatasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulihkan ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulihkan dari Tindak Debatasi di Daerah Pemerintah untuk dipulihkan ke Daerah Kabupaten Asal Kecamatan Kabupaten Kota (orang)	10 Kecamatan (200 Data/ Kecamatan); KAB. FLORES TIMUR	30	100.000.000	Dana Transfer Daerah Dana Alokasi Daerah	Pemangung Pemerintah	30	70.000.000	



KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJUTAHUN 2024	
WILAYAH	KABUPATEN	KOTA	KAWILAYAH	LOKASI			TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET		KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	
														1
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perencanaan rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas (A)		68.84	238.000.000				67.84	338.000.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pemukiman di Luar Panti Sosial				238.000.000					175.000.000
1	06	04	2.01	01	Peningkatan Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Sosial dengan Bantuan dan Monev Ketersediaan Lapangan Kerja (orang)	(17 Kecamatan, KAB FLORES TIMUR)	136	136.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		136	58.000.000
1	06	04	2.01	02	Peningkatan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkatan Kualitas Pendidikan Ketersediaan Lapangan Kerja (orang)	(19 Kecamatan, KAB FLORES TIMUR)	25	75.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		25	50.000.000
1	06	04	2.01	03	Peningkatan Pendidikan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Pendidikan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Ketersediaan Lapangan Kerja (orang)	(Kab Flores Timur dan Kab Flores Timur, KAB FLORES TIMUR, Desa Cengkering, Wana Uluanda, Desa Teyong 02 03 / Bantuan Modal Usaha kelompok disabilitas, Adonara Timur)	15	40.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		15	31.000.000
1	06	04	2.01	04	Peningkatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Ketersediaan Lapangan Kerja (orang)	(19 Kecamatan, KAB FLORES TIMUR)	40	40.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		40	35.000.000
1	06	04	2.01	11	Peningkatan Layanan Kesehatan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Kesehatan Ketersediaan Lapangan Kerja (orang)	(Kab Flores Timur dan Kab Flores Timur, KAB FLORES TIMUR)	1	31.000.000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		1	30.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
MUNICIPIAL	WILAYAH	KABUPATEN	KOTA	KAWILAYAT			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kecapahan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA & Lupa Panti Sosial			100.000.000					170.000.000	
1	06	04	1.02	01	Pembinaan Layanan Rehabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Kecelakaan Keluarga Kita (orang)	17 Kecamatan, KAB FLORES TIMUR	20	20.000.000	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Daerah	Sumber Daya Manusia		20	20.000.000
1	06	04	1.02	03	Pembinaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman Rehabilitasi Pemukiman sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kecelakaan Keluarga Kita (orang)	17 Kecamatan, KAB FLORES TIMUR	10	30.000.000	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Daerah	Sumber Daya Manusia		10	30.000.000
1	06	04	1.02	07	Pembinaan Bimbingan Psik, Moral, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Moral, Spiritual dan Sosial Kecelakaan Keluarga Kita (orang)	17 Kecamatan, KAB FLORES TIMUR	100	20.000.000	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Daerah	Sumber Daya Manusia		100	20.000.000
1	06	04	1.02	08	Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kecapahan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kecapahan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Kecelakaan Keluarga Kita (orang)	17 Kecamatan, KAB FLORES TIMUR	20	20.000.000	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Daerah	Sumber Daya Manusia		20	20.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)		10.33	35.000.000				10.4	100.000.000
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)		100	175.000.000				100	450.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
MUNICIPIAL	KABUPATEN	KOTA	KAWILAH	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Pembelajaran Anak-anak Terlantar				35.000.000					290.000.000
1	06	05	2.01	01	Pengembangan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Diterapkan Kelembagaan Kabupaten/Kota (orang)	Tembora di 19 Kecamatan, Kab. FLORES TIMUR	4	5.000.000	Dana Transfer Daerah Kabupaten	Sumber Daya Manusia		4	100.000.000
1	06	05	2.01	02	Suplai Anak-anak Terlantar	Jumlah anak-anak Terlantar yang Mendapat Layanan Kelembagaan Kabupaten/Kota (orang)	Kab. Flores Timur dan lain-lain Kabupaten Flores Timur, Kab. FLORES TIMUR	4	30.000.000	Dana Transfer Daerah Kabupaten	Sumber Daya Manusia		4	100.000.000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota				175.000.000					450.000.000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	Kab. Flores Timur, Kab. FLORES TIMUR	34048	30.000.000	Dana Transfer Daerah Kabupaten	Sumber Daya Manusia		34048	170.000.000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantaran Fakir Miskin Kabupaten/Kota	19 Kecamatan, Kab. FLORES TIMUR	13113	40.000.000	Dana Transfer Daerah Kabupaten	Sumber Daya Manusia		13113	100.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tembora di 19 Kecamatan, Kab. FLORES TIMUR	25	30.000.000	Dana Transfer Daerah Kabupaten	Sumber Daya Manusia		25	200.000.000
1	06	05			PROGRAM PENANGKALAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial kemasyarakatan (%)		100	145.000.000				100	270.000.000
						Persentase daya tangkalasi tangpa bencana (%)		12	151.951.379				12	90.000.000
1	06	05	2.03		Kelembagaan sosial masyarakat				145.000.000					270.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN / SUB-KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
MUNICIPAL	WILAYAH KABUPATEN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)
					Bantuan Alam dan Sosial Kabupaten Kota									
1	06	06	2.01	01	Pengelolaan Makam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan di Hal-Hal dalam Masa Tanggung Jawab (Pengawasan) Kawasan Kabupaten Kota (orang)	Kab. Flores Timur (Sama Kendur), Kab. Flores Timur	100	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkat Prioritas		100	100.000.000
1	06	06	2.02	02	Pengelolaan Sertifikasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kelengkapan Layanan yang Terselesa pada Masa Tanggung Jawab (Pengawasan) dan Sertifikasi Kawasan Kabupaten Kota (orang)	Kab. Flores Timur (Sama Kendur), Kab. Flores Timur	90	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkat Prioritas		90	10.000.000
1	06	06	2.03	03	Pengelolaan Tempat Pemangkuatan Pengumpul	Jumlah Tempat Pengumpulan Kawasan Kabupaten Kota (orang)	Kab. Flores Timur (Sama Kendur), Kab. Flores Timur	1	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkat Prioritas		1	40.000.000
1	06	06	2.04	04	Pengelolaan Kemas bagi Kelompok Kemas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kemas bagi Kelompok Kemas Kawasan Kabupaten Kota (orang)	Transfer di 15 Kecamatan Kab. Flores Timur	15	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkat Prioritas		15	30.000.000
1	06	06	2.05	05	Pelayanan dan Sertifikasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan dan Sertifikasi Kawasan Kabupaten Kota (orang)	Kab. Flores Timur (Sama Kendur), Kab. Flores Timur	15	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkat Prioritas		15	40.000.000
1	06	06	2.06		Pengelolaan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Ketersediaan Bantuan Kabupaten Kota				10.000.000					10.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB-KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKTIKAS MAJU TAHUN 2024	
MUNICIPAL	KABUPATEN FLORES	KORPORASI	KEMENTERIAN	RUMAH KAWAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAQU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	06	06	2.01	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Soga- Bersama	Jumlah Kegiatan yang Melibatkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Soga Bersama Kewenangan Kabupaten Kota Sanggau	Kantor Dinas Sosial, Bidang Rehabilitasi, Logistik, dan Logistik dan Logistik, KAB. FLORES TIMUR - Desa Selang (Pemukiman), Ulu Selang	1	82.000.000	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Daerah	Peningkatan Prioritas		1	82.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tani Soga Bersama	Jumlah Kegiatan yang Melibatkan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tani Soga Bersama Kewenangan Kabupaten Kota Sanggau	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	45	45.000.000	Dana Transfer Daerah, Dana Alokasi Daerah	Peningkatan Prioritas		45	45.000.000



BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timurnya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Besar Harapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2024 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untuk bisa menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam Rencana Kerja (Renja) ini menyadari belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan sangat diharapkan masukan dalam bentuk usul saran untuk menyempurnakan Renja ini.

Demikianlah Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Luarantuka, Juli 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670420 199703 1 008



COMPANY
LOGO

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI &
INFORMATIKA
KAB. FLORES TIMUR

TAHUN 2024

25

Mbps
kecepatan 128

50

Mbps
kecepatan 256

100

Mbps
kecepatan 512



LOKER TELEPON



EMAIL



SITUS WEB

www.diskominfo.florestimurkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disusun secara sinergi dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

Larantuka, September 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Flores Timur,

Heronima Laniawura Herry, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197265111992011001

DAFTAR ISI

	Hml
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAE BELAKANG	1-2
1.2 LANDASAN HUKUM	2-5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.3 BIK – BIK / PENTING PENTING LENDIRAKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT / DAERAH	8
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	9
2.5 PENELITIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	10
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBUAKAN NASIONAL	13
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	13
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	14
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB IV : PENUTUP	16



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.**

**BAB I
KERTENTUAN UMUM**

Paragraf 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD.
- (3) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

td

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

td

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor **21 Tahun 2022**.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan pengjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

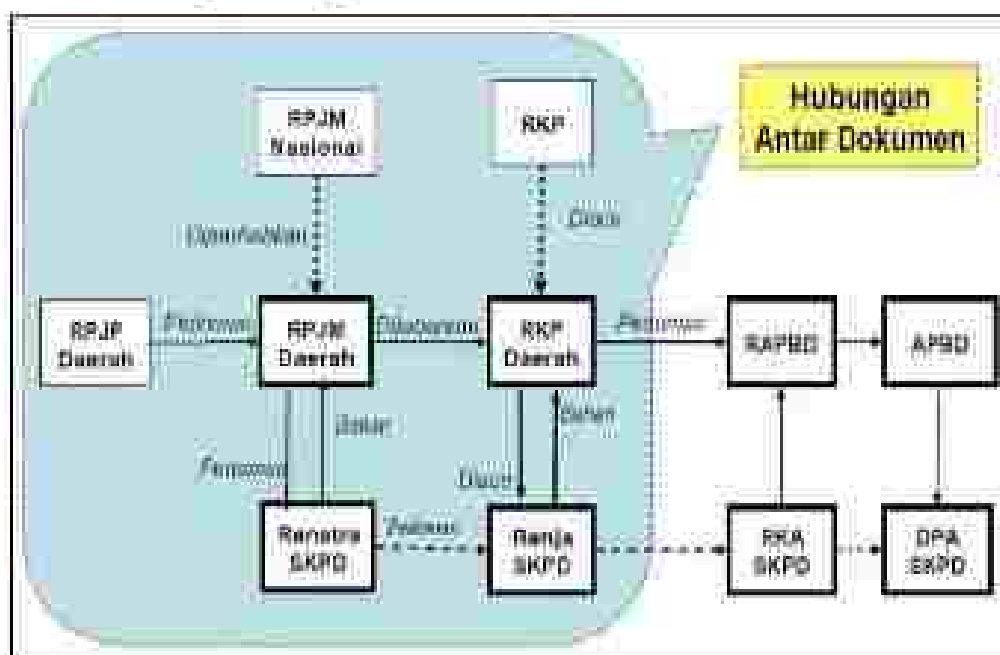
Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 36 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan, orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal, dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2022.
3. Penyusunan Rancangan, dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Nomor..... Tentang Pedoman

Penyempurnaan Rancangan Renja PD

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir, dilakukan dengan menyempatkan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
6. Penetapan, dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
 23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
 24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penyjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Lalu sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana PD dan Pencapaian Rencana PD s/d 2023

Legenda: Target Kinerja Capaian
Rencana Rencana PD 2017-2022
Garis Teras 2.100 tidak mencapai RKP
Garis 2022 dalam dokumen RKP
2024, halaman 3-57

Kode Pelaksanaan	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) sampai akhir periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Real Program (Rencana PD) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Rencana PD Tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana PD s/d tahun berjalan	
					Tar get Rencana PD	Realisasi Rencana PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8.100	9	10-5-7 +9	10-10/4 *100
2	1	01						100	100	100.00
			Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkotaan	100			100	100	100.00
				Persentase Ketercukupan sarana dan prasarana untuk Persentase ASN yang memiliki Kompetensi Kejuruan	100			100	100	100.00
				Persentase Pemantauan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100			100	100	100.00
2	1	01	2.0					100	100	100.00
			Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemantauan dan Evaluasi	100			100	100	100.00

2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD (Dok)	3					3	3	25.00
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja tidak realisasi kinerja SIPD	5					5	5	
2	1	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja PD (Dok)	18					4	4	
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Keuangan	100					100	100	100.00
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	4					4	4	
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPD (Bulan 1)	2					2	2	100.00
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SIPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SIPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SIPD (1000)	48					0	0	25.00
2	1	0	2.0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki asuransi kesehatan (%)	100					100	100	
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Buku/lembar)	36					2	2	5.00
2	1	0	2.0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100					100	100	100.00
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komplek Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Jumlah Faktat Penyediaan Komplek Instalasi	4					1	1	25.00

[illegible]

[illegible]

4.1	1	0	2.01	1	Penerbitan Kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil penerbitan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik (Dokumen)	4					4	4	
4.2	1	0	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (dokumen)	344					344	344	18.87
4.3	1	0	2.01	3	Pengelolaan Konten dan Pemantauan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan pemantauan media komunikasi publik (Dokumen)	320					320	320	25.00
4.4	1	0	2.01	4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	487					487	487	24.35
4.5	1	0	2.01	5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	2.352					2.352	2.352	15.43
4.6	1	0	2.01	6	Layanan Rukungan Media	Jumlah layanan dukungan media (Layanan)	22					22	22	
4.7	1	0	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Jumlah sumber daya komunitas publik yang mendapat kapasitasnya (Orang)	30					30	30	25.00
4.8	1	0	2.01	12	Pengembangan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas Komunitas	Jumlah Dokumen Kegiatan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendemonstrasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kelengkapan Informasi Masyarakat (dokumen)	44					44	44	25.00
4.9	1	0	2.01	13	Penerbitan/Pengaturan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Fasilitas)	4					4	4	25.00
5	1	0	0		Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Info Publik Pemerintah	100					72.22	72.22	72.22

2	1	0	20		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Daerah						70	70	
2	01	01	201	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Desa)	200					50	50	2500
2	01	01	201	02	Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendaftaran dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	80					20	20	2500
2	01	01	201	03	Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Sist)	100					30	30	
2	01	01	201	04	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Liput)								5000/01
2	01	01	201	05	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah (Gig, Diakses, Dint)	1					1	1	10000
2	01	01	201	06	Pengembangan Sistem Kamunika Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Saluran Kasel / Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	4					1	1	
2	01	01	201	07	Koordinasi dan Integrasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Integrasi Sistem Keamanan Informasi	10					4	4	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	OPD Standar Nasional	RTR	Target Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025	
1	Capaian pengomsting di dsh penberwede n kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		√	10-12	1	1	1	0	1	1	1	Kegiatan hanya dilaksanakan di 1 tahun 2022
2	Presentase Lembaga yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Pemda		√	11	11	11	11	11	0	11	11	Kegiatan hanya dilaksanakan di 1 tahun 2022
3	Cakupan layanan Telekomunikasi		√	0	71.12	71.12	71.12	0	0	71.12	71.12	Kegiatan hanya dilaksanakan di 1 tahun 2022

Berdasarkan Capaian Pelayanan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terdapat 3 (tiga) Indikator Pelayanan Kinerja yang Mendukung Pencapaian Kinerja, pada Presentase lembaga yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Pemda Mencapai 32 % atau sekitar 16 OPD dari target 18 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi menjadi kunci keberhasilan Pembangunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya juga, menghadapi banyak Permasalahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar di antaranya :

1. Penguasaan jaringa Internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public belum optimal

Berdasarkan permasalahan yang datang dari luar dan dari dalam yang menghambat keberhasilan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika , maka isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Empat tahun ke depan, adalah :

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Website oleh Organisasi Perangkat Daerah
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan Akses Informasi dan Teknologi
3. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur 2024 adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.4 Sebagai berikut:

Taken To
 Review including Transcription Error (RFE) value: 1000
 Rejected Reason: None

[illegible]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencana bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April Tahun 2023 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi publik Tahun 2023.

Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Flores Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Program Aplikasi Informatika				
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)	70	
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	19 Kec	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	19 Kec	Diterima dengan catatan ajukan permohonan ke Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Flores Timur
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19 Kec	Diterima dengan catatan ajukan permohonan ke Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Flores Timur

			Kabupaten/Kota (Dokumen)		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19 Kec	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	19 Kec	Diterima dengan syarat: ajukan proposal ke Bupati Flores Timur untuk selanjutnya di proses ke Kementerian KOMINFO RI

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Yang selaras dengan Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional yakni Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
			2021	2024
Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Meningkatkan Prosentase Jaringan Intra Pemerintah	Meningkatnya Prosentase Jaringan Intra Pemerintah	68,03	84,42
Meningkatnya Kualitasnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik	18	40

3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah Tahun 2024 tersebut, maka dirumuskan program/dan kegiatan Prioritas Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Flores Timur sebagai berikut.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maja Tahun 2024
Kabupaten Flores Timur

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE	Jenis/ Bidang Kegiatan/ Program/ Kegiatan Sub-Kegiatan	Kategori Kegiatan/ Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024 (Rp)				Status Kegiatan	Rencana Baru Estimasi Tahun 2024 (Rp)	
			Jumlah	Tipe Dokumen Karya	Estimasi Biaya/ Page Jumlah	Sumber Berkas		Jumlah Berkas	Estimasi Biaya/ Page Jumlah
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	PROGRAM PRIORITAS								
1.6.11	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kebudayaan/ Seni	Jumlah Layanan/Mode Kampanye dan Informasi Publik (TV)		40	85.441,00			40	85.441,40
1.6.11.1.1	Penerbitan Laporan Tahunan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik							
1.6.11.1.1.0	Penyusunan Laporan Tahunan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil penyusunan laporan yang diunggah informasi dan komunikasi publik (Dokumen)	Jumlah	1	1.000,00	(PES)		1	1.000,00
1.6.11.1.1.1	Pengelolaan Laporan dan Penerbitan Publikasi Pemerintah Publik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Dokumen Regulasi Publik (Dokumen)	8 Lembar	24	24.000,00	(PES)		24	24.000,00
1.6.11.1.1.2	Pengelolaan Publikasi Pemerintah Publik	Jumlah dokumen hasil pengumpulan laporan dan penyusunan media komunikasi publik (Dokumen)	8 Lembar	24	24.000,00	(PES)		24	24.000,00
1.6.11.1.1.3	Penerbitan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Publikasi Penerbitan Pengumuman Publik Pemerintah Publik (Dokumen)	8 Lembar	24	24.000,00	(PES)		24	24.000,00
1.6.11.1.1.4	Jumlah Dokumen Publikasi Informasi Publik (Dokumen)	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Informasi Publik (Dokumen)	8 Lembar	24	24.000,00	(PES)		24	24.000,00
1.6.11.1.1.5	Pengelolaan Publikasi dan Layanan Dokumen Pemerintah Publik	Jumlah dokumen layanan publik (Dokumen)	8 Lembar	24	24.000,00	(PES)		24	24.000,00
1.6.11.1.1.6	Pengelolaan Layanan Pemerintah Publik dan Layanan Informasi Publik	Jumlah dokumen dan komunikasi publik yang diunggah keplatform (Dokumen)	Jumlah	24	24.000,00	(PES)		24	24.000,00
1.6.11.1.1.7	Pengelolaan Pengumuman Pemerintah Publik dan Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kebudayaan/ Seni	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengumuman Pemerintah Publik dan Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kebudayaan/ Seni Pengumuman dan Layanan Informasi Informasi Pemerintah (Dokumen)	8 Lembar	8	24.000,00	(PES)		8	24.000,00
1.6.11.1.1.8	Program Aplikasi Informatika	Jumlah Lembar dan Penerbitan Penerbitan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (Kegiatan Publikasi Publik)	Jumlah	1	4.000,00	(PES)		1	4.000,00
1.6.11	Pengelolaan Rencana Daerah yang Telah Disiapkan dan Penerbitan Publikasi dan Sub Bidang dan Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Pengumuman Layanan dan Pemerintah		84,42%	227.484,781			84%	228.803,20

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah. Maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Unsubstantiated Floer: Timmer

[illegible]

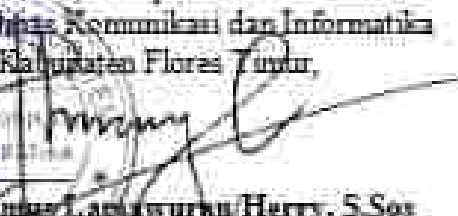
BAB V. PENUTUP

RENJA Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2024 melalui pelaksanaan program, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2023 sebagai berikut:

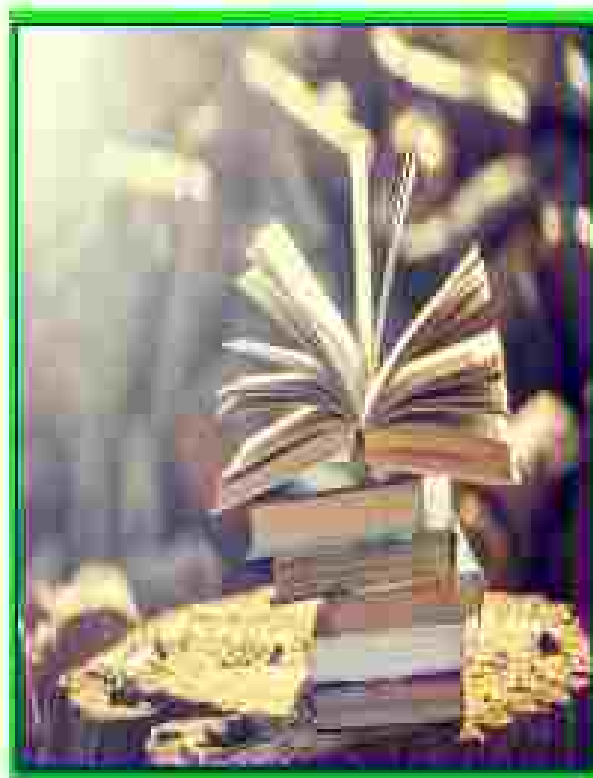
1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENJA Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah terumut dalam RENJA;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang terumut dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKA) Tahun 2024.
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat terumut dalam RENJA Tahun 2024 ini.

Demikian RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

Larantuka, September 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Flores Timur,

Heronimus Lantawuran Herry, S.Sos
Pemerintah Kabupaten Flores Timur
NIP. 197205111992011001



Rencana Kerja (Rerja) Perangkat Daerah 2024



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jln. T.M.P Lapaktana No. 5 Telp. (0383) 21151,

Fax (0383) 21453 Kode Pos 86218

e-mail : diskopukm.flores@yahoo.com

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 telah selesai disusun dan sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra OPD tahun 2023-2026 dan *Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026* Kabupaten Flores Timur pada aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Terasusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) ini berkat partisipasi semua pihak khususnya semua elemen perangkat daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) ini. Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) akan menjadi rujukan dalam penyusunan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di tahun 2024. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen Renja OPD ini tidak dapat terwujud.

Larantuka, Juli 2023
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Flores Timur,

Achmad R. Duli, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja	19
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat	34
BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah	47
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB. V. PENUTUP	67



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 11 Tahun 2023**



RKPD

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
2023**



ANJAY

**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PRANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menyebutkan

salah satu melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Prangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perishahan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Kerja Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0946).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0082).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Momen Peringkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0146), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Momen Peringkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161).
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13).
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Peringkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15).
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pemerintah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pemerintah perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pembangunan Daerah;
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RKS PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut RK PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Program adalah pelaksanaan kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
11. Indikator Kinerja adalah nilai yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau rencana dan tujuan dalam bentuk besaran output, hasil (outcome), dan dampak (impact);
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
KERANGKA KERJA PROGRAM KAT DAERAH

Paragraf 2

- (1) Kepala PD merupakan dokumen perencanaan Perangko Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perjabatan dari Rencana PD yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kebutuhan sumber yang disertai *budgetary* Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Realisasi Kerja Perangko Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Fungsi Perangko Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangko Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

- (1) Kepala PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKD PD.

BAB III
ORGANISASI DAN EVALUASI

Paragraf 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kepala PD Tahun 2024 untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati selaku Kepala DPRD.
- (3) Kepala DPRD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi hasil PD Tahun 2024.

**DAD 15
KEHENTUAN PENSETUJUAN**

Paragraf 3

Pemerintah Kabupaten ini berhak berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditandatangani di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENAJMANT ULUPATI FLORES TIMUR,

tdh

(KARYA ALEXANDER MBI)

Ditandatangani di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

**PEKAMAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

tdh

PELUSU PEDJO MARIAN

KEPUTA HAKMAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 10

Sesuai dengan perintah bupati
KEPUTA HAKMAH KEPUTA



KEPUTA HAKMAH KEPUTA
PEMINTA TIK
SEPTEMBER 2023/12 1 007



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substantif*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan

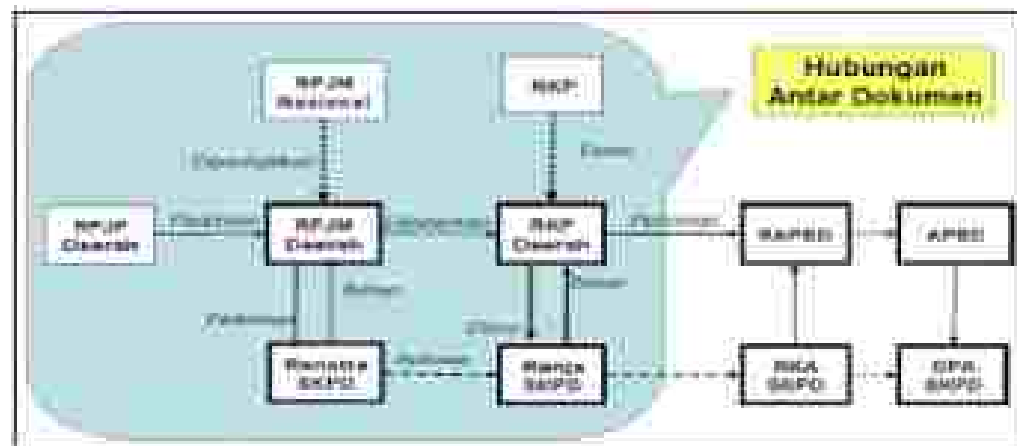


ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan, orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah. 2. Penyusunan rancangan awal, dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2022. 3. Penyusunan Rancangan, dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah 5. Perumusan Rancangan Akhir, dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023; 6. Penetapan, dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;



25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENIA Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENIA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENIA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENIA.

BAB II HASIL EVALUASI RENIA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.



BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja 2022 merupakan tahun terakhir Renstra 2017 – 2022, untuk Program Penunjang Urusan Kabupaten masih dengan indikator yang sama sedangkan pada Program Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2022 capaian 36,3%. Dan untuk tahun 2023 - 2026 dengan target indikator 47,83% dan target 7 program, sebagaimana di gambar pada table 2.1 Sebagai berikut :



Tabel 1.1
Efektivitas Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

Kode	Unit Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (sasaran)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023			Target program / kegiatan (Rencana SKPD 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Rencana SKPD sampai dengan Tahun 2023		Catatan
					Target rata rata perangkat daerah tahun 2023	Realisasi rata rata perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8-9-10	11	12-13-14-15	16-17-18-19	20
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
1	01	01	Program Penguatng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Kam)	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100	120	100	343	100%		
				Kualitas sarana pelayanan sopratat (%)	100	88	100	342	100%		
				Jumlah Dokumen Pengembangan dan Urutan Pencapaian Indikator Lincirya OPD (dokumen)	7		7		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

1	01	2.81	38	Kontribusi dan Partisipasi Kapitalis-Capital Kecil dan Kebijakan (Kebijakan) KKP	Jumlah Dana dan Capital Kebijakan (Kebijakan)	12	12	12	12	100%				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	01	2.82	40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji)	12	12	14	14	100%				
1	01	2.83	42	Pelaksanaan pemerintahan dan Pelayanan / Visibilitas Keuangan KPP	Terselenggaranya pemerintahan Kebijakan (Kebijakan)	12	12	12	12	100%				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	01	2.84	44	Penyediaan Anggaran belanja untuk dan pemerintah daerah	Terselenggaranya Anggaran belanja untuk dan pemerintah daerah	4	4	7	24	1200%				
1	01	2.85	46	Penyediaan Anggaran (dan Pelayanan) untuk dan pemerintah daerah	Terselenggaranya Anggaran belanja untuk dan pemerintah daerah (Gaji)	1	1	1	1					
1	01	2.86	48	Penyediaan Belanja Logistik / Kebijakan	Terselenggaranya belanja logistik Kebijakan (Kebijakan)	12	24	4	16	40%				
					Terselenggaranya belanja logistik Kebijakan (Kebijakan)	12	36	31	31	100%				
1	01	2.87	49	Penyediaan barang untuk dan pemerintah	Terselenggaranya barang untuk dan pemerintah (Kebijakan)	48.138	80.138	40.888	82.548	219%				
1	01	2.88	50	Penyediaan bahan bakar dan pelayanan pemerintah / pemerintah	Terselenggaranya bahan bakar dan pelayanan pemerintah / pemerintah	4	4	2	8	40%				
1	01	2.89	52	Pelaksanaan Kegiatan Kerja	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemerintahan	160	160	200	200	1000%				
1	01	2.90	54	Penyediaan barang (dan Kebijakan) dan Kebijakan KPP	Terselenggaranya barang Kebijakan dan Kebijakan Kebijakan dan Kebijakan (Kebijakan)	12	12	38	184	333%				
1	01	2.91		Penyediaan barang Mula Sosial dan Keuangan Umum Perangkat Daerah										
1	01	2.92	56	Penyediaan Mula	Terselenggaranya Mula (Mula)	1	1	1	1	100%				
1	01	2.93		Penyediaan barang pemerintah										

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

1	40	2.44	40	apenas pemerintahan daerah Pelayanan Jasa Sewa Milyunan	Adaptasi Pelayanan (14) Tanggulangi jasa sewa milyunan (1440)	12	12	100	40	75%			
1	40	2.44	42	Pelayanan jasa transportasi Sewar Sewa Air dan Listrik	Pelayanan jasa transportasi Sewar Sewa Air dan Listrik (Sewa)	12	12	12	12	100%			
1	40	2.44	44	Jasa pelayanan umum umum	Jumlah jasa tenaga pelayanan dan umum (pelayanan : 4 orang)	20	20	14	120	110%			
1	40	2.44		Pembinaan Bidang Milik Daerah Kabupaten Uluwu Pemerintah Daerah									
1	40	2.44	42	Pelayanan jasa pembinaan Bidang pembinaan, yaitu di bidang pembinaan dan aparatnya/petugas	Jumlah pembinaan dan aparatnya yang dibina pemerintah	10	10	6	30	42%			
					Tanggulangi pelayanan jasa pembinaan dan pembinaan kegiatan (dinas : aparatnya)		0	1	1	20%			
1	40	2.44	44	Pelayanan : (adaptasi) pelayanan umum dan (pelayanan umum)	Jumlah pelayanan umum yang dipelayanan (adapasi)	1	1	1	4	40%			
1	40	2.44	48	Pelayanan : (adaptasi) umum dan pembinaan (pelayanan kegiatan / pembinaan umum)	Tanggulangi pelayanan kegiatan (adapasi)	14	14	12	12	420%			
2	17	40		Program Pengawasan dan pembinaan kegiatan	Pengawasan dan pembinaan kegiatan : (kegiatan umum kegiatan umum)	20	100	1	20	60%			
3	17	40	2.44	Pembinaan dan pengawasan kegiatan : (kegiatan umum kegiatan umum) dan (kegiatan umum) yang (kegiatan kegiatan umum) dalam daerah kabupaten, kota									
3	17	40	2.44.4	Pengawasan kegiatan kegiatan : (kegiatan umum kegiatan umum) dan (kegiatan umum) yang (kegiatan kegiatan umum) dalam daerah kabupaten, kota	Jumlah kegiatan / KMD yang dipelayanan (KMD)	1	1	10	20	110%			
					Jumlah kegiatan yang dipelayanan (kegiatan : kegiatan)	1	1	10	1	10%			
4	17	44		Program Pembinaan						400%			

				jumlah KSP/UKP kegiatan		36	111	6	36				
2	17	44	2.61	Bantuan keuangan kegiatan simpan pinjam, unit simpan pinjam kegiatan yang wilayah kepengurusannya dalam 2 kota) daerah kabupaten/kota		1		1	36	100%			
2	17	44	2.61.01	Pelaksanaan pembelian kegiatan KSP/UKP kegiatan keuntungan kabupaten / kota	Jumlah kelompok sasaran (kegiatan)	10	36	40	170	121%			
2	17	44	2.61.02	Penghargaan kegiatan KSP/UKP kegiatan keuntungan kabupaten/kota	Jumlah kelompok sasaran (kegiatan)	10	10	10	40	100%			
3	17	45		Program Pendidikan dan latihan perikoprasian	Jumlah Koperasi Aktif (Kegiatan)	36	111	6	36	100%			
2	17	45	2.62	Pendidikan dan latihan perikoprasian bagi koperasi yang wilayah kepengurusan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi Aktif (Kegiatan)	1							
2	17	45	2.62.01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perikoprasian serta kapasitas dan kompetensi GCM koperasi	Sosialisasi, Pendidikan, workshop, pelatihan, studi banding	17	17	1	31	135%			
3	17	46		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kegiatan		36	111	6	36	100%			
2	17	46	2.63	Pelaksanaan kegiatan yang kepengurusannya dalam tingkat kabupaten/kota		1		40	143	107%			
2	17	46	2.63.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Widi usaha, Akad Bazar, Akad Pembinaan, Penguatan Kolaborasi, Penguatan Manajemen, Demokrasi, dan Rostekumriaas Usaha Kegiatan Keuntungan Sosial	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (kegiatan)	41	11	40	143	107%			

No	K	K	K	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah UKM/LEM (UMKM)	644	571	248	11	1,1%			
					Pengembangan Usaha Baru - usaha baru (usaha baru)								
1	17	81	2,8%	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, kemudahan perijinan, pengusutan informasi bisnis dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah UKM/LEM (UMKM)	1	1	662	1.648	40%			
2	17	82	2,81%	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Dokumen Data Base UKM/UMKM (Dokumen)	10	10	1	4	40%			
3	17	83	2,81,82	Pemberdayaan melalui pembinaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Baru (UMKM)	200	100	411	1.111	30%			
4	17	84	2,81,84	Pemberdayaan Kelangkaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM yang aktif (UMKM)	40	40	10	120	40%			
5	17	88		Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM/LEM (UMKM)	644	1.411	100	11	1,1%			
					Pengembangan Usaha Baru - usaha baru (usaha baru)	1.648	1.648	500	4	1%			
					UMKM dan Kapasitas yang dipantau secara Rutin (UMKM)	104	1	60	1	1%			
6	17	89	2,8%	Pengembangan usaha mikro dengan bantuan perantara atau mitra usaha kecil		11		3	1	0%			
7	17	90	2,81,81	Fasilitas usaha mikro seperti usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah Fasilitas Pengembangan UKM (UKM)	11		3	21	30%			
					Jumlah usaha baru/ usaha baru (UMKM)	111	10	21	21	6%			

KODE	Urusan/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (subcomca)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Rencana PD) a/d Tahun 2024 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan kegiatan kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatannya kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan (Rencana SKPD 2024)	Perkiraan realisasi kegiatan target program/kegiatan Rencana SKPD sampai dengan Tahun 2024		Catatan
					Target rata-rata perangkat daerah tahun 2024	Realisasi rata-rata perangkat daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan a/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9-7-8)	11=(10/9)	12
	Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Pelayanan (%)	100								
		Persentase Keberhasilan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100								
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi keprofesional (%)	100								
		Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100								

			Kinerja dan Realisasi (%)									
Penguasaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (da)	8					2			8%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD (da)	8					2			8%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12					4	3		30%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10					4			8%	
Adaptasi Keuangan Perangkat Daerah												
	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14					14	8		50%	
	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10					12	1		8%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (da)										

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan keuangan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	8				4	I	(15)	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemangku Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD (SKPD)								
		Penyusunan Perencanaan Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Substansi dan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	9						5	
		Sekolah dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Substansi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10						5	
		Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	11				4	II	(15)	
		Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Substansi Laporan dan Laporan yang Mengikuti Pemantauan dan Pelaporan (Laporan)								
		Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (Dok)	12						5	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Sistem)					1	II		

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (GOK)	48				17	1	2%
		Pendidikan dan Seleksi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Seleksi (orang)	17				2	0	0%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)					4	0	
		Salahsatu Timor Perumahan Kencana	Perumahan Kencana Kencana dan Kencana Kencana (K)							
		Servis dan Pemeliharaan Mesin Listrik Perumahan Kencana	Jumlah Pelat Kencana Mesin Listrik Perumahan Kencana yang Ditindakan (pelat)	12				3	0	0%
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelat Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Ditindakan (Pelat)	8				7	1	10%
		Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelat Peralatan Rumah tangga yang ditindakan (Pelat)	3						0%
		Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelat Bahan Logistik Kantor yang Ditindakan (Pelat)	4				1	0	20%
		Pemeliharaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Pelat Barang Cetak dan Pengadaan yang Ditindakan (Pelat)	6				2	1	10%
		Pemeliharaan Bahan Bakar dan Perawatan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Perawatan Perundang-Undangan yang Ditindakan (dok)	9				7	0	0%
		Facilities Koneksi Tami	Jumlah Laporan Fasilitas					12	4	30%

2024

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

2024

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 10-week training program on the heart rate (HR) and energy expenditure (EE) of sedentary, middle-aged men. The subjects were divided into two groups: a control group and a training group. The training group performed a 10-week program of aerobic exercise, while the control group remained sedentary. HR and EE were measured at rest and during exercise at the beginning and end of the 10-week period. The results showed that the training group had a significant decrease in HR and an increase in EE compared to the control group. The findings suggest that a 10-week training program can improve cardiovascular fitness and increase energy expenditure in sedentary, middle-aged men.

2024

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Sifat Kegiatan/Program dalam Renc. Kabupaten / Kota				Indikator Kinerja (Kualitatif)											
			Pemerkahan Kaderan Kelarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Kelarga Melalui Khidmatan Bortegoran dan Pengembangan Ekonomi Lalima	Jumlah Kelarga yang mengikuti pemerkahan kaderan kelarga dalam peningkatan taraf hidup kelarga melalui khidmatan bortegoran dan pengembangan ekonomi lalima (Kelarga)	100					10	100	100	100%		
				Kelahiran pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan usaha Mikro(M)											
			Pembinaan Usaha Mikro yang ditunjukan melalui Pemetaan, Kordinasi, Kemudahan Pemetaan, Penguasaan Kelayakan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kordinasi	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan (unit usaha)											
			Pembinaan Petani dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, pengujian kelayakan, pemetaan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha kegiatan kordinasi keagutan, Unit Usaha	1000					200	10	100	100%		
			Pembinaan Kelayakan Petani dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang selalu menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro/Unit Usaha	1000					200	10	100	100%		
				Persentase UNKN yang bergerak dibidang											

2024

Deadline: 15 June 2024



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Presentase Koperasi Aktif		√	20 %	65	88	90	14,13	-	90	88	Mengukur Peningkatan Koperasi yang berkualitas yaitu : Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di kali seratus
2	Presentase UKM non BPR/LKM aktif		√	4,37	4,37	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Kegiatan
3	Presentase BPR/LKM aktif		√	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Kegiatan
4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil		√	20 %	2,06	2,22	2,38	1,90	-	2,06	2,22	Mengukur peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha yaitu : Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah Usaha Mikro keseluruhan di kali seratus



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Isu – isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya manusia pengelola dan Kesadaran Koperasi
3. Belum Optimalnya penguatan Kapasitas kelembagaan, bantuan permodalan,

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 24

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PADU INDIKATIF	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PADU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				4.214.216.368	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.364.341.964	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Lerontuku	Target Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100	1.421.610.264	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Lerontuku	Target Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	100	1.421.610.264	
		Lerontuku	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%			Lerontuku	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%		
		Lerontuku	Persentase ASN yang memiliki kesediaan Kompetensi (%)	100%			Lerontuku	Persentase ASN yang memiliki kesediaan Kompetensi (%)	100%		

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

		Lembaruka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%			Lembaruka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lembaruka	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	12 dokumen	182.500.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	12 dokumen	88.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lembaruka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 dokumen	36.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lembaruka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	4 dokumen	16.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2 dokumen	16.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Lembaruka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	4 laporan	37.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	3 laporan	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lembaruka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(laporan)	2 laporan	15.500.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(laporan)	4 laporan	10.000.000	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lerentuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3 dokumen	1.192.370.267		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lerentuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)		1.899.530.064	
	Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Lerentuka	Jumlah penyediaan Gai dan Tunjangan ASN (org/bulan)	28 org/12 bulan	2.112.375.267		Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Lerentuka	Jumlah penyediaan Gai dan Tunjangan ASN (org/bulan)	28 orang / 12 bulan	1.920.820.064	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lerentuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1 dokumen	49.986.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lerentuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12 dokumen	66.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lerentuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 dokumen	30.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lerentuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	10.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lerentuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	8 dokumen	27.500.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lerentuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	8 dokumen	15.000.000	
	Penyusunan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lerentuka	Jumlah Rencana Keabsahan Barang Milik Daerah pada SKPD				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lerentuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	1	2.000.000	

	Mila Daerah							DKPD			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Muka Daerah pada SKPD	Lanjutan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Berang Muka Daerah pada SKPD				Penelaahan Berang Muka Daerah pada SKPD	Lanjutan	Jumlah Laporan Penelaahan Berang Muka Daerah pada SKPD	18	5.000.000
	Penelaahan Berang Muka Daerah pada SKPD	Lanjutan	Jumlah Laporan Penelaahan Berang Muka Daerah pada SKPD	5 laporan	17.500.000		Penelaahan Berang Muka Daerah pada SKPD	Lanjutan	Jumlah Laporan Penelaahan Berang Muka Daerah pada SKPD	2 laporan	5.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lanjutan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (jarang)	13 dokumen n/1 orang	145.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lanjutan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jarang)	13 dokumen 3 orang	25.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lanjutan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	10.000.000		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lanjutan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	3.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lanjutan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	16.500.000		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lanjutan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	3.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lanjutan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan)	2 orang	75.500.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lanjutan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan)	2 orang	15.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	18.800.000		Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana Kantor (M)	100,0	379.574.870		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana Kantor (M)	100,0	139.300.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	1.300.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	1.300.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perekengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah perekengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)(ATK dan Kerekengkapan Komputer)	1 paket perekengkapan, infokus	66.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perekengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah perekengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)(ATK dan Kerekengkapan Komputer)	3 paket	16.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (BBLM)	1 Paket	60.277.775		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (BBLM)	1 paket	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2 paket (foto kopi dan cetak)	45.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2 paket	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1.150.000		Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1.800.000	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

	Facilities Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Riset dan Tamu)	12 laporan	38.300.000		Facilities Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Riset dan Tamu)	12 laporan	16.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	156.345.897		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	56.300.000	
	penelausahan ars-dinamis pada SKPD	Larantuka	Jumlah dokumen penelausahan ars-dinamis pada SKPD	12 laporan	8.000.000		penelausahan ars- dinamis pada SKPD	Larantuka	Jumlah dokumen penelausahan ars- dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	472.530.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	145.530.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (daftar jasa kelola surat, lembar disposisi dan buku agenda surat)	12 laporan	1.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (daftar kartu kelola surat, lembar disposisi dan buku agenda surat)	12 laporan	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan (laporan)	12 laporan	92.400.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan (laporan)	12 laporan	90.000.000	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Dipekikan	12 laporan	30.000.000		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Dipekikan	12 laporan	54.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipekikan (laporan)	12 laporan (30 orang)	343.480.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipekikan (laporan)	12 laporan	343.480.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah)	100	104.500.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah)	100	47.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekikan dan Biaya yang Dipekikan	10 unit	47.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekikan dan Biaya yang Dipekikan	10 unit	36.000.000	
	Pemeliharaan Asat Tek Berwujud	Larantuka	Jumlah Asat Tek Berwujud yang Dipekikan	1	4.600.000		Pemeliharaan Asat Tek Berwujud	Larantuka	Jumlah Asat Tek Berwujud yang Dipekikan			
	Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipekikan				Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipekikan	4 unit	2.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain-lain	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipekikan				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain-lain	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipekikan	7 unit	6.000.000	
	Pemeliharaan Raksas Gedung	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang Dipekikan	1 unit	26.000.000		Pemeliharaan Raksas Gedung	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang Dipekikan	1 unit	6.000.000	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

	Kantor dan Bangunan Lainnya		(unit)			Kantor dan Bangunan Lainnya		(unit)		
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirusak	24	27.500.000					
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirusak (unit)	5	-	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirusak (unit)	2 unit	5.000.000
	PROGRAM URUSAN KOPERASI				792.341.431	PROGRAM URUSAN KOPERASI				542.321.980
	Program Pengawasan dan Pemertasaan Koperasi		jumlah test pengawasan dan pemertasaan koperasi	50,00%	38.000.000	Program Pengawasan dan Pemertasaan Koperasi		jumlah test pengawasan dan pemertasaan koperasi	42,00%	38.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi	Larantuka	jumlah koperasi yang taat pada peraturan	92	36.500.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi	Larantuka	jumlah koperasi yang taat pada peraturan	92 unit	36.500.000
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Wilayah Keagglomerasi Daerah Kabupaten Kota	Larantuka	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kabupaten / kota	92	36.500.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Wilayah Keagglomerasi Daerah Kabupaten Kota	Larantuka	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kabupaten / kota	92 unit usaha	36.500.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Larabuka	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	% Koperasi	50.000.000	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Larabuka	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	% Koperasi	10.000.000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Larabuka		10 Koperasi	50.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Larabuka		10 Koperasi	10.000.000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kecamatan Kabupaten / Kota	Larabuka	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10	50.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kecamatan Kabupaten / Kota	Larabuka	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10 Koperasi	10.000.000	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Larabuka	Persentase SDM yang memahami Pongtahuan Perkoperasian	80	78.000.000	Program Pendidikan dan Latihan Perikoperasian	Larabuka	Persentase SDM yang memahami Pongtahuan Perkoperasian	120	830.000.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Larabuka	jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	80	78.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Larabuka	jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	120	830.000.000	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

Revisi/penyempurnaan dan Peningkatan Peningkatan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Lampiran	Jumlah SDM yang menerima peningkatan kapasitas	3 dokumen	70.000.000	Peningkatan Revisi/penyempurnaan dan Peningkatan Peningkatan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Lampiran	Jumlah SDM yang menerima peningkatan kapasitas	125	830.850.000
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Lampiran	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)	40%	45.000.000	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Lampiran A	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)	40%	25.000.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Lampiran		15 keluarga	45.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Lampiran	10 keluarga (kelompok kecil)	25.000.000	
Peningkatan Keaderan Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Lampiran	Jumlah Keluarga yang mengikuti pembinaan keaderan keluarga dalam peningkatan tarif hidup keluarga melalui kehidupan berkegiatan dan pengembangan ekonomi lainnya	15 keluarga	45.000.000	Peningkatan Keaderan Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Lampiran	Jumlah Keluarga yang mengikuti pembinaan keaderan keluarga dalam peningkatan tarif hidup keluarga melalui kehidupan berkegiatan dan pengembangan ekonomi lainnya	10 keluarga (kelompok kecil)	25.000.000
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Lampiran	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro (%)	21,53	108.500.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Lampiran B	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro (%)	21,53	65.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

Pembudayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				100-300.000	Pembudayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			340	88.000.000	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Semula tambah, memiliki akses pasar, akses pendanaan, penguatan kelembagaan, pendataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten kota	240	50.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Semula tambah, memiliki akses pasar, akses pendanaan, penguatan kelembagaan, pendataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten kota			
Pembudayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Teruji Umatnya Pemompaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	240	50.000.000	Pembudayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Teruji Umatnya Pemompaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Larantuka	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdele	-	-	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Larantuka	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdele	240	88.000.000	
Program Pengembangan UMKM	Larantuka	Prosentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang bertadai Hukun	1,04	488.341.431	Program Pengembangan UMKM	Larantuka	Prosentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang bertadai Hukun	1,04	179.171.998	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Lemfuta	15 unit usaha	480.341.431	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Lemfuta	15 unit usaha	480.341.431
	Facilities Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Desa Lemfuta-Kelurahan Tanjung Sungs, Ke. Polon, Sinu, Ke. Bala, Desa Mikanterak, Ke. Anagapo, Desa Bilean, Kelurahan Bura	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produk dan pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Pelatihan Manajemen, Standartisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha : UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pemasaran, Penguatan, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			



1.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat

Usulan usulan masyarakat pada Program dan Kegiatan yang didanai oleh APBD II melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan terlebih dahulu diklarifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dan Apabila sesuai dengan program kegiatan yang ada maka akan diakomodir sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah dan selanjutnya terhadap usulan kegiatan yang tidak dapat diakomodir pada APBD II akan didorong melalui dana APBD I dan APBN.



Tabel T-C.32.

Unsur Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten : Nusa Tenggara Timur/ Kabupaten Flores Timur
Parangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Program / Kegiatan	Unit	Indikator Kinerja	Besar / Volume	Catatan
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi		
	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	(Desa Lewobela (Dusun 1 s/d 4), Lewobela, Kec. Adonara Tengah)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi	20 Orang	
		(Lewopao, Kec. Adonara Tengah)		7 Orang	
		(RT 005 RW 003 Dusun 2 Labanaen - Desa Jolang, Boleng, Kec. Ile Boleng)		100 Orang	
		(Kelidatang, Laka, Kolaka, Kec. Tanjung Bunga)		6 Orang	
		(Peningkatan Kapasitas pengurus Bundes, Desa Lewobunga, Lewobunga, Kec. Tanjung Bunga)		3 Orang	
		(Desa Lemanu, Lemanu, Kec. Solor Selatan)		10 Orang	
		(Desa Kawuta, Kawuta, Kec. Solor Timur)		50 Orang	

		(Perlu ada peningkatan SDM untuk kelompok UMKM di Dusun 1, 2 dan 3 dan untuk Kelompok PKK serta adakah pasar murah untuk masyarakat Dusun 1, 2 dan 3, Mananga, Kec. Solor Timur)		200 Orang	
		(Desa Ongalereng, Ongalereng, Kec. Solor Barat)		7 Orang	
		(Desa Kelurahan se Kecamatan Solor Barat, Solor Barat)		15 Orang	
		(Peningkatan pengetahuan tentang koperasi kepada pengurus agar mampu mengelola dan mengembangkan koperasi (bundes) DI DESA LEWOINGU, KECAMATAN TITEHENA, Lewoingu, Kec. Titehena)		10 Orang	
		(DESA TENAWAHANG KECAMATAN TITEHENA, Tenawahang, Kec. Titehena)		100 Orang	
		(KOPERASI TOBI TA'A DESA LEWOTOBI, Bitawan, Kec. Ile Bura)		3 Orang	
		(DESA HURUNG, Hurung, Kec. Adonara Barat)		5 Orang	
		(Desa Dawataa KSP Dawataa Mandiri, Dawataa, Kec. Adonara Timur)		7 Orang	
		(Desa Lelenbala, Lelen Bala, Kec. Adonara Timur)		15 Orang	
2	Program Pengembangan UMKM		Presentase UMKM yang Bergerak di Bidang Pertanian Memiliki Badan Hukum		

Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orisntansi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	(Desa Tikatukan, Tikatukan, Kec. Adonara)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha	
	(Desa Pandai, Pandai, Kec. Wotan Uhumando)		10 Unit Usaha	
	(Desa Pandai, Pandai, Kec. Wotan Uhumando)		10 Unit Usaha	
	(Desa Pandai, Pandai, Kec. Wotan Uhumando)		10 Unit Usaha	
	(DESA BAYA, Baya, Kec. Adonara Tengah)		40 Unit Usaha	
	(Desa Hoko-Horowura, Hoko Horowura, Kec. Adonara Tengah)		2 Unit Usaha	
	(Desa Kenotan, Kenotan, Kec. Adonara Tengah)		30 Unit Usaha	
	(Desa Kenotan, Kenotan, Kec. Adonara Tengah)		1 Unit Usaha	
	(Nubalema, Nubalema, Kec. Adonara Tengah)		15 Unit Usaha	
	(Desa Gayak, Nelereren, Kec. Ile Boleng)		2 Unit Usaha	
	(DUSUN 1,2,3 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Boleng, Kec. Ile Boleng)		30 Unit Usaha	
	(Desa Nelelamawangi, Nelelamawangi, Kec. Ile Boleng)		13 Unit Usaha	
	(Desa Dokeng, Dokeng, Kec. Ile Boleng)		4 Unit Usaha	

	(Desa Bayuntaa, Bayuntaa, Kec. Ile Bolesig)	3 Unit Usaha	
	(Desa Balaweling, Balaweling, Kec. Wihama)	6 Unit Usaha	
	(3 unit Mesin Pencetak Batako/Pavin Blok, Watololong, Kec. Wihama)	3 Unit Usaha	
	(Kolidatang, Laka, Kolaka, Kec. Tanjung Bunga)	8 Unit Usaha	
	(Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, Wailolong, Kec. Ile Mandiri)	18 Unit Usaha	
	(Desa Riangkemie, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur, Riangkemie, Kec. Ile Mandiri)	1 Unit Usaha	
	(DESA LEWOHALA - KECAMATAN ILE MANDIRI, Lewohala, Kec. Ile Mandiri)	5 Unit Usaha	
	(Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec. Larantuka)	1 Unit Usaha	
	(RT 01, RT 03, KELURAHAN BALELA, Balela, Kec. Larantuka)	6 Unit Usaha	
	(RT 01 s.d RT 017, Waihalan, Kec. Larantuka)	10 Unit Usaha	
	(RT.001-010, Sarotari Timur, Kec. Larantuka)	10 Unit Usaha	
	(Dusun I, II, III Desa Lamawalang, Lamawalang, Kec. Larantuka)	30 Unit Usaha	
	(PEDAGANG KECIL DI DESA KALIKE AIMATAN, Kelike Aimatan, Kec. Solor Selatan)	14 Unit Usaha	
	(Desa Kalike, Kelike, Kec. Solor Selatan)	1 Unit Usaha	
	(Desa Lewomuda, Lewomuda, Kec. Démon Pagong)	3 Unit Usaha	

	(Desa Lewokluok, Kec. Daimon Pagong, Kab. Flores Timur, Lewokluok, Kec. Daimon Pagong)	3 Unit Usaha	
	(Desa Kawuta, Kawuta, Kec. Solor Timur)	7 Unit Usaha	
	(Balm Pertemuan Desa, Mananga, Kec. Solor Timur)	30 Unit Usaha	
	(Desa watobuku Kecamatan solor Timur, Watobuku, Kec. Solor Timur)	15 Unit Usaha	
	(Desa Watohari, Watohari, Kec. Solor Timur)	1 Unit Usaha	
	(Dusun I, Dusun II dan Dusun III, Liwo, Kec. Solor Timur)	25 Unit Usaha	
	(Desa Lamawalang, Lamawalang, Kec. Solor Barat)	20 Unit Usaha	
	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor Barat)	8 Unit Usaha	
	(DESALEWOLAGA, Lewolaga, Kec. Titehena)	1 Unit Usaha	
	(Desa Tuakapa, Tuakapa, Kec. Titehena)	40 Unit Usaha	
	(DESA TENAWAHANG KECAMATAN TITEHENA, Tenawahang, Kec. Titehena)	10 Unit Usaha	
	(6 Dusun di Desa Boru, Boru, Kec. Wulanggitang)	6 Unit Usaha	
	(Desa Puhulera, Puhulera, Kec. Wulanggitang)	5 Unit Usaha	
	(Desa watobaya, Watobaya, Kec. Adonara Barat)	4 Unit Usaha	
	(RT 01 sd RT 012, Teromh, Kec. Adonara Timur)	150 Unit Usaha	

	(Dusun I, II dan III Desa Bilal, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Bilal, Kec. Adonara Timur)	8 Unit Usaha	
	(Untuk Kelompok Usaha kecil di Desa Waiburak Yg terhimpun dari Dusun I, II, III dan Dusun IV, Waiburak, Kec. Adonara Timur)	35 Unit Usaha	
	(Desa Karinglamalouk, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur, Karinglamalouk, Kec. Adonara Timur)	10 Unit Usaha	
	(Desa Tapobali, Tapobali, Kec. Adonara Timur)	10 Unit Usaha	
	(Desa Kwaelaga Lamawato, Kwaelaga Lamawato, Kec. Adonara Timur)	20 Unit Usaha	



BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBLIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Nasional Tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi - (1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, (4) Penguatan Daya Saing Usaha, (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Pelaksanaan Pemilu.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2024
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	1,43	2,35

Angka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni: *"Penguatan Ekonomi Dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar"*, dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan. Untuk mencapai sasaran dan masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel berikut,

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1. Perekonomian Masyarakat	1.3 Meningkatkan Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	2,35
	1.5 Meningkatkan peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	0,50



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui Program Prioritas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur yang mendukung target Kinerja dan Pencapaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (Dua) Program Prioritas, 2 (Dua) Kegiatan, dan 2 (Dua) Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut :



Tabel 3.3

Komponen Kegiatan Program dan Kegiatan Perangkar Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maja Tahun 2024
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

KODE	URUTAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	Prakiraan Maja Rencana tahun 2024	
			TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	PROGRAM URUSAN KOPERASI			135.171.900					167.416.883
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro / UMKM	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, Kecil dan usaha Mikro (%)	100%	65.000.000		DANU		100%	72.600.000
2	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemutuan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelompok dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			10.000.000		DANU			72.600.000



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

2024

2	1	0	2	0	001	Programas Nama Dana Usaha Mikro	Jumlah Duit Usaha Mikro Pendana	240 unit maka	75.000.000	19 Kasimatu			240 unit maka	75.000.000
2	1	0				Program Pengembangan UMKM	Programas UMKM yang berperak ditidung pertanian yang berhadan Rakus	167	170.171.900		DANU		2100	794.814.883
1	1	0	2	0		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			170.171.900		DANU		20 unit maka	794.814.883



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

2024

2	1	6	2	1	000	Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Akreditasi Unit UMKM yang Mendukung Fasilitas Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Manajemen	7001111000	Kec. Tichane (Desa Lerebelang, Tikepa, Wahmanai, Kec. Walamurang (Desa Hara, Herau, Kec. Lamifama (Desa Bangkorek), Kec. Adonara Tengah (Desa Wawa, Lini), Kec. Laramada (Kec. Santari, Lilek, Sawani, Tengah, Hada, Petan, Hara, Kec. Wihams (Desa Hemfama))	DAU		20 unit unit	194.000.000
---	---	---	---	---	-----	--	--	-----------	------------	---	-----	--	-----------------	-------------



BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah. Maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel 4.1
Rencana Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Pelaksanaan Maja Tahun 2025
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

KODE						URUSAN / BIDANG URUTAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	Pelaksanaan Maja Rencana tahun 2025	
								TARGET	KEHUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	KEHUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1	8	2	0	0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			1.284.341.964					4.503.111.705
2	1	0				Program Pemangaj Dinas Pematutuhan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat Pelaksana Admistrasi per kabupaten (%)	100	1.431.830.064				100	3.324.400.833
							Persentase Ketrampilan Baruan dan Pematutuhan Aparatur (%)	100%					100	134.268.651
							Persentase ASN yang Memiliki Ketrampilan Kompetensi (%)	100					100	2.119.621.771
							Persentase Pematutuhan dan Pelaksanaan capaian Kinerja dan Kerangka (%)	100					100	25.800.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

2	1	0	2		01	Pertemuan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000					334.388.051
2	1	0	2	0	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mek)	2 dokumen	12.000.000	Lampirkan	DAK		2 dokumen	47.000.000
2	1	0	2	0	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Gak)	2 dokumen	15.000.000	Lampirkan	DAK		2 dokumen	20.000.000
2	1	0	2	0	0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1 laporan	10.000.000	Lampirkan	DAK		1 laporan	27.000.000
2	1	0	2	0	0004	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 laporan	10.000.000	Lampirkan	DAK		4 laporan	50.000.000
2	1	0	2	0	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.999.510.064					2.119.421.772
2	1	0	2	0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	29 orang / 14 bulan	1.999.510.064	Lampirkan	DAK		29 orang / 14 bulan	2.119.421.772
2	1	0	2	0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	10.000.000	Lampirkan	DAK		12 dokumen	20.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

2	1	0	2	0	0001	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kegiatan Bantuan Trenstansi Samarudin M.PD	Jumlah Laporan Keuangan Bantuan/ Trenstansi Samarudin M.PD dan Laporan Koordinasi Pengawasan Laporan Keuangan Bantuan Trenstansi Samarudin • M.PD	2 Laporan	10.000.000	Lanjutan	0%		2 Laporan	20.000.000
2	1	4	2	0		Administrasi Borang Milik Daerah pada Peningkat Daerah			12.000.000					22.000.000
2	1	0	2	0	0001	Pengawasan Pencapaian Kebijakan Borang Milik Daerah	Jumlah Rencana Pelaksanaan Borang Milik Daerah pada M.PD	1 dikamus	1.000.000	Lanjutan	0%		1 dikamus	10.000.000
2	1	0	2	0	0002	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Borang Milik Daerah pada M.PD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Laporan Borang Milik Daerah pada M.PD	6 Laporan	2.000.000	Lanjutan	0%		6 Laporan	10.000.000
2	1	0	2	0	0003	Pengawasan Borang Milik Daerah pada M.PD	Jumlah Laporan Pengawasan Borang Milik Daerah pada M.PD	2 Laporan	1.000.000	Lanjutan	0%		2 Laporan	2.000.000
2	1	4	2	0		Administrasi Kepegawaian Peningkat Daerah			22.000.000					100.000.000
2	1	0	2	0	0001	Pengawasan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendukung dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 dikamus	1.000.000	Lanjutan	0%		12 dikamus	10.000.000
2	1	0	2	0	0002	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dikamus	1.000.000	Lanjutan	0%			12.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

							Pegawai								
2	1	0	2	0	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Amalok Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	15.000.000	Lunak	DAS		4 orang	75.000.000
2	1	0	2	0			Administrasi Umum Persiapan Daerah			139.300.000					284.075.000
2	1	0	2	0	0001		Persediaan Kumpulan Informasi Statistik Perencanaan Anggaran Kumin	Amalok paket kumpulan statistik perencanaan anggaran kumin yang disediakan	4 paket	2.500.000	Lunak	DAS		4 paket	4.000.000
2	1	0	2	0	0002		Persediaan Peminan dan Perencanaan Kumin	Amalok Paket Fasilitas dan Perencanaan kumin yang disediakan	3 paket	15.000.000	Lunak	DAS		2 paket	30.000.000
2	1	0	2	0	0003		Persediaan Fasilitas Rumah Tinggal	Amalok Paket Fasilitas Rumah Tinggal yang disediakan	1 paket	7.500.000	Lunak	DAS		1 paket	20.000.000
2	1	0	2	0	0004		Persediaan Bahan Logistik Kumin	Amalok paket bahan logistik kumin yang disediakan	1 paket	20.000.000	Lunak	DAS		1 paket	20.000.000
2	1	0	2	0	0005		Persediaan Barang Cetakan dan Pengemasan	Amalok paket barang cetakan dan pengemasan yang disediakan (paket)	2 paket	20.000.000	Lunak	DAS		2 paket	40.000.000
2	1	0	2	0	0006		Persediaan Bahan Baku dan Pemasangan Perencanaan-Undangan	Amalok Dokumen Bahan Baku dan Pemasangan Perencanaan-Undangan yang disediakan	2 dokumen	1.000.000	Lunak	DAS		2 dokumen	4.000.000
2	1	0	2	0	0008	III	Fasilitas Kunjungan Tama	Amalok Laporan Fasilitas Kunjungan Tama (Rapat dan Tama)	12 laporan	15.000.000	Lunak	DAS		12 laporan	60.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

2	1	0	2	0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kemah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulanan	50.000.000	Lanjutan	DND		12 bulanan	50.000.000
2	1	0	2	0	0010	Pembastutan Arus Dinas pada SKPD	Kemah Dokumen Pembastutan Arus Dinas pada SKPD/Kabupaten	1 bulanan	1.000.000	Lanjutan	DND		1 bulanan	1.000.000
2	1	0	2	0	0011	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemantauan Harian Elektronik pada SKPD	Kemah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemantauan Harian Elektronik pada SKPD	12 bulanan	2.500.000	Lanjutan	DND		12 bulanan	50.000.000
2	1	0	2	0		Perbaikan Jala Pemasang Urutan Pemantauan Darah			145.500.000				145.500.000	
2	1	0	2	0	0001	Persediaan Jala Sarai Menyaji	Kemah Laporan persediaan jala sarai menyaji (jalah sarai, lebel sarai, lebel dijuali dan lebel apandi sarai)	12 bulanan	1.500.000	Lanjutan	DND		12 bulanan	1.500.000
2	1	0	2	0	0002	Persediaan Jala Kambukan, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemah Laporan Persediaan Jala Kambukan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan (laporan)	12 bulanan	6.000.000	Lanjutan	DND		12 bulanan	6.000.000
2	1	0	2	0	0004	Persediaan Jala Pajangan Untuk Kambuk	Kemah Laporan Persediaan Jala Pajangan Untuk Kambuk yang Disalurkan (laporan)	12 bulanan	54.000.000		DND		12 bulanan	200.000.000
2	1	0	2	0		Pemeliharaan Sarang Mili Darah Pemasang Urutan Pemantauan	Pemeliharaan Pemeliharaan Sarang Mili Darah Pemasang Urutan Pemantauan Darah(S)	100	12.500.000				100	120.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

							Direktur									
2	1	0	2	0	0002		Pembelian dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Dinas Operasional atau layanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau layanan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya	10 unit	30.000.000	1 (satu)	DAS		10 unit	30.000.000	
2	1	0	2	0	0003		Pembelian Mobil	Jumlah Mobil yang dipelihara	0 unit	2.500.000	1 (satu)	DAS		0 unit	2.500.000	
2	1	0	2	0	0004		Pembelian Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perawatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	5.000.000	1 (satu)	DAS		7 unit	25.000.000	
0	1	0	2	0	0005		Pembelian Kelelahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	1 unit	8.000.000	1 (satu)	DAS		1 unit	20.000.000	
0	1	0	2	0	0011		Pembelian Kelelahan Koneksi dan Peralatan Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	Jumlah Koneksi dan Peralatan Pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	2 unit	5.000.000	1 (satu)	DAS		2 unit	11.000.000	
2	1						PROGRAM URUSAN KOPERASI			141.571.000					117.710.000	
2	1	0					Program Pengembangan dan Pemeliharaan Keperan	persentase pengembangan dan pemeliharaan Keperan	70%	36.500.000				70%	40.250.000	

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

2024

2	1	0	2	0			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam atau Simpan Pinjam Koperasi			18.500.000					Belum ada	42.358.000
2	1	0	2	0	0004		Pelaksanaan Pemas Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Wilayah Keanggotaannya Diarah Kabupaten Kota	Amiliah Koperasi yang sudah diadakan pemeriksaan dan pengawasan	92 koperasi sudah	42.358.000	11 Kabupaten				11 amiliah sudah	42.358.000
2	1	0					Program Pelatihan Kelembagaan KSP/USP Koperasi	Persentase pelatihan kelembagaan KSP/USP Koperasi	3,43%	15.000.000					10 Koperasi	35.800.000
2	1	0	2	0			Pelatihan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam / atau Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu); Daerah Kabupaten / Kota			15.000.000					10 Koperasi	15.000.000
2	1	0	2	0	0005		Pelaksanaan Pelatihan Kelembagaan KSP/ USP Koperasi Keanggotaan Kabupaten / Kota	jumlah dan waktu koperasi yang sudah dilakukan pelatihan kelembagaan	10 Koperasi	15.000.000	11 Kabupaten				10 Koperasi	15.000.000

2	1	0				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase IDM yang mengikuti Pengambilan Perkoperasian	100%	500.850.000				100	85.800.000
2	1	0	2	0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah kerangannya dalam wilayah kerangka dalam daerah Kabupaten / Kota			5.000.000.000				100	5.000.000.000
2	1	0	2	0	0001	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kemampuan SDM Koperasi	Jumlah IDM yang mengikuti pengetahuan perkoperasian	100%	5.000.000.000	100%			100	5.000.000.000
2	1	0				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)	100%	55.000.000		100%		100%	49.500.000
2	1	0	2	0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang kerangkannya dalam Daerah Kabupaten / Kota			25.000.000		100%			24.500.000

2024

Submitted: 2011-07-20

2	1	0	2	0			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dibentuk melalui Pendataan, Kemurahan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		65.000,000		0,00%				101,250,000
2	1	0	2	0	0044		Persyaratan, Hasil Data Usaha Mikro	Jumlah Dst Usaha Mikro Pendata :	240 unit usaha	65.000,000	100% Realisasi			240 unit usaha	12.500,000
2	1	0					Program Pengembangan UMKM	Program UMKM yang berperan di bidang pertanian yang berbasis rumah	1,5%	170.171,900		0,00%		1,00%	794.316,301
2	1	0	2	0			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			170.171,900		0,00%		20 unit usaha	794.316,301

2	1	0	2	0	0006	Produk dan Pengolahan Perikanan, Sambur Daya Mamasa, Serta Desain dan Teknologi	Kelas dan EMM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sambur Daya Mamasa, Serta Desain dan Teknologi	18 unit muka	416.471.000	Kec. Hualima (Desa Lembileg, Tualupe, Watunara, Kec. Walangitang (Desa Hema, Hewa), Kec. Lewelata (Desa Ranghata), Kec. Adonita Tengah (Desa Went, Luet, Kec. Lamutaka (Kec. Sumpu, Lekin, Saram Tengah, Gula, Pelen) Kec. Koc Witama (Desa Hambani)	000	20 unit muka	764.936.982
---	---	---	---	---	------	---	---	-----------------	-------------	---	-----	-----------------	-------------



BAB. V PENUTUP

RENIA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENIA Tahun 2024 melalui pelaksanaan program, Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENIA Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENIA Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RENIA;
2. Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan keserusiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, serta



kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya,

3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RENJA Tahun 2024 ini.

Demikian RENJA Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

Larantuka, Juli 2023
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Flores Timur,

Achmad R. Duli, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN FLORES TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup untuk Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan Program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan untuk mereview hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Rencana Kerja (Renja) termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,

SERVULUS SATEL DEMOOR S Hut
Pembina Tk.I
NIP. 197112172000121002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERATURAN BUPATI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA PERANGKAT DAERAH	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.3 ISU-ISU STRATEGIS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR	22
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	23
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	34
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	42
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	43
PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V : PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	20
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	24
Tabel 2.5 Usaha Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	35
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024	43
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	45
Tabel 4.1 Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	48
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun SKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD.
- (3) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PEKJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

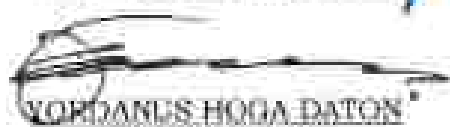
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200312 1 007

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substantif*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan penyabaran Tahun Kedua Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026, untuk periode1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

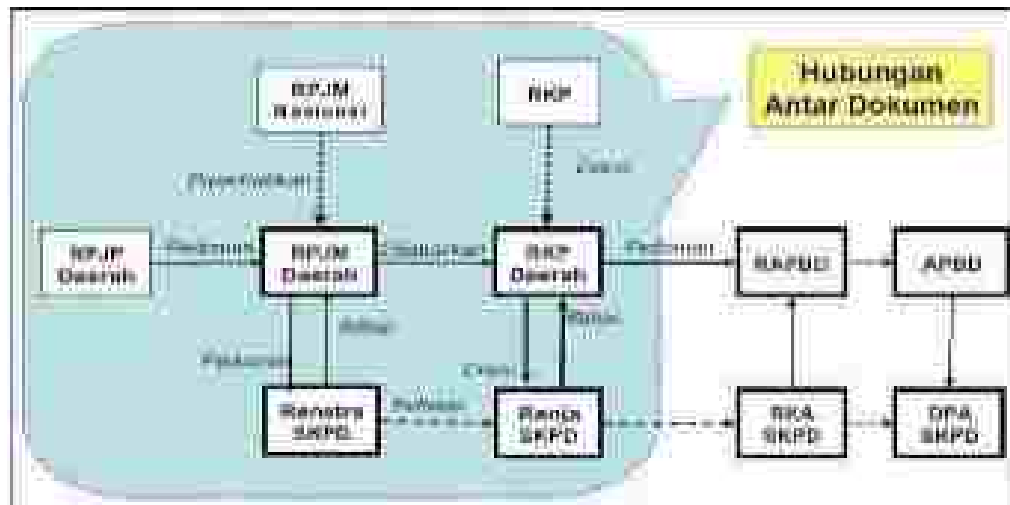
Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten

Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENIA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Sistematika Penulisan

Dokumen RENIA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENIA.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Tahun 2022 merupakan tahun kedua Renstra 2023 s.d 2026 untuk Program Penunjang Kabupaten masih dengan indikator yang sama sedangkan pada Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022 capaiannya 42,03%. Dan untuk tahun 2023 s.d 2026 dengan indikator dan target sebanyak 8 program, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 Sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekomendasi Analisis Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah
dan Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

Kode	Dinas Bidang/Cabang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Tingkat Kinerja Capaian Program (Rencana FY) s.d Tahun 2023 (skala Persentase)	Realisasi Tingkat Kinerja Capaian Program dan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan pelaksanaan kegiatan SKPD tahun 2023			Target program kegiatan (Rencana SKPD 2023)	Pembinaan realisasi kegiatan kerja program/kegiatan Rencana SKPD sampai dengan Tahun 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
1	01	01			Program Peningkat Penguatan Daerah Kabupaten Kota	Terwujudnya Penguatan Administrasi Pemerintahan (%)	100	40	100	100	100	
						Terwujudnya Sektor dan program yang memiliki (%)	100	20	100	70	70	
						PDI yang memiliki standarisasi pelayanan kepada masyarakat (%)	100	0	0	0	0	
						Sektor pelayanan pemerintahan dan urusan pemerintahan lainnya sesuai DPO kabupaten	100	0	0	100	0	
2	01	01		1.01	Penguatan, Pengembangan, dan Wilayah Kinerja Perangkat Daerah	Sektor pelayanan pemerintahan dan urusan pemerintahan lainnya sesuai DPO kabupaten	100	0	0	100		
3	01	01	1.01	01	Kemampuan dan Penguatan Layanan Operasi Admin dan Wilayah Kabupaten Kota (SKPD)	Terwujudnya Layanan Operasi Admin (DPO kabupaten)	100	0	0	100		
4	01	01	01	1.01	Administrasi Kabupaten Perangkat Daerah	Terwujudnya Capaian Target SKPD/KSD	100	10	100	100		
5	01	01	01	1.01	01	Terwujudnya Capaian Target SKPD	100	70	70	100		
6	01	01	01	1.01	01	Terwujudnya Penguatan dan Penguatan Wilayah Kabupaten Kota	100	40	100	100		
7	01	01	01	1.01	Administrasi Kabupaten Perangkat Daerah	PDI yang memiliki standarisasi pelayanan kepada masyarakat (%)	100	0	0	0		
8	01	01	01	1.01	01	Terwujudnya Capaian Target Program Kabupaten Kota dan Wilayah	100	0	0	0		

11	10	1.01	Penyusunan Kegiatan Masyarakat di Bidang Pertahanan dan Pengabdian Lingkungan (PPLK) Kabupaten Kota	Jumlah kegiatan kegiatan masyarakat dalam bidang pertahanan dan pengabdian lingkungan yang dilaksanakan sebagai subkegiatan kegiatan PPLK Kabupaten Kota	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10	1.02	Penelitian, Pengajaran, Penelitian, dan PPLK Kabupaten Kota	Jumlah kegiatan kegiatan penelitian, pengajaran, penelitian, dan PPLK Kabupaten Kota	5	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
11	10	1.03	Kegiatan lain yang berkaitan dengan pertahanan dan pengabdian lingkungan yang dilaksanakan sebagai subkegiatan kegiatan PPLK Kabupaten Kota	Jumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan pertahanan dan pengabdian lingkungan yang dilaksanakan sebagai subkegiatan kegiatan PPLK Kabupaten Kota	5	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
11	11		Program Kegiatan Pengabdian	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.01	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.02	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.03	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.04	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.05	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.06	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.07	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.08	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.09	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.10	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.11	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.12	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.13	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.14	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.15	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.16	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.17	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.18	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.19	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	1.20	Pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Perencanaan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan di Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja	SPM Standar Nasional	ISK	Target Rencana Perangkit Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Terselenggaranya KPPGAI Kabupaten Kediri	12	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 telah terselenggaranya pelaksanaan KPPGAI dengan melibatkan Komite Pengkajian Lingkungan Hidup (KPLH)
2	Terdapatnya KLTIS untuk KRM terkait dengan provinsi	12	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2021 dilaksanakan untuk Penyusunan KLTIS KPMIP
3	Penelitian dan Pengawasan terkait ketahanan pangan (sawit, kedelai, beras) kegiatan yang dilakukan ketahanan pangan terhadap isu lingkungan, oleh PPLH dan PNCI LKIP yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri	12	5	90,91%	92,37%	45,45%	71,43%	42%	100%	41,67%	71,43%	Pada Tahun 2023 telah dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan isu lingkungan baru? untuk mencapai 50 unit mencapai 14%
4	Penggiatan kegiatan (dari Nomor Permen PPNP) Pengarus Lingkungan Hidup di Daerah (PPLH) di Kabupaten Kediri	12	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dilaksanakan untuk kegiatan ini
5	Terdapatnya Penggiatan Penggiatan MUA	12	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dilaksanakan untuk kegiatan ini
6	Terselenggaranya MPA dan kemitraan lokal atau pengkajian tradisional	12	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dilaksanakan untuk kegiatan ini
7	Terselenggaranya dan kegiatan (kegiatan) baik pengkajian tradisional	12	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dilaksanakan untuk kegiatan ini
8	Penggiatan baik MPA	12	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022 sampai dengan 2024 telah dilaksanakan untuk kegiatan ini

8.	Terbentuknya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dilaksanakan kegiatan ini
9.	Terbentuknya penyuluhan kesehatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tahun 2022 penyuluhan secara langsung persampulahan hanya untuk sampel
10.	Terbentuknya pendidikan dan pelatihan masyarakat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dilaksanakan untuk kegiatan ini
11.	Terbentuk sampel yang beragam	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sampel pada bulan Juli 2022 sampel yang terbentuk berjumlah 26.400 ml dan yang teragih berjumlah 21.775 ml
12.	Pemeriksaan jumlah sampel yang terkumpul mencapai 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dilaksanakan untuk kegiatan di Pusat Data Ulang sampel
13.	Pemeriksaan sebagai area penelitian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cakupan Area penelitian sampel untuk Kab. Flores Timur hanya di 11 Kecamatan dan hanya jumlah kel. desa yang ada sebanyak 280 jadi hanya 8,40%
14.	Pemeriksaan jumlah sampel yang terkumpul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tahun 2022 Pemeriksaan sampel yang baru terangkum mencapai 8661 rumah
15.	Pemeriksaan um pengetahuan sampel oleh warga yang diteliti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak pengetahuan sampel dengan pihak kecamatan dilaksanakan
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tahun 2022 IKLH sudah dapat dihitung selengkap tahun 2021 tahun ini dihitung karena pada saatnya tahun tersebut

Dari tabel 2.2. di atas, dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan bidang urusan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota realisasi capaian setiap tahunnya 100% dengan hasil yang dicapai berupa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).
- Indikator Kinerja Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dimana capaian pada Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengurusan izin lingkungan sebanyak 21 usaha dari target 50 atau hanya 42%. Dilihat dari prosentase rendah bukan karena usaha dan/atau kegiatan yang mengurus izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur rendah, tetapi untuk pengurusan ijin kelurahan lingkungan sudah menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Indikator Kinerja Timbulan Sampah Yang Ditangani dan Presentase jumlah sampah yang tertangani untuk Tahun 2022 yaitu timbulan sampah 60.712 m³ dan sampah yang tertangani 45.848 m³ atau sebesar 75,32%. Pemanganan sampah baru 21 Desa/kelurahan dari 250 desa/kelurahan di Kabupaten Flores Timur.
- Indikator Kinerja penetapan hak MHA yang mendukung pelayanan kinerja pada tingkat realisasi capaian tidak dapat dijalankan pada urusan lingkungan hidup karena anggaran belum ada.
- Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 67,35% (Sedang).

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Salah satu tugas pokok dinas lingkungan hidup yaitu menjalankan urusan bidang lingkungan hidup dalam hal pengelolaan persampahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam penerapan pengelolaan sistem persampahan dilakukan dengan pengurangan sampah (melalui Pusat daur Ulang) dampungan sampah (pengangkutan sampah dari TPS ke TPA). Berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui konservasi

terhadap mata air dan rehabilitasi lahan kritis untuk mencapai kualitas lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan tingkat realisasi urusan Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh petugas kebersihan terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan juga pada pengurangan sampah melalui pusat daur ulang belum berfungsi secara baik. Pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan.

Adapun beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah yang berkaitan dengan urusan persampahan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup :

1. Belum terwujudnya fungsi laboratorium lingkungan hidup
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah
3. Masih rendahnya daerah yang dikonservasi/direhabilitasi
4. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau public dan privat
5. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
6. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait Lingkungan Hidup
7. Masih rendahnya ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah maka analisis kebutuhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Revisi Teknis Anggaran Awal RKPD Tahun 2024 Dinas
Kepolisian Wilayah Kabupaten Klaten (Rincian)

KATEGORI AWAL 2024					REVISI KEGIATAN KEBERSTABILAN				
Program Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET Output	PAJAK BERSI (Rp)	Program Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET Output	REVISI PAJAK BERSI (Rp)
BEBAN LANGKAH AWAL				3.000.000.000					3.000.000.000
Program Kegiatan Dinas Penyediaan Ruang Kabupaten Baru				228.000.000	Program Kegiatan Dinas Penyediaan Ruang Kabupaten Baru				228.000.000
Program Kegiatan Dinas Penyediaan Ruang Kabupaten Baru		Tugas/Program/Indikator Pembangunan	100		Program Kegiatan Dinas Penyediaan Ruang Kabupaten Baru		Tugas/Program/Indikator Pembangunan	100	
		Pembangunan pemukiman umum dan perumahan khusus (2)	100				Pembangunan pemukiman umum dan perumahan khusus (2)	100	
		Pembangunan jalan umum kemukiman (10)	100				Pembangunan jalan umum kemukiman (10)	100	
		Pembangunan pemukiman perumahan khusus (10)	100				Pembangunan pemukiman perumahan khusus (10)	100	
		Pembangunan pemukiman perumahan khusus (10)	100				Pembangunan pemukiman perumahan khusus (10)	100	
Penyediaan Fasilitas dan Ruang Publik Taman Kota		Penyediaan fasilitas publik dan ruang publik taman kota	1	10.000.000	Penyediaan Fasilitas dan Ruang Publik Taman Kota		Penyediaan fasilitas publik dan ruang publik taman kota	1	10.000.000
Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000	Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000
Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000	Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000
Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000	Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000
Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000	Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000
Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000	Penyediaan Fasilitas Penyediaan Fasilitas Publik	Kabupaten (100%)	Penyediaan Fasilitas Publik (100%)	1	10.000.000

KANDIDAT 1 (Rak. Bata)					KANDIDAT 2 (Dokter)				
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDUKTOR BERSAMA	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN Bata	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDUKTOR BERSAMA	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN Bata (Rp.)
Teknikan Menanamkan Hasil KEGIATAN Bata			-	1.000.000	Teknikan Menanamkan Hasil KEGIATAN Bata				10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata		Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)	100	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata	Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)		100	10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata		Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)	100	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata	Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)		100	10.000.000
PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000	PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata			-	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata				10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata		Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)	100	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata	Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)		100	10.000.000
PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000	PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata			-	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata				10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata		Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)	100	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata	Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)		100	10.000.000
PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000	PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata			-	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata				10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata		Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)	100	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata	Dan 270 pengantar hasil KEGIATAN Bata (Rp. 10)		100	10.000.000
PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000	PROGRAM PENGANTAR HASIL KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)		Pengantar hasil KEGIATAN BATA (Rp. 100.000.000)	100.000	10.000.000
Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata			-	10.000.000	Teknikan Pengantar Hasil KEGIATAN Bata				10.000.000

KAPASITAS & HASIL BERSIH					KAPASITAS & HASIL BERSIH				
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR BERSIH	TARGET KAPASITAS	INDIKATOR BERSIH (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR BERSIH	TARGET KAPASITAS	INDIKATOR BERSIH (Rp.)
Program Pengabdian Sosial (PPS) dan Pengabdian Masyarakat (PM) - Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat		Jumlah orang yang mengikuti PPS/PM Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat	1	10.000.000	Program Pengabdian Sosial (PPS) dan Pengabdian Masyarakat (PM) - Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat		Jumlah orang yang mengikuti PPS/PM Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat	1	10.000.000
PROGRAM PENGABDIAN SOSIAL (PPS) DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PM)		Pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat PPS/PM dan lainnya pengabdian masyarakat (Rp.)	100	10.000.000	PROGRAM PENGABDIAN SOSIAL (PPS) DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PM)		Pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat PPS/PM dan lainnya pengabdian masyarakat (Rp.)	100	10.000.000
Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat			10	10.000.000	Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat			10	10.000.000
Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat		Jumlah orang yang mengikuti PPS/PM dan lainnya pengabdian masyarakat (Rp.)	1	10.000.000	Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat		Jumlah orang yang mengikuti PPS/PM dan lainnya pengabdian masyarakat (Rp.)	1	10.000.000
Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat		Jumlah orang yang mengikuti PPS/PM dan lainnya pengabdian masyarakat (Rp.)	1	10.000.000	Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat		Jumlah orang yang mengikuti PPS/PM dan lainnya pengabdian masyarakat (Rp.)	1	10.000.000
PROGRAM PENGABDIAN SOSIAL (PPS) DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PM)		Pengabdian masyarakat (Rp.)	100	10.000.000	PROGRAM PENGABDIAN SOSIAL (PPS) DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PM)		Pengabdian masyarakat (Rp.)	100	10.000.000
Pengabdian Masyarakat			10	10.000.000	Pengabdian Masyarakat			10	10.000.000

KANDUNGAN 4000 BATA					KANDUNGAN 2000 BATA				
PROGRAM RESULTAT	LOKASI	INDIKATOR BENCANA	TARGET KAPASITAS	INDIKATOR BENCANA	PROGRAM / RESULTAT	LOKASI	INDIKATOR BENCANA	TARGET KAPASITAS	INDIKATOR BENCANA
Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan manajemen bencana		Jumlah masyarakat yang terdampak bencana yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan bencana	1	100%	Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan manajemen bencana	Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan	Jumlah masyarakat yang terdampak bencana yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan bencana	1	100%
Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan manajemen bencana		Jumlah masyarakat yang terdampak bencana yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan bencana	11	100%	Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan manajemen bencana	Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan	Jumlah masyarakat yang terdampak bencana yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan bencana	1	100%
Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan manajemen bencana		Jumlah masyarakat yang terdampak bencana yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan bencana	12 / 100%	100%	Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan manajemen bencana	Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan	Jumlah masyarakat yang terdampak bencana yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan bencana	12 / 100%	100%

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bahwa atas (bottom up planning) berdasarkan asa deoktatisasi dan desentralisasi, baik bagi kelompok masyarakat maupun perangkat daerah kabupaten atau kota maupun penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan pada perangkat daerah

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Remp perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal Bulan Maret 2023 dengan 19 kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi public tahun 2023.

Rekapitulasi musrenbang kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023Tema Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	-	
			Cakupan daerah yang dikawatirasi (%)		
	Kegiatan : Pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup lab/kota		Cakupan daerah yang dikawatirasi (berdasarkan UU)	-	
2	Sub kegiatan : Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Pengelolaan (1) sumber mata air Wai Kaitung, Daerah Mbu, Aia Wai Wai dan Daerah pers. Le-Baka Kama, Kaitung, Kec. Alifan	Pengelolaan pada Daerah Sektir Mbu, Aia	1 Lokasi	Temuan dan identifikasi sumber-sumber mata air karna mata air telah rusak (dalam dan di) DDA
		Daerah Lomolele, Kec. Alifan		2 Lokasi	Temuan dan identifikasi sumber-sumber mata air
		Daerah Gija, Kec. Kaitung		1 Lokasi	Ditemuan masalah sumber-sumber mata air
		Daerah Kaitung, Kaitung, Kec. Kaitung		1 Lokasi	Ditemuan, perlu ada penanganan karena mata air yang ada di lokasi ini di rusak akibat oleh DDA kaitung
		Daerah Mangrove Kecamatan Kaitung(1)		1 Lokasi	Ditemuan
		Mata Air Wai Wai - Daerah Lomolele - Kec. Kaitung, Kabupaten, Kec. Kaitung		-	Ditemuan, perlu ada penanganan karena mata air yang ada di lokasi ini di rusak akibat oleh DDA kaitung
		Mata Air Bua Bua Daerah Mangrove Kecamatan Wai Wai (1 lokasi)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan pengelolan DDA Wai Wai
		Daerah Pual, Kec. Wai Wai		100 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan pengelolan DDA Wai Wai
		Daerah Kaitung, Kecamatan Wai Wai (1 lokasi)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan pengelolan DDA Wai Wai

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Volume	Catatan
		Maka Air Wad Kari Saka, Wad Jara Duri Wad Kari, Maka Huma, Huma, Kari, Adama, Targat		1 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		1 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat
		Dura Huma, Kuma, Kuma, Targat		4 Tahun	Tahun 2022 telah dilakukan penghapusan di Kari, Adama, Targat

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Volume	Catatan
		(1) HKI (sumber tenaga, pelatihan di (2) dan (3), Pelayanan Warga Baru, Km. Lingsatoka)		3 Lokasi	Ditutupi anak pengungsi
		(Dinas Kelola, Kelola, Km. Naha Selatan)		30 Lokasi	identifikasi survey lokasi untuk 4 mata air
		(Dinas Lintas, Masi, Abi, Lingsat, Km. Naha Selatan)		3 Lokasi	identifikasi survey lokasi untuk 3 mata air
		(Dinas) dan (Dinas) II, Dinas Kelola, Km. Koromora Naha Selatan, Lingsat, Km. Km. Naha Selatan)		2 Lokasi	identifikasi survey lokasi untuk 2 mata air
		(Dinas) Masi, Km. Naha Selatan, Koromora Masi, Abi, Lingsat, Masi, Km. Naha Selatan, Naha Selatan, Km. (Dinas, Papua)		1 Lokasi	Pengembangan titik identifikasi air tahun 2022 di Km. Naha Selatan
		(Dinas, Papua, Papua, Km. Naha Papua)		3 Lokasi	Pengembangan titik identifikasi air tahun 2022 di Km. Naha Selatan
		(Masi, Abi, Wamona, Koromora, Km. Dinas, Papua)		1 Lokasi	Pengembangan titik identifikasi air tahun 2022 di Km. Naha Selatan
		(Dinas, Masi, Masi, Abi, Wamona dan Wamona, Dinas, Papua, Lingsat, Km. Naha Selatan)		1 Lokasi	Pengembangan titik identifikasi air tahun 2022 di Km. Naha Selatan
		(Dinas, Naha, Naha, Km. Naha Selatan)		1 Lokasi	identifikasi survey lokasi, mata air di Km. Naha Salatan Km. Naha Selatan
		(Masi, Abi, Wamona, Lingsat, Km. Naha Selatan)		1 Lokasi	identifikasi survey lokasi
		(Masi, Abi, Wamona, Lingsat, Km. Naha Selatan)		1 Lokasi	identifikasi survey lokasi
		(Masi, Wamona, Km. Naha Selatan)		21 Lokasi	identifikasi survey lokasi, mata air di Km. Naha Salatan Km. Naha Selatan
		(Dinas, Naha, Km. Naha Selatan, Km. Naha Salatan)		10 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 akan dilakukan pengembangan 4 kecamatan
		(Dinas) dan (Dinas) Lingsat, Lingsat, Km. Naha Selatan)		1 Lokasi	
		(Wamona, Dina, Lingsat, Dina, Dinas, Dina, Lingsat, Km. Naha Selatan)		21 Lokasi	identifikasi survey lokasi

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
		1. Misi (mengembangkan konsep strategi dan konsep untuk diadopsi ke pengelompokan di 7 kecamatan untuk ada 6 Desa Terpadung yakni: Nal Hakt, Hantak, Hantakak, Manung Hantak, Lantakting, Kac. Tihafeni)		3 Lokasi	melakukan survey lokasi
		2. Peta Sektor Program Pengelompokan di Misi (ke Watanak untuk) mengorganisasikan lokasi ke tiga (Kebanahan Manungak di Misi Kupa, Vihara (Pakt), Kupa, Kac. Tihafeni)		1 lokasi	melakukan survey lokasi
		3. Struktur misi Ad II (Desa Watanak, Misi Watanak, Kac. Tihafeni)		1 Lokasi	melakukan survey lokasi
		4. Peta di sektor yang punya Lantak (Gintak, Hantak Jaya, Kac. Watanak)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 melakukan pengelompokan
		5. Peta di sektor yang punya Lantak (Gintak, Hantak Jaya, Kac. Watanak)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 melakukan pengelompokan
		6. Peta, Nantak, Kac. Watanak		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 melakukan pengelompokan
		7. Misi ke Paktak, Desa Paktak, Paktak, Kac. Watanak		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 melakukan pengelompokan
		8. Misi (Kac. Hantak) Misi Paktak, Kac. Hantak, Hantak		1 Lokasi	Survey lokasi untuk ada
		9. Desa II, III Desa Tawak, Tawak, Kac. Hantak Hantak		1 Lokasi	Survey lokasi untuk ada
		10. WATANGKE DAN WATANGKE (Kupa, Kac. Hantak Hantak)		2 Lokasi	Survey lokasi untuk ada
		11. Misi Sektor II, Kac. Hantak Hantak		4 Lokasi	Survey lokasi untuk ada
		12. Misi, Misi Kupa, Lantak (Kac. Kupa, Kac. Hantak Hantak)		3 Lokasi	Survey lokasi untuk ada
		13. Misi ke Watanak dan Misi ke Ad Pakt, Misi Kupa, Watanak, Kac. Hantak Hantak		2 Lokasi	Survey lokasi untuk ada
		14. Desa Hantak, Misi ke Watanak, Kupa, Kupa, Misi Kupa, Kupa, Kac. Hantak Hantak		3 Lokasi	Survey ke 3 lokasi untuk ada

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Berkas/ Volume	Catatan
		(pengembangan) tempat penitipan anak untuk masyarakat Desa Lumbanjiro II sebanyak 7 unit yang terdiri dari 2 unit di dusun I, 1 unit di dusun II, dan 2 unit di dusun III. Lokasi di Desa Kls. Tanjung Mungur		1 Kelompok	Dititik kawat pengalangan TPS pada desa yang belum memiliki tempat penitipan anak akan disediakan di masing-masing desa pada TPS.
		(Kebudayaan) keragaman, keberagaman, dan Lumbanjiro		1 Kelompok	Tahun 2023 kegiatan ini akan selesai
		(Kebudayaan) Bakti, dan Lumbanjiro		11 Kelompok	Dititik untuk pengalangan Bakti pengal
		(Kls. II) dan (Kls. II) Bakti, dan Lumbanjiro		11 Kelompok	Dititik untuk dan tahun 2023 ini akan selesai
		(Kls. II, III, IV, dan V) Bakti, dan Lumbanjiro		11 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Kebudayaan) Lumbanjiro, Lumbanjiro, dan Lumbanjiro		4 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Kebudayaan) Bakti dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro		1 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Kebudayaan) Bakti dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro		1 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Kebudayaan) Lumbanjiro, Paksi dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro		4 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Kebudayaan) Lumbanjiro, Paksi dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro		4 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Kls. II, III, IV, dan V) dan Bakti dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro		2 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Kls. II, III, IV, dan V) dan Bakti dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro		2 Kelompok	Tahap untuk dan pada 1 tahun ini
		(Desain I, II, dan III, dan Bakti dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro)		1 Kelompok	Dititik kawat pengalangan pengalangan untuk dan pada 1 tahun ini dan pada 1 tahun ini akan selesai dan dan Lumbanjiro
		(Desain I, II, dan III, dan Bakti dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro)		1 Kelompok	Dititik kawat pengalangan pengalangan untuk dan pada 1 tahun ini dan pada 1 tahun ini akan selesai dan dan Lumbanjiro
		(Desain I, II, dan III, dan Bakti dan Bakti dan Bakti dan Lumbanjiro)		10 Kelompok	Dititik kawat pengalangan pengalangan untuk dan pada 1 tahun ini dan pada 1 tahun ini akan selesai dan dan Lumbanjiro

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Nasional Tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu *"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan. Salah satu prioritas nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yakni PN 6: *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim*.

Kebijakan Nasional tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur (Dinas Lingkungan Hidup) untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah berdasarkan Renstra Perangkat daerah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup, dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2023	2024
Tercapainya kualitas Lingkungan hidup yang baik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	69,71	69,81

Angka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni: *"Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas"*, dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan.

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.6 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75
	3.7 Meningkatnya system pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase penanganan sampah	99
		Persentase pengurangan sampah	0,28

Program dan Kegiatan

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 mempunyai 2 (dua) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran. Program prioritas tersebut terdiri dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2) Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota
- 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota

2. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Sampah

Rumusan rencana program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rencana Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan
Prakiraan Maja Tahun 2025

KODE					URAIAN - NERANG URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Jumlah)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENYITING	PRABIRAN MASA RENCANA TAMBAH 2025	
PROG	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KUALITAS	PAGE DOKUMEN (Rp.)	SKORING DATA		TARGET CAPAIAN KUALITAS	PAGE DOKUMEN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					DOAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	11	41			Crana Pemertanian Seling Lingkungan Hidup (Program Prastera)			140,000,000					140,000,000
1	11	41			Program Pengertanian Pemertanian dan atau Kesehatan Lingkungan Hidup	Pemertanian agribisnis terdistribusi lingkungan hidup (%)		75	400,000,000			75	400,000,000
						Catupin dalam peng alihsertifikasi (%)		10				10	
2	11	42	1.01		Pengertanian Pemertanian dan atau Kesehatan Lingkungan Hidup dan atau	Jumlah Diketahui (Rp./tahun) Lingkungan (diketahui)			100,000,000				100,000,000
3	11	43	1.01	000	Kegiatan, pemertanian dan diketahui pemertanian pemertanian lingkungan Hidup dan atau kesehatan lingkungan Masa Renc. dan atau dan Ling.	Jumlah, diketahui dan atau diketahui dan atau diketahui dan atau, dan atau dan diketahui dan atau	Lingkungan, dan diketahui, dan diketahui dan atau	1	100,000,000	100,000,000 (diketahui dan atau)		1	100,000,000
4	11	44	1.01	000	Kegiatan, pemertanian dan diketahui pemertanian diketahui dan atau dan atau diketahui dan atau, dan atau dan diketahui dan atau	Jumlah, diketahui dan atau diketahui dan atau diketahui dan atau, dan atau dan diketahui dan atau	Lingkungan, dan diketahui, dan diketahui dan atau	1	100,000,000	100,000,000 (diketahui dan atau)		1	100,000,000
5	11	45	1.01	000	Pengertanian Pemertanian Lingkungan Hidup Lingkungan dan atau	Jumlah, diketahui dan atau diketahui dan atau diketahui dan atau, dan atau dan diketahui dan atau	Lingkungan, dan diketahui, dan diketahui dan atau	1	100,000,000	100,000,000 (diketahui dan atau)		1	100,000,000
6	11	46	1.01		Pengertanian Pemertanian dan atau Kesehatan Lingkungan Hidup dan atau	Jumlah, diketahui dan atau diketahui dan atau diketahui dan atau, dan atau dan diketahui dan atau			10,000,000				10,000,000

KODE						TUJUAN / BIDANG TUJUAN/ PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERSILAHAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Garis)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PE-2024	PRASARANA MAJU BERKUALITAS TAHUN 2024	
001000	001000	001000	001000	001000	001000			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGE INDIKATOR (Rp.)	SUMBER DATA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGE INDIKATOR (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11	11	111	1111	11111	Pengelolaan administrasi sarung kawasan Indragiri Hilir	Adaptasi struktur organisasi dan tata kelola organisasi Hilir yang efektif dan efisien	Desa. Hilir Taman, Hilir Tanjung Pinang Desa. Cendek	1	20.000.000	Data Tambahan Taman + (111)		1	40.000.000
2	11	43	112	1121		Pemilihan Pemantauan dan inspeksi kawasan Hilir yang selayak tak. 2024	Desa. Hilir yang dibangun dan dikelola (No)			200.000.000				200.000.000
3	11	11	111	1111	11111	Pengelolaan kawasan	Desa. Hilir yang dibangun dan dikelola di sampingnya yang dikelola dibangun dan dikelola (No)	Desa. Tambahan Hilir. Hilir	1	20.000.000	Data Tambahan Taman + (111)		1	20.000.000
4	11	11	111	1111		Program Pengawasan dan Pengawasan	Pengawasan dan pengawasan kawasan (No)		10	1.000.000.000			10	500.000.000
							Pengawasan dan pengawasan kawasan (No)		10					
5	11	11	111	1111	11111	Pengawasan kawasan	Desa. Hilir yang dibangun dan dikelola di sampingnya yang dikelola dibangun dan dikelola (No)			1.000.000.000				1.000.000.000
6	11	11	111	1111	11111	Pengawasan kawasan dan pengawasan dan pengawasan dan pengawasan	Desa. Hilir yang dibangun dan dikelola di sampingnya yang dikelola dibangun dan dikelola (No)	Desa. Cendek Desa. Hilir Taman	1	20.000.000	Data Tambahan Taman + (111)		1	40.000.000
7	11	11	111	1111	11111	Pengawasan kawasan dan pengawasan dan pengawasan dan pengawasan	Desa. Hilir yang dibangun dan dikelola di sampingnya yang dikelola dibangun dan dikelola (No)	Desa. Cendek Desa. Hilir Taman	1	20.000.000	Data Tambahan Taman + (111)		1	40.000.000
8	11	11	111	1111	11111	Pengawasan kawasan dan pengawasan dan pengawasan dan pengawasan	Desa. Hilir yang dibangun dan dikelola di sampingnya yang dikelola dibangun dan dikelola (No)	Desa. Cendek Desa. Hilir Taman	1	20.000.000	Data Tambahan Taman + (111)		1	40.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Lingsihangun Midong Kabupaten Flores Timur Tahun 2014

[illegible]

BAB V PENUTUP

RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar- ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2024 melalui pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah yang berwewasan Lingkungan di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENJA Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RENJA;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan

koraksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RENJA Tahun 2024 ini.

Larantuka, Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,



SERVULUS SATEL DEMOOR S.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 197112172000121002

**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**RENCANA KERJA
(RENJA TAHUN 2024)**



KABUPATEN FLORES TIMUR





BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD.
- (3) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TKJ

NIP. 19780426 200212 1 007

doi:10.1017/S0022292412001619

[illegible]

Kepala Dinas Pengendalian Pertumbuhan
dan Kelangkaan Benda Cagar, Penertakan dan
Pemertaan Perijinan dan
Kebijakan Pemasaran

STAFF RUMBLE 1990032 1007

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	36
2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	40
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	41
2.5 PENELAAHAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	60
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIYAKAN NASIONAL	60
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DP2KBP3A	60
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	70
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP1KBP3A	36
Tabel 2.3	Riview Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	41
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	57
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	61
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	62
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja DP1KBP3A Tahun 2024	71

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1	Hubungan antara Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran	2
-----------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substantif*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun kedua Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026, untuk periode tahun ke dua yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 36 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

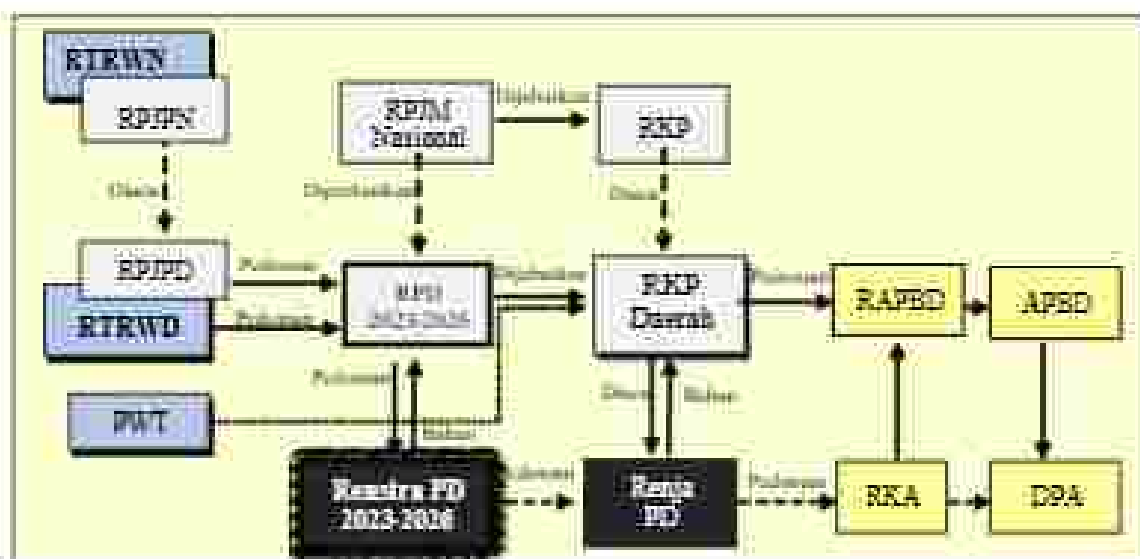
1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2022.

3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Hubungan Rencana PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana disambarkakan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Hubungan antara Rencana PD Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Pelaksanaan



Berdasarkan bagan pada gambar tersebut maka terlihat sangat jelas hubungan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya karena Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disusun mengacu pada Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Kepala BKKBN No 11 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
23. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RENIA Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENIA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENIA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS P2KBP3A

Pada Bab ini memuat tiga hal pokok yakni Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat secara detail gambaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan dan lokasi dalam rencana kerja tahun 2024.

BAB. V PENUTUP

Pada Bab ini berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2022 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Schedul Realisasi Pelaksanaan Renc. Pembangunan Daerah dan Alokasi Renc. Pembangunan Daerah s.d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Bima Timur

Kode	Urutan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renc. Capaian Program (Rencana Peningkatan Daerah) 2022-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan (Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (s.d)			Target Program dan Kegiatan Renc. Peningkatan Daerah Tahun 2022-2023	Realisasi Capaian Target Rencana Peningkatan Daerah Tahun 2022 (s.d) 2023				
					Target Renc. Peningkatan Daerah Tahun 2022	Realisasi Renc. Peningkatan Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11			
A. SUMBER DAFTAR 2022-2023													
1	1A				Program Pemertajaaan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah (Kategori: Kekuasaan)								
2	1A	1			Program Peningkat Urutan Pemertajaaan Daerah (Kategori: Kekuasaan)	Terselenggaranya Pelaksanaan administrasi pemerintahan (%)	100		100	98	98		
					Terselenggaranya Service dan Pemertajaaan Aparatur (%)	40		100	98	98			
					Terselenggaranya Layanan dan Capaian Kinerja dan Revisi (Kategori: Kebijakan)	4		4	4	100			
3	1A	2	120		Pertemuan, Pengabdian, dan Peningkat Kinerja Pemerintah Daerah								
4	1A	3	120	4	Kemampuan dan Peningkat Layanan Capaian Kinerja dan Revisi Pemerintahan Daerah (Kategori: Kebijakan)	40	4	4	7	100			
5	1A	4	120		Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah								
6	1A	5	120	1	Peningkat Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN (Sektor)	14	14	14	100			

8	34	3	200	3	Pelayanan Pemantauan dan Penilaian Kualitas Kegiatan UKM	Jumlah Laporan dan administrasi yang ada kegiatan (bulan)	80	12	12	12	100		
9	34	3	200		Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Pelayanan Umum dan administrasi kegiatan							
10	34	3	200	4	Pelayanan Bahan Logistik Kesen	Jumlah jenis ATK yang disediakan (jenis)	127	40	20	12	94		
						Jumlah alat/kabupaten yang disediakan (jenis)	14	15	12	10	122.22		
11	34	3	200	5	Pelayanan Bina Cakrawala dan Pengembangan	Jumlah jenis barang Cakrawala dan Pengembangan (barang)	600487	81750	125587	87500	27.44		
12	34	3	200	6	Kegiatan Kegiatan Tesis	Jumlah Monev dan Monev Kesen (doc)	5120	287	2000	508	17.9		
13	34	3	200	8	Pengembangan Rupa Kemandirian dan Kegiatan UKM	Jumlah rupa kemandirian dan kegiatan (doc)	422	60	100	25	22		
14	34	3	200		Pelayanan Jasa Perantara Usaha Pemukiman Perkotaan								
15	34	3	200	1	Pelayanan Jasa Sosial Masyarakat	Jumlah jenis pelayanan dan administrasi (barang)	2427	120	500	12	14		
16	34	3	200	2	Pelayanan Jasa Komunikasi, Jaringan Data dan lain-lain	Jumlah jenis layanan jasa komunikasi, jaringan data dan lain-lain (bulan)	80	12	12	12	100		
17	34	3	200	4	Pelayanan Jasa Pelayanan Usaha Kesen	Jumlah layanan produksi dan administrasi kegiatan (barang)	14	14	20	88	100		
18	34	3	200		Pelayanan Bina UKM, Dukungan Pemukiman Usaha Pemukiman Perkotaan								
19	34	3	200	2	Pelayanan Jasa Sosial Masyarakat, Bina Kemandirian, Bina dan Pemukiman Kemandirian, Bina dan Pemukiman Kemandirian, Bina dan Pemukiman Kemandirian	Jumlah layanan produksi dan administrasi kegiatan (barang)	8	4	8	12	100		
						Jumlah layanan produksi dan administrasi kegiatan (barang)							

4	14	1	200	9	Pendidikan Kebudayaan, Bahasa Kerita dan Negeri Lainnya	Jumlah: Dua Gedung Kantor yang dipelihara (Kantor Kota)	2	2	1	2	100			
1	14	1	120	11	Pendidikan Kebudayaan, Bahasa dan Negeri, Pendidikan Gedung Kantor dan Negeri Lainnya	Terletak pada Pendidikan masyarakat (Pendidikan gabung Kantor Kota)	2	2	1	2	120			
2	4				Unit Pendidikan Bahasa Pendidikan dan Pendidikan dan									
2	9	2			Pendidikan (Unit dan Unit Pendidikan)	Pendidikan dan Kantor Pendidikan dan Kantor yang dipelihara (K)	20	20	20	20	120			
						Jumlah Gedung Pendidikan dan yang dipelihara (Kantor dan Kantor Pendidikan)	20	17	10	9	70			
						Pendidikan dan Kantor Pendidikan (K)	20	20	20	20	20			
1	4	2	120		Pendidikan Pendidikan (Unit dan Unit Pendidikan) Pendidikan dan Kantor Pendidikan dan Kantor									
3	4	2	120	1	Kantor dan Kantor dan Kantor (Unit dan Kantor) Kantor dan Kantor	Jumlah Gedung Pendidikan dan Kantor dan Kantor	24	9	20	1	120			
2	9	2	120	4	Kantor dan Kantor (Unit dan Kantor) (Unit dan Kantor)	Jumlah gedung pendidikan dan Kantor dan Kantor	120	0	120	200	100			

2	8	2	200		Penelitian dan Pengajaran Kebudayaan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Aspek-aspek Kebudayaan Kebudayaan, Kebudayaan Kota											
2	8	2	200	2	Aktivitas Kritis dan Pembelajaran Pembelajaran Partisipasi Pembelajaran dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kegiatan Belajar Masyarakat untuk bagi pengajaran dalam masyarakat untuk (Kegiatan)	100	0	0	10	10	10	10			
2	8	8			Pengajaran Kebudayaan Pengajaran	Pengajaran Kebudayaan Sesuai dengan Pengajaran dan Anak yang diajarkan (A)			20			10				
2	8	8	200		Pengajaran Kebudayaan Sesuai dengan Pengajaran dan Anak yang diajarkan (A)											
2	8	8	200	2	Aktivitas Kritis dan Pembelajaran dan Anak Pembelajaran dan Anak Kegiatan Belajar	Jumlah Aktivitas dan Anak Pembelajaran dan Anak (A)	1	0	0	1	1	1	1			
2	8	8			Pengajaran Kebudayaan dan Anak dan Anak	Jumlah Pengajaran yang diajarkan (A)				0	10					
2	8	8	200		Pengajaran dan Anak dan Anak dan Anak dan Anak dan Anak dan Anak dan Anak	Jumlah Pengajaran yang diajarkan (A)										

2	6	3	200	1	Penyusunan Peta Cetak dan Arah di Kawasan Kelurahan Kota	Penyusunan Lembaran dan Pelatikan untuk penyusunan dan pelatikan Kelurahan terhadap Penyusunan (dib)	100	0	1	1	100			
2	6	6			Penyusunan Himpunan (di Arah (MKA)	Survei Lapangan dan yang arsitek (Lembaga)			10	0	1			
1	6	6	200		Pembinaan PPA pada Lembaga Pendidikan, dan penyusunan dan Desain (di Arah Kelurahan Kelurahan Kota	Survei Forum Arah yang (Lembaga)			10	10	94			
2	6	6	200	2	Kontribusi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Peta Arah : Kelurahan Kelurahan Kota	Survei Forum Arah yang (Lembaga)	10	0	10	10	100			
2	10				Dinas Penyusunan Rancangan Penyusunan Peta Arah dan Kelurahan									
2	10	3			Penyusunan Penyusunan Kelurahan Kelurahan (Lembaga)	Gabungan PPA Arah (Lembaga)	10	10	10	10,2	10			
						(L)								
						Gabungan Arah (L)	10	14	10	10,25	10			
						Survei PPA Arah yang (L)	10	0	10	10	10			
2	10	3	200		Pembinaan Penyusunan Penyusunan Kelurahan Kelurahan (Lembaga)									

2	14	8	200	1	Programat pelaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Program KEMK, untuk Kelengkapan Dokumen/Peraturan Kabupaten/Kota	Untuk PPKB dan Sub PPKB yang diserahkan langsung	100	90	78	78	100			
2	14	8	200		Programat dan Pelaksanaan Kegiatan, Alat dan Obat Kesehatan, Serta Pakaian Pelanggaran, K3 dan Pakaian, Kelengkapan K3	Kelengkapan PPKB Perencanaan K3 dan PPKB	88	88	88	87	88,11			
2	14	8	200	1	Programat Pelaksanaan Alat dan Obat Kesehatan dan Sarana Pemantauan, Pelaksanaan K3 dan Fasilitas Kesehatan lingkungan, Sarana dan Instalasi	Untuk Alat dan Obat Kesehatan yang diserahkan langsung	1	1	1	1	100			
2	14	8	200	1	Perencanaan Sarana Pemantauan PPKB dan K3	Untuk Sarana Pemantauan dan pengendalian kesehatan, Gula, obat dan Alas dan Sarana kesehatan yang diserahkan langsung	10	1	1	10	100			
						Untuk Unit Sarana Pemantauan PPKB dan K3								
						Untuk unit Sarana Kelengkapan kesehatan kesehatan dan kesehatan Kelengkapan KEMK, KEMK, PPKB, PPKB dan pengendalian kesehatan, Kelengkapan KEMK, KEMK, KEMK dan KEMK								
						Untuk unit Sarana Kelengkapan kesehatan kesehatan dan kesehatan Kelengkapan KEMK, KEMK, PPKB, PPKB dan pengendalian kesehatan, Kelengkapan KEMK, KEMK, KEMK dan KEMK								
2	14	8	200	1	Perencanaan Pelaksanaan Kelengkapan Kesehatan dan Kesehatan Kesehatan dan Kesehatan Kesehatan	Untuk Perencanaan K3 yang diserahkan langsung	10000	10000	10000	11000	70,70			

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					URUTAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDUKSI DOK. PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Semua Peningkat Daerah) 2022-2023	Realisasi Target Fungsi Hasil Program/kegiatan (Semua Peningkat Daerah) tahun 2022-2023	Target dan Realisasi Fungsi Program dan Kegiatan Tahun 2022 (N-2)			Target Program dan Kegiatan Fungsi Peningkat Daerah Tahun 2022 (N-1) 2022	Realisasi Capaian Target Fungsi Peningkat Daerah Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	
KELOMPOK	INDUKSI DOK. PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDUKSI DOK. PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDUKSI DOK. PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDUKSI DOK. PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN					Target Fungsi Peningkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Fungsi Peningkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Fungsi Peningkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Fungsi (%)
I					II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					Tingkat Peningkatan, Nilai yang Tidak Berubah dengan Peningkatan Nilai									
					DAFTAR PENGENDALIAN BENDAHARA, PENGENDALIAN BERENCANA, PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN MELINDUNGKAN ASIA									
					Program Peningkatan Fungsi Peningkat Daerah Kabupaten Kota									
					Tingkat Peningkatan Administrasi Pemerintahan (%)									
					Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dan peningkatan kinerja (%)									
					Terdapatnya AEF yang memiliki indikator kinerja (%)									
					Terdapatnya Laporan dan Capaian Kinerja dan Kinerja (Skor)									
					Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Kinerja Peningkat Daerah									
					Terdapatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (%)									
					Peningkatan Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									
					Terdapatnya Dokumen Peningkatan Peningkat Daerah									

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAAN (INDUKSI) BINAAN PROGRAM KHIDMATAN TERKIN KHIDMATAN	INDUKSI BINAAN PROGRAM KHIDMATAN TERKIN KHIDMATAN (Tahun)	Target Kinerja Capaian Program (Skor/1000)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Indikator Capaian sampai dengan tahun (Y-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Indikator Tahun 2023 (Y-3)			Target Program dan Indikator Kinerja Program dan Indikator Tahun (Y-4) 2023	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Indikator Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	
INDUKSI BINAAN	INDUKSI BINAAN	INDUKSI BINAAN	INDUKSI BINAAN	INDUKSI BINAAN					Target Kinerja Program dan Indikator Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Indikator Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Indikator Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen BKA-BKPD	Jumlah Dokumen BKA-BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen BKA-BKPD (Dok)	2					2	2	100
1	14	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja BKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja BKPD (laporan)	4					4	4	100
1	14	01	2.01	01	Realisasi Kinerja Peningkatan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Peningkatan Daerah	4					4	4	100
1	14	01	2.01	01	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan	Terdapatnya Dokumen Laporan Kegiatan Kegiatan	1							
1	14	01	2.01	01	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan	Terdapatnya Dokumen Laporan Kegiatan Kegiatan	1							
1	14	01	2.01	01	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji/Bulan)	24					24	24	100

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIRI DAN PERINGKIPAN PROGRAM/KEGIATAN/KEB KAWASAN	INDUKSI DAN PERINGKIPAN KEGIATAN/KEB KAWASAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Sesuai Kelembagaan Daerah) 2022-2023	Realisasi Target Fungsi Hasil Program/keb Kelembagaan Capaian sampai dengan tahun (2022-2023)	Target dan Realisasi Fungsi Program/keb Kelembagaan Tahun 2022 (2022)			Target Program/keb Kelembagaan Fungsi Program/keb Kelembagaan Tahun (2022-2023)	Realisasi Capaian Target Fungsi Program/keb Kelembagaan Tahun 2022 (Tahun Kelembagaan)		
KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN					Target Fungsi Program/keb Kelembagaan Tahun 2022	Realisasi Fungsi Program/keb Kelembagaan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/keb Kelembagaan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Kelembagaan (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	54	01	2.02	02	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Manajemen Kawasan (PMK)	Luarlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan/Manajemen Kawasan (dokumen)									
												10	10	100	
A	54	01	2.02	03	Kendali dan Pemantauan Laporan Kegiatan Berkas/Thema/Struktur (PMK)	Luarlah Laporan Kegiatan Berkas/Thema/Struktur (dokumen) Dokumen/Struktur (dokumen) Dokumen/Struktur (dokumen) Dokumen/Struktur (dokumen) Dokumen/Struktur (dokumen)									
												10	10	100	
A	54	01	2.02		Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)	Luarlah laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (dokumen)									
														0	
A	54	01	2.02	04	Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)	Luarlah laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (dokumen)							10	10	100
A	54	01	2.02		Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan/Manajemen Kawasan (PMK)	Luarlah Laporan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan/Manajemen Kawasan (dokumen)									
														0	

2000-2001

KODE					URAIAN (INDIKATOR/URAIAN PROGRAM/KEGIATAN) TERKAIT	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT (Paket)	Target Kinerja Capaian Program Komunitas Desa/RT 2020-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan tahun (2020-2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Capaian Rata-rata Program Desa/RT Tahun (2020-2022)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Tahun berjalan)	
URAIAN	INDIKATOR/URAIAN	INDIKATOR/URAIAN	INDIKATOR/URAIAN	INDIKATOR/URAIAN					Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	14	01	100	01	Kordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Keagamaan	Luaran Dokumen hasil Kordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Keagamaan	1					1	1	100
	14	01	100	02	Kordinasi dan pelatihan pengurus Pendidikan Tawar dan Tinggi	Luaran Papanel Bimbingan Tawar dan Tinggi yang Menghimpun Pendidikan dan Pelatihan (Jaring)	1					1	1	100
	14	01	100		Chitrasean Ummah Pengkaji Masjid	Pembinaan kordinasi antara dan pengurus kordinasi (%)	100							0
P	14	01	100	03	Pembinaan Kompleks Fasilitas Fasilitas Perumahan Masyarakat	Luaran Paket pembangunan fasilitas Fasilitas Perumahan Masyarakat yang disediakan (Paket)	1					1	1	100
	14	01	100	04	Pembinaan Perumahan (Perumahan Masyarakat)	Luaran paket pembangunan perumahan yang disediakan (Paket)	1					1	1	100
P	14	01	100	05	Pembinaan Perumahan Kincir Tawar (Paket Kincir Tawar)	Luaran paket pembangunan perumahan yang disediakan (Paket)	1					1	1	100
	14	01	100	06	Pembinaan Perumahan Kincir Tawar (Paket Kincir Tawar)	Luaran paket pembangunan perumahan yang disediakan (Paket)	1					1	1	100
P	14	01	100	07	Pembinaan Perumahan Kincir Tawar (Paket Kincir Tawar)	Luaran paket pembangunan perumahan yang disediakan (Paket)	1					1	1	100
P	14	01	100	08	Pembinaan Perumahan Kincir Tawar (Paket Kincir Tawar)	Luaran paket pembangunan perumahan yang disediakan (Paket)	1					1	1	100

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 391–398

Kode					URAIAN BIDANG/URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA HASIL KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Tahun)	Target Kinerja Program (Rencana Penganggaran Daerah) 2015-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Subprogram (Rencana Penganggaran Daerah) tahun (K-2) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Subprogram Tahun 2015 (K-2)			Target Program dan Subprogram Rencana Penganggaran Daerah Tahun (K-1) 2015	Realisasi Capaian Target Rencana Penganggaran Daerah Tahun 2015 (Tahun Berjalan)	
Unit Kerja	Wewenang/Instansi	Program/ Subprogram	Subsistem/ Kegiatan	Aspek/Indikator					Target Kinerja Penganggaran Daerah Tahun 2015	Realisasi Kinerja Penganggaran Daerah Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Realisasi Capaian Program dan Subprogram Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	DA	D1	D101	D10101	Proyeksi Biaya Cetak dan Pengiriman	Jumlah paket barang cetak dan pengiriman (paket)	12					12	12	100
					Proyeksi Kegiatan Tahun (Buku Monev Tahun Berjalan)	Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan Tahun (Buku)	12			12	12	100		
D	DA	D1	D101	D10101	Proyeksi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SUD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SUD	12					12	12	100
					Proyeksi Biaya M&E Dampak Pengaruh Lingkungan Masyarakat Daerah	Aktivitas Penyelenggaraan Rapat M&E Dampak Pengaruh Lingkungan Masyarakat Daerah (%)	12			12	12	100		
D	DA	D1	D101	D10101	Proyeksi Kegiatan dan Materi Lainnya	Jumlah unit kegiatan dan materi lainnya yang disediakan (unit)	12					12	12	100
					Proyeksi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	12			12	12	100		
D	DA	D1	D101	D10101	Proyeksi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	12					12	12	100
					Proyeksi Biaya Pengadaan Barang dan Jasa	Pendapatan pemerintah yang bersumber dari Penghasilan Daerah (%)	12			12	12	100		

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIRI DAN WIDANG WISAYAH PROGRAM/KEGIATAN/KELOMPOK KEGIATAN	INDUKSI DAN POKOK AIS KEGIATAN/KELOMPOK KEGIATAN (Paket)	Target Fungsi Capaian Program (Sesuai Rancangan Dasar) 2022-2023	Realisasi Target Fungsi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun (2022-2023)	Target dan Realisasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Rencana Penghasilan Daerah Tahun (2022-2023)	Realisasi Capaian Target Rencana Penghasilan Daerah Tahun 2022 (Tahun Anggaran)	
KELOMPOK	INDUKSI KEGIATAN	WIDANG WISAYAH	SUB WIDANG WISAYAH	ALOKASI BUDGET					Target Rencana Penghasilan Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Penghasilan Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	24	01	2.08	01	Penyediaan dan Sewa Menyewa	Lurah kegiatan penyediaan jasa sewa mobil/motor (Agensi)	12					12	12	100
	24	01	2.08	01	Penyediaan dan Sewa Menyewa, Sewa Dupa, Air dan Listrik	Lurah kegiatan Penyediaan jasa sewa mobil/motor, Sewa Dupa, Air dan Listrik yang disediakan (Agensi)	12					12	12	100
E	24	01	2.08	02	Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lurah kegiatan Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Agensi)	1					1	1	100
	24	01	2.08	02	Penyediaan dan Peralatan Umum Kantor	Lurah usaha penyediaan dan usaha pemeliharaan barang	12					12	12	100
E	24	01	2.08		Pembinaan Ruang Muka Depan Pemukiman Umum Pemukiman Desa		20							0
	24	01	2.08	03	Penyediaan dan Fasilitas, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pelayanan Kesehatan Desa (Kesehatan dan Lapangan)	Lurah Kesehatan Desa Operasional atau Lapangan yang diberikan dan diberikan Pajak dan Pemasangannya (Desa)	0					20	20	840
E	24	01	2.08	04	Pembinaan dan Tata Kelola Desa	Lurah dan Tata Kelola yang diberikan (Desa)	1					1	1	100
	24	01	2.08	05	Pembinaan, Rehabilitasi, Rehab, Ronda dan Pemertan Lantana	Lurah Desa Gedung Kantor yang diberikan/dikerjakan (Desa)	1					1	1	100

© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 261: 103–110

[illegible]

© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 261: 103–110

KODE					URUTAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUK DARI PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Tahun)	Target Kinerja Capaian Program (Sektor) 2015-2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan tahun (N-1) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (N-2)			Target Program dan Kegiatan Sampai Perkiraan Akhir Tahun (N+1) 2021	Realisasi Capaian Target Kinerja Perkiraan Akhir Tahun 2020 (Tahun Sejalan)	
KELOMPOK	INDUK PROGRAM	PROGRAM	SUBPROGRAM	Sub Kegiatan					Target Kinerja Perkiraan Akhir Tahun 2021	Realisasi Kinerja Perkiraan Akhir Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	08	01	1.01	01	Kelembagaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring, Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	Aspek Kelangkaan Hasil Instalasi Perencanaan Perumahan Tersebut dan Bidang Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi								
2	08	02	1.02	02	Kelembagaan Perencanaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	Aspek Kelangkaan Hasil Instalasi Perumahan Tersebut dan Bidang Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	1				1	100		
2	08	03	1.03	03	Kelembagaan Perencanaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	Aspek Kelangkaan Hasil Instalasi Perumahan Tersebut dan Bidang Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	10				10	100		
2	08	04	1.04	04	Kelembagaan Perencanaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	Aspek Kelangkaan Hasil Instalasi Perumahan Tersebut dan Bidang Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	10						0	
2	08	05	1.05	05	Kelembagaan Perencanaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	Aspek Kelangkaan Hasil Instalasi Perumahan Tersebut dan Bidang Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	10				10	100	87	
2	08	06	1.06	06	Kelembagaan Perencanaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	Aspek Kelangkaan Hasil Instalasi Perumahan Tersebut dan Bidang Pelak, Habitat, Sosial dan Ekonomi	1000							

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIKESAN (REDAKSI) RUMAH PROGRAM KHIDMATAN TER KAWATAN	INDUKSI DAN PENGALAMAN KAWATAN TER KAWATAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Sesuai Kategori Dana)	Realisasi Target Sesuai Hasil Program dan Kategori Kategori Kategori (tahun 2022-2023)	Target dan Realisasi Rencana Program dan Kategori Tahun 2022 (R-2)			Target Program dan Kategori Rencana Kategori Kategori (tahun 2022-2023)	Realisasi Capaian Target Sesuai Program dan Kategori Tahun 2022 (tahun Kategori)	
INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI					Target Renc Kategori Kategori Tahun 2022	Realisasi Rencana Kategori Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kategori Kategori Tahun 2022	Tingkat Capaian Kategori Kategori Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	01	1.01		Program dan Pengembangan Layanan Penerimaan Layanan Penerimaan Program Terpadu Berkas Ketersediaan	Jumlah Layanan KES dan Pengembangan, kegiatan Materi untuk meningkatkan Gestur dan Perilaku Anak (Sesuai)	24							0
2	02	01	1.02	02	Pengembangan Kegiatan untuk Daya Lainya, Penerimaan Layanan Penerimaan Terpadu Penerimaan Ketersediaan Ketersediaan (KES/KES)	Jumlah Sumber Daya Manusia Layanan Penerimaan Terpadu Penerimaan bagi Penerimaan Kategori Ketersediaan Kategori (Kategori)	24					24	24	100
1	03	01	1.03	04	Pengembangan Kegiatan untuk Layanan Penerimaan Terpadu Penerimaan Program Terpadu Ketersediaan KES/KES	Jumlah Dokumen hasil Penerimaan (Pengembangan Layanan Layanan Penerimaan Terpadu Ketersediaan KES/KES (Sesuai))	1					1	1	100
1	05	04			Program Pengembangan Ketersediaan Ketersediaan	Penerimaan Penerimaan Ketersediaan Ketersediaan (Ketersediaan) yang Ketersediaan Ketersediaan	Masih							
1	06	04	1.01		Pengembangan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan (KES) dan (KES) Terpadu Berkas KES/KES	Jumlah Layanan KES dan Pengembangan, kegiatan Materi untuk meningkatkan Gestur dan Perilaku Anak (Sesuai)	1							0

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAAN (BIDANG/KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN)	INDUKSI DOK. PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN (Tahun)	Target Kinerja Capaian Program (Semester Pengajaran 2022-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/kegiatan (Semester Pengajaran Tahun 2022-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (N-S)			Target Program dan Kegiatan Rata-rata Pengajaran Tahun 2022-2023	Realisasi Capaian Target Kinerja Pengajaran Tahun 2022 (Tahun Pengajaran)	
UNIVERSITAS	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KELOMPOK	ALOKASI BUDGET					Target Kinerja Pengajaran Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pengajaran Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	04	1.01	01	Pengembangan Kapasitas Mahasiswa untuk Peningkatan Kualitas Layanan Keperawatan Kaki Kaki	Jumlah Layanan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Layanan Keperawatan Kaki/Tela (Jepang)	1					1	1	100
1	06	04	1.01		Pengembangan dan Pengembangan Layanan Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan dan Menjadikan KGI dan PGI Anak dan Wanita Keperawatan Ginekologi Keperawatan Kaki	Jumlah Layanan Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan yang mendapat Penguatan (Lembaga)	1							0
1	06	04	1.01	01	Aktivitas Komunitas dan pengembangan Pengembangan Layanan Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan Peningkatan Kualitas Keperawatan Peningkatan Kualitas Keperawatan Kaki Kaki	Jumlah Layanan Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan yang mendapat Penguatan dan Penguatan (Lembaga)	1							
1	06	04	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Tenaga Ahli Lembaga Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan Tenaga Ahli Keperawatan Kaki Kaki	Jumlah Sumber Daya Lembaga Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan yang mendapat Penguatan Kapasitas Keperawatan Keperawatan Kaki/Tela (Jepang)	10					10	10	100
1	06	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas untuk Lembaga Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan Peningkatan Kualitas Keperawatan Peningkatan Kualitas Keperawatan Kaki Kaki	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Keperawatan Lembaga Perawatan Lantai Perawatan Kualitas Keperawatan Keperawatan Keperawatan Kaki/Tela (Jepang)	1					1	1	100

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAN (DIDANGLIYANY PROGRAM/KEGIATAN/LENGKAPAN)	INDUKSI DOK. PROGRAM/KEGIATAN/LENGKAPAN (Paket)	Target Fungsi Capaian Program (Sesuai Rancangan Dasar)	Realisasi Target Fungsi Hasil Program/kegiatan (Sesuai Rancangan Dasar) tahun 2022-2023	Target dan Realisasi Fungsi Program dan Kegiatan Tahun 2022 (P-2)			Target Program dan Kegiatan Rata-rata Persebaran Daerah Tahun 2022-2023	Realisasi Capaian Target Rata-rata Persebaran Daerah Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	
INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI					Target Rata-rata Persebaran Daerah Tahun 2022	Realisasi Rata-rata Persebaran Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Rata-rata Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Rata-rata (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	00	44	1.01		Penyusunan Laporan Hasil Kajian/Asesmen Masyarakat KID dan Pak. Anak yang Wilayah Kependudukan Daerah Kabupaten Kota	Lembar Laporan Data Dasar dan Asesmen untuk Diseminasi dalam Pengembangan Kebijakan Anak Kabupaten Kota (Sesuai)	1							0
1	00	44	1.01	01	Penyusunan Laporan Kegiatan/Hasil Kajian/Asesmen Masyarakat KID dan Pak. Anak yang Wilayah Kependudukan Daerah Kabupaten Kota	Lembar Laporan Kegiatan/Hasil Kajian/Asesmen Masyarakat KID dan Pak. Anak yang Wilayah Kependudukan Daerah Kabupaten Kota (Sesuai)	1					1	1	100
1	00	01			Program Penelitian Sosial Data Dasar dan Asesmen	Lembar Penelitian yang diseminasi (Orang)	1							0
1	00	01	1.01		Penyusunan, Pengumpulan, Analisis dan Penyajian Data Dasar dan Asesmen Kependudukan Data & Tangkai Daerah Kabupaten Kota	Lembar Penelitian yang diseminasi (Orang)	1							0
1	00	01	1.01	01	Penyusunan Data Dasar dan Asesmen Kependudukan Kabupaten Kota	Penyusunan Sosial dan Asesmen (atau penelitian dan pengumpulan data) wilayah Kabupaten Kota	1					1	1	100
1	00	01			Program Penelitian Pak. Anak (PITA)	Penyusunan Sosial Kependudukan (Orang) (Orang)	1					1	1	100
							0.00							0

B. PENETRA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAAN/INOVASI/REKREASI/PROGRAM/KEGIATAN/LEMBAR KEGIATAN	INDUKSI/LOKASI/PROYEKSI/KEGIATAN/LEMBAR KEGIATAN (Tahun)	Target Kinerja Capaian Program (Sesuai Rencana Kerja)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan (Sesuai Laporan Tahunan 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (K-2)			Target Program dan Kegiatan (Sesuai Laporan Tahunan 2022)	Realisasi Capaian Target Kinerja Peningkatan Capaian Tahun 2022 (Tahunan Berjalan)	
INDUKSI/REKREASI	PROYEKSI	KEGIATAN	LEMBAR KEGIATAN	ALOKASI BUDGET					Target Kinerja Peningkatan Capaian Tahun 2022	Realisasi Kinerja Peningkatan Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Peningkatan Daya Kelengkapan Layanan Anak (R)	12							12
1	0%	0%	2,0%		Pelaksanaan PTA pada Layanan Peningkatan Daya Kelengkapan dan Daya Kelengkapan Anak/Kota	Audit Dokumen Matrik Evaluasi dan Indikator Pelaksanaan Peningkatan Daya Kelengkapan Anak/Kota (Sesuai)	1							12
2	0%	0%	2,0%	0%	Kendali dan Pelaksanaan Pelaksanaan Peningkatan Daya Kelengkapan Anak/Kota	Audit Dokumen Matrik Evaluasi dan Indikator Pelaksanaan Peningkatan Daya Kelengkapan Anak/Kota (Sesuai)	1							12
3	0%	0%	2,0%		Pengawasan dan Pelaksanaan Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Peningkatan Kualitas (Sesuai) Anak/Kota	Audit Dokumen (Sesuai) yang Sesuai (Sesuai)	1					12	12	100
4	0%	0%	2,0%		Peningkatan Layanan Peningkatan Kualitas (Sesuai) Anak/Kota	Lembar Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas (Sesuai) Anak/Kota (Sesuai)	12					12	12	127

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					URUTAN PERANGKAP PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDUKSI DOKUMEN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Semester Pengajaran 2022-2023)	Realisasi Target Fungsi Hasil Program (Semester Pengajaran 2022-2023)	Target dan Realisasi Fungsi Program (Semester Tahun 2022 (N-2))			Target Program dan Capaian Fungsi Pengajaran (Semester Tahun 2022 (N-1) 2022)	Realisasi Capaian Target Fungsi Pengajaran (Semester Tahun 2022 (Tahun Berjalan))	
URUTAN	INDUKSI DOKUMEN	URUTAN	INDUKSI DOKUMEN	URUTAN					Target Fungsi Pengajaran (Semester Tahun 2022)	Realisasi Fungsi Pengajaran (Semester Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Fungsi Pengajaran (Semester Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Fungsi (%)
1	06	06	1.01	04	Program Injeksi air ke Lahan Persegi Lurus Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota	Lantai Dekat dan Hasil Pengajaran injeksi air ke Lahan Persegi Lurus Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota (dokumen)	2					2	2	100
2	14				Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota									0
3	14	01			Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota	Lantai Dekat dan Hasil Pengajaran Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota (dokumen)	2							0
4	14	02	1.01		Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota	Lantai Dekat dan Hasil Pengajaran Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota (dokumen)								0
5	14	01	1.01	02	Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota	Lantai Dekat dan Hasil Pengajaran Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota (dokumen)	2					2	2	100
6	14	01	1.01		Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota	Lantai Dekat dan Hasil Pengajaran Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota (dokumen)	2							0
7	14	01	1.01		Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota	Lantai Dekat dan Hasil Pengajaran Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota (dokumen)	2					2	2	100
8	14	01	1.01		Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota	Lantai Dekat dan Hasil Pengajaran Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tergar Daerah Kota Kota (dokumen)	2							0

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAN (REDAKSI/REVISI/PROGRAM/KEGIATAN/NEW KEGIATAN)	INDUKSI/NEW PROGRAM/KEGIATAN/NEW KEGIATAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Semua Kegiatan/Detail) 2022-2023	Realisasi Target Fungsi Hasil Program/Detail Kegiatan/semua kegiatan tahun 2022-2023	Target dan Realisasi Fungsi Program dan Kegiatan Tahun 2022 (2022)			Target Program dan Kegiatan Fungsi/Detail Tahun 2022 (2022)	Realisasi Capaian Target Fungsi/Detail/Detail Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	
INDUKSI/REDAKSI/REVISI/PROGRAM/KEGIATAN/NEW KEGIATAN	INDUKSI/REDAKSI/REVISI/PROGRAM/KEGIATAN/NEW KEGIATAN	INDUKSI/REDAKSI/REVISI/PROGRAM/KEGIATAN/NEW KEGIATAN	INDUKSI/REDAKSI/REVISI/PROGRAM/KEGIATAN/NEW KEGIATAN	INDUKSI/REDAKSI/REVISI/PROGRAM/KEGIATAN/NEW KEGIATAN					Target Fungsi/Detail/Detail Tahun 2022	Realisasi Fungsi/Detail/Detail Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Fungsi/Detail/Detail Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Fungsi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	14	41	1.1	61	Aktivasi Program OCBP sebagai Stakeholder dan Mitra Kerja	Lembar Diketahui yang mendapatkan Aktivasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Koordinasi dan Keluarga Berencana) sebagai Stakeholder dan Mitra Kerja	12					12	12	100
	14	41	1.1	62	Penyediaan informasi dan edukasi (IG) Program OCBP Sosial Rantai Budaya Lokal	Lembar Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (IG) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Koordinasi dan Keluarga Berencana) Sosial Rantai Budaya Lokal (Dokumen)	2					2	2	100
2	14	41	1.1	64	Promosi dan IG Program OCBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Lembar Dokumen Promosi dan IG Program OCBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3					3	3	100
2	14	41	1.1	66	Pelaksanaan Monitoring Operasional Program OCBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Kecamatan), Rapat Koordinasi Desa (Kecamatan), dan Kelurahan (Kecamatan)	Lembar Laporan Monitoring Operasional Program OCBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Kecamatan), Rapat Koordinasi Desa (Kecamatan), dan Kelurahan (Kecamatan)	4					4	4	100

Kecamatan Kota Depok Tahun 2022

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAAN (DIDANALISIS) DAN PROGRAM/KEGIATAN/LEMBAGA KEGIATAN	INDUKSI DOKUMEN PROGRAM/KEGIATAN/LEMBAGA KEGIATAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Semua Kegiatan/Kelembagaan)	Realisasi Target Fungsi Hasil Program/Kelembagaan (Semua Kegiatan/Kelembagaan) Tahun 2022-2023	Target dan Realisasi Fungsi Program dan Kegiatan Tahun 2022 (N-S)			Target Program dan Kegiatan Fungsi Peningkatan Daerah Tahun 2022-2023	Realisasi Capaian Target Fungsi Peningkatan Daerah Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	
INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN					Target Fungsi Peningkatan Daerah Tahun 2022	Realisasi Fungsi Peningkatan Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Fungsi Peningkatan Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Fungsi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	14	41	1.01	87	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai di Balai Penyelidikan KSDRC	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyelidikan Dengan Koneksi (Pembangunan Keluarga, Koordinasi dan Kolaborasi Komunitas)	12					12	0	0
2	14	45	2.01	88	Pengelolaan Program KSDRC	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Program KSDRC	12					12	0	0
3	14	47	2.02		Pengelolaan Jaringan Pemantau KSDRC (Pusat Kegiatan KSDRC/PLKSD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Jaringan Pemantau KSDRC (Pusat Kegiatan KSDRC/PLKSD)	1							0
2	14	47	2.02	91	Pembinaan KSDRC dan Program KSDRC di Unit Kegiatan KSDRC (Pusat Kegiatan KSDRC/PLKSD)	Jumlah Organisasi yang Membina Pembinaan KSDRC dan Program Dengan Koneksi (Pembangunan Keluarga, Koordinasi dan Kolaborasi Komunitas) di Unit Kegiatan KSDRC (Pusat Kegiatan KSDRC/PLKSD) (Organisasi)	14					14	0	0
2	14	48	2.03	94	Pengelolaan Pelaksanaan Penyelidikan, Pengumpulan, Pengolahan dan Pengolahan Program KSDRC untuk Peningkatan KSDRC (Pusat Kegiatan KSDRC/PLKSD)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pelaksanaan Penyelidikan, Pengumpulan, Pengolahan dan Pengolahan Program KSDRC untuk Peningkatan KSDRC (Pusat Kegiatan KSDRC/PLKSD) (Organisasi)	1					1	0	0

KSDRC dan KSDRC Tahun 2022

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAAN (DIDANGLIHKAN) PROGRAM/KEGIATAN/LEMBAR KEGIATAN	INDUKSI DOKUMEN/LEMBAR KEGIATAN/LEMBAR KEGIATAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Sesuai Kelembagaan Desain)	Realisasi Target Fungsi Hasil Program/lemb Kelembagaan Kelembagaan sampai dengan tahun (N-1) 2022	Target dan Realisasi Fungsi Program dan Kelembagaan Tahun 2022 (N-2)			Target Program dan Kelembagaan Kelembagaan sampai dengan tahun (N-1) 2022	Realisasi Capaian Target Sesuai Fungsionalitas Kelembagaan Tahun 2022 (Tahun Kelembagaan)	
KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN	KELEMBAGAAN					Target Fungsi Kelembagaan Tahun 2022	Realisasi Fungsi Kelembagaan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kelembagaan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kelembagaan Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	14	01	1.01	04	Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan (KPK)	Kelembagaan Kelembagaan yang memiliki Kelembagaan Kelembagaan (KPK)								
1	14	01	1.01		Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan (KPK)	100					100	0	0
1	14	01	1.01		Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan (KPK)	0						0	0
1	14	01	1.01	04	Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan (KPK)	0					0	0	0
1	14	01	1.01	04	Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan (KPK)	100					100	100	100
1	14	01	1.01	04	Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan (KPK)	0					0	0	0

© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 261: 103–110

[illegible]

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIRI DAN URUTAN LEMBAR PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKSI DOKUMEN KEGIATAN (Paket)	Target Peserta Capaian Program (Rencana Capaian) 2022-2023	Realisasi Target Peserta Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2022-2023	Target dan Realisasi Peserta Program dan Kegiatan Tahun 2022 (N=2)			Target Peserta dan Kegiatan Sampai dengan Tahun 2022 (N=1)	Realisasi Capaian Target Peserta dan Kegiatan Sampai dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	
INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN	INDUKSI DOKUMEN					Target Peserta	Realisasi Peserta	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Peserta dan Kegiatan Sampai dengan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Peserta (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	01	2.34	02	Indikator Pendidikan Umum: Akademi di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang diberikan Cetak	20					2	0	0
2	14	03	2.34	03	Pelaksanaan dan Pengkaderan Program KHRPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengkaderan Program KHRPK di Kampung KB (Pengkaderan Solusinya, dan Solusinya KHRPK) di Kampung KB	20					20	0	0
2	14	03	2.34	04	Pelaksanaan Tergabung Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tergabung Kampung KB (Laporan)	2					2	0	0
2	14	04			Program Pendidikan dan Peningkatan Literasi Masyarakat	Persentase remaja Perempuan umur 15-18 tahun mengikuti KB atau sedang hamil anak pertama (%)	1000							0
					Persentase Balita yang mengikuti KBK (N=1)	20								0

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAN (DIDANGLIYAKAN) PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDUKSI DOK. PROGRAM/AS- KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Tahun)	Target Fungsi Capaian Program (Semesta Peningkatan Grafik)	Realisasi Target Fungsi Hasil Program/ sub kegiatan Capaian sampai dengan tahun (Y-2) 2022	Target dan Realisasi Fungsi Program/ sub kegiatan Tahun 2022 (Y-2)			Target Program/ sub kegiatan Fungsi Capaian Tahun (Y-1) 2022	Realisasi Capaian Target Semesta Peningkatan Capaian Tahun 2022 (Tahun Berkas)	
INDUKSI DOK.	INDUKSI DOK.	INDUKSI DOK.	INDUKSI DOK.	INDUKSI DOK.					Target Fungsi Peningkatan Capaian Tahun 2022	Realisasi Fungsi Peningkatan Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ sub kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Semesta (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	14	44	2.01	81	Peningkatan Peningkatan Kualitas Makna Peningkatan Kualitas dan Kualitas Kelompok	Untuk Kelompok Kegiatan dan Kegiatan/ sub kegiatan (Bina Kelompok/ sub (BKL), Bina Kelompok/ sub (BKS), Pusat Informasi dan Konseling/ sub (PIK), Bina Kelompok/ sub (BKL), Unit Peningkatan Peningkatan/ sub (UPP) dan Peningkatan/ sub (Peningkatan/ sub)	100							100
2	14	44	2.01	81	Peningkatan Peningkatan Kualitas Kualitas dan Peningkatan Kualitas (BKL), Bina Kelengkapan/ sub (BKS), Bina Kelengkapan/ sub (BKS), Pusat Informasi dan Konseling/ sub (PIK), Bina Kelengkapan/ sub (BKL), Unit Peningkatan Peningkatan/ sub (UPP) dan Peningkatan/ sub (Peningkatan/ sub)	Untuk Kelompok Kegiatan dan Kegiatan/ sub kegiatan (Bina Kelengkapan/ sub (BKL), Bina Kelengkapan/ sub (BKS), Pusat Informasi dan Konseling/ sub (PIK), Bina Kelengkapan/ sub (BKL), Unit Peningkatan Peningkatan/ sub (UPP) dan Peningkatan/ sub (Peningkatan/ sub)	100					100	0	100
3	14	44	2.01	82	Peningkatan Peningkatan Kualitas Kualitas dan Peningkatan Kualitas (BKL), Bina Kelengkapan/ sub (BKS), Bina Kelengkapan/ sub (BKS), Pusat Informasi dan Konseling/ sub (PIK), Bina Kelengkapan/ sub (BKL), Unit Peningkatan Peningkatan/ sub (UPP) dan Peningkatan/ sub (Peningkatan/ sub)	Untuk Peningkatan Peningkatan/ sub (UPP) dan Peningkatan/ sub (Peningkatan/ sub)	100					100	0	100

B. PENYERTA TAHUN 2022-2023

KODE					CIPTAN (DIDANGKIPKAN) PROGRAM KEGIATAN TER KEGIATAN	INDUKSI DAN PENGALAM KEGIATAN TER KEGIATAN (Tahun)	Target Peserta Capaian Program (Sesuai Kelembagaan Desain)	Realisasi Target Sesuai Hasil Program dan Kelembagaan Kelembagaan Capaian Sesuai dengan tahun (N-1) 2022	Target dan Realisasi Peserta Program dan Kelembagaan Tahun 2022 (N-2)			Target Program dan Kelembagaan Kelembagaan Capaian Sesuai Tahun (N-1) 2022	Realisasi Capaian Target Sesuai Peserta dan Tahun 2022 (Tahun Kelembagaan)	
INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI	INDUKSI					Target Peserta Kelembagaan Tahun 2022	Realisasi Peserta Kelembagaan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kelembagaan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Kelembagaan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	14	44	1.01	64	Program Keluarga Terpadu Pelayanan Keluarga Terpadu dan Kelembagaan Keluarga (PKK, BKK, BKL, PPPK, POKK dan Kelembagaan PPPK)	Indikator Kelembagaan yang meliputi Dinas dan Pelayanan Terpadu Pelayanan Keluarga Terpadu dan Kelembagaan Keluarga (PKK, BKK, BKL, PPPK, POKK dan Kelembagaan PPPK)						400	0	0
2	14	44	1.01	65	Program Keluarga Terpadu Pelayanan Keluarga Terpadu dan Kelembagaan Keluarga (PKK, BKK, BKL, PPPK, POKK dan Kelembagaan PPPK)	Indikator Kelembagaan yang meliputi Dinas dan Pelayanan Terpadu Pelayanan Keluarga Terpadu dan Kelembagaan Keluarga (PKK, BKK, BKL, PPPK, POKK dan Kelembagaan PPPK)	180					180	0	0
3	14	44	1.01	66	Program Keluarga Terpadu Pelayanan Keluarga Terpadu dan Kelembagaan Keluarga (PKK, BKK, BKL, PPPK, POKK dan Kelembagaan PPPK)	Indikator Kelembagaan yang meliputi Dinas dan Pelayanan Terpadu Pelayanan Keluarga Terpadu dan Kelembagaan Keluarga (PKK, BKK, BKL, PPPK, POKK dan Kelembagaan PPPK)	100					1		0

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian kuserja pada pada tahun 2022 Program Keluarga Berencana belum mencapai target. Hal ini terlihat pada capaian dari dua indikator program yang belum optimal yakni cakupan FUS peserta KB aktif sebesar 38,20 dari yang ditargetkan sebesar 68% dan cakupan akseptor baru sebesar 39,95 dari yang

kelembagaan tahun 2022-2023

ditargetkan sebesar 70%. Faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab tidak tercapainya target pada indikator-indikator tersebut adalah dukungan kualitas SDM yang belum optimal, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk ber KB serta partisipasi Pria ber KB juga masih rendah. Sedangkan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada beberapa indikator yang menunjukkan capaian kinerjanya belum optimal dan perlu mendapat perhatian. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa terdapat table A yang memuat program dan indikator renstra tahun 2017 – 2022 sedangkan pada table B memuat program dan indikator renstra tahun 2023- 2026, karena tahun 2023 ini merupakan tahun peralihan dari rentra 2017-2022 ke renstra 2023-2026 dimana pada rentra 2017-2022 telah berakhir sehingga ada perbedaan pada target dan indikator baik program dan kegiatan pada renstra 2023- 2026.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Dinas P2KBPA Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	UIC	Target Renstra Perangkat Daerah (2023)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun (n-2)	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
	1	4	5									
A	Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD											
1	Angka Kelahiran Total (TKP)		Y	3,1	3	3	2,8	2,9	0	3	2,8	
2	Indeks Pembangunan Gender		Y	0	92,24	93,16	94,08	0	0	93,16	94,08	
3	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Kasus)		Y		20	19	18	25	63	19	18	
4	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (Kasus)		Y		25	23	21	5	4	25	21	

8	Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan											
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga		✓		3	3	3	0	0	3	3	
2	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif (mCPR)				58,63	54,75	55,87	38,2	37,88	54,75	55,87	
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		✓		22	20	28	52,71	58,89	20	28	
4	Rasio Akseptor KB		✓		69	62	65	54,57	0,58	62	65	
5	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/mahasiswa		✓		16	16	17	0	0	16	17	
6	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Indeks Pembangunan Gender		✓		92,24	93,16	94,08	0	0	93,16	94,08	
2	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Kasus)		✓		20	19	18	25	63	19	18	
3	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (Kasus)		✓		25	23	21	3	4	23	21	

4	Persentase partisipasi perempuan di sector public	✓		46	47	47,5	55	0	47	47,5	
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	✓		3,3	6,8	5,6		0,03	5,6	5,6	
6	Rasio KDRP	✓		0	0	0	0,001	0	0	0	
7	Partisipasi angkatan kerja Perempuan	✓		47,5	48,2	48,4	62,8	0	48,2	48,4	

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang ada menunjukkan bahwa belum seluruh indikator memperoleh hasil yang optimal. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai bagian dari permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPIKBP3A dan berpengaruh pada capaian kinerja adalah sebagai berikut: Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB, Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan KB, Kurangnya dukungan lintas sektor dalam program KB, Perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai, Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran belum optimal, Fasilitas sarana prasarana publik yang responsif gender belum tersedia secara memadai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKEPPPA, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKEPPPA serta tuntutan regulasi atau kebijakan nasional untuk isu prioritas tertentu. Berdasarkan pada beberapa faktor tersebut maka ditetapkan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKEPPPA sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan program *Bangga Kencana* yang merupakan akronim dari *Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana* yang menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas belum optimal.
3. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Program KB.
4. Tingginya Angka keluarga beresiko *stunting*.
5. Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
6. Terbatasnya jumlah lembaga / forum untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan dan Anak serta belum berperan maksimal.
7. Dukungan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih sangat terbatas.
8. Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan anak untuk dipergunakan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
9. Aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi terbatas.
10. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelayanan publik.

Kode	Kategori					Detail					Status
	Nama / Deskripsi / Keterangan	Detail	Unit	Angka	Unit / Keterangan	Nama / Deskripsi / Keterangan	Detail	Unit	Angka	Unit / Keterangan	
001	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	001	001	001	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	001	001	001	001
002	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	002	002	002	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	002	002	002	002
003	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	003	003	003	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	003	003	003	003
004	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	004	004	004	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	004	004	004	004
005	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	005	005	005	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	005	005	005	005
006	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	006	006	006	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	006	006	006	006
007	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	007	007	007	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	007	007	007	007
008	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	008	008	008	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	008	008	008	008
009	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	009	009	009	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	009	009	009	009
010	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	010	010	010	Anggaran Kas/Tabungan	Anggaran Kas/Tabungan	010	010	010	010

Jahr	Vorname, Nachname					Geburtsdatum, Geburtsort					Beruf			
	Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort	Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort	Jahr	Monat	Tag	Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort	Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort	Jahr	Monat	Tag				
1900	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1900 Geburtsort: Wien				01.01.1900	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1900 Geburtsort: Wien				01.01.1900				
1901	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1901 Geburtsort: Wien	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1901 Geburtsort: Wien	1901	1	01	01.01.1901	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1901 Geburtsort: Wien	1901	1	01	01.01.1901			
1902	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1902 Geburtsort: Wien	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1902 Geburtsort: Wien		1902	1	01	01.01.1902	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1902 Geburtsort: Wien		1902	1	01	01.01.1902	
		Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1902 Geburtsort: Wien		1902	1	01	01.01.1902	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1902 Geburtsort: Wien		1902	1	01	01.01.1902	
1903	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1903 Geburtsort: Wien				01.01.1903	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1903 Geburtsort: Wien				01.01.1903				
1904	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1904 Geburtsort: Wien				01.01.1904	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1904 Geburtsort: Wien				01.01.1904				
1905	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1905 Geburtsort: Wien	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1905 Geburtsort: Wien	1905	1	01	01.01.1905	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1905 Geburtsort: Wien	1905	1	01	01.01.1905			
1906	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1906 Geburtsort: Wien				01.01.1906	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1906 Geburtsort: Wien				01.01.1906				
1907	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1907 Geburtsort: Wien				01.01.1907	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1907 Geburtsort: Wien				01.01.1907				
1908	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1908 Geburtsort: Wien				01.01.1908	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1908 Geburtsort: Wien				01.01.1908				
1909	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1909 Geburtsort: Wien				01.01.1909	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1909 Geburtsort: Wien				01.01.1909				
1910	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1910 Geburtsort: Wien				01.01.1910	Maximilian Joseph Maria von Österreich Geburtsdatum: 01.01.1910 Geburtsort: Wien				01.01.1910				

ID	Kategorie A					Kategorie B					Status
	Titel (max. 100 Zeichen)	Unterthema (max. 100 Zeichen)	Art	Art	Art (max. 100 Zeichen)	Titel (max. 100 Zeichen)	Unterthema (max. 100 Zeichen)	Art	Art	Art (max. 100 Zeichen)	
11111111	Titel A (max. 100 Zeichen)	Unterthema A (max. 100 Zeichen)	Art A	Art A	Art A (max. 100 Zeichen)	Titel B (max. 100 Zeichen)	Unterthema B (max. 100 Zeichen)	Art B	Art B	Art B (max. 100 Zeichen)	Beendet
22222222	Titel B (max. 100 Zeichen)	Unterthema B (max. 100 Zeichen)	Art B	Art B	Art B (max. 100 Zeichen)	Titel C (max. 100 Zeichen)	Unterthema C (max. 100 Zeichen)	Art C	Art C	Art C (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung
33333333	Titel C (max. 100 Zeichen)	Unterthema C (max. 100 Zeichen)	Art C	Art C	Art C (max. 100 Zeichen)	Titel D (max. 100 Zeichen)	Unterthema D (max. 100 Zeichen)	Art D	Art D	Art D (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung
44444444	Titel D (max. 100 Zeichen)	Unterthema D (max. 100 Zeichen)	Art D	Art D	Art D (max. 100 Zeichen)	Titel E (max. 100 Zeichen)	Unterthema E (max. 100 Zeichen)	Art E	Art E	Art E (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung
55555555	Titel E (max. 100 Zeichen)	Unterthema E (max. 100 Zeichen)	Art E	Art E	Art E (max. 100 Zeichen)	Titel F (max. 100 Zeichen)	Unterthema F (max. 100 Zeichen)	Art F	Art F	Art F (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung
66666666	Titel F (max. 100 Zeichen)	Unterthema F (max. 100 Zeichen)	Art F	Art F	Art F (max. 100 Zeichen)	Titel G (max. 100 Zeichen)	Unterthema G (max. 100 Zeichen)	Art G	Art G	Art G (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung
77777777	Titel G (max. 100 Zeichen)	Unterthema G (max. 100 Zeichen)	Art G	Art G	Art G (max. 100 Zeichen)	Titel H (max. 100 Zeichen)	Unterthema H (max. 100 Zeichen)	Art H	Art H	Art H (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung
88888888	Titel H (max. 100 Zeichen)	Unterthema H (max. 100 Zeichen)	Art H	Art H	Art H (max. 100 Zeichen)	Titel I (max. 100 Zeichen)	Unterthema I (max. 100 Zeichen)	Art I	Art I	Art I (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung
99999999	Titel I (max. 100 Zeichen)	Unterthema I (max. 100 Zeichen)	Art I	Art I	Art I (max. 100 Zeichen)	Titel J (max. 100 Zeichen)	Unterthema J (max. 100 Zeichen)	Art J	Art J	Art J (max. 100 Zeichen)	In Bearbeitung

Jika dilihat dari rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Dinas PIKBP3A kondisinya relatif sama baik terhadap jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan juga anggarannya.

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2024 Dinas PIKBP3A disusun dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan. Usulan dari pemangku kepentingan dalam konteks perencanaan ini muncul melalui kegiatan musrembang di 19 kecamatan. Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat ini pada dasarnya adalah mencermati setiap usulan yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah tersebut.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	Usulan Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan Sub Kegiatan (Satuan)	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
	2	3	4	5	6
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	URUSAN PENGANTARAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi di sektor publik(%)			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)			

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	Kec. Wotanulumedo (Desa Panda), Kec. Adonara Tengah (Desa Kenatan), Kec. Witihama (Desa Balaweling), Kec. Larantuka (Kel. Lewolena, Lebae, Pulentobi Wangi Bai), Kec. Solor Selatan (Desa Kakik Aimatea, Lemanu), Kec. Oemah pagong (Desa Lewakluki), Kec. Solor Timur (Desa Mananga), Kec. Solor Barat (Desa Balaweling I), Kel. Ritasabang, Kec. Trehena (Desa Tanawahang), Kec. Ila Bura (Desa Lawotobi), Kec. Adonara Barat (Desa Kmakamak), Kec. Adonara Timur (Desa Naramakoma, Leleni Sala)	16	Kegiatan bisa diakomodir tetapi kegiatan berpusat di Larantuka
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER	Persentase Desa/Kel menyediakan Data Gender (%)			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kewenangan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Larantuka (Kab. Kota Kabupaten)		
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Wotanulumedo (Desa Panda), Kec. Witihama (Desa Balaweling), Kec. Ila Mandiri (Desa Riangkoma), Kec. Larantuka (Kel. Balata), Kec. Trehena (Desa Tanawang, Konga), Kec. Ila Bura (Desa Lawotobi), Kec. Adonara Barat (Desa Watobaya), Kec. Adonara Timur (Desa Leleni Sala)	9 Desa	Kegiatan bisa diakomodir tetapi kegiatan berpusat di Larantuka
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	34,75		
		Cakupan Akseptor Baru (%)	65		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota			

	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	19 Kec. Kap. Ploim	10	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	Kec. Adonara Tengah (Desa Kanotan), Kec. Ile Bolong (Desa Goyak, Bungalewan, NelaJamawangi II.), Kec. Ile Bolong (Desa Dolaang), Kec. Larantuka (Kai), Amagarapati, Balala, Lebab, Pukantobi Wangi Bai), Kec. Solor Selatan (Desa Bubuatagamu, Lematu, Lawagragani), Kec. Solor Timur (Desa Kawuta, Wulubolong), Kec. Tahana (Desa Lawdingu, Tusupa, Tenawahang, Lerabolang, Konga, Adabang), Kec. Wulanggatang (Desa Hwa, Pululera, Walura), Kec. Adonara Timur (Desa Dawetas, Tapobai)	25	Usulan tidak semua diakomodir karena sudah terima tahun sebelumnya dan yang bisa menaffms Desa dengan lokasi stunting

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usulan masyarakat yang diterima sesuai dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A adalah dengan rincian : tiga program, tiga kegiatan dan empat sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur melaksanakan dua urusan yakni Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Implementasi dari penyelenggaraan urusan ini selalu dielaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, secara nasional melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkontribusi secara langsung pada Prioritas Nasional “Memusgihkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Tahun 2024. Komitmen untuk memberikan upaya yang terbaik dalam memastikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, serta perlindungan khusus dan pemenuhan hak khususnya dalam pencapaian 5 arahan Presiden menjadi fokus dalam RKA-K/L Rencan PPPA Tahun 2024 yaitu: 1) *Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kesetaraan*, 2) *Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak*, 3) *Pemenuhan ketertarikan terhadap perempuan dan anak*, 4) *Pemenuhan pekerja anak dan*, 5) *Pencegahan perkawinan anak*.

Selain fokus pada lima isu prioritas pembangunan PPPA sesuai arahan Presiden, kebijakan teknis Kementerian PPPA dalam pengalokasian Page Anggaran Tahun 2024 atau dalam menyusun RKA-K/L tahun 2024, diarahkan pada (1) *Peningkatan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di pusat dan daerah*, (2) *Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di K/L dan daerah*, (3) *Pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan IIE dan bonet*, (4) *Peningkatan sinergi dan kolaborasi antara K/L, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat*, (5) *Pemantauan efektivitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfiskal Pelapangan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA)*, dan (6) *Penguatan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)*.

Berbagai kebijakan dan prioritas nasional dalam rencana pembangunan tahun 2024 sejalan dengan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP1KBP3A

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra

Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2024
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	3
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	91,32	93,16
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	19
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	21

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program Prioritas, 9 (sembilan) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
DP1KEP3A

ESDP				Uraian Bidang / Urutan Prioritas, Rencana dan Program Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Jumlah)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Capaian Pening	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Luas	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana/Pagu (Miliar)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu (Miliar)
1.				2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	06			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			8.350.000,000					8.350.000,000
1.	06			JURUSAN PEMERTAHAN RUANG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			114.000,000					114.000,000
1.	06	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam publikasi	47%	75.000,000			47,5%		110.000,000
1.	06	02	2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Aksi Lokal dan Sosial (aspek Ketahanan dan Pemberdayaan PUS termasuk PPRB (Kategori Gender)		70.000,000					40.000,000

Kode					Tipe Kegiatan / Nama Kegiatan / Deskripsi Program Kegiatan	Subjektivitas Program / Kegiatan / Kegiatan (Kategori)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Gedung / Ruang	Pemeriksaan / Monitoring / Evaluasi	
							Indikator	Target / Sasaran	Aspek / Data / Output	Sumber / Dana		Target / Sasaran	Kebutuhan / Data / Output
2	08	02	1.03	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Tarmaduk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pelaksanaan Gender (PUG) Tarmaduk Pelaksanaan Pembangunan Responer Gender (PPRG) dan Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (Perangkat Daerah)	Lembaga (ibu Kota Kabupaten)	3 Perangkat Daerah	20.000.000	APBN / (DAU)		3 Perangkat Daerah	40.000.000
1	08	02	1.03		Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Partisipasi Perempuan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)		1 Dokumen	30.000.000			1 Dokumen	30.000.000
2	08	02	1.03	02	Advokat Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Partisipasi Perempuan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	Lembaga (ibu Kota Kabupaten)	10 Organisasi	30.000.000	APBN / (DAU)		10 Organisasi	30.000.000
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pembinaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pembinaan dan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)		10 Orang	25.000.000			10 Orang	40.000.000

Kode					Tipe Kegiatan / Nama Kegiatan / Deskripsi Program Kegiatan	Subjektivitas Program / Kegiatan / Kegiatan (Kategori)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Status Penting	Pemeriksaan / Monitoring / Evaluasi Tahun 2024	
							Indikator	Target / Capaian / Kinerja	Alokasi Dana / Biaya / Anggaran	Sumber Dana		Target / Capaian	Kebutuhan / Dana / Biaya / Anggaran
1	06	02	1.01	01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Layanan Pembinaan Perempuan Korban Kekerasan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Penyelenggara Layanan Pembinaan Perempuan Korban Kekerasan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Larantuka (ibu Kota Kabupaten)	30 Orang	25.000.000	APSD II (DAU)		30 Orang	40.000.000
1	06	02			PROGRAM PEMBINAAN HAK ANAK (PBA)	Persentase Pelaksanaan Terhadap Anak (%)		100%				100%	
						Persentase Pelaksanaan Terhadap Anak (%)		100%	20.000.000			100%	140.000.000
2	06	02	1.01		Pelaksanaan PBA pada Lembaga Pemasyarakatan, Rukun Warga dan Desa, Umat Kewarganegaraan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PBA pada Lembaga Pemasyarakatan, Rukun Warga dan Desa, Umat Kewarganegaraan Kab/Kota (Dokumen)		1 Dok	20.000.000			1 Dok	30.000.000
3	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PBA pada Lembaga Pemasyarakatan, Rukun Warga dan Desa, Umat Kewarganegaraan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PBA pada Lembaga Pemasyarakatan, Rukun Warga dan Desa, Umat Kewarganegaraan Kab/Kota (Dokumen)	Larantuka (ibu Kota Kabupaten)	1 Dok	20.000.000	APSD II (DAU)		1 Dok	50.000.000
2	06	02	1.01		Pengawasan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Kualitas Hidup Anak Kewarganegaraan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pelayanan Pemasyarakatan Kualitas Hidup Anak Kewarganegaraan Kab/Kota (orang)		30 Orang	30.000.000			30 Orang	60.000.000
3	06	02	1.01	01	Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewarganegaraan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pelayanan Pemasyarakatan Kualitas Hidup Anak Kewarganegaraan Kab/Kota (orang)	Larantuka	30 Orang	20.000.000	APSD II (DAU)		30 Orang	40.000.000

KODE					Tipe Kegiatan/Program/Kelembagaan Dana dan Program Kegiatan	Subjektivitas Program/Kelembagaan Kelembagaan (Subjektivitas)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Gedung Peningkat	Pemeriksaan Monev Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Gedung Monev	Alokasi Dana/Rupiah Monev	Sumber Dana		Target Gedung	Kapabilitas Dana/Rupiah Monev
2	06	06	1.01	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Pelayanan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Pelayanan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Ponorogo	1.000	10.000.000	APBD-W (DAU)		1.000	80.000.000
2	04				URAIAN PEMERINTAHAN BICANG KEBERHUKUAN PERHUKUM DAN KELUASA BERHUKUM				2.100.000.000				6.400.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUASA BERHUKUM (KB)	Cakupan PUS Patan KB-Setif (N)	34,36					33,87	
						Cakupan Asesor Baru (N)	88		5.345.000.000			88	5.345.000.000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunitas, Informasi dan Edukasi (KE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunitas, Informasi dan Edukasi (KE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1	800.000.000			1	40.000.000
2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Rencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakortam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Rencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakortam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	13 Kac, 100 Patan	4	480.000.000	APBD-W (DAU)		4	10.000.000

KODE					Tipe Kegiatan / Nama Kegiatan / Deskripsi Program Kegiatan	Subjektivitas Program / Kegiatan / Kegiatan (Kategori)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pemeriksaan Monev Rencana Tahun 2024	
							Indikator	Target Capaian (Majelis)	Alokasi Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp) Indikasi
1	14	03	1.01	13	Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dok)	13-Kec, Kab Kotim	1	150.000.000	APBD II (DAK)		1	13.000.000
1	14	03	1.01	13	Kampanye, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	13-Kec, Kab Kotim	1	30.000.000	APBD II (DAK)		1	15.000.000
1	14	03	1.01		Pendayagunaan Tenaga Pemuda KIE/Peluang Lapangan KIE (PKS/PKS)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Tenaga Pemuda KIE/Peluang Lapangan KIE (PKS/PKS)		1	1.000.000.000				40.000.000
1	14	03	1.01	05	Pembinaan IMF dan Program Bangga Kencana di Umi Lapangan oleh PKS/PKS	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMF dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Reproduksi, dan KB di Umi Lapangan oleh PKS/PKS (Organisasi)	13-Kec, Kab Kotim	15	250.000.000	APBD II (DAK)		15	25.000.000

KODE					Tipe Kegiatan Utama/Program/Kelembagaan Dana dan Program Kegiatan	Subjaya Program/Kelembagaan Kelembagaan (Kategori)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Gedung Pening	Pemeriksaan Monev Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Tanggal Cek/Revisi	Alokasi Dana/Rupiah Miliar	Bentuk Dana		Tanggal Cek/Revisi	Kebutuhan Dana/Rupiah Miliar
1	14	03	2.03	05	Pembinaan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengawasan, Pelaksanaan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan PKB/ Pengawasan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengawasan, Pelaksanaan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	18 Kac. Kab. Kotim	1	1,000,000,000	APBD II (DAU)		1	20,000,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Unit Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		3 unit	1,677,000,000			3 unit	6,342,580,000
3	14	03	2.03	01	Pengawasan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringan	Jumlah Laporan Pengawasan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringan (Laporan)	18 Kac. Kab. Kotim	1 Laporan	37,000,000	APBD II (DAU)		1 Laporan	6,035,330,000
1	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesadaran Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	18 Kac. Kab. Kotim	250 orang	1,100,000,000	APBD II (DAU)		300 Orang	50,000,000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	18 Kac. Kab. Kotim	3 unit	2,500,000,000	APBD II (DAU)		3 unit	10,000,000
1	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bangsaku	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bangsaku (Laporan)	18 Kac. Kab. Kotim	1 Laporan	20,000,000	APBD II (DAU)		1 Laporan	20,000,000

KODE					Tipe Kegiatan / Nama Kegiatan / Deskripsi dan Program Kegiatan	Subjaya Program / Kegiatan / Kegiatan (Subjaya)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pemeriksaan / Monitoring / Evaluasi Tahun 2024	
							Indikator	Target / Capaian (Mula)	Alokasi Dana / Biaya (Mula)	Sumber Dana		Target / Capaian	Kebutuhan Dana / Biaya (Mula)
1	14	03	1.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Partisipasi	Jumlah Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Partisipasi (orang)	18 Kac, Kac Potlin	450 Orang	20.000.000	APBD II (DAU)		500 Orang	25.000.000
1	14	03	1.04		Pembinaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kac, Kac dan Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kac, Kac dan Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB		3 Organisasi	500.000.000			8 Organisasi	124.450.000
1	14	03	1.04	21	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB (organisasi)	18 Kac, Kac Potlin	3 Organisasi	30.000.000	APBD II (DAU)		12 Organisasi	45.450.000
1	14	03	1.04	22	Integrasi Pembangunan Untuk Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Untuk Sektor di Kampung KB (dokumen)	18 Kac, Kac Potlin	5 Dok	850.000.000	APBD II (DAU)		11 Dok	55.000.000
1	14	03	1.04	24	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (laporan)	18 Kac, Kac Potlin	8 Lap	20.000.000	APBD II (DAU)		11 Lap	40.000.000
1	14	04			PROGRAM KEMERDEKAAN DAN PEMERIKATAN KELUARGA SEHAT (KES)	Persentase remaja Perempuan umur 15-19 tahun menikah (di atas atau sedang hamil) atau pertama (%)	0.001						

KODE					Tipe Kegiatan / Nama Kegiatan / Detail dan Program Kegiatan	Subjaya Program / Kegiatan / Kegiatan (Kategori)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pemeriksaan Monev Rencana Tahun 2024	
							Luas	Target Kegiatan (Maka)	Alokasi Dana (Rp) (Maka)	Sumber Dana		Target Kegiatan	Kapasitas Dana (Rp) (Maka)
						Persentase Sakti yang mengikut KOSTER RAUD (%)	80		1.500.000.000				100.000.000
1	04	04	1.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PPKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA) dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA) dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA)			1.500.000.000				100.000.000
1	04	04	1.01	11	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PPKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PPKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA) (Laporan)	18 Kac. 400 Potlot	400	45.000.000	APED II (DAU)		400	35.000.000
1	04	04	1.01	14	Pelaksanaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PPKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PPKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	18 Kac. 140 Potlot	750	1.500.000.000	APED II (DAU)		750	50.000.000

KODE					Tipe Kegiatan Utama Pembiayaan Dana dan Program Kegiatan	Subjeksi Program Kegiatan Kategori (Subsidi)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pemeriksaan Monev Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Gedung Majelis	Alokasi Dana/Rupia Indikator	Sumber Dana		Target Gedung	Kebutuhan Dana/Rupia Indikator
1	54	54	2.01	23	Pembentukan Kelompok Ketenangan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asapori (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketenangan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asapori (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	13-Kec. Kab. Kotire	291	35.000.000	APBD-W (DAU)		291	35.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2024.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2024 terdiri dari 9 (sembilan) Program 24 (dua puluh empat) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Kerja DP1KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH - BIDANG URUSAN (PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN)	INDIKATOR (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			TARGET 2024	PAGE INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGE INDIKATIF (Rp)
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
4441111 444111	DINAS PENGELOLAAN PERUMAHAN, KEMUKAAN BERENCANA, PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PELAKSANAAN KAWAL			11.259.338.000,00					11.259.338.000,00
1.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	<i>Empat (4) Kegiatan Administrasi Pelayanan (Ca)</i>	100	1.254.338.000,00			Peningkat Prioritas	100	1.254.338.000,00
		<i>Persentase Ketersediaan Internet dan Pelayanan Aplikasi (Ca)</i>	77					77	
		<i>Persentase ASN yang Memiliki Ketersediaan Komputasi (Ca)</i>	24					24	
		<i>Persentase Peningkatan dan Penguatan Capaian Kinerja dan Kelangkaan (Ca)</i>	100					100	
1.08.01.1.01	Pengamanan, Penguatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			Peningkat Prioritas		45.000.000,00
2.01.01.3.01 0001	Pengamanan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Dokumen	2	10.000.000,00	GGD/Levelede Leverak	Dana Provinsi Cetak-Buku	Peningkat Prioritas	2	10.000.000,00
2.01.01.3.01 0002	Koordinasi dan Pengamanan Dokumen RK/5 SKPD	Jumlah Dokumen RK/5-SKPD dan Laporan Hasil Kerekrutan Pengamanan Dokumen RK/5- SKPD Dokumen	2	10.000.000,00	GGD/Levelede Leverak	Dana Provinsi Cetak-Buku	Peningkat Prioritas	2	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA FINANSIAL					PEMBAYARAN MAJU KENDARAAN TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS 1 DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan (Mitur Pemas) Kinerja SKPD	Amat Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Sistem Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	10.000.000,00	(SKPD) Lurah dan Lurah	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	4	35.000.000,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Amat Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(SKPD) Lurah dan Lurah	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	4	35.000.000,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.380.000.000,00			Peningkat Prioritas		1.380.000.000,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Amat Gaji yang Maksimal Gaji dan Tunjangan ASN yang Bulat	2024	1.307.088.500,00	(SKPD) Lurah dan Lurah	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	2024	1.300.000.000,00
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Amat Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(SKPD) Lurah dan Lurah	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	12	54.000.000,00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Amat Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	(Lurah dan Lurah)	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	2	15.000.000,00
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Peningkat Prioritas		7.000.000,00
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Amat Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	(SKPD) Lurah dan Lurah	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	1	7.000.000,00
2.08.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			Peningkat Prioritas		5.000.000,00
2.08.01.2.03.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Amat Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	5.000.000,00	(SKPD) Lurah dan Lurah	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	1	5.000.000,00
2.08.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah			113.013.004,00			Peningkat Prioritas		113.013.004,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Amat Paket Anggaran Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disetujui (Paket)	2	2.000.000,00	(SKPD) Lurah dan Lurah	Dana Penger Uang-Dat	Peningkat Prioritas	2	2.000.000,00

2.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah			95.500.000,00			Peningkat Peningkat		95.500.000,00
2.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang Diperbaiki dan Diperbaiki Pajak dan Perbaikan (Unit)	2	80.000.000,00	OPD/Layanan daerah	Sumber Dana Daerah	Peningkat Peningkat	2	80.000.000,00
2.06.01.2.09.0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kendaraan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi (Unit)	2	10.000.000,00	OPD/Layanan daerah	Sumber Dana Daerah	Peningkat Peningkat	2	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN SUB- KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	OPD/Layanan daerah	Sumber Dana Daerah	Peningkat Peningkat	1	2.000.000,00
2.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi (Unit)	2	10.000.000,00	OPD/Layanan daerah	Sumber Dana Daerah	Peningkat Peningkat	2	10.000.000,00
2.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK			275.000.000,00					510.000.000,00
2.06.02	PROGRAM PENGARUSUTANAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi di sektor Publik (%)	47	75.000.000,00			Sumber Dana Masyarakat	47	110.000.000,00
2.06.02.1.01	Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kemasyarakatan Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Sumber Dana Masyarakat		40.000.000,00
2.06.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Peningkatan Pemberdayaan Perempuan/ Gender (PPRG) Kecamatan Kabupaten/Kota/Peningkat Daerah	1	20.000.000,00	1. Kecamatan - Kabupaten Kabupaten KAB. PUGRI MILIK	Sumber Dana Masyarakat		1	40.000.000,00

1.08.02.1.02	Pembudayaan Persempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomis Organisasi Kemasyarakatan Kesejahteraan Keluarga Kota			30.000.000,00			Sumber Daya Manusia		30.000.000,00
1.08.02.1.02.0002	Aktivitas Hibridasi dan Penguatan Peringatan Peringatan Peringatan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Hibridasi dan Penguatan Kabupaten Kabupaten Peringatan Peringatan Peringatan Peringatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomis Kesejahteraan Keluarga Kota (Organisasi)	10	30.000.000,00	Kendaraan - Gakota Hibridasi, RAB, PLOKOT, RAB, RAB	Sumber Daya Manusia	10	30.000.000,00	
1.08.02.1.03	Pengukuran dan Pengembangan Lembaga Persempuan Layanan Pembudayaan Persempuan Kesejahteraan Keluarga Kota			25.000.000,00			Sumber Daya Manusia		25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PEKERJAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.06.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perantara Pembiayaan Kabupaten/Kota	Audiot sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perantara Pembiayaan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	10	25.000.000,00	Kabupaten/Kota Kabupaten KAS FLORES TIMUR	Dana Pembiayaan DAK	Sumber Daya Manusia	20	40.000.000,00
1.06.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PERSEMPULAN	Persempulan Kasus Ekstremis dalam Rangka Tanggapan terorisme (%)	1.000	20.000.000,00			Peningkat Prioritas		30.000.000,00
1.06.03.1.03	Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perampasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00			Peningkat Prioritas		30.000.000,00
2.06.01.2.03.0003	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perantara Pembiayaan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Audiot sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perantara Pembiayaan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	24	30.000.000,00	Kabupaten/Kota Kabupaten KAS FLORES TIMUR	Dana Pembiayaan DAK	Peningkat Prioritas	24	30.000.000,00

100%

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2024. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan Rencana Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan terutama dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Rencan Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi acuan Rencan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Perangkat Daerah wajib melakukan analisis perkembangan kegiatan secara periodik baik tahunan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kerja, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
3. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Perangkat Daerah wajib melakukan pemenuhan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2024. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, Dinas PEXBPPA Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencan Tahun 2024.

Kepala Dinas

Penjendahan Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Flores Timur



Sn. Am. Rahmawati, S.S., MAP
NIP. 19691016-199903-2-007



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN FLORESTIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan tuntunan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPIMP dan RPIMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPIMD dan Renja Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 13 Tahun 2022 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

RENJA PD 2024 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur.

RENJA PD 2024 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD 2024 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD 2024.

Larantuka, September 2023

Kepala Dinas, Sekretaris dan Pengawas



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI TAHUN 2022	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dmas	26
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI	27
2.4 Review Terhadap Ramwal RKPD	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA DPK Tahun 2024	43
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53
BAB V PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	9
Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur	16
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur	29
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan Perkiraan Maje Tahun 2025	45
Tabel 4.1. RENJA dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024	54



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024



KALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Mengingat** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0034);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0065);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
 8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
 9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pemimpang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat KPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Kerja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah pengjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi misi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terdistribusi sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan dari Rencana PD yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Rencana PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Rencana PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rencana PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKPD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPD.
- (3) Kepala BPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Rencana PD Tahun 2024.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Paragraf 5

Pemerintah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Diwangkan di Loranfala
pada tanggal 17 Juli 2023

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

td

DONAT ALEXANDER RINI

Diundangkan di Loranfala
pada tanggal 17 Juli 2023

**PEMERINTAH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

td

PETRUS PIDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Bismillah sebagai pengantar adalah
KEPALA BADAN HUKUM,


WIDIYANTI HOGA DATUR
PESIDWA TKJ
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi; (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua Renstra PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, untuk periode I (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah. Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD

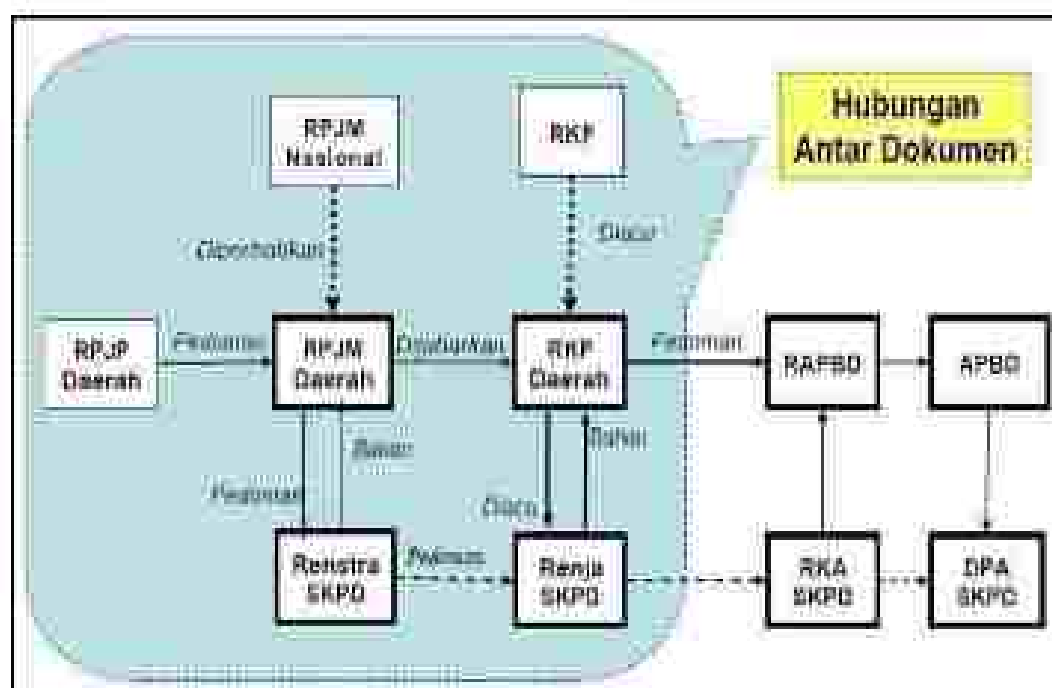
adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan, orientasi mengenai Renja PD serta persiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2022.
3. Penyusunan Rancangan dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam angka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Penetapan dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores

Timor Tahun 2024. Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023–2026;
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah , isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah , review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan 2022 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
(tahun berjalan)

Urutan	Materi/Dimensi/Indikator Dasar	Program	Kategori	Indikator Kinerja	Uraian/Isi/Detail Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan a. d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan a. d. Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah a. d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)		
									Target Kinerja PO Tahun 2022	Realisasi Kinerja PO Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan a. d. tahun berjalan/tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target rencana (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					RENSTRA 2017-2022										
					SELANJA DAERAH										
					URUSAN RUTIN										
					Program Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota										
1	1	01			Program Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	100					
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	100	100					
						Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SD Aparatur (orang)	100	100	100	100					

						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Keuangan OPD (Dok)	100	100	100	100				
x	x	0 1	2,0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,00							
x	x	0 1	2,0 1	0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	50	40	8	8	100			
x	x	0 1	2,0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60,00							
x	x	0 1	2,0 2	0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	48	14	14	100			
x	x	0 1	2,0 2	0 3		Penaksanaan Penatausahaan dan Pengguna Verifikasi Keuangan SKPD	60	48	14	14	100			
x	x	0 1	2,0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
x	x	0 1	2,0 5	0 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pangkat	20	4	2	6	0			

1	1	0	1,0	0	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Disediakan (Unit)	3	2	1	0	-		
1	1	0	1,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100				100		
1	1	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat (Lembar)	450	450	100	90	90		
1	1	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	60	27	12	12	100		
1	1	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Tenaga Pembersih dan Pemeliharaan Perkantoran (Orang)	20	13	13	13	100		
1	1	0	1,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100						
1	1	0	1,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi Perizinan (Unit)	13	9	9	9	100		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara (Unit)	13	9	9	9	100		
1	1	0	1,0	0	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab (Unit)	1	2	2	2	100		
1	1	0	1,0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Dipelihara (Unit)	40	11	5	5	100		

2	2 3	0 2	2,0 2	0 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah pemustaka yang mengunjungi/memanfaatkan layanan perpustakaan keliling dan perpustakaan daerah (Orang)	10.250	1.000	10.000	1.050	10		
2	2 3	0 2	2,0 2	0 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Gedung Perpustakaan yang Dibangun/Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0		
2	2 3	0 2	2,0 2	0 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Lomba Minat Baca dan Lomba Peningkatan Minat Baca (Orang)	1.200	1000	250	0	0		
2	2 4	0 2	2,0 2	0 4	Peningkatan Literasi Berbasis Inkubasi Sosial	Jumlah anggaran yang diarahkan peningkatan budaya baca (Daca)	17	4	7	4	37		
URUSAN KEARSIPAN													
2	2 4	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik							
					Jumlah Arsip Preservasi yang Dipelihara secara Berkala								
					Jumlah Aksesibilitas Ketersediaan Layanan Informasi Kearsipan								

2	2 4	0 2	2.0 1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara secara berkala	112								
2	2 4	0 2	2.0 1	0 1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah sarana pembinaan kearsipan (Kec.)	106	19	1	3	2				
						Jumlah Arsip Daerah yang Dipelihara (Box)									
2	2 4	0 2	2.0 1	0 2	Pemeliharaan dan Perventasi Arsip Dinamis	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Komunitas Simant Data (Kec.)	106	19	100	100	100				
2	2 4	0 2	2.0 2		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota	Jumlah akreditasi kersipiditas Layanan Informasi Kearsipan									
2	2 4	0 2	2.0 2	0 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota	Berbagai Teknik Kearsipan (Orang)	30	66	34	34	100				
2	2 4	0 3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah dokumen arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (Box)									
2	2 4	0 3	2.0 1		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan dan pendataan dokumen arsip daerah	2								

2	2	0	2.0	0	Pemilihan, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Produksi dan Penemuan Dokumen Arsip Daerah (Akutir) (OPD)	2	2	1	1	100		
---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	--	--

RENSTRA 2023-2026

Urusan	Mitra/Instansi/Unit Kerja	Program	Kegiatan	Dok. Kegiatan	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Rencana dan Ketetapan di Kabupaten/Kota Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (tahun n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan n (Rencana PD tahun n-2) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah n di tahun Terjadat (tahun n-1) 2022	
									Target Rencana PD (tahun n-2) 2021	Realisasi n Rencana PD (tahun n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan di tahun terjadat (tahun n-1) 2022	Tingkat capaian realisasi target rencana (%)
								2022 dan 2023						
1					2	3	4	5	6	7	8=(6*100/5)	9	10=(9*100/8)	11=(10*100)

2	2				Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
3	3	1			Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100						
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100						
						Persentase ASN yang Memiliki Keterampilan kompetensi (%)	100	100						

						<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100	100					
I	x	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)</i>				12	12		
II	x	0	2,0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	0	0		2	2	4	
III	x	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKAS SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKAS SKPD (Dokumen)</i>	0	0		2	2	3	
IV	x	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahap Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	50	40		5	5	5	
V	x	0	2,0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	0	0		3	3	5	
VI	x	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi kinerja keuangan (OPD %)</i>				28	28		
VII	x	0	2,0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-bulan)</i>	14	14		14	14	70	
VIII	x	0	2,0	0	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	60	60		12	12	12	

1	x	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kemajuan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kemajuan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kemajuan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4				2	2	20
1	x	0	2,0		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)						2	2	
1	x	0	2,0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0				1	1	1
1	x	0	2,0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)	0	0				1	1	0
1	x	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)						3	3	0
1	x	0	2,0	0	Pendaftaran dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0				1	1	2
1	x	0	2,0	0	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0				1	1	0
1	x	0	2,0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	4				2	2	4

I	X	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Intermediasi sarana dan prasarana kantor (%)						100	100	
X	X	0	2,0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	10	10				1	1	35
X	X	0	2,0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	83	85				4	4	4
X	X	0	2,0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	143	6				2	2	0
X	X	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	289	63				2	2	3
X	X	0	2,0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	700.000	700.000				2	2	10
X	X	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	60	60				2	2	2
X	X	0	2,0	0	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	607	10				12	12	92
X	X	0	2,0	0	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	45	12				12	12	92
X	X	0	2,0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0				1	0	0

1	1	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kantor atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Kantor atau Lapangan yang dipelihara dan diberikan pajak dan perizinannya (Unit)	13	9		9	9	69
1	1	0	2,0	0	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabiskan (Unit)	1	2		2	2	200
1	1	0	2,0	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ dirahabiskan. Awti	40	11		20	20	133
2	2				Uraian Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
2	2	0			Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)				37,50	20,00	
2	2	0	2,0		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Pada Tingkat Daerah (%)						
2	2	0	2,0	0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan ITIL Berbasis ISO10000 (ITIL Information Technology Service Management) Layanan	1	0		10	0	0
2	2	0	2,0	0	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Kota Sesuai Ketersediaannya	19	10		1	3	16

						(Perpustakaan)							
2	0.1.2	0.2	2.0	0	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang diimbangi Pembinaan dalam Menwujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	0			20	20	0
3	0.1.3	0.2	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (orang)	60	24			20	20	33
4	0.1.4	0.2	2.0	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola, Pengelolaan dan Pengembangan untuk Menwujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (eksemplar)	8.500	1.000			200	200	2
5	0.1.5	0.2	2.0		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota	Cakupan pembudayaan Gemar Membaca (%)					15,33	7	
6	0.1.6	0.2	2.0	0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegiatan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokasi)	10-250	1.000			35	15	0

2	3	0	2,0	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perputakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Perputakaan)	1	0			1	0	0
2	3	0	2,0	0	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kab/kota (orang)	1.200	1000			24	0	2
2	3	0	2,0	0	Pengembangan Literasi Berbasis Inklin Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklini Sosial di Wilayah Kab-Kota yang Dikembangkan (Perputakaan)	17	4			10	7	41
2	3	0	2,0	0	Pemilihan Data Baca Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Data baca tingkat daerah kab/kota yang dipilih dan ditubung kegemaran (orang)					1	0	0
2	3				Uraian Pemasintuhan Bidang Kesenian								
2	3	0			Program Pengelolaan Arup	Cakupan pengelolaan kesenian di daerah (%)					15,34		
2	3	0	2,0		Pengelolaan Arup Dinamis Daerah Kab/ Kota	Jumlah arup dinamis daerah					61	61	
2	3	0	2,0	0	Penciptaan dan Penggunaan Arup Dinamis	Jumlah Naskah Dinat yang Diciptakan dan Digunakan (berkat)	106	19			40	40	38
2	3	0	2,0	0	Pemeliharaan dan Penyusutan Arup Dinamis	Jumlah Naskah Dinat Yang Diadakan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkat)	106	19			20	20	19

2	2	0	2,0	0	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	0	0				1	1	0
2	2	0	1,0		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota	Jumlah laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah (Laporan)						1	1	
2	2	0	2,0	0	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	50	50				1	1	2
2	2	0			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)								
2	2	0	1,0		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai, ditingkatkan dan dimusnahkan (arsip)						10	10	
2	2	0	2,0	0	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) tahun (Arsip)	1	1				10	10	500
2	2	0	1,0		Penyelamatan Arsip Perangkit Daerah Kab/ Kota yang Digabung dan atau disebarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan	Jumlah daftar arsip daerah pemekaran yang dilakukan pendampingan dan penyelamatan (Arsip)						40	40	

					Desa/ Kelurahan									
2	2	0	2,0	0	Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	0	0			20	20	0	
2	2	0	2,0	0	Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan (Arsip)	0	0			20	20	0	

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur.

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target Rencana				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	-	3,00	0,49	0,49	0,50	0,49	1,96	1,96	2,00	
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	-	50,00	45	45,65	46,11	45,20	45,76	49,76	45,00	

3	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	-	2,50	0,14	0,14	0,14	0,14	0,015	0,015	0,20	
4	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Memiliki Sertifikat	-	20,01	4,37	4,39	4,44	4,35	10,50	10,98	11,00	
5	Jumlah Pengelola Kearsipan yang Memiliki Sertifikat	-	10,20	6,50	6,67	7,38	5,83	29,13	33,50	42,07	
6	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	-	17,00	18,30	20,59	23,06	15,25	20,69	24,14	27,56	

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang ada menunjukkan bahwa belum seluruh indikator memperoleh hasil yang optimal. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai bagian dari permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan berpengaruh pada capaian kinerja adalah sebagai berikut: rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara arsip serta tenaga Pengelola kearsipan yang kurang berkompeten berpengaruh terhadap kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan arsip daerah yang pada akhirnya menyebabkan kualitas pelayanan publik kurang akuntabel dan transparan, tenaga pengelola perpustakaan yang kurang berkompeten, sarana dan prasarana yang belum memadai serta kebijakan anggaran yang belum optimal.

2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatas menunjukkan bahwa semua indikator belum mencapai target. Adapun faktor yang menghambat pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta perbandingan SDM dan beban kerja yang kurang proporsional;
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai standard;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar;
5. Peningkatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
6. Meningkatkan Layanan Perpustakaan dan jaringan layanan perpustakaan ke seluruh wilayah kecamatan, desa/ kelurahan;

7. Perlu meningkatkan dukungan stakeholder, masyarakat dan aparat pemerintah Kel/ Desa untuk pembangunan Perpustakaan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Rumah Ibadah/ Perpustakaan Khums dan perpustakaan masyarakat;
8. Optimalisasi pemanfaatan Fungsi Perpustakaan dan Arsip oleh masyarakat.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur. Dikaitkan dengan sasaran pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026, maka tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung Tujuan Pembangunan daerah yaitu *Terwujudnya Daya Saing Daerah* dengan sasaran *Terwujudnya Daya Saing Sumber Daya Manusia* dan mendukung tujuan *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* dengan sasaran *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

RESEARCH AND REPORTING FOR THE 2014

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jika dilihat dari rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami penurunan pagu belanja yakni pagu Rancangan Awal Rp. 2.925.747.566 dan pagu hasil analisis kebutuhan Rp. 2.722.243.036.-

2.4.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan, kelompok masyarakat, dan dari OPD lain di Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dan kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Berapa Tahun	Estimasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENINGKATAN PERPUSTAKAAN		<i>Capaian Pengembangan Perpustakaan (C)</i>		
	Kegiatan Penguatan Perpustakaan Tingkat Kecamatan/Kabupaten		<i>Penguatan Perpustakaan Tingkat Kecamatan (C)</i>		
	Sub Kegiatan Pengembangan Ruang Pustaka	Pengembangan Ruang Pustaka yang sudah ada dan ada rencana untuk dibangun di Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten	Jumlah Ruang Pengembangan Ruang yang sudah dan direncanakan dibangun	1 tahun	2025,26
		1. Ruang Pustaka		1 tahun	2025,26
		2. Ruang Pustaka di Desa/Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten		1 tahun	2025,26

		usulan Desa yang memiliki sumber di Desa Lelabuhan yang akan membuat rumah kesehatan Desa Lelabuhan, Desa (Tolakan)		1 Usulan	
		usulan rumah kesehatan dengan kemungkinan Hutan Desa yang dibutuhkan untuk kemungkinan untuk kesehatan Desa / Desa, Desa, Desa (Tolakan)		1 Usulan	
		(Desa A, Desa, Desa, Desa)		1 Usulan	
		Desa B Desa, Desa, Desa, Desa, Kampung)		1 Usulan	
		Desa, Desa, Desa, Desa, Desa, Desa, Kampung)		1 Usulan	
		Desa, Desa, Desa, Kampung)		1 Usulan	

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usulan masyarakat yang diterima hanya 34 usulan, yang ditolak adalah 17 usulan yakni usulan pembangunan gedung kantor dan pengadaan bahan pustaka, ditolak dengan alasan usulan tersebut menjadi kewenangan desa dan sekolah, namun terkait dengan pengadaan bahan pustaka dapat diakomodir melalui layanan perpustakaan keliling dan melalui kerjasama Pola Titip Gulir Bahan Pustaka yang terikat dengan MoU antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dengan sasaran penerima Pola Titip Gulir. Pola ini adalah bagian dari Pendekatan pelayanan kepada pemustaka untuk mendukung inovasi Literasi Masuk Dapur dengan cara meminjamkan Bahan Pustaka Cetak/Buku kepada Desa/Kelurahan yang digulir dalam kurun waktu tiga (3) bulan dengan jumlah buku 200 eksemplar dalam 200 judul.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telasih Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional RI

1. Peningkatan gemar membaca, dengan strategi :
 - a) Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - b) Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan;
 - c) Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat;
 - d) Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
2. Pengembangan koleksi Indonesia yang lengkap dan mutakhir, dengan strategi :
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan
 - b) Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan adat, berbagai komunitas dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas budaya lokal.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, dengan strategi :
 - a) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan
 - b) Meningkatkan kerjasama antar jejaring perpustakaan

b. Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

1. Kebijakan Kearsipan

Kebijakan kearsipan sebagai landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang meliputi :

- a) Pengembangan NSPK sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/ lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota;

- b) Penyusunan NSPK sebagai amanat UU nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 yang berimplikasi pada kementerian/ lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota yang menyangkut 10 area yaitu : (1) Pembinaan; (2) Pengelolaan Arsip; (3) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (4) Organisasi; (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (6) Prasarana dan Sarana Kearsipan; (7) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; (8) Sosialisasi Kearsipan; (9) Kerja Sama; (10) Pendanaan.

2. Pembinaan Kearsipan

Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu :

- a) Penguatan dan penataan lembaga kearsipan yang meliputi penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan pada kementerian/ lembaga, lembaga kearsipan daerah dan perguruan tinggi serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga kearsipan pada kementerian/ lembaga dan daerah serta perguruan tinggi;
- b) Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis TIK;
- c) Pengembangan sarana dan prasarana kearsipan melalui standarisasi gedung, peralatan dan sistem jaringan kearsipan;
- d) Jaringan strategis dan koneksi dengan unit dan lembaga kearsipan;
- e) Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar arsip;
- f) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis.

3. Pengelolaan Arsip

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang – undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sedangkan pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Lebih lanjut dipertegas oleh pasal 41 butir (1) bahwa pencipta arsip sebagaimana pasal 40 ayat (2) pencipta arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024 (%)
1	Meningkatnya Daya Saing SDM	Terwujudnya Daya Saing SDM	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan	41,67
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraanpemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pengelolaan Kearsipan di Daerah	16,15
			Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	30

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rancangan Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dalam Renja 2024 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur 2023 – 2026 yang terfokus pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2023 khusus pada program museum meliputi 3 Program, 5 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan, yang mana untuk urusan bidang perpustakaan sebagian besar kegiatan dilaksanakan tersebar pada beberapa desa/kecamatan dan kegiatan bidang kearsipan tersebar pada OPD dan desa/kecamatan, dengan total kebutuhan dana pagu indikatif sebesar Rp. 435.400.000,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Urutan	Indikator Keberhasilan	Program	Kegiatan	Nama Kegiatan	Urutan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2025	
							Lahan	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Paga Indikatif	Bantuan Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Paga Indikatif
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.752.343.698				2.584.274.488
12	2	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			8	2.784.343.838				2.587.878.828
13	3	4	8		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				2.784.343.838				2.587.878.828
14	4	4	8		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkotaan (%)		100				100	
						Persentase Efektivitas Kerja dan Pemasaran Aparatur (%)		100				100	
						Persentase Adu yang Menilik Efektivitas Kegiatan (%)		100				100	
						Persentase Penguasaan dan Pelaksanaan Capaian Kinerja dan Urutan (%)		100				100	

2	2	8	18		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.800.000				31.800.000
2	2	8	18	8	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rp)	Lampiran	3	21.800.000	DAC		7.800.000
2	2	8	18	8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Rp)	Lampiran	3	1.800.000	DAC		7.800.000
2	2	8	18	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Lampiran	4	1.800.000	DAC	5	10.900.000
2	2	8	18	8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Lampiran	1	1.800.000	DAC	3	1.800.000
2	2	8	18		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.838.794.170				1.838.351.390
2	2	8	18	8	Prosedur Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah prosedur Gaji dan Tunjangan ASN (per bulan)	Lampiran	14	1.751.211.838	DAC	14	1.838.200.000
2	2	8	18	8	Prosedur Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Prosedur Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Rp)	Lampiran	12	7.242.600	DAC	12	40.900.000
2	2	8	18	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan : Keuangan Tahunan Pemerintah SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah SKPD	Lampiran	1	1.999.750	DAC	1	8.351.300

2	2	8	2.8		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				1.000.000				1.000.000
2	2	8	2.8	8	Pengurusan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah HKPD/DAU	Lampiran	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	2	8	2.8	8	Rekomendasi dan Pengurusan Laporan tentang MUII Daerah pada HKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Pengurusan Laporan tentang MUII Daerah pada HKPD (Laporan)	Lampiran	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	2	8	2.8		Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah				15.000.000				15.000.000
2	2	8	2.8	8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kegiatan	Jumlah Dokumen Formasi dan Pengolahan Administrasi Kegiatan	Lampiran	1	1.000.000	DAU		-	-
2	2	8	2.8	8	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampiran	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2	2	8	2.8	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampiran OPS, Lembar Wawancara	1	1.000.000	DAU		-	-
2	2	8	2.8		Administrasi Umum Perangkat Daerah				113.100.000				113.100.000
2	2	8	2.8	8	Pengurusan Kampas Sertifikasi Literasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket kampanye untuk literasi dan penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Lampiran	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000

2	2	8	18	8	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Lampiran	1		18.000.000	DAC		1	1.500.000
2	2	8	18	8	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Lampiran	1		1.000.000	DAC		1	1.700.000
1	2	8	18	8	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Lampiran	1		32.000.000	DAC		2	10.175.000
2	2	8	18	8	Persediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan	Lampiran	1		15.000.000	DAC		2	11.000.000
1	2	8	18	8	Persediaan Bahan Bakar dan Perlengkapan Perantara-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Perlengkapan Perantara-undangan yang Disediakan	Lampiran	1		1.000.000	DAC		2	1.000.000
1	2	8	18	8	Fasilitas Kompleks Tenda	Jumlah Laporan Fasilitas Kompleks Tenda (laporan)	Lampiran	1		15.000.000	DAC		2	15.000.000
2	2	8	18	8	Persediaan Barang Koordinasi dan Komunikasi BKPD	Jumlah Laporan Persiapan Barang Koordinasi dan Komunikasi BKPD (Laporan)	Dalam dan Luar Wilayah Kab. Ponorogo	2		55.000.000	DAC		2	45.000.000
2	2	8	18		Persediaan Barang Milik Daerah Penerimaan Urusan Pemerintahan Daerah					10.000.000				11.375.000
2	2	8	18	8	Persediaan Peralatan dan Meubel	Jumlah unit Peralatan dan Meubel lainnya yang disediakan (unit)	Lampiran	1		70.000.000	DAC		2	71.375.000
2	2	8	18		Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000	DAC			103.000.000
2	2	8	18	8	Persediaan Jasa Survei Monev	Jumlah laporan pengaduan jasa survei monev (laporan)	Lampiran	1		1.000.000	DAC		1	1.000.000

2	2	8	18	8	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselenggarakan	Lampiran	3	37.448.308			1	37.448.308
2	2	8	18	8	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselenggarakan	Lampiran	12	114.896.888	DAU		12	114.896.888
2	2	8	18		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemasang Urutan Pemeliharaan Daerah				82.028.858	DAU			82.028.858
2	2	8	18	8	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Permisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan diparkir pajak dan permisinan (Unit)	Lampiran	3	11.738.838	DAU		3	11.738.838
2	2	8	18	8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara/manti	Lampiran	3	1.888.388	DAU		3	1.888.388
2	2	8	18	8	Pemeliharaan Kebutuhan di Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang (Unit)	Lampiran	1	1.888.388	DAU		1	1.888.388
URUTAN PERPUSTAKAAN									388.888.888	DAU			388.888.888
2	2	8	2		PROGRAM PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN	Colongon Pengalangan Perputakaan (R)			388.888.888	DAU			388.888.888
2	2	8	18	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten				18.888.888				18.888.888
2	2	8	18	1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Pengembangan yang Dibangun/di Tingkat Daerah Kabupaten (Unit) Sumber Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten (Perpustakaan)	Kes. Adnan Tumor, Kes. Walanggiting, Kes. Pa Mandiri dan Kes. Talar Selatan	4	18.888.888	DAU		4	18.888.888

2	2	8	28	8	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab. Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang diluluskan. Pembinaan dalam Menegakkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Kita Selor Selatan dan Selor Baris	1	21.000.000	DAC		28	21.580.340
2	2	8	28	8	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pemeliharaan Tingkat Daerah Kab. Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi. Tenaga Perpustakaan dan Pemeliharaan Tingkat Daerah Kab. Kota (orang)	Kita Tumpang Tumpang	18	17.000.000	DAC		29	21.480.711
2	2	8	28	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tersebut yang Ditambah dan Dikurangi (contoh)	Laraman	140	21.000.000	DAC		1.000	-
2	2	8	28		Pembudayaan Generasi Membaca Tingkat Daerah Kab. Kota				102.000.000	DAC			102.000.000
2	2	8	28	8	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokasi Pembudayaan Generasi Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokasi)	ITIK GULIN :Dava Lelobaka, Nara aruna, Doroma, Tampulambuk, Tumpang Ora, Lomblungu Mikunawak, Pa ka Laraman, Pakea Fakim, Kiri Sakila	15	67.000.000	DAC		15	31.340.000
						LAYANAN MPK :Dava Nusabek, Kakila, Kikungf aya, Kema, KIK Wakayon							
2	2	8	28	8	Pengembangan dan Pemeliharaan Satuan Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab. Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab. Kota	Laraman	1	15.000.000	DAC		-	-

2	2	8	1.8	8	Pembinaan Pengkaryaan Gerakan Budaya Gema Mahasiswa	Jumlah uang yang mendapatkan pengkaryaan gerakan budaya gema mahasiswa tingkat fakultas (uang)	Larangan	34	31.800.000			34	31.800.000
3	2	8	1.8	8	Pengembangan Literasi Berbasis Teknologi Sosial	Jumlah Pengumpulan Berbasis Teknologi Sosial di Wilayah Fak-Fak yang Ditembangkan (Pengumpulan)	Pengumpulan Data: Ek, Soler Timur / Data: Wabubling, Ek, Wabubling, Data: Data, Ek: Lencidana (Data: Data), Ek: De Mandiri, Data: Lencidana, Ek: Tumbuh Data: Dumas, Lencidana, Ek: Wabubling Data: Pado, Ek: Tumbuh Data: Data, Lencidana, Ek: Lencidana (Data: Data)	8	31.800.000	DAU		18	31.800.000
URUTAN KEARSIPAN									132.400.000	DAU			132.400.000
1	2	8			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	jumlah pengumpulan kearsipan daerah (%)		28	108.300.000	DAU		28	108.300.000
2	2	8	1.8		Pengelolaan Arsip Dinas Daerah Kota				64.500.000	DAU			64.500.000
3	2	8	1.8	8	Pengelolaan dan Pengumpulan Arsip Dinas	Jumlah Matrik Data yang Ditampilkan dan Ditampilkan (Data)	OP (Pengumpulan)	100	31.800.000			100	31.800.000
4	2	8	1.8	8	Pemeliharaan dan Pemrosesan Arsip Dinas	Jumlah Matrik Data yang Ditampilkan, Pemeliharaan dan Pengumpulan (Data)	Larangan	18	15.000.000			24	15.110.000
5	2	8	1.8	8	Pengelolaan Arsip Dinas Kewenangan Kota Kota	Jumlah Layanan Hasil Pengumpulan Arsip Dinas Kewenangan Kota Kota (Pengumpulan)	OP / Ekspansi Filter Filter	1	18.000.000			1	18.000.000

2	2	8	2.8		Kegiatan Penyelamatan Sungai Jari-jari Infrastruktur Kerasip Nasional Tingkat Kota Kata			36.000.000	DAC			33.693.930	
2	2	8	2.8	8	Pembinaan Kapasitas Unit Kerasip dan Lembaga Kerasip Daerah Kota Kata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapasitas Unit Kerasip dan Lembaga Kerasip Daerah Kota Kata (Laporan)	Kec. Wuluwung	21	36.000.000	DAC		33.693.930	
2	2	8			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARUP	Catatan pelaksanaan dan pengelolaan arup di daerah (%)	22		35.400.000			20	40.364.010
2	2	8	2.8		Pemanahan Arup di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kata yang Memiliki Risiko di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			19	35.400.000	DAC			40.364.010
2	2	8	2.8	8	Pendidikan, Peningkatan dan Pelaksanaan Pemanahan Arup yang Memiliki Risiko di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arup yang Dilakukan Pendidikan, Peningkatan, dan Pelaksanaan Pemanahan Arup yang Memiliki Risiko di Bawah 10 (sepuluh) tahun (Arup)	Larombe, Kab. Puncu Ponor	18	35.400.000	DAC		18	40.364.010

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Urutan Urutan/ Urutan/Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urutan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Tujuan Capaian Kinerja	Ketentuan Dana/ Page Indikator	Sumber Dana
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0				URUSAN PEMERINTAHAN Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				1.722.343.036	
1	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			0	1.266.843.036	
1	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.266.843.036	
2	23	01		Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100		
					Persentase Keterpaduan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100		
					Persentase ASN yang Memiliki Keasutan/ kompetensi (%)		100		
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100		

2	23	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.000.000	
2	23	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	Lampirkan	2	20.000.000	DAU
2	23	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS SKPD	Jumlah Dokumen RKAS SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKAS SKPD (dok)	Lampirkan	2	1.000.000	DAU
2	23	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Lampirkan	4	8.000.000	DAU
2	23	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Lampirkan	2	5.000.000	DAU
2	23	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.835.074.178	
2	23	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org bulan)	Lampirkan	14	1.751.411.828	DAU
2	23	01	2.0 2	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	Lampirkan	12	33.262.600	DAU

2	23	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Ambil Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lampiran	2	9.999.750	DAU
2	23	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				6.000.000	
2	23	01	2.0 3	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dok)	Lampiran	1	3.000.000	DAU
2	23	01	2.0 3	04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)	Lampiran	1	3.000.000	DAU
2	23	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000	
2	23	01	2.0 5	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ambil Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dok)	Lampiran	1	3.000.000	DAU
2	23	01	2.0 5	04	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ambil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampiran	1	3.000.000	DAU
2	23	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ambil Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampiran/ OPD luar Wilayah	2	8.000.000	DAU

2	23	01	2.0 6		Administrasi Umum Persagkat Daerah				133.900.000	
2	23	01	2.0 6	01	Persediaan Kamporan Instansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket kamporan pialansi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Larangan	2	2.000.000	DAU
2	23	01	2.0 6	02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Larangan	2	10.000.000	DAU
2	23	01	2.0 6	03	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Larangan	1	3.000.000	DAU
2	23	01	2.0 6	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Larangan	2	32.000.000	DAU
2	23	01	2.0 6	05	Persediaan Barang Cetakan dan Pengesahan	Jumlah paket barang cetak dan pengesahan (paket)	Larangan	2	15.000.000	DAU
2	23	01	2.0 6	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Perumun Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perumun Perundang-Undangan yang Disediakan	Larangan	2	1.800.000	DAU
2	23	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	Larangan	1	15.000.000	DAU
2	23	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Dalam dan Luar Wilayah Kab. Flores	2	55.000.000	DAU

2	23	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.000.000	
2	23	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)	Lampauke	2	10.000.000	DAU
2	23	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166.140.000	DAU
2	23	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Lampauke	1	1.800.000	DAU
2	23	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Lampauke	2	37.440.000	
2	23	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Lampauke	12	124.000.000	DAU
2	23	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82.728.858	DAU
2	23	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan (Unit)	Lampauke	9	71.738.858	DAU
2	23	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Lampauke	3	1.000.000	DAU

2	23	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang (Unit)	Lampunaka	2	5.000.000	DAU
URUSAN PERPUSTAKAAN									300.000.000	DAU
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)</i>			300.000.000	DAU
2	23	02	2.0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota				98.000.000	
2	23	02	2.0 1	01	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kab/ Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab/ Kota sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	Kec. Adonara Timur, Kec. Wulaboggung, Kec. Le-Mamuli dan Kec. Solor Selatan	4	20.000.000	DAU
2	23	02	2.0 1	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Merupakan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Kec Solor Selatan dan Solor Barat	3	20.000.000	DAU
2	23	02	2.0 1	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/ Kota (orang)	Kec. Tanjung Bunga	20	37.000.000	DAU
2	23	02	2.0 1	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Terceak yang Daerah dan Didistribusi (Kilogram)	Lampunaka	140	21.000.000	DAU
2	23	02	2.0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota				201.000.000	DAU

2	23	02	2.0 1	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lembar Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lembar)	TITIGULIR : Desa Lelenbala, Noratasinga, Dawaman, Karinglamabek, Elwang, Owa, Lewobunga, Akohanturak, Rutan, Jarantuka, Polres Flotim, Kari, Bulela LAYANAN MPK : Desa Natabeni, Enaleu, Hobeang Jaya, Hwa, SDA, Waibrowe	15	57.500.000	DAU
2	23	02	2.0 1	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Lorantuka	1	15.500.000	DAU
2	23	02	2.0 1	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kab/kota (orang)	Lorantuka	24	30.000.000	
2	23	02	2.0 1	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	Perpustakaan Desa : Kec. Solus Timor (Desa Walublabang), Kec. Wulanggung (Desa Boral), Kec. Lewolena (Desa Santala), Kec. Re Mandiri (Desa Lewolaba), Kec. Titihena (Desa Duntara Lewobaga), Kec. Wihama (Desa Pleda), Kec. Tawung Bunga (Desa Isonmalaba), Kec. Keluhagait (Desa Horinara)	3	60.000.000	DAU
URUSAN KEARSIPAN									134.400.000	DAU
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	saluran pengelolaan kearsipan daerah (%)		10	100.000.000	DAU
2	24	02	2.0 1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota				44.000.000	DAU
2	24	02	2.0 1	01	Pemiptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (naskah)	(19 Kecamatan)	100	31.000.000	
2	24	02	2.0 1	02	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan (naskah)	Lorantuka	20	15.000.000	

1	24	02	2.0 1	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kemungkinan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kemungkinan Kab/ Kota (Laporan)	OPD Kabupaten Flores Timur	1	38.000.000	
1	24	02	2.0 2		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Korupsi Nasional Tingkat Kab/ Kota				36.000.000	DAU
1	24	02	2.0 3	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Korupsi dan Lembaga Korupsi Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Korupsi dan Lembaga Korupsi Daerah Kab/ Kota (Laporan)	Kec. Wulanggung	21	38.000.000	DAU
1	24	02			PROGRAM PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	30		35.400.000	
1	24	03	2.0 1		Pemurnaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Rentasi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			10	35.400.000	DAU
1	24	03	2.0 1	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemurnaan Arsip yang Memiliki Rentasi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemurnaan Arsip yang Memiliki Rentasi Dibawah 10 (Sepuluh) tahun (Arsip)	Loromula Kab. Flores Timur	10	35.400.000	DAU

BAB V PENUTUP

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang mempunyai fungsi: memberikan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang menitikberatkan pada pencapaian pelayanan perpustakaan dan penguatan perpustakaan desa yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial serta pencapaian pengelolaan kearsipan dinamis daerah dan penyelamatan arsip daerah. Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya mengabarkan secara ringkas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, September 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

